



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENDE,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 149 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2026;

Mengingat...

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Bappeda	/.
Kepala Bagian Hukum	[Signature]

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);

MEMUTUSKAN...

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Bappeda	
Kepala Bagian Hukum	

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan;

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende.
6. Daerah adalah Kabupaten Ende.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
8. Bupati adalah Bupati Ende.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Pasal 2

(1) RKPD...

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Bappeda	/ -
Kepala Bagian Hukum	

- (1) RKPD Tahun 2026 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Tahun 2025- 2029.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di susun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I pendahuluan
 - b. bab II gambaran umum kondisi Daerah
 - c. bab III kerangka ekonomi daerah dan keuangan Daerah
 - d. bab IV sasaran dan prioritas pembangunan Daerah
 - e. bab V rencana kerja dan pendanaan Daerah
 - f. bab VI kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah
 - g. bab VII penutup
- (4) Ketentuan mengenai isi dan uraian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RKPD Tahun 2026 menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja PD, untuk menjamin Renja Perangkat Daerah mempedomani rencana program dan kegiatan prioritas RKPD serta selaras dengan Renstra PD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD, untuk menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran telah disusun ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah

(3) Kepala...

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Bappeda	/
Kepala Bagian Hukum	

- (3) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan evaluasi hasil Renja PD, untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja PD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra PD serta sasaran dan prioritas RKPD.
- (4) Hasil pengendalian dan evaluasi wajib disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende

Ditetapkan di Ende
Pada tanggal 19 September 2025



Diundangkan di Ende
pada tanggal 19 September 2025
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,



BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2025 NOMOR 16

LAMPIRAN...

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Bappeda	N
Kepala Bagian Hukum	Y

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris Daerah	Y
Asisten Pemerintahan dan Kesra	Y
Plt. Kepala Bappeda	N

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ENDE TAHUN 2026

ISI DAN URAIAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENDE
TAHUN 2026

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	I-1
1.1	Latar Belakang.....	I-1
1.2	Dasar hukum.....	I-2
1.3	Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I-3
1.4	Maksud dan tujuan.....	I-4
1.5	Sistematika Dokumen RKPD.....	I-4
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1.	Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Ende.....	II-1
2.1.1.	Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.1.1.	Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	II-1
2.1.1.2.	Potensi Pengembangan Wilayah.....	II-14
2.1.1.3.	Kawasan Rawan Bencana Alam.....	II-16
2.1.1.4.	Demografi.....	II-19
2.1.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-20
2.1.2.1.	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II-20
2.1.2.2.	Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II-25
2.1.2.3.	Fokus Seni Budaya dan Olahraga.....	II-28
2.1.3.	Aspek Pelayanan Umum.....	II-28
2.1.3.1.	Fokus Layanan Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar..	II-28
2.1.3.2.	Fokus Layanan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	II-40
2.1.3.3	Fokus Layanan Urusan Pilihan.....	II-47
2.1.3.4.	Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II-53
2.1.3.5.	Fokus Layanan Urusan Kewilayahan.....	II-58
2.1.3.6.	Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Umum.....	II-58

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Bappeda	
Kepala Bagian Hukum	

2.1.4.	Aspek Daya Saing Daerah.....	II-59
2.1.4.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II-59
2.1.4.2.	Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur.....	II-61
2.1.4.3. I	Fokus Iklim Berinvestasi.....	II-63
2.1.4.4.	Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-64
2.2.	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD sampai dengan Tahun 2021.....	II-65
2.3.	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-137
2.3.1.	Permasalahan yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan.....	II-137
2.3.2.	Permasalahan yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	II-138
	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
BAB III	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.	Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021 dan Perkiraan Sampai Tahun 2022.....	III-1
3.1.1.	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah.....	III-5
3.1.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-6
3.2.	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.....	III-6
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-1
4.1.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional.....	IV-1
4.1.2.	Kebijakan Pembangunan Provinsi NTT.....	IV-3
4.1.3.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Ende.....	IV-3
4.2.	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023.....	IV-6
4.2.1	Perumusan Prioritas Pembangunan.....	IV-6
4.2.2.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2023.....	IV-12
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	VI-1
6.1.	Indikator Kinerja Pemerintah Daerah.....	VI-1
6.1.1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan idikator Kinerja kunci (IKK) Daerah.....	VI-2
6.1.2.	Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	VI-5
BAB VII		
PENUTUP	VII-1

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Bappeda	/ -
Kepala Bagian Hukum	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ende merupakan rencana kerja pemerintah tahunan yang diawali dengan Penyusunan Rancangan Awal RKPD, Rancangan RKPD dan Rancangan Akhir RKPD, yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ende untuk menjadi RKPD Kabupaten Ende Tahun 2026. Secara substansi RKPD 2026 memuat rancangan prioritas pembangunan, rancangan kerangka makro ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, rencana kerja dan pendanaan suatu daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025-2029, RKPD Provinsi NTT Tahun 2026 dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2026. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 75 Ayat (2) Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, tahapan pembangunan di Kabupaten Ende pada Tahun 2026 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2029. Sejalan dengan kedudukan perencanaan serta memerhatikan isu dan perkembangan terkini dirumuskan Tema Perencanaan pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2026, yaitu: Peningkatan Kualitas SDM, dan Pemberdayaan Masyarakat, Penguatan Infrastruktur, dan Ketahanan Pangan serta Mewujudkan Supremasi Hukum dan Good Governance untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Tema ini mengandung makna peningkatan kualitas SDM merupakan kunci utama dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. SDM yang unggul akan mendorong inovasi dan meningkatkan daya saing daerah seperti pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemberdayaan masyarakat memiliki makna, proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial, Ketahanan pangan, memiliki makna dalam mencapai kesejahteraan social dan ekonomi. Ketahanan pangan yang kuat memastikan bahwa masyarakat memiliki

akses yang cukup, aman dan bergizi terhadap pangan dengan harga yang wajar, serta mampu bertahan dalam menghadapi krisis atau bencana melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal terutama sektor pertanian dan perikanan. Penguatan infrastruktur, memiliki makna pada peningkatan kualitas dan daya tahan infrastruktur yang ada, dengan tujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih optimal dan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan, memiliki makna pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan integrasi antara pengembangan SDM, ketahanan pangan dan infrastruktur yang ramah lingkungan.

Dengan Diterbitkannya Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, menjadi babak baru bagi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Nomenklatur yang semula hanya pada level Program dan Kegiatan, kini menjadi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Pengelolaan data perencanaan pembangunan kini harus menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang disediakan oleh Kemendagri.

Memperhatikan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 73-103), Penyusunan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2026 dilaksanakan dalam 6 (enam) tahapan yaitu: 1) persiapan penyusunan, 2) Penyusunan Rancangan Awal RKPD, 3) Penyusunan Rancangan RKPD, 4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD, 5) Perumusan Rancangan Akhir, dan 6) Penetapan RKPD dengan Peraturan Bupati Ende. Tahapan Penyusunan Rancangan Awal RKPD ini merupakan tahap kedua setelah tahapan persiapan penyusunan. Pada Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi kegiatan pembentukan tim penyusun, orientasi RKPD, penyusunan agenda kerja, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2026 ini dalam rangka memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende dalam menyusun Rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2026 ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
7. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

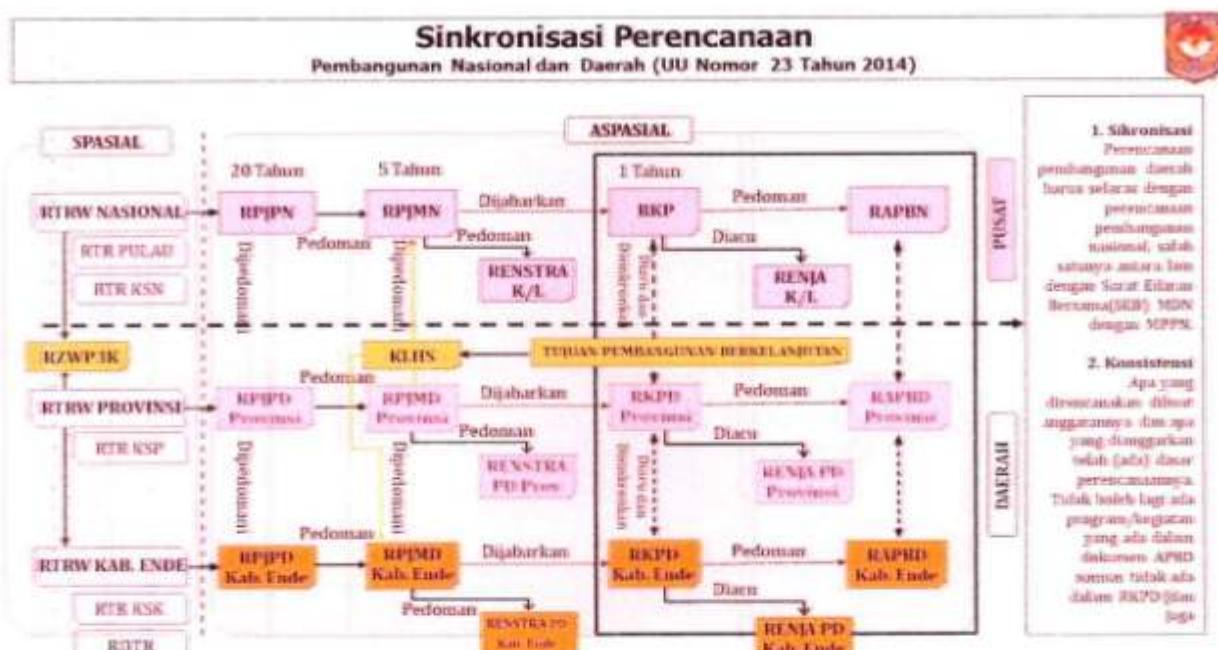
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 435 Tahun 2025);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ende;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende Tahun 2023-2042;
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 4).

1.3 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RKPD Kabupaten Ende Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2029, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2045. Dalam rangka sinkronisasi dengan kebijakan provinsi dan nasional, memerhatikan pula RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029, RKPD Provinsi NTT Tahun 2026, RPJMN Tahun 2025-2045 dan RKP Tahun 2026. Dalam konteks pembangunan yang berdimensi kewilayahan, disinergikan dengan Perda Nomor 1 tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Ende Tahun 2023-2042 dan RTRW Provinsi NTT serta RTRW Nasional. Keseluruhan dokumen perencanaan tersebut diatas dalam konsep perencanaan dan penganggaran terpadu, diharmonisasikan dengan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang menjadi dasar dalam perumusan keseluruhan kebijakan pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2026.

Gambar 1.1 Bagan Alir Hubungan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya



1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Ende Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk menjamin keberlangsungan antara perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah serta menjaga kesinambungan dan sinergi keseluruhan tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2026.

1.4.2 Tujuan

- Menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Sebagai Acuan dalam pelaksanaan fasilitasi dan harmonisasi kepada Gubernur Provinsi NTT terhadap Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Ende Tahun 2026.

1.5 Sistematika Dokumen Rancangan Akhir RKPD

Tahun 2026

Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Ende Tahun 2026 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang penyusunan, landasan hukum, hubungan antar dokumen, sistematika serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD.

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah, memuat gambaran umum kondisi Kabupaten Ende, evaluasi pelaksanaan RKPD, Realisasi RPJMD dan permasalahan pembangunan daerah.

BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, memuat arah kebijakan ekonomi

dan keuangan daerah.

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan Rancangan RPJMD 2025-2029, dan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah sesuai fungsi Perangkat Daerah.

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, memuat indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB VII Penutup, menjelaskan keseluruhan proses penyusunan dan penegasan terkait tindak lanjut pelaksanaan RKPD 2026.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Ende

2.1.1 Aspek Geografi

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara geografis, Kabupaten Ende terletak disebelah selatan khatulistiwa pada koordinat $121^{\circ}21'6,44''$ sampai dengan koordinat $122^{\circ}1'28, 1604''$ Bujur Timur dan $08^{\circ}55'28,35''$ sampai dengan $08^{\circ}26'4,10''$ Lintang Selatan.

Kabupaten Ende merupakan salah satu dari 22 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki wilayah seluas 2085,19 km², dengan batas-batas, sebagai berikut:

- ❖ Sebelah Utara: Laut Flores
- ❖ Sebelah Timur: Kabupaten Sikka
- ❖ Sebelah Selatan: Laut Sawu
- ❖ Sebelah Barat: Kabupaten Nagekeo

Secara administrasi wilayah Kabupaten Ende terdiri atas 21 Kecamatan, 255 Desa, 23 Kelurahan, dan 893 dusun/lingkungan. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Wewaria (14,05%), diikuti Maukaro (10,39 %), Kotabaru (10,33 %) dan Nangapanda (8,99%), sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Ende Tengah (0,27%). Berdasarkan jenis pemerintahan, terdapat 2 (dua) kecamatan yang seluruh wilayahnya merupakan kelurahan yaitu Kecamatan Ende Selatan dan Ende Tengah, 10 (sepuluh) kecamatan yang seluruh wilayahnya merupakan Desa dan 9 (sembilan) kecamatan memiliki unsur pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Tabel 2.1 Kecamatan, Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan dan Dusun/Lingkungan

No.	Kecamatan	Nama Ibu kota	Jarak ke Ibu kota Kab. (km)	Luas wilayah		Jumlah		
				(km ²)	±	Desa	Kel.	Dusun
1	Wewaria	Welamosa	53,00	292,94	14,05	22	-	73
2	Maukaro	Maukaro	97,00	216,06	10,39	11	-	35
3	Kotabaru	Kotabaru	117,00	199,70	9,58	13	-	38
4	Nangapanda	Ndonrea	29,00	190,31	9,13	28	1	89
5	Ende	Nangaba	9,00	164,99	7,91	32	-	91
6	Maurole	Maurole	84,00	155,14	7,44	13	-	39
7	Detusoko	Detusoko	33,00	144,27	6,92	20	1	74
8	Detukell	Watunggere	57,00	112,29	5,39	13	-	41
9	Lepembusu Kellsuke	Pelbenga	58,00	150,88	7,24	16	-	41
10	Ndona	Ndona	8,00	93,52	4,48	12	2	37

No.	Kecamatan	Nama Ibu kota	Jarak ke ibu kota Kab. (km)	Luas wilayah		Jumlah		
				(km ²)	%	Desa	Kel.	Dusun
11	Wolowaru	Bokasape	65,00	64,53	3,09	16	1	57
12	Lio Timur	Watuneso	92,00	53,93	2,59	12	1	48
13	Ndona Timur	Demulaka	45,00	52,84	2,53	7	-	21
14	Kelimutu	Woloara	52,00	54,03	2,59	9	-	30
15	Wolejita	Wolojita	72,00	39,77	1,91	5	1	24
16	Ndori	Maubasa	87,00	26,71	1,28	10	-	29
17	Ende Timur	Wolowona	45,5	19,63	0,94	3	3	24
18	Ende Selatan	Tetandara	1,49	19,57	0,94	-	5	24
19	Ende Utara	Kotaraja	0,02	17,52	0,84	6	4	39
20	Pulau Ende	Rendoruterua	17,87	10,22	0,49	9	-	26
21	Ende Tengah	Paupire	3,50	5,75	0,28	-	4	13
Total				2.085,19	100	255	23	893

SumberData :Ende Dalam Angka 2015, Data Desa Kelurahan-DPMID (Olahan Bappeda)

2. Letak, Kondisi Geografis dan Pembagian Wilayah Pelayanan

a. Posisi Astronomis

Kabupaten Ende terletak disebelah selatan khatulistiwa pada koordinat $121^{\circ}21'6,44''$ sampai dengan koordinat $122^{\circ}1'28,1604''$ Bujur Timur dan $08^{\circ}55'28,35''$ sampai dengan $08^{\circ}26'4,10''$ Lintang Selatan.

b. Posisi Geostrategik

Berdasarkan letakgeografis, Kabupaten Ende mempunyai posisi strategis karena beberapa alasan antara lain:

- 1) Terletak ditengah-tengah Pulau Flores, yang merupakan salah satu dari 3 pulau besar diprovinsi NTT, diapit 5 (lima) Kabupaten dibagian barat, yaitu: Kabupaten Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Barat, dan 2 (dua) Kabupaten dibagian Timur, yaitu: Kabupaten Sikka dan Kabupaten Flores Timur. Pada awal kemerdekaan Negara Republik Indonesia, Provinsi Bali, NTB dan NTT masih dalam bentuk wilayah NusaTenggara, Kabupaten Ende merupakan Pusat Pemerintahan Flores.
- 2) Merupakan jalur utama pelayaran khususnya di wilayah NTT dan bagian selatan Indonesia,karena mempunyai akses langsung pelayaran laut menuju Kupang sebagai Ibu Kota Provinsi dan Pulau Timor, serta Pulau Sumba dialur pelayaran Laut Sawu.
- 3) Kabupaten Ende berada pada lintasan tujuan wisata utama Bali-Lombok-Flores, dengan focal point keberadaan Danau Tiga Warna Kelimutu sebagai salah satu destinasi Pariwisata Flores.
- 4) Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia,

Kabupaten Ende menjadi perhatian tersendiri karena merupakan tempat pengasingan Presiden Soekarno pada tahun 1934-1938, dan diyakini merupakan **tempat permenungan gagasan cemerlang Falsafah Negara Pancasila**.

c. Kondisi/Kawasan

Secara geografis dan topografis, kondisi kawasan yang ada di Kabupaten Ende, terdiri dari:

1) Wilayah Pedalaman

Wilayah pedalaman di Kabupaten Ende meliputi 163 Desa/Kelurahan, yang tersebar pada 15 Kecamatan, yaitu: Kecamatan Nangapanda, Pulau Ende, Ende, Ndona, Detusoko, Wewaria, Wolowaru, Wolojita, Maurole, Maukaro, Lio Timur, Kotabaru, Kelimutu, Ende Utara, dan Kecamatan Ende Timur.

2) Wilayah Terpencil

Wilayah terpencil di Kabupaten Ende meliputi 90 desa, yang tersebar pada 13 kecamatan, yaitu: Kecamatan Nangapanda, Ende, Ndona, Wewaria, Wolowaru, Maurole, Maukaro, Lio Timur, Kotabaru, Detukeli, Ndona Timur, Ndori, dan Kecamatan Lepembusu Kelisoke.

3) Kawasan Pesisir/Kepulauan

Keberadaan kawasan pesisir yang ada di Kabupaten Ende terdiri dari wilayah pesisir bagian utara dan selatan, yaitu:

- Kawasan Pesisir Utara, meliputi: Kecamatan Maukaro, Maurole, Wewaria dan Kotabaru.
- Kawasan Pesisir Selatan, meliputi: Kecamatan Nangapanda, Ende, Ende Utara, Ende Selatan, Ndona, Wolojita, Wolowaru, Ndori, Lio Timur dan Pulau Ende.
- Selain kawasan pesisir di Kabupaten Ende terdapat satu pulau kecil, yaitu: Pulau Ende.

4) Kawasan Pegunungan

Hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Ende merupakan pegunungan dan terdapat 2 (dua) gunung berapi aktif, yaitu: Gunung Iya dan Gunung Kelimutuserta merupakan areal kawasan hutan lindung dengan keberadaan Taman Nasional Kelimutu dan Hutan Kemang Boleng yang berada pada

wilayah bagian tengah pegunungan yang ada di Kabupaten Ende.

d. Tingkat Perkembangan Desa

Dilihat dari Tingkat Perkembangannya berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 400 Tahun 2024 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2024, maka dari 255 Desa yang ada di Kabupaten Ende dikategorikan sebagai:

- 1) Desa Tertinggal, sebanyak 100 Desa atau sebesar 39,21 %;
- 2) Desa Berkembang, sebanyak 146 Desa atau sebesar 57,25 % serta
- 3) Desa Maju, sebanyak 9 Desa atau sebesar 3,53 % dengan rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Kategori Desa Berdasarkan Tingkat Perkembangannya

KECAMATAN	DESA TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU
Ende Timur		1) Desa Ndungga 2) Desa Kedebodu 3) Desa Tiwutewa	
Nangapanda	1) Desa Watumite 2) Desa Kerirea 3) Desa Zozozea 4) Desa Romarea 5) Desa Malawaru 6) Desa Tenda Ondo 7) Desa Jemburea 8) Desa Uzuzozo	1) Desa Tendarea 2) Desa Tendambepa 3) Desa Rapowawo 4) Desa Nggorea 5) Desa Raporendu 6) Desa Bheramari 7) Desa Tiwerea 8) Desa Sanggarhorho 9) Desa Ndeturea 10) Desa Penggajawa 11) Desa Jegharangga 12) Desa Ondorea Barat 13) Desa Timbaria 14) Desa Mbobhenga 15) Desa Anaraja 16) Desa Kekandere 17) Desa Tanazozo 18) Desa Embuzozo	1) Desa Ondorea 2) Desa Ndorurea I
Pulau Ende	1) Desa Aejeti 2) Desa Rorurangga 3) Desa Kazokapo 4) Desa Rengamenge	1) Desa Puutara 2) Desa Paderape 3) Desa Ndoriwoi 4) Desa Renderaterua 5) Desa Redodori	
Ende	1) Desa Raburia	1) Desa Riaraaja	

KECAMATAN	DESA TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU
	2) Desa Wologai	2) Desa Mbotutenda	
	3) Desa Ndetundora I	3) Desa Ndetundora II	
	4) Desa Tomberabu I	4) Desa Tomberabu II	
	5) Desa Nakuramba	5) Desa Emburia	
	6) Desa Wolokaro	6) Desa Rukuramba	
	7) Desa Ja Moke Asa	7) Desa Ndetundora III	
	8) Desa Randotonda	8) Desa Tonggopapa	
	9) Desa Tinabani	9) Desa Worhopapa	
	10) Desa Uzuramba	10) Desa Wawonato	
	11) Desa Wologai Dua	11) Desa Jejaraja	
	12) Desa Tendambonggi	12) Desa Randorama	
	13) Desa Nemboramba	13) Desa Ranoramba	
	14) Desa Ermbu Ngera	14) Desa Peozakaramba	
	15) Desa Uzuramba Barat	15) Desa Embutheru	
		16) Desa Nuaja	
		17) Desa Wajakea Jaya	
Ndonia	1) Desa Niña	1) Desa Wolotopo	1) Desa Nanganesa
	2) Desa Kekasewa	2) Desa Wolotopo Timur	
	3) Desa Wolokota	3) Desa Puutuga	
	4) Desa Reka	4) Desa Ngalupojo	
		5) Desa Ngaluroga	
		6) Desa Manulondo	
		7) Desa Kelikiku	
Detusoko		1) Detusoko Barat	
		2) Desa Wolotolo	
		3) Desa Wolotolo Tengah	
		4) Desa Roa	
		5) Desa Saga	
		6) Desa Niowula	
		7) Desa Wolofeo	
		8) Desa Nua One	
		9) Desa Wologai	
		10) Desa Dile	
		11) Desa Ndito	
		12) Desa Sipijena	
		13) Desa Turunalu	
		14) Desa Wologai Tengah	
		15) Desa Wolomage	
		16) Desa Rateroru	
		17) Desa Golulada	
		18) Desa Ranga	
		19) Desa Wolomasî	
		20) Desa Randoria	
Wewaria	1) Desa Wewaria	1) Desa Welamosa	

KECAMATAN	DESA TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU
	2) Desa Tanall	2) Desa Mukusaki	
	3) Desa Detubela	3) Desa Mautenda	
	4) Desa Aelipo	4) Desa Mautenda Barat	
	5) Desa Ekoae	5) Desa Fataatu Timur	
	6) Desa Ratewati	6) Desa Fataatu	
	7) Desa Mbotulaka	7) Desa Aemuri	
	8) Desa Kelitembu	8) Desa Numba	
	9) Desa Ekolea	9) Desa Ratewati Selatan	
	10) Desa Ae Ndoko		
	11) Desa Nuangenda		
	12) Desa Waka		
	13) Desa Wolooja		
Wolowaru	1) Desa Bokasape Timur	1) Desa Mbuliloo	
	2) Desa Nualise	2) Desa Rindiwawo	
	3) Desa Wolosoko	3) Desa Jopu	
	4) Desa Liselowobora	4) Desa Wolokoli	
	5) Desa Likanaka	5) Desa Mbuliwaralau	
	6) Desa Niramesi	6) Desa Lisedetu	
	7) Desa Lise Pu'u	7) Desa Tanaloo	
		8) Desa Nakambara	
		9) Desa Mbuliwaralau Utara	
Wolojita		1) Desa Tenda	1) Desa Nggela
		2) Desa Wiwipemo	
		3) Desa Pora	
		4) Desa Nuamulu	
Maurole	1) Desa Ranokolo	1) Desa Aewora	1) Desa Maurole
	2) Desa Detuwulu	2) Desa Ranakolo Selatan	2. Desa Masambi
	3) Desa Otogedu	3. Desa Keliwumbu	3) Desa Watukamba
	4. Desa Wolbau	4. Desa Niranus	
	5. Desa Ngalukaja		
	6. Desa Ululada		
Maukaro	1) Desa Kebirangga Selatan	1) Desa Kamubheka	1. Desa Kebirangga
	2) Desa Magekapa	2. Desa Mundinggasa	
	3. Desa Boafeo	3. Desa Nabe	
	4. Desa Kolikapa	4. Desa Kobaleba	
	5. Desa Kebirangga Tengah	5. Desa Natanangge	
Lio Timur	1. Desa Wololele A	1) Desa Wolosambi	
	2. Desa Fatamari	2) Desa Woloara	

KECAMATAN	DESA TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU
	3. Desa Nua Lima	3) Desa Detupera	
	4. Desa Tanaroga	4) Desa Liabeke	
	5. Desa Bu Tanalagu	5) Desa Ranggatalo	
	6. Desa Mbewawora	6) Desa Hobatua	
Kotabaru	1) Desa Ndondo	1) Desa Kota Baru	
	2) Desa Niopanda	2) Desa Tou	
	3) Desa Hangalande	3) Desa Tou Timur	
	4) Desa Tou Barat	4) Desa Loboniki	
	5) Desa Liselande		
	6) Desa Rangalaka		
	7) Desa Pise		
	8) Desa Neotonda		
	9) Desa Nuanaga		
Kelimutu	1. Desa Detuena	1) Desa Nuamuri	
	2. Desa Wolokelo	2) Desa Nuamuri Barat	
		3) Desa Koanara	
		4) Desa Woloara	
		5) Desa Waturaka	
		6) Desa Pemo	
		7. Desa Nduaria	
Detukeli	1) Desa Nggesa	1) Desa Detukeli	
	2) Desa Kebesani	2) Desa Unggu	
	3) Desa Wolomuku	3) Desa Nggesabiri	
	4) Desa Watunggere Marlilonga	4) Desa Watunggere Marlilonga	
	5. Desa Detumbewa	5) Jeo Du'a	
		6) Desa Nida	
		7) Desa Maurole Selatan	
		8) Desa Kanganara	
Ndoni Timur	1) Desa Kurulimbu	1) Desa Demulaka	
	2) Desa Sokoria	2. Desa Roga	
	3. Desa Kurulimbu Selatan		
	4. Desa Nggawa		
	5. Desa Sokoria Selatan		
Ndori	1) Desa Kelisamba	1) Desa Wonda	1) Desa Maubasa
	2) Desa Mole	2) Desa Serandori	
	3) Desa Lungaria	3) Desa Ratemangga	
	4) Desa Aebara	4) Desa Maubasa Barat	

KECAMATAN	DESA TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU
		5) Desa Maubasa Timur	
Ende Utara	1) Desa Cheoghoma 2) Desa Borokanda 3) Desa Watusipi 4) Desa Mbomba 5) Desa Embundoa 6) Desa Raterua		
Lepembusu Kellsuke	1) Desa Ndikosapu 2) Desa Taniwoda 3) Desa Tanalangi 4) Desa Detuara 5) Desa Tivusora 6) Desa Lisekuru 7) Desa Mukueku Sa'ate	1) Desa Ngumbelaka 2) Desa Mukureku 3) Desa Wologai Timur 4) Desa Kuru 5) Desa Ndenggarongge 6) Desa Rutujeja 7) Desa Kurusare	
T O T A L	100 Desa Tertinggal	146 Desa Berkembang	9 Desa Maju

Sumber : DPMD Kabupaten Ende, Indeks Desa Membangun Tahun 2024

3. Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Ende terdiri atas perbukitan dan pegunungan yang menempati wilayah tengah dan selatan, sementara dataran rendah dengan sedikit perbukitan berada di wilayah utara. Secara keseluruhan terdapat 20,60% wilayah Kabupaten Ende (421km^2) berada pada ketinggian lebih dari 500 meter diatas permukaan laut (dpl). Kecamatan dengan tinggi rata-rata terbesar adalah Ndona Timur (1.148m dpl), dan yang paling rendah adalah Ende Selatan (306 m dpl).

Tabel 2.3 Ketinggian Rata rata dari Permukaan Laut (dpl) dan % Luas Wilayah Menurut Ketinggian per Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah berdasarkan Kategori Ketinggian DPL (Ha)							Total Luas Wilayah
		0-250 mdpl (Ha)	250-500 mdpl (Ha)	500-750 mdpl (Ha)	750-1000 mdpl (Ha)	1000-1250 mdpl (Ha)	1250-1500 mdpl (Ha)	1500-1750 mdpl (ha)	
1	Nangapanda	7.421,70	8.346,41	2.674,28	589,04	-	-	-	19.031,40
2	Pulau Ende	920,85	100,67	-	-	-	-	-	1.021,51
3	Maukaro	8.870,32	6.913,58	4.118,39	1.622,40	110,83	-	-	21.665,52
4	Ende	2.382,52	5.495,37	4.745,90	3.012,09	863,15	-	-	16.499,08
5	Ende Selatan	1.427,21	464,75	65,54	-	-	-	-	1.956,99
6	Ende Timur	832,46	657,72	389,7	83,33	-	-	-	1.963,20
7	Ende Tengah	516,54	55,13	2,85	-	-	-	-	574,50
8	Ende Utara	1.159,15	503,5	88,96	-	-	-	-	1.751,57
9	Ndona	2.835,91	2.411,57	1.828,68	1.589,12	515,03	171,76	-	9.352,08
10	Ndona Timur	-	362,07	854,98	1.647,20	1.423,43	861,38	135,11	5.284,18

No.	Kecamatan	Luas Wilayah berdasarkan Kategori Ketinggian DPL (Ha)							Total Luas Wilayah
		0-250 mdpl (Ha)	250-500 mdpl (Ha)	500-750 mdpl (Ha)	750-1000 mdpl (Ha)	1000-1250 mdpl (Ha)	1250-1500 mdpl (Ha)	1500-1750 mdpl (ha)	
11	Wolowaru	1.261,68	2.042,74	1.662,53	945,96	408,29	131,83	-	6.453,03
12	Wolojita	841,59	990,61	932,46	547,31	282,36	328,07	54,19	3.976,60
13	Lio Timur	1.318,14	1.851,67	1.089,04	700,4	238,08	179,79	15,87	5.392,99
14	Kelimutu	-	-	487,67	1.437,66	1.952,31	972,55	553,01	5.403,18
15	Ndori	286,25	1.247,86	131,88	-	-	-	-	2.670,99
16	Maurole	7.817,53	4.535,17	2.122,08	925,29	-	-	-	15.513,89
17	Kotabaru	1.052,09	4.097,43	2.981,29	1.483,23	834,5	71,52	-	19.970,11
18	Detukell	831,34	3.930,80	3.592,46	1.972,77	866,42	34,77	-	11.238,56
19	Lepembusu Kellsuke	314,77	1.481,83	2.622,28	3.002,15	4.133,13	3.140,52	393,68	15.088,34
20	Detunoko	66,09	1.147,50	3.446,80	4.313,20	3.246,64	1.676,31	530,64	14.427,20
21	Wewaria	18.272,68	7.573,47	2.248,06	651,44	406,71	141,86	-	29.294,16

Sumber: Kabupaten Ende Dalam Angka 2025

Berdasarkan kemiringan tanah (lereng), sebagian besar wilayah Kabupaten Ende (58,11% atau $\pm 1.195\text{ km}^2$) berada pada kemiringan diatas 40%. Data kemiringan tanah masing-masing kecamatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 4 Kemiringan Tanah (Lereng) dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Ende

No	Kecamatan	Kemiringan Tanah (lereng) – Slope (%)							Luas (km ²)	
		3-12% slope		12-40% slope		>40% slope				
		%	Luas (km ²)	%	Luas (km ²)	%	Luas (km ²)	%		
1	Nangapanda	5,20	11,08	6,56	13,98	83,81	178,66	4,43	9,44	
2	Pulau Ende	5,50	3,47	7,01	4,42	5,34	3,37	82,15	51,78	
3	Maukaro	2,30	2,36	4,12	4,23	23,55	24,16	70,03	71,85	
4	Ende	2,41	4,33	8,49	15,24	8,68	15,58	80,42	144,35	
5	Ende Selatan	6,60	0,83	22,08	2,79	36,11	4,57	35,21	4,45	
6	Ende Timur	4,71	1,83	15,26	5,91	17,58	6,81	62,45	24,21	
7	Ende Tengah	7,97	0,59	34,44	2,56	22,62	1,68	34,97	2,60	
8	Ende Utara	4,21	2,04	15,23	7,39	13,03	6,33	67,53	32,79	
9	Ndona	0,41	0,44	-	0,00	22,73	24,20	76,86	81,83	
10	Ndona Timur	0,28	0,11	-	0,00	21,31	8,58	78,41	31,55	
11	Wolowaru	-	0,00	3,38	2,26	17,73	11,85	78,89	52,73	
12	Wolojita	-	0,00	3,43	1,13	22,32	7,34	74,25	24,43	
13	Lio Timur	-	0,00	3,28	1,53	17,40	8,14	79,32	37,11	
14	Kelimutu	-	0,00	5,11	3,01	26,20	15,44	68,89	40,60	
15	Ndori	-	0,00	2,94	0,17	29,76	1,77	67,30	4,00	
16	Maurole	3,94	6,14	5,78	9,01	42,72	66,62	47,56	74,17	

No	Kecamatan	Kemiringan Tanah (Jereng) – Slope (%)							
				3-12% slope		12-40% slope		>40% slope	
		%	Luas (km ²)	%	Luas (km ²)	%	Luas (km ²)	%	Luas (km ²)
17	Kotabaru	0,33	0,59	5,62	10,11	46,59	83,77	47,46	85,34
18	Detukeli	6,60	13,12	8,21	16,32	17,45	34,69	67,74	134,67
19	Lepembusu Kelisoke	1,32	1,80	4,28	5,83	12,39	16,88	82,01	111,70
20	Detusoko	3,21	6,23	6,14	11,92	40,58	78,75	50,07	97,17
21	Wewaria	3,61	5,70	6,49	10,25	40,30	63,65	49,60	78,34
Total Luasan (km ²)		60,67		128,08		662,84		1195,12	
% Terhadap Total Wilayah		3,96		6,26		32,39		58,40	

Sumber: Ende Dalam Angka 2025 (Data Olahan Bappeda)

4. Geologi

Pembagian wilayah Kabupaten Ende menurut kedalaman tanah efektif terbagi atas: 52,96% wilayah memiliki kedalaman tanah efektif 0–30 cm; dan 11,32% memiliki kedalaman tanah efektif 30–60 cm; serta 30,22% memiliki kedalaman tanah efektif 60–90 cm; sementara itu 5,5% wilayah kedalaman tanah efektif diatas 90 cm. Jenis tanah di Kabupaten Ende didominasi tanah mediteran dengan bentuk wilayah volcano, dengan tekstur tanah yang terdiri atas 22,99% tekstur tanah sedang ,57,11% tekstur tanah kasar, 3,70% tekstur tanah halus dan sisanya sebesar 16,90% tidak dikategorikan.

Tabel 2. 5 Persentase Luas Wilayah menurut Tekstur Tanah per-Kecamatan

No.	Kecamatan	Jenis Tekstur			Total Luas Wilayah (km ²)
		Sedang	Kasar	Halus	
1	Nangapanda	35.13	33.69	31.18	213.17
2	Pulau Ende	35.28	33.71	31.01	63.03
3	Maukaro	33.05	34.19	32.67	102.6
4	Ende	50.09	49.91	-	179.5
5	Ende Selatan	49.92	50.08	-	12.65
6	Ende Timur	49.89	50.11	-	38.76
7	Ende Tengah	50.14	49.86	-	743
8	Ende Utara	49.90	50.10	-	48.55
9	Ndona	49.67	50.33	-	106.47
10	Ndona Timur	40.64	50.36	-	40.24
11	Wolowaru	49.70	50.30	-	66.84
12	Wolojita	49.71	50.29	-	32.9
13	Lio Timur	49.71	50.29	-	46.79
14	Kelimutu	49.63	50.37	-	58.94
15	Ndori	49.71	50.29	-	5.94
16	Maurole	50.00	50.00	-	155.94
17	Kotabaru	50.00	50.00	-	179.81
18	Detukeli	50.00	50.00	-	198.81
19	Lepembusu Kelisoke	33.42	33.55	33.03	136.2
20	Detusoko	33.30	33.56	33.14	194.07

No.	Kecamatan	Jenis Tekstur			Total Luas Wilayah (km ²)
		Sedang	Kasar	Halus	
21	Wewaria	33.35	33.61	33.04	157.95

Sumber: Ende Dalam Angka 2018

5. Hidrologi

Hutan lindung sepanjang bagian tengah wilayah, menyebabkan banyaknya sebaran daerah aliran sungai (DAS) dan mataair di Kabupaten Ende. Beberapa DAS besar antara lain Kali Nangapanda, Kali Nangaba, Kali Wolowona, Kali Loworea, Kali Ndondo, dan Kali Lowo Lande, hampir setiap tahun mengalami banjir. Mataair tersebar pada beberapa wilayah dengan debit berkisar 4-17 liter/detik. Beberapa Mata Air yang ada, diantaranya : Mata Air Woloare, Aekipa, Aepana,Nangapanda, Ae Ino, Seke Mele, Aewanda, Aemuri, Kena Fikodan LioLo'o telah dimanfaatkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk pemenuhan kebutuhan, air bersih masyarakat Kota Ende, Kecamatan Nangapanda, Detusoko, Wolowaru dan Kecamatan Maurole. Beberapa mata air dalam debit yang lebih kecil dimanfaatkan untuk fasilitas air bersih perdesaan.

Tabel 2.6 Daerah Aliran Sungai dan Mata Air di Kabupaten Ende

No	Kecamatan	Nama Sungai (DAS)	Nama Mata Air (debit-liter/detik)	Keterangan
1	Nangapanda	Lowo Nangapanda	Mata Air Nangapanda(10)	PDAM Nangapanda
2	Pulau Ende			
3	Maukaro	Lowo Bengge, Ae Molumba Rowo Rheo		
4	Ende	Lowo Nangaba		PDAM/ IKK Nangaba
5	Ende Selatan			
6	Ende Timur	Lowo Wolowona	Mata Air Aewanda	
7	Ende Tengah			
8	Ende Utara	Manungae	Mata air Woloare (4)	PDAM KotaEnde
9	Ndona	Lowo Wolotopo dan Ngalupolo	Mata air aepana (19),Mata airAekipa (12)	PDAM Kota Ende dan Ndona
10	Ndona Timur	Lowo Aebai, LowoRia		
11	Wolowaru	Lowo Ae Bara, Lowo Ae hepo	Mata Air Lia Lo'o(7),Seke Mele(-)	PDAM Wolowaru
12	Wolojita	Lowo Aebai		
13	Lio Timur	Lowo Lise		
14	Kelimutu	Lowo Aebara, Lowo Ria	Mata airMoni (4)	
15	Ndori	Lowo Ria		
16	Maurole	Lowo bajo	Mata AirAe Ino(7)	PDAM Maurole
17	KotaBaru	Lowo Ndondo, Lowo Lande		
18	Detukeli	Lowo Laka, Lowo Pemoria		

No	Kecamatan	Nama Sungai (DAS)	Nama Mata Air (debit-liter/detik)	Keterangan
19	Lepembusu Kelisoke	Lowo Lise, Lowo Pombo		
20	Detusoko	Lowo Ria	Mata Air Kena Fiko	PDAM Detusoko
	Wewaria	Lowo Rea		

Sumber: Kabupaten Ende Dalam Angka 2025

6. Klimatologi

Kabupaten Ende beriklim tropis agak kering, dengan suhu berkisar antara 22,5–34 °C. Curah hujan berkisar antara 0-549 mm/tahun, dengan tingkat intensitas hujan sedang. Jumlah hari hujan sebanyak 128 hari, dengan hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari. Kelembaban udara rata-rata sebesar 80,4 gr/m³, dengan rata-rata kelembaban minimum sebesar 68,7gr/m³ dan maksimum sebesar 89 gr/m³.

7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Ende diarahkan dengan memerhatikan Rencana Pola Ruang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Ende Tahun 2023-2042 dan hasil peninjauan kembali. Secara umum penggunaan lahan di Kabupaten Ende, meliputi: Kawasan Lindung seluas 41.062 ha (19,76%) dan Kawasan Budidaya seluas 166.705 ha (80,24%), dengan rincian luas masing-masing penggunaan lahan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Rencana Pola Ruang Wilayah

NO	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
I	Kawasan Lindung	41.062	19,76
1	Kawasan yang Memberi Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	22.225	10,70
	o Kawasan Hutang Lindung	22.225	10,70
2	Kawasan Perlindungan Setempat	11.306	5,44
3	Kawasan Konservasi	7.336	3,53
	o Kawasan Suaka Alam	1.943	0,94
	o Kawasan Pelesatarian Alam	5.393	2,60
4	Kawasan Ekosistem Mangrove	196	0,09
II	Kawasan Budidaya	166.705	80,24
1	Kawasan Hutan Produksi	34.036	16,38
	o Kawasan Hutan Produksi Tetap	32.942	15,86
	o Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi	1.094	0,53
2	Kawasan Pertanian	121.999	58,72%
	o Kawasan Tanaman Pangan	28.888	13,90%
	o Kawasan Perkebunan	93.110	4,48%
3	Kawasan Pertambangan dan Energi	34	0,02%

NO	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
	o Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Kecamatan Ende Selatan	4	0.002%
	o Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik tersebar pada lima kecamatan	30	0.01%
4	Kawasan Peruntukan Industri	200	0.10%
5	Kawasan Pariwisata	330	0.16%
	Kawasan Pemukiman	10.048	4.84%
	o Kawasan Pemukiman Perkotaan	2.493	1.20%
	o Kawasan Pemukiman Pedesaan	7.554	3.64%
6	Kawasan Transportasi	48	0.02%
7	Kawasan Petahanan dan Keamanan	11	0.005%
TOTAL I+II		107.767	100

Sumber:Perda RTRW Kab.Ende Nomor 1 Tahun 2023

2.2.1.1 Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana

Alam

a) Gempa Bumi



Kabupaten Ende dikenal sebagai salah satu lokasi rawan gempa di Indonesia. Daerah ini mempunyai pertumbuhan penduduk yang cepat, termasuk bangunan yang ada, khususnya di Kota Ende dan sekitarnya. Sejumlah gempa bumi yang merusak telah menghantam daerah ini antara lain gempa bumi Maumere tahun 1989 dan 1992. Gempa bumi di Kabupaten Ende umumnya diakibatkan oleh saling bergeseknya tepian zona sub duksi atau jalur patahan (*fault*) aktif. Daerah Rawan Gempa Bumi dengan luas kurang lebih 8.068 Ha terdapat dihampir seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Ende terkecuali Kecamatan Pulau Ende.

b) Gelombang Ekstrim dan Abrasi



Potensi rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi terjadi pada hampir seluruh wilayah pesisir pantai Kabupaten Ende dengan luas kurang lebih 387 Ha yang mencakup

Kecamatan Ende Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kecamatan Ende Utara, Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Lio Timur, Kecamatan Maukaro, Kecamatan Maurole, Kecamatan Nangapanda, Kecamatan Ndona, Kecamatan Ndori, Kecamatan Pulau Ende, Kecamatan Wewaria, dan Kecamatan Wolowaru.

c) Letusan Gunung Api



Daerah rawan letusan gunung api dengan luas kurang lebih 1.056 Ha yang mencakup wilayah Kecamatan Ende Selatan, Kecamatan Kelimutu, Kecamatan Ndona Timur dan Kecamatan Wolojita dengan 2

gunung api aktif yaitu gunung Iya dan Gunung Kelimutu.

d) Banjir Bandang

Banjir Bandang adalah banjir besar yang datang secara tiba-tiba dengan meluap, menggenangi, dan mengalir deras menghanyutkan benda-benda besar (seperti kayu dan sebagainya). Banjir ini terjadi secara tiba-tiba di daerah permukaan rendah akibat hujan yang turun terus-menerus. Daerah rawan bencana banjir bandang di Kabupaten Ende dengan luas kurang lebih 5.104 Ha yang mencakup wilayah Kecamatan Detukeli, Kecamatan Detusoko, Kecamatan Ende, Kecamatan Ende Timur, Kecamatan Ende Utara, Kecamatan Kelimutu, Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Kecamatan Lio Timur, Kecamatan Maukaro, Kecamatan Maurole, Kecamatan Nangapanda, Kecamatan Ndona, Kecamatan Ndona Timur, Kecamatan Ndori, Kecamatan Wewaria, Kecamatan Wolojita dan Kecamatan Wolowaru.



e) Tanah Longsor

merupakan daerah rawan longsor. Daerah rawan longsor di Kabupaten Ende dengan luas kurang lebih 103.708 Ha yang meliputi hampir seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Ende terkecuali Kecamatan Pulau Ende.

f) **Tsunami**

Sama seperti gelombang tinggi dan abrasi daerah rawan tsunami juga mencakup seluruh wilayah pesisir di Kabupaten Ende dengan luas kurang lebih 282 Ha yang mencakup wilayah Kecamatan Ende, Kecamatan Ende Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kecamatan Ende Utara, Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Lio Timur, Kecamatan Maurole, Kecamatan Nangapanda, Kecamatan Ndona, Kecamatan Ndori, Kecamatan Pulau Ende, Kecamatan Wolojita dan Kecamatan Wolowaru.

g) **Liquifikasi**



Angin sering terjadi tiap tahun di wilayah Kabupaten Ende. Berdasarkan hasil analisis, seluruh kecamatan di Kabupaten Ende tergolong dalam ancaman angin ribut rendah. Daerah yang pernah mengalami angin ribut antara lain

Kecamatan Detukeli, Wewaria, Wolojita, Pulau Ende, Kelimutu, Ende, dan Kecamatan Maurole.

2.2.1 Aspek Demografi

2.2.1.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan Publikasi BPS Ende (Ende Dalam Angka Tahun 2025), menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Ende sampai akhir tahun 2024 mencapai 281.371 jiwa terdiri atas 137.961 jiwa penduduk laki-laki dan 143.410 penduduk perempuan.

Secara kewilayahan penduduk Kabupaten Ende terkonsentrasi di daerah perkotaan ($\pm 27,33\%$), terutama di Kecamatan Ende Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa perkotaan masih merupakan daya tarik utama bagi penduduk, baik dari desa maupun masyarakat luar wilayah untuk mencari pekerjaan, bersekolah, serta aktifitas kegiatan lain. Realitas perkembangan

fasilitas pendidikan (tinggi), serta usaha jasa dan perdagangan turut mempengaruhi perkembangan penduduk di Kota Ende. Penduduk terbesar berada di Kecamatan Ende Selatan sebanyak 26.782 jiwa, disusul Kecamatan Ende Tengah sebanyak 24.250 jiwa dan Nangapanda sebanyak 24.108 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Ndona Timur, yaitu sebanyak 5.129 jiwa.

Dengan luas wilayah 2.085 km², tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Ende Tahun 2025 adalah sebesar 134,94/km². Kecamatan yang mempunyai tingkat kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Ende Tengah (4.217,39 jiwa/km²), sedangkan yang paling jarang adalah Kecamatan Lepembusu Kelisoke dengan tingkat kepadatan 36,28 jiwa/km². Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan (sexratio) keadaan Tahun 2025 adalah sebesar 96,20%. Sementara itu, dari sisi laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Ende tahun 2020-2024 adalah 1,03 % dengan Kecamatan Nangapanda menduduki tempat teratas yakni 1,79 %. Selengkapnya digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 8 Jumlah Penduduk, Rasio jenis Kelamin, Kepadatan Penduduk Tahun 2023 – 2025

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2024	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km persegi (km ⁻²)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Nangapanda	24.108	1,79	8,57	126,68	100,20
Pulau Ende	8.985	1,42	3,19	879,16	95,45
Maukaro	8.112	1,46	2,88	37,44	101,34
Ende	18.308	1,78	6,51	110,96	94,15
Ende Selatan	26.782	1,18	9,52	1368,52	92,21
Ende Timur	19.824	0,44	7,05	1009,88	92,32
Ende Tengah	24.250	0,44	8,62	4217,39	91,94
Ende Utara	18.663	0,55	6,63	1065,24	96,27
Ndona	14.464	1,48	5,14	154,66	96,04
Ndona Timur	5.129	0,44	1,82	97,07	103,53
Wolowaru	16.708	0,62	5,94	258,92	93,56
Wolojita	6.396	0,55	2,27	160,82	93,70
Lio Timur	8.297	1,35	2,95	153,85	97,36
Kelimutu	7.312	1,20	2,6	135,33	91,01
Ndori	6.057	1,57	2,15	226,77	92,29
Maurole	11.881	0,63	4,22	76,58	93,34
Kotabaru	10.712	0,77	3,81	53,64	97,78
Detukeli	7.019	1,07	2,49	62,51	97,66
Lepembusu Kelisoke	5.474	0,53	1,95	36,28	94,53
Detusoko	14.796	1,25	5,26	102,56	110,35

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2024	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km persegi (km ²)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Wewaria	18.094	1,01	6,43	61,77	102,10
Kabupaten Ende	281.371	1,03	100	134,94	96,1

Sumber : Kabupaten Ende Dalam Angka 2015

Berdasarkan data tren kependudukan yang telah diperoleh, selanjutnya dilakukan proyeksi penduduk hingga tahun 2045 untuk menggambarkan jumlah penduduk dalam 20 tahun mendatang.

Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi, Kabupaten Ende secara keseluruhan mengalami peningkatan jumlah penduduk yang persisten hingga tahun 2045. Diproyeksikan jumlah penduduk Kabupaten Ende pada tahun 2024 adalah 280.018 jiwa dan diprediksikan terus meningkat hingga tahun 2045 menjadi 310.357 jiwa. Dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun, kenaikan jumlah penduduk tidak dialami di seluruh kecamatan. Terdapat beberapa kecamatan yang diprediksikan mengalami penurunan jumlah penduduk, yakni meliputi kecamatan Ende, Ende Timur, Ende Tengah, Ende Utara, Ndona Timur, Kelimutu, Ndori, Detukeli, dan Lepembusu Kelisoke. Lebih jelasnya, proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Ende tahun 2024-2045 dapat dilihat padat tabel berikut ini.

Tabel 2. 9 Proyeksi Jumlah Penduduk di Kabupaten Ende Tahun 2024-2029

No	Kecamatan	Proyeksi Jumlah Penduduk					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Nangapanda	24.021	24.343	24.669	24.999	25.334	25.674
2	Pulau Ende	9.023	9.185	9.351	9.519	9.691	9.865
3	Maukaro	8.203	8.411	8.624	8.843	9.067	9.297
4	Ende	17.705	17.414	17.128	16.846	16.570	16.297
5	Ende Selatan	26.738	26.997	27.259	27.524	27.790	28.060
6	Ende Timur	19.662	19.588	19.515	19.442	19.369	19.296
7	Ende Tengah	12.973	11.900	10.916	10.014	9.186	8.427
8	Ende Utara	18.452	18.342	18.233	18.124	18.017	17.909
9	Ndona	15.521	16.892	18.384	20.007	21.774	23.697
10	Ndona Timur	5.041	4.977	4.913	4.851	4.789	4.728

No	Kecamatan	Proyeksi Jumlah Penduduk					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
11	Wolowaru	16.697	16.788	16.880	16.973	17.066	17.159
12	Wolojita	6.377	6.393	6.408	6.424	6.440	6.456
13	Lio Timur	8.291	8.392	8.494	8.598	8.703	8.809
14	Kelimutu	7.247	7.265	7.284	7.303	7.322	7.341
15	Ndori	5.935	5.903	5.871	5.839	5.807	5.776
16	Maurole	12.052	12.302	12.557	12.817	13.083	13.354
17	Kotabaru	10.627	10.621	10.616	10.610	10.605	10.600
18	Detukell	6.938	6.929	6.919	6.909	6.899	6.890
19	Lepembusu Kelisoke	5.399	5.354	5.308	5.264	5.219	5.175
20	Detusoko	14.781	14.942	15.106	15.271	15.438	15.607
21	Wewaria	18.273	18.635	19.004	19.380	19.764	20.155
Kab. Ende		280.018	281.462	282.913	284.372	285.838	287.312

Sumber: RPJPD Kab. Ende Tahun 2025-2045

2.3.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.1.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a) Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Besaran produksi barang dan jasa di Kabupaten Ende yang ditunjukan dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sampai dengan keadaan Tahun 2024 mencapai 7.885,46 Miliar Rupiah, dimana didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar kurang lebih 2.336,64 Miliar Rupiah atau 31,69 % diikuti Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar kurang lebih 1193,95 Miliar (16,19 %).

Sementara itu Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010, angka PDRB Kabupaten Ende mengalami kenaikan dari Rp. 4.131,22 Miliar pada tahun 2019 menjadi Rp. 4.630,78 Miliar di Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa selama Tahun 2024 di Kabupaten Ende mengalami Kenaikan ekonomi sekitar 2,57%.

Tabel 2.10 Nilai dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ende
Kurun Waktu 2019-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB (dalam miliar rupiah)					
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	6.075,21	6.314,66	6.792,62	7.374,38	7.885,46
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010	4.076,21	4.162,98	4.291,79	4.457,69	4.630,78
Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 (%)	-1,33	2,13	3,09	3,87	3,88

Sumber: Kabupaten Ende Dalam Angka 2025

Tabel 2.11 Peranan Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Ende
ADHB Kurun Waktu 2020-2024

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Agriculture, Forestry, and Fishing	29,50	30,71	31,50	31,69	31,35
B.	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	1,25	1,22	1,19	1,14	1,1
C.	Industri Pengolahan/Manufacturing	1,62	1,56	1,63	1,79	2,09
D.	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08
E.	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	0,06	0,07	0,07	0,06	0,06
F.	Konstruksi/Construction	9,59	9,53	9,25	9,11	8,8
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade;Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	14,81	14,81	15,55	16,19	16,43
H.	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	5,64	5,48	5,69	5,86	6,24
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Accommodation and Food Service Activities	0,27	0,26	0,29	0,32	0,34
J.	Informasi dan Komunikasi Information and Communication	5,00	5,08	4,96	4,82	4,73
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi Financial and Insurance Activities	4,29	4,42	4,48	4,29	4,23
L.	Real Estat/Real Estate Activities	2,61	2,50	2,54	2,65	2,86
M,N,	Jasa Perusahaan/Business Activities	0,13	0,19	0,19	0,19	0,19
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administrationand Defence; Compulsory Social Security	10,29	9,88	9,08	8,70	8,59
P.	Jasa Pendidikan/Education	10,78	10,36	9,76	9,32	9,14

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Human Health and Social Work Activities	1,93	1,97	1,88	1,95	1,95
R,S,T, U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	2,05	1,91	1,88	1,85	1,81
	Produk Domestik Regional Bruto Gross Regional Domestic Product	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Ende Dalam Angka 2025

Dari sisi produksi sebanyak 6 sektor Lapangan Usaha tumbuh diatas 5% atau diatas pertumbuhan PDRB secara keseluruhan. Fokus pengembangan sektor ekonomi utama yakni pertanian, kehutanan dan perikanan, dan sumber pertumbuhan baru seperti pariwisata harus dapat terus didorong guna lebih memajukan perekonomian Kabupaten Ende.

Tabel 2. 12 Laju Pertumbuhan (%) Sektor Ekonomi 2020-2024

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Agriculture, Forestry, and Fishing	2,49	5,14	5,06	4,6	2,96
B.	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	-1,89	0,49	1,68	2,46	3,53
C.	Industri Pengolahan/Manufacturing	-4,32	-0,87	9,95	8,47	10,49
D.	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	10,83	1,46	6,75	11,29	10,55
E.	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	6,98	6,5	4,01	2,79	2,57
F.	Konstruksi/Construction	-9,88	2,17	-0,79	4,25	1,37
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade;Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	-6,22	2,27	7,41	5,64	6,13
H.	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	-12,6	0,79	3,93	2,69	3,9
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Accommodation and Food Service Activities	-24,94	3,72	17,05	15,34	10,16
J.	Informasi dan Komunikasi Information and Communication	12,29	5,48	4,42	5,12	4,13
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi Financial and Insurance Activities	9,39	2,8	1,05	1,96	4,18
L.	Real Estat/Real Estate Activities	-0,99	0,87	0,79	3,84	6,45
M,N,	Jasa Perusahaan/Business Activities	-40,46	-17,29	3,93	5,56	6,83
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administrationand Defence; Compulsory Social Security	4,46	-1,44	-1,68	0,25	4,73
P.	Jasa Pendidikan/Education	2,12	-1,92	-0,76	1,6	2,15

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Human Health and Social Work Activities	4,44	5,28	2,09	4,28	3,44
R,S,T, U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	-17,19	-3,53	0,72	3,99	2,77
	Produk Domestik Regional Bruto Gross Regional Domestic Product	-1,33	2,13	3,09	3,87	3,88

Sumber: BPS Kabupaten Ende

Berdasarkan PDRB Pengeluaran terlihat bahwa selama periode 2020-2024, PDRB Kabupaten Ende, sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT). Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal tetap bruto (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar dan cenderung menurun yakni sekitar 47,19 s/d 46,06%. Meskipun komponen ekspor bernilai negatif, namun di sisi lain komponen impor sebagai komponen pengurang dalam PDRB juga masih berkontribusi relatif besar, yakni sekitar 0,84 % s/d 0,77%. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor).

Tabel 2.13 PDRB Pengeluaran ADHK 2020-2024

Komponen Baru	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah)									
	tahun 2020 -2024									
	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.904,15	71,25	2.951,76	70,90	3.019,17	70,35	3.109,95	69,77	3.227,59	69,70
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	110,79	2,72	115,66	2,78	119,66	2,79	124,35	2,79	138,13	2,98
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	874,69	21,46	836,00	20,08	768,20	17,90	784,91	17,61	18,00	18,00
Pembentukan Modal Tetap Bruto		47,19		48,23	1.994,26	46,47	2.110,29	47,34	46,06	46,06
Perubahan Inventori	34,28	0,84	35,02	0,84	34,97	0,81	34,09	0,76	0,77	0,77
Net Ekspor Barang dan Jasa	-1.771,37	-43,46	-1.783,32	-42,84	-1.644,46	-38,32	-1.705,91	-38,27	37,51	37,51
Produk Domestik Regional Bruto	4.076,21	100,00	4.162,98	100,00	4.291,79	100,00	4.457,69	100,00	100,00	100,00

Sumber: Publikasi Website BPS Ende

b) Laju Inflasi

Data Inflasi Kabupaten Ende untuk Tahun 2020 -2024 tidak dipublikasikan, sehingga mengacu pada inflasi provinsi secara keseluruhan dan beberapa daerah di wilayah Provinsi NTT yaitu Kota

Kupang, Maumere dan Waingapu menjadi dasar pengukuran besar inflasi di Kabupaten Ende. Nilai inflasi Provinsi NTT dan beberapa daerah di wilayah Provinsi NTT dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 14 Inflasi di beberapa kabupaten/kota NTT

Wilayah Inflasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Kupang	-	1,86	7,07	2,21	0,24
Maumere	-	0,55	6,25	3,33	2,65
Waingapu	-	1,28	3,54	3,27	1,57
Nusa Tenggara Timur	0,61	1,67	6,65	2,42	0,83

Sumber: BPS, Provinsi NTT

c) PDRB Perkapita

PDRB per kapita secara teoritis merupakan ketersedian barang dan jasa yang dapat dinikmati oleh setiap masyarakat di daerah tersebut. Semakin besar nilai PDRB perkapita, semakin banyak pula ketersedian barang dan jasa yang dapat mereka nikmati. Dengan semakin besar PDRB per kapita, kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukan adanya trend kenaikan PDRB Perkapita di Kabupaten Ende Publikasi BPS "Kabupaten Ende Dalam Angka 2025" Pada Tahun 2019, PDRB perkapita ADHB adalah sebesar Rp. 22.293,- Angka ini kemudian meningkat menjadi Rp. 23.209,- di Tahun 2021, dan pada Tahun 2023 mencapai Rp. 26.471. Sementara untuk harga konstan, PDRB Perkapita ADHK pada Tahun 2019 tercatat sebesar Rp. 15.085,- dan terus meningkat menjadi Rp. 15.301,- di Tahun 2021 dan menjadi Rp.16.001,- di Tahun 2023. Rata-rata pertumbuhan PDRB PDRB Perkapita ADHK 2010 sebesar 2,19%.

Tabel 2. 15 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Ende, 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022*	2023**	2024
1	3	4	5	6	6
Nilai PDRB (juta Rp)					
ADHB	6.075.210	6.314.657	6.792.617	7.374.379	7.885,45
ADHK 2010	4.076.215	4.162.984	4.291.787	4.457.690	4.640,78
PDRB Perkapita (ribu Rp)					
ADHB	22.456	23.209	24.630	26.471	28.025,13
ADHK 2010	15.067	15.301	15.562	16.001	

Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHK 2010 (%)	0,12	1,55	3,09	3,87	3,88
Jumlah Penduduk (000 orang)	271	272	273,3	278,6	281,37
Pertumbuhan penduduk	- 1,21	0,57	0,59	1,04	1,03

Sumber:BPS, Ende Dalam Angka 2025.

d) Indeks Gini

Ketimpangan pendapatan (*Gini Ratio*) adalah ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Perubahan *Gini Ratio* merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. *Gini Ratio* mengalami penurunan berarti distribusi pengeluaran penduduk mengalami perbaikan.

Grafik 2. 1 Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Ende Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Ende

Berdasarkan Grafik di atas terlihat bahwa perkembangan rasio gini di Kabupaten Ende memiliki kondisi yang fluktuatif. Dilihat dari angka rasio gini di Kabupaten Ende pada tahun 2020 adalah sebesar 0,341, kemudian menurun menjadi 0,298 pada tahun 2021. Kemudian mengalami peningkatan menjadi 0,306 pada tahun 2022, kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 0,273 dan pada tahun 2024 sedikit mengalami kenaikan angka 0,286. Berdasarkan perkembangan rasio gini yang ditinjau dari tahun

2020- 2024 memiliki nilai dibawah 0,5. Kondisi ini menunjukkan pemerataan pendapatan di Kabupaten Ende semakin baik.

e) **Angka Kemiskinan**

Untuk mengukur kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (52 komoditi) dan bukan makanan (51 komoditi perkotaan dan 47 komoditi perdesaan) yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor. Berdasarkan data susenas, diketahui jumlah penduduk miskin Kabupaten Ende cenderung fluktuatif, dimana pada tahun 2019 sebesar 63.450 (23,18 %). Selanjutnya pada tahun 2023 dan 2024 penduduk miskin cenderung menurun masing-masing pada angka 22,86 % dan 22,57%.

Tabel 2.16 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Ende 2020-2024

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)		Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)		Persentase Penduduk Miskin	
	Ende	NTT	Ende	NTT	Ende	NTT
2019	363.508,00	373.922,00	63,45	1.146,32	23,18	21,09
2020	392.591,00	403.005,00	65,22	1.153,76	23,76	20,9
2021	428.328,00	415.116,00	66,38	1.169,31	24,13	20,99
2022	473.403,00	460.823,00	63,40	1.131,62	23,00	20,05
2023	518.939,00	507.203,00	63,10	1.141,11	22,86	19,96
2024	528.259,00	527.275,00	62,37	1.127,57	22,57	19,48

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

f) **Angka Kemiskinan**

Kemiskinan dianggap sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dengan pengeluaran. Oleh karena itu, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Ende mengalami kondisi yang fluktuatif dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2020 hingga 2021, angka penduduk miskin meningkat dari 23,76%

menjadi 24,13. Kemudian pada tahun 2022 menurun menjadi 23% dan terus menurun menjadi 22,86% pada tahun 2023, dan menurun lagi 22,57% pada tahun 2024. Lebih jelasnya, angka kemiskinan di Kabupaten Ende dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2. 17 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Ende

Tahun 2019-2024

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2020	392.591,00	65,22	23,76
2021	428.328,00	66,38	24,13
2022	473.403,00	63,40	23,00
2023	518.939,00	63,10	22,86
2024	528.259,00	62,370	22,57

Sumber: Kabupaten Ende Dalam Angka 2025

Sedangkan persentase penduduk miskin propinsi NTT dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2. 18 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2020-2024

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin(ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2020	403.005,00	1.153,76	20,9
2021	415.116,00	1.169,31	20,99
2022	460.823,00	1.131,62	20,05
2023	507.203,00	1.141,11	19,96
2024	527.275,00	1.127,57	19,48

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)2025

g) Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem – setara dengan USD 1.9 PPP (purchasing power parity) atau kurang lebih setara dengan Rp. 322.170/orang/bln. Isu utama percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah bagaimana memastikan program perlindungan sosial dan pemberdayaan dapat secara efektif mengurangi kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem. Untuk itu diperlukan upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem yang harus dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi, serta upaya validasi data dan

mempertajam basis data untuk mencapai ketepatan target dan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Tabel ... Garis Kemiskinan, Jumlah,dan Persentase Penduduk Miskin Ekstrem di Kabupaten Ende,2020-2024

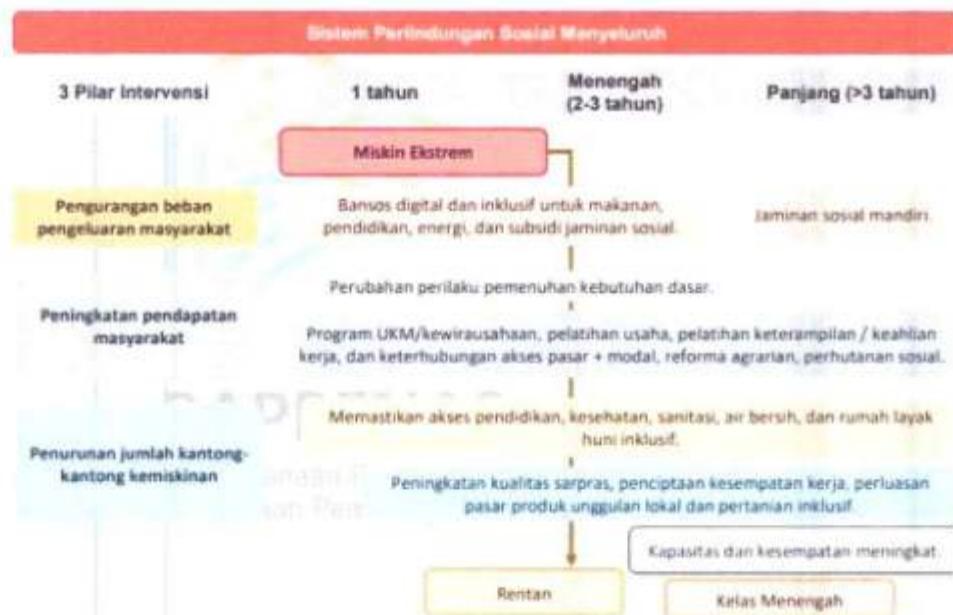
Tahun	Garis Kemiskinan Ekstrem (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (ribu)	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem
2020	322.170	37.13	13,53
2021	322.170	35.76	13
2022	322.170	30.29	10,99
2023	322.170	15.19	5,5
2024	322.170	N/A	N/A

Sumber:BPS da Kemenko PMK RI

h) Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yakni dengan menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan meminimalkan wilayah kantong kemiskin.

Gambar 2.1 Intervensi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem



2.1.3.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

a) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia menggambarkan komposit indikator Angka Harapan Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup dan Pengeluaran Ril Yang Disesuaikan. IPM Kabupaten Ende terus mengalami peningkatan dimana keadaan terakhir Tahun 2024 sebesar 72,24 menduduki rangking 2 IPM Kabupaten/Kota se-NTT. Kondisi ini

menunjukkan bahwa terjadi sedikit penurunan jika dibandingkan dengan IPM tahun 2019.

Tabel 2.21. Perkembangan IPM Kabupaten Ende 2019-2024

Komponen Indeks Pembangunan Manusia	Komponen dan Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					
	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Umur Harapan Hidup	65	65	65	66	66	72,87
Harapan Lama Sekolah	14	14	14	14	14	13,83
Rata-Rata Lamanya Sekolah	8	8	8	8	8	8,29
Pengeluaran Rill per Kapita disesuaikan (oooRp)	9.315	9.094	9.027	9.413	9.739	10.009
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,2	67,04	67,3	67,97	68,63	72,24
Peringkat di NTT	3	3	3	3	3	2

Sumber: Publikasi BPS NTT dan Ende Dalam Angka 2025

b) Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan APM di Kabupaten Ende untuk semua tingkat pendidikan cenderung fluktuatif kurun 2013-2019. Data APK dan APM Kabupaten Ende kurun waktu 2019-2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Angka Partisipasi Kasar SD/MI,SMP/MTs, SMA/MAN
Tahun 2019-2024

No	Jenjang Pendidikan	Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar (SD)	Ende	105,05	103,39	102,47	110,54	107,45	105,9
		Nusa Tenggara Timur	114,95	113,4	113,55	113,36	111,35	110,58
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Ende	103,67	101,76	99,71	87,71	100,19	97,49
		Nusa Tenggara Timur	87,82	89,85	90,78	89,88	90,41	91,73
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Atas (SMA)	Ende	95,63	93,61	96,13	94,58	89,18	76,35
		Nusa Tenggara Timur	84,63	84,7	86,36	86,38	88,66	89,2
4	Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar (SD)	Ende	91,24	91,02	91	95,86	95,67	96,99
		Nusa Tenggara Timur	96,14	96	96,04	96,08	95,98	97,01
5	Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Ende	68,82	69,53	69,45	69,55	75,99	77,75
		Nusa Tenggara Timur	69,19	69,82	69,99	70,05	73,47	73,72
6	Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Atas (SMA)	Ende	58,46	59,29	59,61	61,84	54,8	52,54
		Nusa Tenggara Timur	53,65	54,09	54,29	56	58,15	60,73

Sumber: Publikasi BPS NTT dan Ende Dalam Angka 2025

c) Angka Putus Sekolah

Selama kurun waktu Tahun 2016-2023 APSSD/MI,SMP/Mts mengalami fluktuasi. Data menunjukkan pada Tahun 2024 Angka Putus Sekolah (APs) pada jenjang pendidikan SD/MI sebesar 2,11, sementara itu untuk jenjang pendidikan SMP/MTs juga sama sebesar 6,92.

Tabel. 2.23. Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs
Tahun 2019-2024

No	Jenjang	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01.00	APSSD/MI	0,061	0	0,03	0,08	0,12	2,11
02.00	APSSMP/MTs	0,14	0	0,01	0,08	0,12	6,92

Sumber: LKPJ Kab.Ende Tahun 2024

d) Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Hasil pendidikan merupakan hasil yang diperoleh dari adanya proses belajar-mengajar sebagai bagian dari proses pendidikan, yang dapat ditunjukkan dari jumlah penduduk yang berhasil tamat atau jumlah lulusan menurut jenjang pendidikan tertentu. Data Susenas menunjukkan pada Tahun 2022 di Kabupaten Ende masih banyak penduduk yang tidak punya ijazah yaitu sebanyak 23,61%.

Tabel. 2.24. Persentase Penduduk Kabupaten Ende Berumur 10 Tahun Ke Atas
Menurut Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki, 2015 – 2022

No.	Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tidak Punya	30,01	34,81	31,77	33,39	25,00	28,30	25,82	23,61
2	Sekolah Dasar	28,02	30,77	26,38	30,29	27,70	26,53	25,76	25,81
3	SMP	13,42	9,81	15,80	13,98	13,52	16,74	17,66	20,72
4	SMA dan SMK	14,87	16,60	17,31	15,29	23,02	19,68	19,44	17,73
5	Diploma I/II	0,60	0,78	0,90	0,41	0,26	0,43	0,45	0,57
6	Diploma III	2,15	0,91	1,60	1,21		1,26	2,15	1,96
7	Diploma IV/S1/S2/S3	6,95	6,34	6,24	5,48	0,82	7,06	8,73	8,89

Sumber : BPS, Ende Dalam Angka

e) Angka Kematian Bayi (AKB)

Batas toleransi angka kematian neonatal (bayi 0-28 hari) sebesar 3,43 per 1000 kelahiran hidup (38 orang bayi yang meninggal kurang dari 0-28 hari dari 3.656 jumlah kelahiran hidup). Capaian target tahun 2024 sebesar 10,12 per 1000 kelahiran hidup. Angka ini menunjukkan bahwa kematian sangat tinggi pada masa neonatal dari batas toleransi dan sangat perlu dilakukan pengawasan dan intervensi.

Tabel 2. 19 Angka Kematian Bayi Kabupaten Ende Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Angka Kematian Bayi
1	2020	13
2	2021	23
3	2022	51

No.	Tahun	Angka Kematian Bayi
4	2023	23
5	2024	12

Sumber: Kabupaten Ende Dalam Angka 2025

Faktor penyebab kematian bayi antara lain gangguan pernafasan dan jantung, kurangnya asupan gizi bayi selama dalam kandungan yang menyebabkan berat badan lahirrendah, kelainan konginetal pada bayi dan komplikasi kehamilan.

f) Prevelensi Balita Gizi Buruk

Balita Gizi buruk adalah balita yang dengan berat badan dibawah garis merah pada KMS (Kartu Menuju Sehat). Pada tahun 2022 terdapat 696 balita yang mengalami gizi buruk, dengan 221 balita atau 31,75% terdapat di kecamatan Nangapanda disusul 98 balita atau 14,08 % dikecamatan Wewaria. Pada tahun 2023 balita gizi buruk terus meningkat sebanyak 713 balita mengalmi Gizi.

Tabel 2.22. Jumlah Balita Gizi Buruk Menurut Kecamatan di Kabupaten Ende Tahun 2022-2023

Kecamatan	2022	2023
010. Nangapanda	221	35
011. Pulau Ende	7	2
012. Maukaro	19	40
020. Ende	8	55
030. Ende Selatan	25	65
031. Ende Timur	43	88
032. Ende Tengah	29	37
033. Ende Utara	12	46
040. Ndona	26	53
041. Ndona Timur	3	6
050. Wolowaru	34	26
051. Wolojita	28	29
052. Lio Timur	11	10
053. Kelimutu	-	-
054. Ndori	5	8
060. Maurole	13	45
061. Kotabaru	33	40
062. Detukeli	47	13
063. Lepembusu Kelisoke	23	11
070. Detusoko	11	27
071. Wewaria	98	77
Kabupaten Ende	696	713

Sumber: BPS, Kabupaten Ende

g) Angka Kematian Ibu Melahirkan

Kasus kematian ibu adalah jumlah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan dan nifas. Khusus pada indikator ini kematian ibu yang terjadi sebagai akibat dari kelainan atau resiko kehamilan, persalinan dan nifas. Pada tahun 2022 kasus kematian ibu yang terjadi sebanyak 10 kasus dan tahun 2023 sebanyak 8 kasus.

h) Angkatan Kerja

Pada Tahun 2024, total jumlah penduduk usia kerja (PUK) di Kabupaten Ende adalah sebanyak 212.412 orang dengan rincian 164.186 orang angkatan kerja dan 48.226 orang bukan angkatan kerja. Lebih dari 50% dari total PUK adalah perempuan, sedangkan sisanya PUK berjenis kelamin laki-laki.

Tabel. 2.25. Angka Kerja di Kabupaten Ende Tahun 2019-2024

Kegiatan Seminggu Yang Lalu	Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Seminggu yang lalu dan Jenis Kelamin											
	Laki - laki						Perempuan					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Angkatan kerja	68.46	75.079	79.375	77.222	77.838	84.185	68.813	71.997	79.258	77.842	78.665	80.001
a. Bekerja	66.676	72.994	77.369	75.595	76.435	82.527	66.505	69.743	77.13	76.276	76.013	78.287
b. Pengangguran	1.784	3.085	2.006	1.627	1.403	1.685	2.308	2.254	2.128	1.566	2.653	1.714
2. Bukan Angkatan Kerja	19.14	18.636	14.732	17.267	23.274	18.426	35.168	37.936	31.127	33.958	29.751	29.8
a. Sekolah	8.199	6.211	5.902	8.61	10.369	6.711	9.856	8.495	5.872	8.555	9.213	7.225
b. Mengurus Rumah Tangga	4.181	6.006	3.466	3.331	4.275	2.819	21.445	26.833	21.686	20.82	17.073	18.43
c. Lainnya	6.76	6.419	5.364	5.326	8.63	8.806	3.802	2.608	3.569	3.583	3.465	4.146
Jumlah	87.6	93.715	94.107	94.489	101.112	102.611	103.981	109.933	110.385	110.8	108.416	109.801

Sumber: BPS, Kabupaten Ende Dalam Angka 2025

Tabel 2.2. Komposisi Penduduk Kabupaten Ende yang Bekerja Kerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2022

Lapangan Usaha	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Usaha Utama							
	Laki-laki				Perempuan			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30.476	34.448	34.448	36.294	16.927	27.650	34.448	36.294
Pertambangan dan Penggalian	722	1.128	11.479	12.828	662	745	11.479	12.828
Industri Pengolahan	4.971	27.067	5.418	26.473	20.932	20.870	5.418	26.473
Listrik, Gas, dan Air	469	72.994	367	75.595	124	69.743	367	75.595
Konstruksi	6.645	5.323	6.088	6.620	-	-	6.088	6.620
Perdagangan Besar, Eceran Penyediaan Makan dan Minum	8.523	10.599	9.450	7.705	7.389	8.532	9.450	7.705
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	6.985	6.407	6.418	7.749	517	324	6.418	7.749
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	833	1.857	2.072	348	384	1.306	2.072	548

Lapangan Usaha	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Usaha Utama							
	Laki-laki				Perempuan			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Jasa Kemsosyarakatan	7.052	8.204	7.677	10.471	9.370	10.708	7.677	10.471
Jumlah	66.676	72.994	77.369	75.595	66.505	69.743	77.369	75.595

Data Sakernas juga menunjukkan bahwa dari keseluruhan Angkatan Kerja pada Tahun 2022 sebagian besar menekuni sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebanyak 48,01% yang sedikit mengalami peningkatan, diikuti sektor yang lain seperti sektor Industri Pengolahan yang mengalami peningkatan cukup besar dibanding tahun 2021.

i) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

TPAK diperoleh dengan cara membandingkan antara jumlah Angkatan Kerja (AK) dan Penduduk Usia Kerja (PUK). TPAK di Kabupaten Ende secara keseluruhan pada Tahun 2019–2024 mengalami fluktuasi. Dari Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 data menunjukkan bahwa TPAK Kabupaten Ende selalu mengalami peningkatan hanya saja pada Tahun 2023 mengalami penurunan dari 74,69% ditahun 2024 menjadi 281,37%.

Tabel. 2.27. Tingkat Partisipasi Angka Kerja di Kabupaten Ende Tahun 2019-2024

Jenis kelamin	TPAK (persen)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-laki	80,12	80,11	79,37	81,73	76,98	82,527
Perempuan	66,51	65,49	79,13	70,25	72,566	78,287
L+P	71,65	72,22	75,40	75,53	74,69	281,37

Sumber :Kabupaten Ende dalam Angka 2024

j) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah rasio antara jumlah penganggur terbuka terhadap angkatan kerja. Data BPS mengindikasikan angka TPT di Kabupaten Ende sebesar 2,59 pada keadaan Tahun 2023, dan meningkat menjadi 3,02% di Tahun 2024. Secara umum, angka pengangguran yang relative rendah (di bawah 10%) tidak bisa dijadikan indicator bahwa tidak ada masalah dalam pasar kerja.

Tabel. 2.28. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Ende

Tahun 2019-2024

Jenis kelamin	TPT (persen)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-laki	1,99	1,42	2,00	02,11	1,80	1,654
Perempuan	3,87	1,53	2,12	20,01	3,37	1,714
L+P	2,98	2,95	2,01	2,06	2,59	3,02

Sumber : BPS, Sakernas 2019-2023, Kabupaten Ende dalam Angka 2025

k) Gender

1) Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Kesetaraan gender dalam pembangunan manusia adalah terpenuhinya hak dasar yang setara bagi laki-laki maupun Perempuan. Hak dasar yang dimaksud di antaranya terpenuhinya pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan dan lingkungan sosial yang layak. Dengan hak dasar yang setara ini, laki-laki dan Perempuan memiliki hak yang sama dalam meningkatkan kapabilitasnya dalam menciptakan pembangunan sosial ekonomi suatu negara. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Ende telah mencapai target nasional, dimana IPG Kabupaten Ende tahun 2024 sebesar 96,35 melebihi dari target nasional sebesar 91,17. IPG Kabupaten Ende dapat dilihat pada tabel berikut.

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Ende Tahun 2020-2024

Tahun	Indeks Pembangunan Gender
2020	95,64
2021	95,81
2022	96,20
2023	96,17
2024	96,35

Sumber: SiGA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2) Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pemuda di Indonesia. IPP terdiri dari komponen pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, gender dan diskriminasi. Indeks Pembangunan Pemuda (Youth Development Index - YDI) adalah suatu ukuran yang dirancang untuk menilai status pembangunan pemuda. Tujuan dari indeks ini adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam kebijakan pemuda serta mendorong perbaikan melalui data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, YDI berfungsi sebagai alat penting bagi pembuat kebijakan untuk mengarahkan sumber daya dan inisiatif dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan potensi

pemuda. Indeks Pembangunan Pemuda dihitung oleh Kementerian Pemuda Olahraga yang dihitung untuk tingkat provinsi, sedangkan kabupaten tidak dihitung. Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi NTT tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2. 31 Indeks Pembangunan Pemuda di Provinsi NTT

tahun 2020-2022

Tahun	Indeks Pembangunan Pemuda
2020	52,17
2021	52,83
2022	54,33

Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2020-2022

3) Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam bersaing untuk mewujudkan kesejahteraan dan keberlanjutan dengan tetap terbuka terhadap persaingan dengan daerah sekitarnya, nasional dan internasional. Daya saing daerah mencakup beberapa aspek yang menjadi tolak ukur antara lain yaitu aspek ekonomi, infrastuktur, sumber daya manusia dan iklim investasi. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) setiap tahun rutin melaksanakan pengukuran terhadap Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dengan 4 komponen dan 12 pilarnya. Berdasarkan data publikasi BRIN, skor IDSD Kabupaten Ende tahun 2023 sebesar 2,98 dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 3,38.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a) Pendidikan

1. Rata-rata Kompetensi Literasi SD

Berdasarkan Rapor Pendidikan Tahun 2024 (<https://rapor.pendidikan.kemdikbud.go.id>), rata-rata kompetensi literasi pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada Tahun 2023 yakni 1,46, yang merupakan nilai kemampuan literasi SD hasil Asesmen Nasional Tahun 2023. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indikator RPJMD 2019–2024 Tahun 2024 yaitu 1,91 maka telah mencapai 76,44% dari target yang

telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa rata-rata kompetensi literasi SD masih dibawah kompetensi minimum, yakni dengan angka 2 dari skala 3.

2. Rata-rata Kompetensi Literasi SMP

Berdasarkan Rapor Pendidikan Tahun 2024 (<https://rapor.pendidikan.kemdikbud.go.id>), rata-rata kompetensi literasi pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Tahun 2023 yakni 1,56, yang merupakan nilai kemampuan literasi SMP hasil Asesmen Nasional Tahun 2023. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indikator RPJMD 2019 – 2024 Tahun 2024 yaitu 2,05 maka telah mencapai 76,10% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa rata-rata kompetensi literasi SMP masih dibawah kompetensi minimum, yakni dengan angka 2 dari skala 3.

3. Rata-rata Kompetensi Numerasi SD

Berdasarkan Rapor Pendidikan Tahun 2024 (<https://rapor.pendidikan.kemdikbud.go.id>), rata-rata kompetensi numerasi pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada Tahun 2023 yakni 1,10, yang merupakan nilai kemampuan literasi SD hasil Asesmen Nasional Tahun 2023. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indikator RPJMD 2019 – 2024 Tahun 2024 yaitu 1,74 maka baru mencapai 63,09% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa rata-rata kompetensi numerasi SD masih dibawah kompetensi minimum, yakni dengan angka 2 dari skala 3.

4. Rata-rata Kompetensi Numerasi SMP

Berdasarkan Rapor Pendidikan Tahun 2024 (<https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id>), rata-rata kompetensi numerasi pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Tahun 2023 yakni 1,34, yang merupakan nilai kemampuan Numerasi SMP hasil Asesmen Nasional Tahun 2023. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indikator RPJMD 2019 – 2024 Tahun 2024 yaitu 2,06 maka baru mencapai 65,05% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa rata-rata kompetensi numerasi SMP masih dibawah kompetensi minimum, yakni dengan angka 2 dari skala 3.

5. Rata-rata Indeks Karakter SD

Berdasarkan Rapor Pendidikan Tahun 2024 (<https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id>), rata-rata indeks karakter pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada Tahun 2023 yakni 1,66, yang merupakan indeks karakter SD hasil Asesmen Nasional Tahun 2023. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indikator RPJMD 2019 – 2024 Tahun 2024 yaitu 2,39 maka baru mencapai 69,46% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa rata-rata Indeks Karakter SD telah berada di kategori berkembang.

6. Rata-rata Indeks Karakter SMP

Berdasarkan Rapor Pendidikan Tahun 2024 (<https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id>), rata-rata indeks karakter pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Tahun 2023 yakni 1,63, yang merupakan indeks karakter SMP hasil Asesmen Nasional Tahun 2023. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indikator RPJMD 2019 – 2024 Tahun 2024 yaitu 2,38 maka baru mencapai 68,49% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa rata-rata Indeks Karakter SMP telah berada di kategori berkembang.

7. Presentasi siswa yang mengikuti Pendidikan Usia Dini (PAUD)

Presentasi siswa yang mengikuti Pendidikan Usia Dini (PAUD) pada jenjang PAUD pada Tahun 2024 yaitu 73,65%. Ini merupakan hasil perbandingan dari jumlah siswa jenjang PAUD sebanyak 6408 orang terhadap jumlah anak usia 5-6 tahun di Kabupaten Ende sebanyak 8701 orang. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indikator RPJMD 2019-2024 Tahun 2024 yaitu 94,20%, maka mencapai 78,18% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa masih terdapat anak usia 5-6 tahun yang belum mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

8. Rasio Ketersediaan Sekolah berbanding Penduduk Usia Sekolah untuk SD/MI

Rasio Ketersediaan Sekolah berbanding Penduduk berusia Sekolah pada jenjang SD pada Tahun 2024 yaitu 106,80 sekolah melayani 10.000 penduduk usia sekolah SD/MI, merupakan hasil perbandingan dari 333 sekolah SD/MI terhadap Jumlah Penduduk Usia 7-12 sebanyak 31.180 orang. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan

dengan target yang telah ditetapkan pada indicator Perubahan RPJMD 2019-2024 Tahun 2024 yaitu 107,53 SD per 10.000 penduduk, maka mencapai 99,32% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa penduduk berusia 7 hingga 12 tahun dapat ditampung dan mengenyam pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar.

9. Rasio Ketersediaan Sekolah berbanding Penduduk Usia Sekolah untuk SMP/MTs

Rasio Ketersediaan Sekolah berbanding Usia Sekolah untuk jenjang SMP/MTs pada Tahun 2024 yaitu 53,95 SMP per 10.000 penduduk. Ini merupakan hasil perbandingan dari Jumlah SMP sebanyak 90 dengan 10.000 penduduk terhadap Jumlah Penduduk Usia 13-15 sebanyak 16.683 orang. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indikator Perubahan RPJMD 2019-2024 Tahun 2024 yaitu 50,11 SMP per 10.000 penduduk, maka mencapai 107,66% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa penduduk berusia 13 hingga 15 tahun dapat ditampung dan mengenyam pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama.

10. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI pada tahun 2024 sebesar 96,31%, yang merupakan hasil perbandingan dari Jumlah siswa SD/MI sebanyak 30.030 dengan Jumlah Penduduk Usia SD (7-12 tahun) sebanyak 31.180 orang. Angka tersebut di atas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indicator Perubahan RPJMD 2019-2024 Tahun 2024 sebesar 108%, maka telah mencapai 89,18% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini walaupun tidak mencapai target tapi menggambarkan bahwa banyak anak usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang Sekolah Dasar.

11. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs

Angka Partisipasi Kasar pada jenjang SMP/MTs pada tahun 2024 yaitu 85,36%, yang merupakan hasil perbandingan dari jumlah siswa SMP sebanyak 14.241 orang dengan jumlah usia jenjang pendidikan SMP sebanyak 16.683 orang. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indicator Perubahan RPJMD 2019-2024 Tahun 2023 yaitu 84,63%, atau telah mencapai 100,87% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa

banyak anak usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang Sekolah Menengah Pertama.

12. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Paket A

Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SD/MI/Paket A pada tahun 2024 yaitu 92,60%, yang merupakan hasil perbandingan dari Jumlah Siswa SD yang Berusia 7-12 tahun sebanyak 28.873 orang terhadap Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun sebanyak 31.180 orang. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indicator Perubahan RPJMD 2019-2024 Tahun 2024 yaitu 98,59%, maka telah mencapai 93,93% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa 93,93% anak usia SD yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan Sekolah Dasar.

13. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SMP/MTs/Paket B pada tahun 2024 yaitu 82,53%, yang merupakan hasil perbandingan dari Jumlah Siswa SMP Usia 13-15 Tahun sebanyak 13.769 orang dengan Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun sebanyak 16.683 orang. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indicator Perubahan RPJMD 2019-2024 Tahun 2024 yaitu 75,70%, maka telah mencapai 109,03%. Pencapaian ini menggambarkan bahwa 109,03% anak usia SMP yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

14. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A

Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada jenjang SD/MI pada tahun 2024 yaitu 91,22%, yang merupakan hasil perbandingan dari jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang sekolah dasar sebanyak 28.443 orang terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 31.180 orang. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indicator Perubahan RPJMD 2019-2024 Tahun 2024 yaitu 96,91% maka mencapai 94,13% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa 94,13% penduduk usia 7-12 Tahun mengenyam pendidikan atau bersekolah di jenjang satuan pendidikan sekolah dasar.

15. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B

Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada jenjang SMP/MTs/Paket B pada tahun 2024 yaitu 74,48%, yang merupakan hasil perbandingan dari jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang sekolah menengah pertama sebanyak 12.426

orang terhadap jumlah penduduk usia 13- 15 tahun sebanyak 16.683. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indicator Perubahan RPJMD 2019-2024 Tahun 2024 yaitu 91,69% makamencapai 81,23% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa 81,23% penduduk usia 13-15 Tahun mengenyam pendidikan atau bersekolah di jenjang satuan pendidikan sekolah menengah pertama.

15. Angka Melanjutkan dari SD/MIkeSMP/MTs

Angka Melanjutkan dari jenjang SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2024 yaitu 90,61%, yang merupakan hasil perbandingan dari Jumlah Siswa Tingkat 1/Kelas 7 Jenjang SMP sebanyak 4.845 orang terhadap Jumlah Lulusan SD pada Tahun 2024 sebanyak 5.347 orang . Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indicator perubahan RPJMD 2019-2024 Tahun 2023 yaitu 100% maka mencapai 90,61% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa 90,61% siswa SD yang melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP.

16. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

Angka Putus Sekolah (APS) pada jenjang SD/MI pada tahun 2024 yaitu 2,11%, yang merupakan hasil perbandingan dari Jumlah Siswa SD yang Putus Sekolah sebanyak 635 orang dengan Jumlah Siswa SD/MI sebanyak 30.030 orang. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indikator Perubahan RPJMD 2019-2024 Tahun 2024 yaitu 0%, maka belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun secara jumlah belum tercapai karena masih terdapat 635 murid SD yang putus sekolah.

17. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

Angka Putus Sekolah (APS) pada jenjang SMP/MTs pada tahun 2024 yaitu 6,92%, yang merupakan hasil perbandingan dari Jumlah Siswa SMP yang Putus Sekolah sebanyak 986 orang dengan Jumlah Siswa SMP/MTs sebanyak 14.241 orang. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indicator perubahan RPJMD 2019-2024 Tahun 2024 yaitu 0%, maka belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun secara jumlah belum tercapai karena masih terdapat 986 murid SMP yang putus sekolah.

a. Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

i. Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2024 yaitu 88,35%, yang merupakan hasil perbandingan dari jumlah Guru SD yang berpendidikan S1/D4 sebanyak 2.654 orang terhadap jumlah seluruh Guru SD sebanyak 3.004 orang. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indicator perubahan RPJMD 2019-2024 Tahun 2024 yaitu 85,99%, maka mencapai 102,74% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa guru jenjang pendidikan Sekolah Dasar yang belum memenuhi standar minimal berpendidikan S1/D4 yakni sebesar 11,65%.

2. Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2024 yaitu 94,97%, yang merupakan hasil perbandingan dari jumlah Guru SMP yang berpendidikan S1/D4 sebanyak 1.266 orang terhadap jumlah seluruh Guru SMP sebanyak 1.333 orang. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indicator perubahan RPJMD 2019-2024 Tahun 2024 yaitu 97,42%, maka mencapai 97,49% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa guru jenjang pendidikan Sekolah Dasar yang belum memenuhi standar minimal berpendidikan S1/D4 yakni sebesar 5,03%.

3. Tenaga Kependidikan SD/MI yang Mengikuti Diklat Kompetensi

Tenaga Kependidikan SD/MI yang Mengikuti Diklat Kompetensi pada tahun 2024 yaitu 0%, yang merupakan perbandingan jumlah tenaga kependidikan jenjang SD yang telah mengikuti Diklat Kompetensi sebanyak 0 (nol) orang dengan jumlah seluruh tenaga kependidikan jenjang SD sebanyak 305 orang . Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indicator perubahan RPJMD 2019-2024 Tahun 2024 yaitu 37,18%, maka belum memenuhi target yang ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja program ini sebesar 0% karena tidak tersedia data tenaga kependidikan yang mengikuti Diklat Kompetensi, selain itu belum ada kegiatan Diklat Kompetensi yang ditujukan untuk tenaga kependidikan jenjang SD.

4. Tenaga Kependidikan SMP yang Mengikuti Diklat Kompetensi

Tenaga Kependidikan SMP/MTs yang Mengikuti Diklat Kompetensi pada tahun 2024 yaitu 0%, yang merupakan perbandingan jumlah tenaga kependidikan jenjang SMP yang telah mengikuti Diklat Kompetensi

dengan jumlah seluruh tenaga kependidikan jenjang SMP. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indicator perubahan RPJMD 2019-2024 Tahun 2024 yaitu 37,18%, maka belum memenuhi target yang ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja program ini sebesar 0% karena tidak tersedia data tenaga kependidikan yang mengikuti Diklat Kompetensi, selain itu belum ada kegiatan Diklat Kompetensi yang ditujukan untuk tenaga kependidikan jenjang SMP.

5. Rasio Guru berbanding Murid SD/MI

Rasio Guru berbanding Murid pada jenjang SD/MI pada tahun 2024 yaitu 672,99/10.000 siswa SD/MI, yang merupakan hasil perbandingan dari 2.021 Guru SD/MI terhadap jumlah seluruh siswa SD/MI sebanyak 30.030 orang. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indicator Perubahan RPJMD 2019-2024 Tahun 2024 yaitu 977,94/10.000, maka mencapai 68,82% dari target yang ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja program ini menggambarkan untuk 10.000 murid SD dilayani oleh 672 orang guru PNS.

6. Rasio Guru berbanding Murid SMP/MTs

Rasio Guru berbanding Murid pada jenjang pendidikan SMP/MTs pada tahun 2024 yaitu 664,98/10.000 siswa SMP/MTs, yang merupakan hasil perbandingan dari 947 GuruSMP/MTs terhadap 14.241 siswa SMP/MTs. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indicator perubahan RPJMD 2019-2024 Tahun 2024 yaitu 746,93/10.000, maka baru mencapai 89,03% dari target yang ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja programini menggambarkan untuk 10.000 murid SMP dilayani oleh 664 orang guru PNS.

Tabel 3.3. Ringkasan Capaian Indikator RPJMD Urusan Pendidikan

No.	Indikator Kinerja Program	Data Awal Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target (%)	Target Akhir RPJMD 2024
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1	Rata-rata Kompetensi Literasi SD	0	1,91	1,46	76,44%	1,91
2	Rata-rata Kompetensi Literasi SMP	0	2,05	1,56	76,10%	2,05
3	Rata-rata Kompetensi Numerasi SD	0	1,74	1,10	63,22%	1,74

4	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMP	0	2,06	1,34	65,05%	2,06
5	Rata-rata Kompetensi Karakter SD	0	2,39	1,66	69,46%	2,39
6	Rata-rata Kompetensi Karakter SMP	0	2,38	1,63	68,49%	2,38
7	Persentase Siswa yang Mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD)	60,86%	94,20%	73,65%	78,18%	94,20%
8	Rasio Ketersediaan Sekolah Berbanding Penduduk Usia Sekolah SD/MI	110,00	107,53	105,80	99,32%	107,53
9	Rasio Ketersediaan Sekolah Berbanding Penduduk Usia Sekolah SMP/MTs	54,00	50,11	53,95	107,66%	50,11
10	APK SD/MI	104%	108%	96,31%	89,18%	108%
11	APK SMP/MTs	85%	84,63%	85,36%	100,87%	84,63%
12	APM SD/MI	90,86%	98,59%	92,60%	93,93%	98,59%
13	APM SMP/MTs	90,86%	75,70%	82,53%	109,03%	98,59%
14	APS SD/MI	93,55%	96,91%	91,22%	94,15%	96,91%
15	APS SMP/MTs	79,87%	91,69%	74,48%	81,23%	91,69%
16	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP	89,36%	100,00%	90,61%	90,61%	100,00%
17	Angka Putus Sekolah SD	0,00%	0,00%	2,11%	#DIV/0!	0,00%
18	Angka Putus Sekolah SMP	0,00%	0,00%	6,92%	#DIV/0!	0,00%
19	Guru SD yang berkualifikasi Si/D4	70,99%	85,99%	88,35%	102,74%	85,99%
20	Guru SMP yang berkualifikasi Si/D4	82,42%	97,42%	94,97%	97,49%	97,42%
21	Tenaga Kependidikan SD yang mengikuti Diklat Kompetensi	14,50%	47,61%	0,00%	0,00%	47,61%
22	Tenaga Kependidikan SMP yang mengikuti Diklat Kompetensi	8,49%	37,18%	0,00%	0,00%	37,18%
23	Rasio Guru Berbanding Murid SD/MI	978,00	977,94	672,99	68,82%	977,94
24	Rasio Guru Berbanding Murid SMP	917,00	746,93	664,98	89,03%	746,93
25	Presentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	4,23%	25,35%	45,94%	181,21%	25,35%

26	Percentase Pengembangan Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	39,13%	78,26%	100,00%	92,78%	78,26%
27	Cakupan Cagar Budaya setiap Daerah yang Dilestarikan	95,24%	100,00%	57,39%	57,39%	100,00%

2. Kesehatan

1.) Presentase Ketersediaan Obat dan Vaksin

Presentase Ketersediaan Obat dan Vaksin dipelayanan Kesehatan (Puskesmas) pada tahun 2024 adalah 40 Paket, Capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100% atau sebanyak 26 Puskesmas memiliki 40 Paket Obat Esensial. Ini menunjukan bahwa jumlah ketersedian Obat dan Vaksin pada Puskesmas dalam kondisi yang baik dan tercukupi untuk Obat Esensialnya.

2.) Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif

Target jumlah pelayanan kesehatan usia produktif pada tahun 2024 sebesar 100%. Usia produktif yang dilayani dalam periode tahun 2024 sebesar 139.460 pasien dari 179.423 total usia produktif di Kabupaten Ende, sehingga capaian pelayanan kesehatan usia produktif tahun 2024 sebesar 77,73%.

3.) Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan settingkat

Target jumlah murid SD dan settingkatnya yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi (97,36%) dari 44.143 orang jumlah murid SD dan settingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih dari total 42.977 orang jumlah murid SD dan settingkat. Dari realisasi tersebut, cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan settingkat belum semua diperiksa.

4.) Cakupan Kepesertaan JKN

Data tahun 2024 menunjukan data dari segmen kepesertaan JKN adalah 281.658 jiwa dengan jumlah penduduk Kabupaten Ende pada tahun 2024 adalah 279.368 jiwa (100,82%), angka ini menjadikan cakupan kepesertaan JKN tahun 2024.

5.) Cakupan Faskes Terakreditasi

Pada tahun 2024 Semua Faskes yang ada di kabupaten Ende sudah terakreditasi.Total ada 26 puskesmas dan 1 RS Pratama atau sebesar 100%, berikut table jenis kategori akreditasi:

NO	PUSKESMAS	STATUSAKREDITASI
1.	Kota Ende	Utama
2.	Rukun Lima	Paripurna
3.	Wolowaru	Utama
4.	Moni	Utama
5.	Kotaratu	Madya
6.	Wolojita	Madya
7.	Ahmad Yani	Paripurna
8.	Saga	Utama
9.	Roga	Madya
10.	Watuneso	Paripurna
11.	Maurole	Madya
12.	Watunggere	Utama
13.	Loboniki	Madya
14.	Detusoko	Utama
15.	Ndetundora	Utama
16.	Riaraja	Paripurna
17.	Nangapanda	Utama
18.	Onekore	Paripurna
19.	Maukaro	Utama
20.	Rewarangga	Madya
21.	Pelbenga	Paripurna
22.	Ngalupolo	Paripurna
23.	Welamosa	Utama
24.	Kotabaru	Utama
25.	Maubasa	Utama
26.	Mukusaki	Madya
27.	RS Kelas D Pratama Tanali	Paripurna

6.) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Target pelayanan masyarakat miskin di Kabupaten Ende 100%. total pelayanan masyarakat miskin dan pelayanan rujukan di Kabupaten Ende tahun 2024 adalah 773 orang, yang tersebar di 26 puskesmas. Cakupan pelayanan masyarakat miskin pada tahun 2024 yaitu 100% (773 total pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin dari 773 total jumlah masyarakat miskin)

7.) Presentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Dasar Pekerja

Pada tahun 2024 semua puskesmas di Kabupaten Ende melaksanakan atau menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar pekerja, jadi cakupannya 100% dari target 95% yang ditetapkan di tahun 2024.

8.) Jumlah Pos UKK disetiap Wilayah Puskesmas

Target jumlah Pos UKK tahun 2024 sebesar 100%, atau sebanyak 234 Pos UKK pada tahun 2024 terdapat 234 Pos UKK (Pos Upaya Kesehatan Kerja) yang tersebar di 26 puskesmas dan 278 desa/kelurahan di Kabupaten Ende(100%).

9.) Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Dasar Kelompok Olahraga

Target puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan dasar kelompok olahraga tahun 2024 sebesar 75%. pada tahun 2024 semua puskesmas di Kabupaten Ende sudah melaksanakan atau menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar kelompok olahraga, sehingga cakupannya 100% (26 puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan dasar kelompok olahraga dari 26 puskesmas).

10.) Presentase Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi (Obat, Makanan, Kosmetik)

Target sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi tahun 2024 sebesar 75% dengan realisasi 79,73 % dimana 59 sarana produksi yang memenuhi syarat dari jumlah seluruh sarana sebanyak 74.Hal ini menunjukan bahwa sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi belum mencapai target sehingga perlu ditingkatkan pengawasan.

11.) Cakupan RumahTangga yang ber-PHBS

Target Rumah Tangga yang ber-PHBS tahun 2024 sebesar 44,50% dengan realisasi 51,61 % dimana terdapat 25.687 rumah tangga ber-PHBS dari jumlah total seluruh sebanyak 49.773 rumah tangga. Hal ini

menunjukkan bahwa cakupan Rumah Tangga yang ber-PHBS belum mencapai target yang telah ditetapkan dan perlu dilakukan upaya peningkatan cakupan.

12.) Cakupan SDM yang Mempromosikan Kesehatan

Target Sekolah Dasar/Madrasah yang mempromosikan kesehatan tahun 2024 sebesar 97,70% dengan realisasi 100% dimana dari jumlah seluruh 348 stratasemuanya dilakukan promosi kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan SD/MI yang mempromosikan kesehatan sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

13.) Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapatkan Perawatan

Target Sekolah Dasar/Madrasah yang mempromosikan kesehatan tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi 100% dimana dari 600 strata semuanya dilakukan promosi kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan SD/MI yang mempromosikan kesehatan sudah mencapai target yang telah ditetapkannya itu Jumlah Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Sarana Pelayanan Kesehatan di Satu Wilayah Kerja pada Kurun Waktu Tertentu/jumlah Seluruh Balita Gizi Buruk yg ditemukan di Satu Wilayah Kerja dalam Waktu yg sama.

14.) Presentase Balita Gizi Buruk

Pada tahun 2024 dari total balita yaitu 18.259 jiwa, terdapat 600 balita yang mengalami gizi buruk atau (3,29%), Hal ini menunjukkan bahwa kasus gizi burukmelebihi batas toleransi yaitu 0,46% dan tidak semua balita gizi buruk dilayani atau mendapatkan penanganan. Hal ini harus tetap menjadi perhatian dan membutuhkan pengawasan serta intervensi secara berkala.

15.) Prevalensi Balita Gizi Kurang

Target jumlah balita dengan gizi buruk tahun 2024 sebesar 14,09% dengan realisasi sebesar 22,51% (4.110 orang balita gizi buruk dari total 18.259 balita dengan gizi buruk). Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2024 tidak semua balita gizi kurang dilayani atau mendapatkan penanganan. Hal ini harus tetap menjadi perhatian dan membutuhkan pengawasan serta intervensi secara berkala.

16.) Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pad aBaduta

Target jumlah balita dengan gizi kurang tahun 2024 sebesar 16,81% dengan realisasi sebesar 4,24% (269 baduta gizi kurang dari total 6.348 baduta).

Hal ini menunjukkan kasus gizi kurang tidak mencapai target dan tidak melewati batas toleransi Jumlah Baduta pendek dan sangat pendek / jumlah Baduta yang ditimbang dan diukur.

17.) Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita

Angka prevalensi stunting pada bayilima tahun (BALITA) mencapai 7,77% (1319 balita Pendek dan sangat Pendek dari total 16.985 balita yang ditimbang). Angka ini tidak melewati batas toleransi yang ditargetkan pada stunting balita yaitu 18 %.

18.) Jumlah Desa yang Melaksanakan STBM

Dari total desa 279 yang sudah melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat adalah 275 desa (98,57%) yang tersebar di 21 kecamatan. Hal ini menunjukkan desa yang melaksanakan STBM sudah ada peningkatan dan sudah mencapai target yang telah ditetapkan yakni 92,80% di tahun 2024.

19.) Meningkatnya Sarana Air Minum yang Memenuhi Syarat

Target jumlah sarana air minum yang memenuhi syarat tahun 2024 sebesar 64,30% dengan realisasi 86,13% (21.747 jumlah sarana air minum yang diperiksa dan memenuhi syarat kesehatan dari total 25.250 jumlah seluruh sarana air minum).

20.) Meningkatnya Sarana Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan/Minuman yang Memenuhi Syarat

Target jumlah sarana sanitasi tempat pengolahan makanan/minuman yang memenuhi syarat tahun 2024 sebesar 97,48% dengan realisasi 98,43% (313 jumlah sarana sanitasi tempat pengolahan makanan/minuman yang memenuhi syarat kesehatan dari total 318 jumlah seluruh sarana sanitasi).

21.) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Target jumlah desa/kelurahan dengan universal child immunization (UCI) tahun 2024 sebesar 99% dengan realisasi sebesar 60,93% (170 desa dari total 279 kelurahan/desa). Hal ini menunjukkan bahwa belum mencapai target dan perlu dipacu untuk jadi perhatian dan intervensi.

22.) Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

Target jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani <24 jam dalam periode tertentu sebesar 100% dengan realisasi tahun 2024 sebesar 0%, hal ini menunjukkan tidak ada desa/kelurahan yang mengalami KLB.

23.) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Target jumlah penemuan penderita penyakit DBD yang ditangani sesuai SOP tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%. Dari total 115 orang Penderita penyakit DBD yang ditemukan, semuanya ditangani sesuai SOP. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kasus DBD di Kabupaten Ende semua diatasi dan mencapai target.

24.) Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani

Target jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani tahun 2024 sebesar 37,50%, sementara hasil penanganan penyakit pneumonia tahun 2024 sebesar 61,08% (700 orang balita pneumonia dari total 1.146 perkiraan balita dengan pneumonia). Hal ini menunjukkan bahwa belum mencapai target dan perlu dilakukan pengawasan dan intervensi.

25.) Presentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak Rubella

Target anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak rubella tahun 2024 sebesar 98% dengan realisasi sebesar 80,25% (63.283 anak yang diimunisasi campak rubella dari total 115.694 jumlah bayi). Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2024 anak yang diimunisasi campak rubella belum mencapai target dan harus mendapat perhatian dan pengawasan.

26.) Tingkat Prevalensi Tuberkulosis

Angka prevalensi tuberculosis mencapai 119 perseratus ribu dimana 556 adalah pasien TBC BTA+ yang ditemukan dan ditangani dari 279.368 jumlah penduduk. Angka ini tidak melewati batas toleransi yang ditargetkan yaitu 466,9 perseratus ribu.

27.) Pelayanan Penderita Orang dengan Resiko HIV/AIDS yang mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai Standar

Target jumlah kasus HIV/AIDS yang diberikan pelayanan sesuai standar pelayanan sebesar 0,004% di tahun 2024. Jumlah orang yang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar sebanyak 58 (0,71%) dari total jumlah orang beresiko koterinfeksi HIV yang ada disatu

wilayah kerja 8.175. Angka ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan belum mencapai target.

28.) Cakupan Penemuan dan Penderita Penyakit Acute Flacite Pralysis (AFP) Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk

Target jumlah penemuan kasus AFP Non Polio tahun 2024 sebesar 29% yaitu 29.083 kasus dari 100.000 penduduk. Pada tahun 2024 tidak ada kasus non polio AFP yang ditemukan.

29.) Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Target jumlah pelayanan penderita hipertensi pada tahun 2024 sebesar 100%. Penderita hipertensi yang dilayani dalam periode tahun 2024 sebesar 104,35% yaitu total pasien hipertensi yang dilayani 10.323 dari 9.893 total penderita hipertensi di Kabupaten Ende.

30.) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita (Pasien Baru) Penyakit TBCBTA+

Target jumlah penemuan baru penderita TBC BTA+ yang ditemukan dan diobati tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi tahun 2024 sebesar 67,89% (556 orang penderita baru TBC BTA+ yang ditemukan dan diobati dari total 819 orang seluruh penderita TBC BTA+ yang ditemukan). Hal ini menunjukkan bahwa belum mencapai target dan perlu dilakukan pengawasan dan intervensi.

31.) Angka Kejadian Malaria

Target jumlah kasus malaria yang terjadi tahun 2024 sebesar 0,4% dengan realisasi sebesar 0,03% yaitu 8 jumlah penderita malaria positif dari total 279.368 jiwa penduduk.

32.) Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Target jumlah pelayanan penderita diabetes melitus pada tahun 2024 sebesar 90%. Penderita diabetes mellitus yang dilayani dalam periode tahun 2024 sebesar 87,36% yaitu total pasien diabetes mellitus yang dilayani 1.832 dari 2.097 total pasien penderita Diabetes Mellitus di Kabupaten Ende. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan sudah melewati target yang ditentukan.

33.) Cakupan Penderita Diare yang Ditangani

Target jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan tahun 2024 sebesar 47,11%. Capaian target tahun 2024

sebesar 47,20% yaitu 2.131 yang penanganan penderita diare dari jumlah 4.515 total perkiraan penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa belum mencapai target.

34.) Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Target jumlah penderita orang dengan gangguan jiwa berat yang datang dan dilayani di sarana kesehatan tahun 2024 sebesar 92%, capaian target tahun 2024 sebesar 100% yaitu dari total 998 penderita gangguan jiwa berat semuanya dilayani. Hal ini menunjukkan bahwa sudah mencapai target.

35.) Rasio Tenaga Dokter persatuan Penduduk

Ratio dokter yang dimaksud adalah yang memberikan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas. Target rasio dokter tahun 2024 sebesar 0,205 per 1000 penduduk. Pencapaian target tahun 2024 sebesar 0,204% dengan jumlah dokter sebanyak 34 orang dari total jumlah penduduk sebanyak 279.368 pada tahun 2024.

36.) Rasio Tenaga Paramedis

Rasio tenaga paramedis yang dimaksud adalah yang memberikan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas. Target rasio tenaga paramedis tahun 2024 sebesar 2,42 per 1000 penduduk. Pencapaian target tahun 2024 sebesar 2,07 per 1000 dengan jumlah paramedis sebanyak 578 orang dari total jumlah penduduk sebanyak 279.368 pada tahun 2024.

37.) Rasio Puskesmas persatuan Penduduk

Ratio puskesmas terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Ende yaitu 26 : 276.368 jiwa dengan capaianya 0,01/1000 jiwa. Artinya sudah melewati standar, bahwa 1 puskesmas dapat melayani 10.647 jiwa penduduk. Walaupun sudah melebihi standar akan tetapi kendala yang dihadapi adalah letak geografi dari Kabupaten Ende itu sendiri yang membuat akses pelayanan kesehatan menjadi sulit.

38.) Rasio Pustu persatuan Penduduk

Data tahun 2024 menunjukkan bahwa target ratio puskesmas pembantu 0,06 per 1000 penduduk dengan jumlah pustu 53 unit dengan capaianya sebesar 0,20 per 1000. Hal ini menunjukkan bahwa ratio puskesmas pembantu sudah melebihi target dari jumlah puskesmas 26 unit.

39.) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama

Pada tahun 2024 Rumah Sakit Pratama Tanali masih melakukan pelayanan Rawat Jalan, tetapi sedang dibuatkan Perda Retribusi, dan kelengkapan lain untuk bisa melakukan pelayanan Rawat Inap di tahun 2025.

40.) Cakupan Pelayanan Anak Balita

Target jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan sesuai standar minimal 8 kali tahun 2024 sebesar 99% (18.509 balita yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali dari 21.817 jumlah seluruh sasaran anak balita). Capaian target tahun 2024 sebesar 85,91%. Hal ini menunjukkan bahwa Pelayanan Anak Balita belum mencapai target dan perlu dilakukan pengawasan dan intervensi.

41.) Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Target jumlah usia lanjut yang datang dan dilayani di sarana kesehatan tahun 2024 sebesar 98%. Capaian target tahun 2024 sebesar 86,19% yaitu 27.937 orang yang lanjut usia yang datang dandilayani di sarana kesehatan dari jumlah total 32.415 usia lanjut. Angka ini masih kurang dari target yang ditentukan.

42.) Meningkatnya Kualitas Hygiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan/Minuman

Target Kualitas Hygiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan/Minuman tahun 2024 sebesar 100%. Capaian target tahun 2024 sebesar 100% yaitu 367 Tempat Pengolahan Makanan/Minuman yang kualitas hygienenya layak dari total 367 Tempat Pengolahan Makanan/Minuman. Angka ini sudah mencapai target yang ditentukan.

43.) Menurunnya Kasus Kematian Ibu

Batas toleransi tahun 2024 adalah 3 kasus kematian ibu. Jumlah kasus kematian ibu sebanyak 1 kasus, yaitu terdiri dari kematian ibu hamil 1 orang dari total 3.205 ibu hamil yang mendapatkan pelayanan. Untuk tahun 2024 Angka kematian ibu ini termasuk lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2023 dimana angka kematian ibu berjumlah total 8 orang (ibu hamil berjumlah 1 orang dan ibu nifas berjumlah 7 orang).

44.) Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Target Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani pada tahun 2024 adalah 100%. Pencapaian tahun 2024 sebesar 100% dari 92 kasus komplikasi yang ditemukan dan ditangani secara definitif.

45.) Cakupan Pertolongan Persalinan di Faskes oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Target jumlah ibu bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan pada tahun 2024 sebesar 100%. Jumlah ibu bersalin 3.684 dari 3.697 sasaran ibu bersalin. Capaian target tahun 2024 sebesar 99,65%. Dari cakupan tersebut hampir mencapai target yang ditetapkan dan akan terus ditingkatkan dalam pelayanan.

46.) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Target jumlah pelayanan kesehatan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal K4 tahun 2024 sebesar 87,70%. Capaian target tahun 2024 sebesar 62,74% (3.205 orang ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 dari 5.108 sasaran ibu hamil). Hal ini menunjukkan bahwa cakupan kunjungan ibu hamil K4 belum mencapai target yang akan menjadi perhatian serius kedepannya sebab indikator ini merupakan indikator SPM.

47.) Cakupan Pelayanan Ibu Nifas

Target jumlah kunjungan ibu nifas yang telah mendapatkan 3 kali pelayanan nifas sesuai standar sebesar 100% pada tahun 2024. Capaian target tahun 2024 sebesar 101,08% (3.737 ibu nifas mendapat pelayanan 3 kali dari total 3.697 sasaran ibu nifas tahun 2024). Hal ini menunjukkan bahwa cakupan kunjungan ibu nifas sudah mencapai target dan akan dipertahankan progresnya.

48.) Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Batas toleransi angka kelangsungan hidup bayi (berumur kurang dari 1 tahun) pada tahun 2024 sebesar 3,43 per 1000 kelahiran hidup. Capaian tahun 2024 sebesar 0,27 per 1000 kelahiran hidup (1 orang bayi yang meninggal dari 3.656 jumlah kelahiran hidup). Hal ini menunjukkan bahwa angka kelangsungan hidup bayi masih dibawah batas normal dan perlu ditingkatkan sehingga tidak ada lagi bayi yang meninggal.

49.) Angka Kematian Neonatal (Bayi 0-28 hari)

Batas toleransi angka kematian neonatal (bayi 0-28 hari) sebesar 3,43 per 1000 kelahiran hidup (38 orang bayi yang meninggal kurang dari 0-

28 hari dari 3.656 jumlah kelahiran hidup). Capaian target tahun 2024 sebesar 10,12 per 1000 kelahiran hidup. Angka ini menunjukkan bahwa kematian sangat tinggi pada masa neonatal dari batas toleransi dan sangat perlu dilakukan pengawasan dan intervensi.

50.) Pelayanan Kesehatan Neonatus

Target jumlah pelayanan bayi yang memperoleh pelayanan sesuai standar tahun 2024 sebesar (98%) (3.656 orang bayi yang berkunjung untuk memperoleh pelayanan kesehatan 4 kali dan lengkap dari 3.565 jumlah seluruh bayi di Kabupaten Ende). Capaian target tahun 2024 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sudah mencapai target pelayanan kesehatan bayi baru lahir.

51.) Cakupan Pelayanan Bayi

Target pelayanan kesehatan neonatus yang memperoleh pelayanan sesuai standartahun 2024sebesar 100% .Capaian target tahun 2024sebesar 77,31% yaitu 3.674 orang bayi yang berkunjung untuk memperoleh pelayanan kesehatan 4 kali dan lengkap dari 4.752 jumlah sasaran bayi). Hal ini menunjukkan bahwa belum mencapai target pelayanan kesehatan bayibaru lahir lengkap, dan terus dilakukan pengawasan dan intervensi.

52.) Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani

Target jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan sesuai standar sebesar 100% (41 orangbayi dengan komplikasi yang ditangani dari 41 jumlah seluruh bayi dengan komplikasi yang ditangani). Capaian target tahun 2024 sebesar 100% seluruh bayi dengan komplikasi yang ditangani. Hal ini menunjukkan bahwa neonatal dengan komplikasi yang ditangani dan semuanya dilayani dan mencapai target.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

• Pekerjaan Umum

Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum terkait dengan penyediaan prasarana jaringan jalan dan jembatan, drainase dan ketersediaan irigasi teknis.Gambaran kondisi capaian layanan sebagaimana disajikan sebagai berikut.

1) Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40KM/Jam)

Tahun 2024 dikeluarkan Keputusan Buapati Ende Nomor: 199/KEP/HK/2024 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Satusnya sebagai Jalan

Kabupaten di Kabupaten Ende dengan Total Panjang Ruas Jalan Kabupaten 802,059 Km dan kemudian dilakukan Survei Kondisi Jalan, hasil survei panjang jalan dalam kondisi baik 340,096 Km dan pada pekerjaan pembangunan, rekonstruksi dan pemeliharaan jalan bertambah 51,40 Km menjadi 391,50 Km dengan Persentasi 48,81%.

2) Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Tahun 2024 panjang Drainase dalam kondisi baik bertambah 641,28 M menjadi 46.971,98 M dengan persentasi 56,30%. Penambahan panjang Drainase lebih dari Target Akhir RPJMD Perubahan Kabupaten Ende yang ditetapkan 52,88%. Capaian Kinerja Tahun 2024 merupakan perbandingan tararealisasi kinerja tahun 2024 dengan target kinerja tahun 2043 yaitu : $(56,30/52,88) \times 100\% = 106,47\%$ sedangkan capaian kinerja terhadap akhir RPJMD Perubahan adalah perbandingan antara realisasi Tahun 2024 terhadap target akhir RPJMD Perubahan: $(56,30/52,88) \times 100\% = 106,5\%$.

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat Kerja, capaian kinerja tersebut termasuk dalam kategori AA > atau Sangat Memuaskan.

3) Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dalam Aliran Sungai Rawan Longsor

Tahun 2024 Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dalam Aliran Sungai Rawan Longsor bertambah 28 Lokasi menjadi 313 Lokasi pembangunan Turap dengan persentasi 56,19%. Melebihi target RPJMD Perubahan Kabupaten Ende yang ditetapkan 26,70 %.

Capaian Kinerja Tahun 2024 merupakan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan target kinerja tahun 2024 yaitu : $(58,35/26,70) \times 100\% = 210,46\%$ sedangkan capaian kinerja terhadap akhir RPJMD Perubahan adalah perbandingan antara realisasi Tahun 2023 terhadap target akhir Perubahan RPJMD Perubahan : $(58,35/26,70) \times 100\% = 210,46\%$

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat Kerja, capaian kinerja tersebut termasuk dalam kategori AA > atau Sangat Memuaskan.

4) Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Tahun 2024 dilakukan survei dan monitoring E-PAKSI mendapat Luasan 2.845,16 Ha dengan persentasi 58,35%. Dari hasil tersebut, maka Persentase

Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik kurang dari target RPJMD Perubahan Kabupaten Ende yang ditetapkan 60,00%.

Capaian Kinerja Tahun 2024 merupakan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan target kinerja tahun 2024 yaitu : $(58,35/60,00) \times 100 = 97,25\%$ sedangkan capaian kinerja terhadap akhir RPJMD Perubahan adalah perbandingan antara realisasi Tahun 2023 terhadap target akhir RPJMD Perubahan: $(58,35/60,00) \times 100 = 97,25\%$.

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat Kerja, capaian kinerja tersebut termasuk dalam kategori AA > atau Sangat Memuaskan.

5) Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelaanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan.

Indikator ini diukur dengan menggunakan Formula Jumlah Rumah Tangga Terakses Air Minum di bagian jumlah Rumah Tangga Seluruhnya. Tahun 2024 setelah direkap ulang dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2024 jumlah Sambungan Rumah 43.898 SR dengan persentasi 68,47%. Dari hasil tersebut, maka jumlah rumah tangga terakses air minum layak kurang dari target RENSTRA Perubahan Kabupaten Ende yang ditetapkan 95,08%. Capaian Kinerja Tahun 2024 merupakan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target kinerja tahun 2024 yaitu : $(68,47/95,08) \times 100\% = 72,01\%$ sedangkan capaian kinerja terhadap akhir RENSTRA Perubahan adalah perbandingan antara realisasi Tahun 2024 terhadap target akhir RPJMD Perubahan: $(68,47/95,08) \times 100\% = 72,01\%$.

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat Kerja, capaian kinerja tersebut termasuk dalam kategori Bb> atau Sangat Baik

6) Persentase Panjang Jalan Lingkungan Dalam Jondisi Baik

Indikator ini diukur dengan menggunakan Formula Panjang Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik di bagi panjang Lingkungan Seluruhnya. Tahun 2024 panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik bertambah 4.632,14 M menjadi 67.859 M dengan persentasi 71,92%. Penambahan panjang jalan lingkungan kurang dari Target Akhir RENSTRA Perubahan Kabupaten Ende yang ditetapkan 77,70 %. Capaian Kinerja Tahun 2024 merupakan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan target kinerja tahun 2024 yaitu : $(71,92/77,70) \times 100\% = 92,56\%$ sedangkan capaian kinerja terhadap akhir RENSTRA Perubahan adalah perbandingan antara realisasi Tahun 2024 terhadap target akhir RENSTRA Perubahan: $(71,92/77,70) \times 100\% = 92,56\%$.

- Berdasarkan Skala Nilai Peringkat Kerja, capaian kinerja tersebut termasuk dalam kategori A> atau Memuaskan
- 7) **Persentase perencanaan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang sesuai regulasi yang berlaku.**

Indikator ini diukur dengan menggunakan formula Jumlah ketaatan RTRW dan RDTR dibagi Jumlah total kesesuaian ruang yang dikeluarkan. Pada Tahun 2024 Total Jumlah ketaatan RTRW yang Taat sebanyak 1020 Kesesuaian Ruang dari Jumlah total kesesuaian ruang yang dikeluarkan 1063 (95,95%). Hal ini kurang dari target yang ditetapkan dalam RENSTRA Perubahan Kabupaten Ende (100%). Capaian Kinerja Tahun 2024 merupakan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan target kinerja tahun 2024 yaitu: $(95,95/100) \times 100\% = 95,95\%$ sedangkan capaian kinerja terhadap akhir RENSTRA Perubahan adalah perbandingan antara realisasi Tahun 2024 terhadap target akhir RENSTRA Perubahan : $(95,95/100) \times 100\% = 95,95\%$.

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat Kerja, capaian kinerja tersebut termasuk dalam kategori AA > atau Sangat Memuaskan.

- 8) **Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan**

Indikator ini diukur dengan menggunakan formula jumlah Luas RTH publik yang tersedia di akhir tahun Pencapaian SPM dibagi Luasan RTH Publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan. Tahun 2024 tidak ada penambahan Luas Ruang Terbuka Hijau, Luasan RTH publik yang dikelola oleh Dinas PUPR (1,40%) hal ini mencapai target yang ditetapkan RENSTRA Perubahan Kabupaten Ende sebesar 1,40 %. Capaian Kinerja Tahun 2024 merupakan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan target kinerja tahun 2024 yaitu: $(1,40/1,40) \times 100\% = 100\%$ sedangkan capaian kinerja terhadap akhir RENSTRA Perubahan adalah perbandingan antara realisasi Tahun 2024 terhadap target akhir RENSTRA Perubahan : $(1,40/1,40) \times 100\% = 100\%$.

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat Kerja, capaian kinerja tersebut termasuk dalam kategori AA> Sangat Memuaskan

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pelayanan pada urusan Perumahan Rakyat terkait dengan ketersediaan rumah layak huni, air bersih, sanitasi dan lingkungan. Gambaran kondisi capaian layanan sebagaimana disajikan sebagai berikut.

1. Persentase KK Korban Bencana Alam atau Relokasi yang memperoleh Rumah Layak Huni

Formula indikator yang digunakan sama dengan formula indikator untuk rasio rumah layak huni. Formula indikator yang digunakan adalah Jumlah rumah layak huni pada tahun n dibagi jumlah seluruh rumah pada tahun n. Pada tahun 2023, jumlah rumah layak huni 45.971 buah dari total jumlah seluruh rumah 64.628 (71.13 %). Tahun 2023, terjadi penambahan jumlah rumah layak huni sebanyak 244 unit, terdiri 68 unit peningkatan kualitas rumah yang ditangani oleh DPRKPP pada TA 2024 dan 15 unit peningkatan kualitas rumah melalui program BSPS.

Kemudian tahun 2024 dari 11.577 buah (14.17 %) rumah layak huni dari total 81.695 rumah di Kabupaten Ende saat ini. Peningkatan jumlah rumah layak huni masih sedikit di bawah target yang ditetapkan yakni 71.79 %.

Capaian Kinerja Tahun 2024 merupakan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan target kinerja tahun 2024 yaitu : $(5/71.79) \times 100\% = 6.99\%$ sedangkan capaian kinerja terhadap akhir RPJMD adalah perbandingan antara realisasi Tahun 2024 terhadap target akhir RPJMD : $(5/97.25) \times 100\% = 5.14\%$.

2. Presentase Luas Bidang Tanah Pemda Yang Tersertifikat

Indikator ini diukur dengan menggunakan formula indikator Jumlah luas tanah PEMDA yang disertifikat dibagi Jumlah luas tanah PEMDA seluruhnya. Tahun 2023 Jumlah luas Tanah PEMDA yang telah bersertifikat sebesar 1.959.351 m² dari total luas bidang Tanah PEMDA sebesar 10.273.760 m² atau (19.07%). Pada Tahun 2024 luas tanah pemda yang disertifikat mengalami penambahan sebesar (81.28 %). Kondisi ini masih kurang dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

Capaian Kinerja Tahun 2024 adalah merupakan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan target kinerja tahun 2024 yaitu : $(82.28/20.55) \times 100\% = 82.28\%$ sedangkan capaian kinerja terhadap akhir RPJMD adalah perbandingan antara realisasi Tahun 2024 terhadap target akhir RPJMD : $(82.28/100) \times 100\% = 82.28\%$.

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat Kerja, capaian kinerja tersebut termasuk dalam kategori AA+ atau sangat memuaskan.

3. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Formula indikator yang digunakan jumlah rumah tinggal bersanitasi dibagi jumlah rumah seluruhnya pada tahun n. Pada tahun 2023, jumlah rumah tinggal bersanitasi 31.833 buah dari total jumlah seluruh rumah 64.628 (49.26%). Tahun 2024, mengalami penambahan 656 unit rumah tinggal bersanitasi sehingga realisasai mencapai (95.71%). Peningkatan jumlah rumah tinggal yang bersanitasi sesuai target yang ditetapkan.

Capaian Kinerja Tahun 2024 adalah perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja tahun 2024 yaitu : $(95.71/100) \times 100\% = 95.71\%$ sedangkan capaian kinerja terhadap akhir RPJMD adalah perbandingan antara realisasi Tahun 2024 terhadap target akhir RPJMD: $(95.71/100) \times 100\% = 95.71\%$. Berdasarkan Skala Nilai Peringkat Kerja, capaian kinerja tersebut termasuk dalam kategori A> atau memuaskan.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

Capaian indikator-indikator kinerja utama Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran Misi Kelima Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu: "Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat" yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi :

1.) Jumlah Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan karakter bangsa Pada tahun 2024 ditargetkan Jumlah Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang dilakukan sebanyak 7 Kegiatan diantaranya:

1. Kegiatan Hari Lahir Pancasila (1Juni) Tahun 2024
2. Kegiatan Hari Proklamasi 17Agustus 2024
3. Kegiatan Apel Kesadaran 17 Bulan Berjalan
4. Kegiatan Hari Pahlawan 10 Nopember 2024
5. Kegiatan Bela Negara
6. Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan
7. Kegiatan Paskibraka

Namun karena anggaran tidak tercukupi, kegiatan pembinaan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa hanya mencapai 6 kegiatan dan 6 dokumen dari 7 kegiatan yang ditargetkan atau 85,71 yaitu kegiatan hari lahir pancasila, kegiatan Hari Proklamasi 17 Agustus 2024,

Kegiatan Apel Kesadaran 17 Bulan Berjalan, Kegiatan Hari Pahlawan 10 November, Kegiatan Paskibraka serta Kegiatan Bela Negara. Apabila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami kenaikan dari 62,50% menjadi 85,71% dikarenakan kegiatan UP2WK yang ditargetkan pada tahun 2023 tidak ditargetkan lagi pada tahun 2024

2. Jumlah Parpol yang dibina

Jumlah partai politik yang dibina adalah jumlah parpol yang tercatat dan berhak untuk menerima bantuan keuangan yaitu sebanyak 12 (dua belas) partai politik yang merupakan jumlah partai yang memperoleh kursi pada Pemilu tahun 2019–2024. Regulasi yang mengatur tentang bantuan keuangan partai politik diatur dalam Permendagri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata cara perhitungan, penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.

Fasilitasi bantuan keuangan partai politik ini dikoordinir oleh Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ende. Badan Kesbangpol Kabupaten Ende sesuai tugas pokok dan fungsi hanya memberikan surat keterangan atas pengajuan berkas permohonan bantuan keuangan partai politik berdasarkan proposal yang dibuat. Atas kelengkapan persyaratan data-data dukung yang disampaikan oleh partai politik ke Badan Kesbangpol Daerah Kabupaten Ende akan dibuatkan check List tersendiri yang ditanda tangani oleh Tim Verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik. Besaran bantuan keuangan partai politik akan disesuaikan dengan jumlah suarayang diperoleh oleh partai politik tersebut.

Pencairan bantuan parpol pada tahun 2024 dilakukan 2 tahap yaitu tahap I (pertama) yaitu Bulan Januari-Agustus, pencairan dilakukan 12 parpol periode 2019-2024 hanya 11 parpol yang mengajukan pencairan sehingga tercapai 91,6% dan Tahap II (kedua) yaitu September- Desember untuk parpol yang mendapat kursi di DPRD periode 2024-2030 yaitu sebanyak 10 partai dan hanya 8 parpol yang terealisasi sehingga mencapai 80%. Dapat disimpulkan Tahun 2024 presentase pencairan bantuan keuntungan parpol sebesar 85,83%

3. Presentase Ormas yang dibina

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas yang berada pada Bidang ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ende. Bidang ini memiliki peranan dalam pendaftaran Surat Keterangan Terdaftar di wilayah Kabupaten Ende untuk Ormas/LSM dan kelompok-kelompok organisasi yang berada di wilayah Kabupaten Ende.

Regulasi yang mengatur mengenai pendataan organisasi masyarakat (ormas), lembaga sosial masyarakat diatur berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedomanpendataan organisasi kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sedangkan regulasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Badan Kesbangpol Kabupaten Ende berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada organisasi kemasyarakatan. Tercatat dari periode bulan Desember 2019 sampai dengan Desember 2024 sudah terhimpun sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) Organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang ekonomi, sosial, budaya, kemasyarakatan dan agama, pendidikan, teknologi dan lain-lain.

Pada Tahun 2024 bidang ketahanan ekonomi dan ormas melakukan 2 (dua) kegiatan guna meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap ormas di Kab. Ende. Adapun kegiatan yakni :

- Rakor pengawasan ormas yang terdaftar di Kab.Ende sebanyak 40 ormas
 - Sosialisasi tentang pembinaan dan pemberdayaan ormas sebanyak 40 ormas
- Jumlah ormas yang dibina pada Tahun 2024 sebanyak 40 ormas, sehingga capaiannya sebesar 52% sedangkan target yang ditetapkan sebesar 44%, sehingga melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2023 realisasi capaiannya 38,96% dari 44% dari target yang ditetapkan. Pada Tahun 2024 mengalami kenaikan karena ada penambahan ormas yang terdaftar sehingga jumlah ormas yang dibina mengalami peningkatan dari tahun 2023.

4) Cakupan Pembinaan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi

Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan pada Tahun 2024 melalui bidang ketahanan ekonomi melakukan beberapa kegiatan untuk menunjang kinerja:

- Pembinaan agama yaitu kegiatan FKUB yang melakukan dialog lintas agama

untuk menjaga Stabilitas keamanan menjelang pilkada

- Koordinasi rutin bulanan dengan FKUB dan kementerian agama
- Pembinaan ekonomi dengan mitra kerja dinas perindag kab. Ende

Ada 3 kegiatan yang menjadi target yang ingin dicapai tahun 2024 dengan capaian 100% Dan realisasi yang dicapai juga 100%

5) Persentase Deteksi Dini dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

Pada tahun 2024 target Porsentase Deteksi Dini dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial 100% . capaian terhadap indikator ini adalah 100% dimana jumlah deteksi dini sama dengan Jumlah Penanganan konflik sosial yang mana sudah diselesaikan Kesbangpolda permasalahannya.

. Satuan Polisi Pamong Praja

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran Misi Kelima yaitu; "Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat" yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi :

1. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Yang Patuh dan Taat Terhadap Ketentuan

- a) Persentase Jumlah Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang tertangani Indikator ini diukur dengan formula perhitungannya adalah Pelanggaran K3 yang terselesaikan/Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP X 100%.

Pada Tahun 2024 jumlah pengaduan masyarakat atas Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebanyak 4 pelanggaran dan semuanya pelanggaran diselesaikan dengan baik dengan demikian capaian kinerja indikatornya adalah 100% .

- b) Persentase Perdadan Perkada yang Ditegakkan.

Indikator ini diukur dengan formula perhitungannya adalah Jumlah Perda yang ditegakkan / jumlah perda yang ada X 100%.

Pada tahun 2024 jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang ditegakkan sebanyak 4Perdadengan demikian realisasi kinerjanya 100 % .

2. Meningkatnya Pelayanan Pemadam Kebakaran yang sesuai standar

- a) Persentase Pelayanan Pemadaman dan penyelamatan kebakaran sesuai standar

Indikator ini diukur dengan formula Jumlah kasus di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap / jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK X 100%.

Pada Tahun 2024 jumlah Kasus Kasus Kebakaran yang terjadi sebanyak 12 Kasus dan semuanya tertangani dalam tingkat waktu tanggap, dengan demikian realisasi kinerjanya 100%

- b) Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) indikator ini diukur dengan formula Jumlah

ketepatan waktu tindak pemadaman kebakaran (≤ 15 menit) / jumlah kejadian kebakaran tahun n X 100%.

Pada tahun 2024 capaian kinerja sebesar 100% dimana dalam penanganan masalah kebakaran yang terjadi dilakukan secara cepat dan tepat dengan durasi waktu tanggap rata-rata 14,58 menit.

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Capaian Indikator Program sesuai dengan Target Kinerja

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran Misi Kelima yaitu; “Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat” yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi :

- a) **Persentase Desa Tangguh bencana pada kawasan rawan bencana**

Jumlah Desa Siaga Bencana yang aktif pada tahun 2024 sebanyak 93 Desa/Kelurahan dari 278 Desa/Kelurahan di Kabupaten Ende.

Pada tahun 2024 target Persentase Desa Tangguh bencana pada kawasan rawan bencana sebesar 45,32%. Realisasi terhadap indikator ini adalah 45,32 %.

6. Sosial

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama Urusan Sosial dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja Misi Kelima yaitu; “Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan

Masyarakat" yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi :

- Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan
Pada tahun 2024 jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebanyak 148 jiwa, dengan kegiatan bimtek dan pemberian tali asih bagi TKSK dan pendamping PKH serta Tagana. Artinya, semua diberdayakan sehingga capaiannya 100%.
- Persentase warga migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan
Tahun 2024, semua warga Negara migran yang dipulangkan sebanyak 24 orang dan semuanya terealisasi dan dipulangkan ke daerah asalnya.
- Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial
Jumlah Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sebanyak 22 jiwa semuanya ditangani dan menerima bantuan dari pemerintah pusat, provinsi dan juga pemda
- Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial 170.920 kk dilakukan verifikasi dan validasi data sebanyak 158.564 kk oleh operator desa/kel setiap bulan, sehingga data valid dan bantuan yang diterima tepat sasaran.
- Persentase penanganan korban bencana alam dan sosial
Target 2024 jumlah PSKS yang diberdayakan 51 orang dengan kegiatan bimtek dan pemberian tali asih bagi tagana
- Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jamsos
Penanganan korban bencana alam dan bencana sosial pada tahun 2024 sebanyak 92 jiwa dan semuanya ditangani dan diberikan bantuan
- Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan Jumlah TMP 19 makam dan semuanya dirawat

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama **Urusan Tenaga Kerja** mendukung pencapaian sasaran kinerja Misi Ketiga yaitu: "Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang kompetitif dan berkelanjutan", yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi :

1) Besaran Pencari kerja yg mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Adanya Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi belum mencapai target yakni 40,22 % dari target yang di rencanakan 54,41 %. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data Jumlah Pencari Kerja yang mendaftar sebanyak 410 (APBN) dan 40 Orang (APBD) orang. Pada pelaksanaanya, sebanyak 19 Peserta mengikuti 1 Kegiatan pelatihan Tata Boga dengan dana APBD sedangkan 176 Peserta mengikuti 11 Paket Pelatihan dengan sumber APBN.

Untuk itu, demi tercapainya peningkatan kompetensi pencaker, maka perludidukung juga dengan Dana APBN dan Dana APBD dalam jumlah yang besar. Sehingga semua peserta yang mendaftar dapat didistribusikan secara merata untuk mengikuti sejumlah paket pelatihan.

2) Meningkatnya kesempatan Kerja

pada tahun 2024 di targetkan 82,45 % dengan realisasi belum mencapai target sebesar 7,69 % dikarenakan terdapat perbedaan jumlah yang mendaftar secara online dengan data fisik yang direkap; dimana kebanyakan pencari kerja tidak melaporkan diri sebagai pencari kerja yang ditempatkan, sehingga yang terdaftar, terlapor dan tercatat hanya adalah pencari kerja yang hendak berangkat ke Dalam Daerah dan Keluar Daerah yakni sebanyak 35 orang.

Kondisi saat ini bahwasannya kartu ak 1 dan ak 2 (Kartu Kuning) sudah tidak digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam pengurusan Tes CPNS dan Tes Lain nya, sehingga para pencari kerja pun tidak secara langsung mendaftar kan diri ke aplikasi sisnaker dan mendaftar secara manual. Akibatnya dinas tidak dapat mengetahui berapa jumlah pencari kerja di kabupaten ende.

Kenyataannya, pihak dinas bisa mendata data pencari kerja hanya dengan Perusahaan yang mempekerjakan pekerja nya di Dalam Negeri dan Luar Negeri.

3) Jumlah Kasus Ketenagakerjaan yang diselesaikan

Jumlah Kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan dengan perjanjian bersamadi target 100 %dan pada tahun 2024 capaiannya melebihi target 100 %. Jumlah kasus yang dilaporkan tertulis sebanyak 10 kasus dan di selesaikanmelalui kerjasama pihak dinas sebagai mediator antara pekerja, pemberi kerja dan pemda untuk mencapai kesepakatan bersama.

4) Jumlah Kepesertaan Program Jamsostek / BPJS Ketenagakerjaan

Belum semua pekerja menjadi Peserta BPJS ketenagakerjaan. Berdasarkan data bahwa sebanyak 1776 pekerja menjadi anggota BPJS dari total keseluruhan pekerja4.541.Targettahun 2024 adalah 66,37 % dan realisasinya 39,11%. Artinya, sebagian besar pekerjasudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Ende.

5) Besaran Perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Provinsi (UMP)

Besaran Perusahaan yang menerapkan Upah minimum Provinsi (UMP) sebanyak 85 Perusahaan dari 233 Perusahaan yang terdaftar. Indikator ini mencapai target 36,37 % dari yang ditargetkan 9,60 % di tahun 2024. Walaupun belum semua perusahaan bisa menerapkan UMP namun sudah sebagian Perusahaan yang sudah bisa menerapkan UMP secara baik sesuai dengan Pendapatan yang diterima.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama Urusan P3A dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja Misi Kelima yaitu: "Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat", yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Indeks Pemberdayaan Gender

$$\frac{28665}{30000} \times 100 = 94,86\%$$

77838

Partisipasi angkatan kerja perempuan yang terlayani pada tahun ini dibandingkan dengan Partisipasi angkatan kerja perempuan yang ada di Kabupaten Ende sebanyak 78,665 dan jumlah Partisipasi Angkatan kerja Laki-laki sebanyak 77,838 %, hal ini karena ada penambahan partisipasi tahun sebelumnya.

2. Persentase Penurunan kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

$$24 \times 100 = 100$$

$$\% 74$$

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilayani sebanyak 74 kasus dari total kasus kekerasan Terhadap perempuan dan Anak di Kabupaten Ende tahun 2024 yaitu 74 kasus.

3. Kategori Kabupaten Layak Anak

Pada tahun 2024 Kategori KLA hanya mencapai Angka 480 (Belum mencapai tingkat Pratama) karena belum semua SKPD yang ada dalam Gugus Tugas KLA melakukan evaluasi KLA untuk penentuan indikator KLA karena untuk mencapai indikator Pratama totalnya kurang lebih 5

3. Pangan

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama **Urusan Pangan** mendukung pencapaian sasaran kinerja Misi Ketiga yaitu: "Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang kompetitif dan Berkelanjutan", yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi :

1. Indikator ketersedian pangan utama

Total Kebutuhan Pangan di Kabupaten Ende pada tahun 2024 dengan jumlah penduduk sebanyak 283.806 jiwa adalah sebesar 47.875,39 ton EB, dari total produksi sebanyak 38.115 ton EB, kekurangan sebesar 9.759,86 Ton EB, sehingga Prosenta seketersediaan mencapai 79,61 %, dari target yang ditetapkan sebesar 90 %, untuk tingkat capaian tersebut, maka kebutuhan masyarakat Kabupaten Ende dapat dipenuhi dan termasuk dalam kategori Rawan Ringan (RR), yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Ende selama 10 bulan 17 hari. Kegiatan ini didukung oleh Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan dan Program Penanganan Kerawanan Pangan.

Faktor Kegagalan:

- Terjadinya Elnino, curahhujan rendah sehingga menyebabkan sebagian areal tidak bisa ditanami oleh tanaman pangan;
- Hujan terjadi saat tanaman padi memasuki fase pembungaan sehingga proses Pembungaan dan pengisian bulir terganggu
- SeranganOPT(penggerek batang,Walangsangit, Keong Mas, dll);
- Penggunaan pupuk masih sangat rendah (NPK dan Urea) oleh petani pada tanaman padi, terlihat pada laporan penyaluran pupuk bersubsidi Kabupaten Ende Tahun 2024 hanya 16 %;
- Alokasi benih bersertifikat masih kurang, sehingga petani menggunakan benih hasil panendari tahun sebelumnya untuk musim tanam berikutnya.

2. Indikator Skor Pola Pangan Harapan

Pola Konsumsi Pangan masyarakat Kabupaten Ende, memang belum mencapai target ideal skor Pola Pangan Harapan secara Nasional yakni skor 100. Capaian target indikator pada tahun 2024 ini, adalah skor 77,1 sesuai dengan target yang ditetapkan yakni skor 77,1.

Faktor Keberhasilan : Adanya kesadaran masyarakat untuk mengubah pola konsumsi yang sebelumnya hanya memprioritaskan asupan karbohidrat, hingga mengkonsumsi makanan yang Beragam Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) . Kegiatan ini didukung dengan program Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Program Pengawasan Keamanan Pangan

4. Pertanahan

Capaian kinerja Program Urusan Pertanahan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja, Indikator ini diukur dengan menggunakan formula Indikator Jumlah luas tanah PEMDA yang disertifikat dibagi Jumlah luas tanah PEMDA seluruhnya. Tahun 2023 Jumlah luas Tanah PEMDA yang telah bersertifikat sebesar 1.959.351 m² dari total luas bidang Tanah PEMDA sebesar 10.273.760 m² atau (19.07%). Pada Tahun 2024 luas tanah pemda yang disertifikat mengalami penambahan sebesar (81.28 %). Kondisi ini masih kurang dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

Capaian Kinerja Tahun 2024 adalah merupakan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan target kinerja tahun 2024 yaitu : $(82.28/20.55) \times 100\% = 82,28\%$ sedangkan capaian kinerja terhadap akhir RPJMD adalah perbandingan

antara realisasi Tahun 2024 terhadap target akhir RPJMD : $(82.28/100) \times 100\% = 82.28\%$. Berdasarkan Skala Nilai Peringkat Kerja, capaian kinerja tersebut termasuk dalam kategori AA> atau sangat memuaskan.

5. Lingkungan Hidup

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama **Urusan Lingkungan Hidup** mendukung pencapaian sasaran kinerja Misi Keempat yaitu: "Mewujudkan Konektivitas antar wilayah yang didukung oleh penyedian sarana dan Prasarana yang berkualitas, merata, berkeadilan dan ramah lingkungan", yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi:

1. Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup
 2. Persentase pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditangani
 3. Persentase B3 dan limbah B3 yang ditangani
 4. Persentase ketataan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH
 5. Persentase penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat di kabupaten
 6. Persentase lembaga pendidikan/dunia usaha yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan LH
 7. Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup
 8. Persentase pengurangan sampah
 9. Persentase penanganan sampah
11. **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama **Urusan Adminsitrasii Kependudukan dan Capil** mendukung pencapaian sasaran kinerja Misi Kelima yaitu: "Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat" yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi :

1. Persentase Penduduk berKartu Keluarga

Pada Tahun 2024 target Persentase Penduduk berKartu Keluarga 80%, capaian kinerja sebesar 99,65% atau sebanyak 83.767 orang yang telah memiliki KK (kartu Keluarga) dari 84.054 kepala keluarga pada tahun 2024. Terjadi peningkatan sebesar 19,65%.

2. Persentase Penduduk berKTP-el

Pada Tahun 2024 target Persentase Penduduk ber KTP-else besar 100%, capaian kinerja besar 96,40% atau sebanyak 202.843 orang yang telah memiliki KTP dari 210.407 orang. Yang wajib memiliki KTP Elektronik (jumlah penduduk usia 17 Tahun ke atas Tahun 2024) pada tahun 2024.

3. Persentase anak memiliki KIA

Pada Tahun 2024 target Persentase anak memiliki KIA sebesar 85,00%, capaian kinerja sebesar 58,98% atau sebanyak 43.296 orang yang telah memiliki KIA (Kartu Identitas Anak) pada Tahun 2024 dari 73.399 orang yang wajib memiliki KIA. Kondisi tersebut belum mencapai target dikarenakan minimnya animo masyarakat untuk mengurus KIA dan ketidaktahuan penduduk pentingnya KIA

4. Persentase penduduk usia 0-18 thn ber akta kelahiran

Pada Tahun 2024 target Persentase penduduk usia 0-18 th ber akta kelahiran sebesar 90%, capaian kinerja sebesar 98,53 % atau sebanyak 78.419 orang yang telah memiliki Akta Kelahiran dari 79.583 orang yang berusia 0 s/d 17 tahun pada Tahun 2024.

5. Cakupan ketersediaan profil kependudukan

Pada Tahun 2024 target Cakupan ketersediaan profil kependudukan sebanyak 1 dokumen capaian kinerja sebesar 100 % atau sebanyak 7 dokumen profil kependudukan yang diterbitkan.

6. Persentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan sipil serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dilaksanakan

Pada Tahun 2024 target Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) sebanyak 23 Inovasi. Jumlah Inovasi serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dilaksanakan 23 inovasi sehingga capaian Kinerja sebesar 100 % pada Tahun 2024.

12. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran Indikator kinerja utama urusan wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran Misi Ketiga, yaitu : "Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Pariwisata yang Kompetitif dan Berkelanjutan" dan Misi Kelima, yaitu : "Menciptakan Pemerintahan yang Bersih,

Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat", adalah sebagai berikut:

1. Persentase Penataan Desa

Target Indikator Persentase Penataan Desa Tahun 2024 pada Program Penataan Desa jumlah Desa yang telah dilakukan Sosialisasi Penataan Desa sebanyak 5 Desa dari target 5 Desa yang diusulkan untuk dilakukan Penataan Desa atau 100 % dimana tahun 2023 Target 9 Desa dan terealisasi 100 %

2. Persentase Peningkatan Kerja Sama Pedesaan

Target Indikator Persentase Peningkatan Kerja Sama Pedesaan Tahun 2024 pada Program Peningkatan Kerja Sama Pedesaan tidak dilaksanakan pendampingan pada Desa yang melakukan kerja sama, sedangkan tahun 2023 jumlah Desa yang didampingi 8 Desa dari 91 Desa yang melakukan kerja sama atau 8,79 %.

3. Cakupan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang tertipadministrasi.

Target Indikator Cakupan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang tertip administrasi pada tahun 2024 pada Program Administrasi Pemerintahan Desa jumlah Desa yang tertib administrasi sebanyak 255 Desa dan Realisasi 100 % sedangkan tahun 2023 dari target 255 Desa yang tertib Administrasi sebanyak 150 Desa atau 39, 21 %.

a. Permasalahan yang dihadapi

- Perangkat Desa belum mampumenyusun Rancangan Peraturan Desa
- Belum adanya Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Inisiatif BPD
- Siltap belum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2019
- Kurang Efektifnya waktu dan alur pencairan Dana Desa dan Lambarnya Penetapan APBDes oleh Desa - Desa
- Banyak desa yang tidak cukup penganggaran jika alokasi Siltap dan tunjangan Kades, Peraangkat Desa dan BPD sebesar 60 % dan terdapat kenaikan pemotongan BPJS untuk perangkat Desa dari Rp. 21.240 menjadi Rp. 21.868,-
- Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu belum bisa dilaksanakan

karena masih menunggu Peraturan Pemerintah sebagai Penjabaran dari Undang – Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

b. Langkah Anstipatif yang diambil

- Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang tata cara Penyusunan Peraturan di Desa.
- Telah menyampaikan kepada Pimpinan terkait kekurangan anggaran namun kerena keterbatasan DAU maka Pemda Ende belum bisa memenuhinya.
- Menerbitkan Perbup Nomor 6 Tahun 2024 dan meneruskan ke Desa–desa sebagai panduan.
- Menerbitkan Perbup Nomor 40 tahun 2024 dan meneruskan ke Desa–Desa.
- Telah dilaksanakan Pelantikan Penjabat Kepala Desa untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa.

4. Persentase BUMDes berkembang

Indikator Persentase BUMDes berkembang pada Program Administrasi Pemerintah Desa jumlah BUMDes berkembang sebanyak 14 BUMDes dari 124BUMDes yang terbentuk atau 11,29% sedangkan tahun 2023 Jumlah BUMDes berkembang 10 BUMDes dari 96 BUMDes yang terbentuk atau 10,42 %.

Permasalahan yang dihadapi

- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang BUMDes sudah tidak relevan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dan belum adanya peraturan Bupati terkait tata kelola BUMDes.
- Belum semua Desa membentuk BUMDes
- Belum semua BUMDes yang telah berbadan Hukum mengelola aset dan potensi yang dimiliki desa dan berkontribusi terhadap PADES

Langkah Anstipatif yang diambil

- Perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang relevan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dan ditetapkan Peraturan Bupati tentang tata kelola BUMDes sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah.
- Memfasilitasi Desa dalam melakukansosialisasi dan Musyawarah Desa pendirian BUM Des
- Melakukan Pelatihan Manajemen BUMDes khususnya Laporan Pertanggung

- jawaban keuangan berbasis akuntansi ETAP sesuai Kepmendes 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes.
5. Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat yang terlibat didalam Pemberdayaan Masyarakat.

Tahun 2024 Indikator Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat yang terlibat didalam Pemberdayaan Masyarakat pada Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat jumlah lembaga Kemasyarakatan yang terlibat didalam Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 3162 Lembaga dari 3706 Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat atau 85,32 %, sedangkan tahun 2023 Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat yang terlibat didalam Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 2905 lembaga atau 78,38 %.

Permasalahan yang dihadapi

- Kurang partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan Posyandu
- Masih kurangnya insentif bagi kader Posyandu

Langkah Anstipatif yang diambil

- Melakukan koordinasi dengan Pemerintahan Desa dan pihak lainnya yang terkait seperti tokoh agama, babinkantibmas untuk menghadiri kegiatan.
- Mengimbau kepada Pemerintah Desa meningkatkan insentif kader Posyandu dengan menggunakan Dana Desa.

13. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama urusan wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran Misi Kedua, yaitu : "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat", sebagai berikut:

1. Meningkatnya implementasi pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk.

Presentase implementasi pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk yang diukur melalui rumusan jumlah perangkat daerah yang menetapkan parameter pembangunan kependudukan dan keluarga dalam perencanaan pembangunan dibagi dengan jumlah perangkat daerah. Target kinerja : 86,30%, realisasi kinerja : 29,63% dengan alokasi anggaran 514.875.000, realisasi anggaran 511.865.000.

Realisasi kinerja rendah karena masih terdapat perangkat daerah yang belum menetapkan parameter pembangunan kependudukan dan keluarga dalam perencanaan pembangunan.

2. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Untuk tahun 2024, persentase penggunaan KB metode kontrasepsi jangka panjang sebanyak 41,35% (6177 peserka KB MKJP dari 14938 peserta KB aktif) lebih rendah dari target yang ditetapkan 46,31 %. Penyebab rendahnya; kurangnya pengetahuan tentang alat kontrasepsi MKJP dan faktor budaya patrilineal terkait pengambilan keputusan menggunakan alat kontrasepsi. Upaya yang telah dilakukan meningkatkan komunikasi, edukasi dan informasi terkait KB MKJP.

3. Menurunnya tingkat putus pakai pemakaian kontra sepsi (DropOut/ DO)

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi dengan jumlah peserta KB aktif. jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi sebanyak 1589 jiwa sedangkan Jumlah akseptor KB sebanyak 17408 jiwa sehingga Capaian kinerjanya 9,13%, masih lebih rendah dari target yang diharapkan sebesar 5,50%. Hal ini disebabkan masih rendahnya pendampingan oleh tenaga lini lapangan pada peserta KB aktif dan penguatan kapasitas dari PKB/PLKB kepada kader IMP. Upaya yang dilakukan untuk mengajar target yakni meningkatkan pendampingan tenaga lini lapangan kepada peserta KB Aktif dan penguatan kapasitas kader IMP oleh PKB/PLKB.

4. Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan.

Tahun 2024 target rata-rata usia kawin pertama perempuan adalah 23 tahun sedangkan realisasinya adalah 32 tahun. Masih ada anggapan tentang tidak pentingnya pendewasaan usia perkawinan dan persiapan kehidupan berkeluarga dari berbagai aspek sehingga dinas berupaya untuk melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya penyiapan kehidupan keluarga bagi remaja (PKBR).

14. Perhubungan

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama **Urusan Wajib Perhubungan** mendukung tercapainya sasaran-sasaran Misi Keempat, yaitu: "Membangun, Menata dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang secara Kuantitatif maupun Kualitatif sesuai Potensi

dan Kebutuhan Daerah yang Ramah Lingkungan", yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi :

1) Indeks pelayanan transportasi darat

Pada sasaran Meningkatkan Konektivitas Sarana dan Prasarana Transportasi untuk indikator **Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan yang memadai** tidak mencapai target dengan realisasi 59,17% dari target 98,43% dengan tingkat capaian sebesar 60,10%, yakni dengan menghitung Jumlah Layanan Transportasi yang dilaksanakan : 684 layanan, dibagi dengan Jumlah Layanan Transportasi yang direncanakan sebanyak 1.128 Layanan, diperoleh dari jumlah 6 (enam) layanan transportasi yang dilaksanakan, yang termuat dalam indikator masing-masing kegiatan sebagai berikut :

- 1) Persentase Perlengkapan jalanan yang disediakan terrealisasi sebesar 79,22% dari target 99,16%
- 2) Persentase pengelolaan Terminal Tipe C yang memenuhi standar regulasi tersebut sebesar 100% dari target 100%
- 3) Persentase Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor secara baik terrealisasi sebesar 46,05% dari target 100%
- 4) Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan dalam rangka manajemen rekayasa lalu lintas terrealisasi 10,92% dari target 100%
- 5) Persentase ketersediaan layanan angkutan darat terrealisasi sebesar 27,36% dari target 98,69%
- 6) Persentase koordinasi dan pengawasan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas Daerah Kabupaten/Kota terrealisasi 91,40% dari target 91,40%

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator program ini sebagai berikut:

- 1) Rendahnya Persentase Perlengkapan Jalan yang disediakan terrealisasi 79,22% dari target yang direncanakan 99,16%.
 - a. Pembangunan Traffic Light 0 Unit sampai dengan tahun 2024 dari Target yang direncanakan 1 Unit sampai dengan tahun 2024.
 - b. Pemasangan Rambu-rambul lalu lintas obuh dari target yang direncanakan 8 buah.
 - c. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) 850 Unit dari 984 Unit (19 Panel PLN 841 titik dan 2 Panel Solar Cell 6 titik) yang dikelola Dinas Perhubungan.
- 2) Persentase Pengolahan Terminal Tipe C yang memenuhi Standar Regulasi terrealisasi 100,00% dari target yang direncanakan 100,00%.

- a. Terminal Tipe C; 2 unit dari 6 Unit Terminal yang dikelola oleh Dinas Perhubungan.
 - b. Jumlah Terminal yang dilakukan pemeliharaan oleh Dinas Perhubungan 6 Unit dari 6 Unit Terminal yang ada.
- 3) Persentase Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Secara Baik terealisasi 46,05% dari target yang direncanakan 100,00%.
- a. Alat Uji Kendaraan yang terakreditasi berjumlah 9 unit dari 9 unit yang sediakan sampai dengan tahun 2024.
 - b. Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-e) Kendaraan Bermotor 1.037 Berkas dari 2274 Unit Kendaraan wajib uji yang direncanakan di tahun 2024.
 - c. Penyediaan SOP Pengujian Kendaraan Bermotor 1 Kali pertahun.
 - d. Pemeliharaan Alat uji Kendaraan Bermotor 9 Unit dari 9 Unit Alat Uji Kendaraan Bermotor yang tersedia.
- 4) Rendahnya Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota terealisasi 10,92% dari target yang direncanakan 100,00%.
- a. Pelaksanaan Pengawasan/Pengamanan Arus Lalu Lintas 12 Laporan.
 - b. Pengadaan Guardrail 801 Meter dari 5.028 Meter yang direncanakan.
 - c. Perbaikan Marka Jalan 0 Meter dari target 2.500 meter yang direncanakan.
 - d. Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Rekayasa Lalu Lintas 0 Dokumen.
 - e. Pelaksanaan Kegiatan pengawasan dan Pengendalian Kebijakan Jalan 12 Laporan
- 5) Persentase Ketersediaan Layanan Angkutan Darat terealisasi 27,36% dari target yang direncanakan 98,69%.
- a. Angkutan Umum yang tersedia sampai dengan tahun 2024 sebanyak 304 unit dari 1.143 Unit yang direncanakan.
 - b. Pelaksanaan Pengawasan Arus Orang / Barang di Terminal 12 Laporan.
- 6) Persentase Koordinasi dan Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota terealisasi 91,40% dari target yang direncanakan 91,40%.
- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Trayek 85 trayek dari 85 Trayek yang direncanakan ditahun 2024.
 - b. Pelaksanaan pengawasan arus orang dalam Kabupaten/Kota 12 Laporan.

2) Persentase koordinasi pembinaan dan pengawasan layanan angkutan laut

terrealisasi 100.00% dari target yang direncanakan 100.00% dengan persetase capaian 100.00%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk indikator ini adalah Pengaturan, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan di Pelabuhan (aktivitas bongkar muat barang dan penumpang di pelabuhan sesuai kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota oleh Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Ende yang tertuang dalam Undang-undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2028). Dan waktu pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah 12 Kali dalam setahunnya (Realisasi 12 kali atau 12 Laporan dari target 12 Laporan).

a) Indeks pelayanan transportasi darat

Indeks Pelayanan Transportasi Darat dengan realisasi 46,55 % dari target 88,82%.

b) Persentase Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Layanan Angkutan Laut.

Persentase Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Layanan Angkutan Laut dengan realisasi 100% target 100%.

15. Komunikasi dan Informasi

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama **Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika** mendukung pencapaian sasaran kinerja Misi Kelima yaitu: Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat”, yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi:

1. Persentase diseminasi informasi publik

Pengukuran dari salah satu Indeks layanan informasi publik adalah penyelenggaraan diseminasi informasi publik, yang didukung oleh Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota serta Subkegiatan Pelayanan Informasi Publik dan Subkegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik. Program, Kegiatan dan Subkegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Target kinerja dari penyelenggaraan diseminasi informasi publik adalah terlaksananya publikasi informasi kegiatan pemerintahan berupa berita melalui media elektronik dengan target kinerja sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) berita / informasi.

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota didukung oleh 2 (dua) Subkegiatan yaitu :

- a. **Sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik** dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 264.599.800,- kegiatan yang dilaksanakan meliputi :
 - Terlaksananya publikasi informasi berupa data-data statis mengenai informasi harga pasar yang tersedia setiap bulan, serta data Transparansi Anggaran Tahunan (Tahun 2024), dengan target sebanyak 58 publikasi dan terealisasi 100 %;
 - Video yang dipublikasi langsung dan video publikasi tidak langsung, dengan target sebanyak 6 (enam) video publikasi langsung dan 37 (tiga puluh tujuh) video publikasi tidak langsung, terrealisasi 100 %;
 - Terlaksananya publikasi informasi tentang kegiatan pemerintahan berupa berita melalui media elektronik, dengan target Publikasi berita / informasi sebanyak 139 berita, terealisasi 100 %. Informasi publik tersebut diatas telah terpublikasi di semua channel resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende, baik itu yang dirilis dan diupdate melalui Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Ende dengan domain: www.endekab.go.id dan beberapa platform media sosial yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende yaitu Channel Youtube : "*Tiwu Telu Media*", Facebook dan Instagram.
 - Terlaksananya kerjasama dengan mass media, terkait publikasi informasi Pemerintah Daerah melalui media terkait, dengan target Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Ende dengan Kompas TV dalam kegiatan Publikasi Potensi Pariwisata dan Program Strategis Kabupaten Ende di Kompas TV meliputi acara Bincang Pagi Kompas TV pada Bulan April 2024, dengan Artikel Berita dan Press Release Berita sebanyak 6 (enam) artikel berita di website Kompas TV, terealisasi 100%.

Secara keseluruhan untuk Sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik dari target kinerja sebanyak 250 berita, realisasi capaian kinerja 250 berita dengan persentase kinerja 100%.

2. Persentase layanan publik secara online dan terintegrasi yang berfungsi baik

Pengukuran Indeks layanan informasi publik mencakup Pemanfaatan Data Statistik Sektoral yang didukung oleh Program Penyelenggaraan Statistik

Sektoral dengan Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral.

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Ende memperolah Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dengan nilai 2,61 atau dengan kategori Baik, dengan 2 (dua) perangkat daerah yang mendukung penilaianstatistik sektoral tahun 2024, yaitu: Dinas Kesehatan Kabupaten Ende dan Dinas Pertanian Kabupaten Ende.

Sedangkan target kinerja dari penyediaan data statistik sektoral adalah tersedianya data statistik sektoral pada Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Ende sebanyak 15 Perangkat Daerah.Pelaksanaan kegiatan tersebut menunjukan hasil tersedianya data statistik sektoral oleh 18 (delapanbelas) Perangkat Daerah di lingkup Pemda Kabupaten Ende dengan Realisasi capaian sebesar 120%.

Adapun 18 (delapan belas) Perangkat Daerah tersebut terdiri dari:

- Dinas Perhubungan Kabupaten Ende
- Dinas Pertanian Kabupaten Ende
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.Ende
- Dinas Kesehatan Kabupaten Ende
- Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ende.
- Bappeda Kabupaten Ende
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Ende
- Dinas Sosial Kab. Ende
- Satpol. PP Kabupaten Ende
- Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Ende
- Dinas PUPR Kabupaten Ende
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende
- Sekretariat DPRD Kabupaten Ende
- Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende
- Kecamatan Lepembusu Kelisoke
- Kecamatan Wewaria
- Kecamatan Ende
- Kecamatan Detusoko

3. Pengamanan data dan informasi

Pengukuran Indeks layanan informasi publik mencakup Pengamanan Data dan Informasi Daerah yang didukung oleh Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi.

Target Kinerja dari Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi adalah 4 (empat) produk hukum. Dari target 4 (empat) produk hukum tersebut telah menghasilkan 1 (satu) produk hukum yaitu SK Bupati Ende Nomor : 165/KEP/HK/2023 Tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende, sehingga realisasi dari target tersebut adalah 25%.

16. Koperasi dan UMKM

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama **Urusan Wajib Koperasi dan UMKM** mendukung tercapainya sasaran-sasaran Misi Ketiga, yaitu : "Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang kompetitif dan Berkelanjutan", yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi :

1. Jumlah Koperasi aktif yang memiliki Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang

Pada tahun 2024 target Jumlah Koperasi Yang Diterbitkan izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang adalah 133 koperasi realisasinya sebanyak 59 koperasi. Jumlah koperasi aktif seluruhnya 120 koperasi.

2. Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa

Target jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa di Tahun 2024 sejumlah 20 koperasi dan terealisasinya sebanyak 24 koperasi dari 120 koperasi yang aktif. Sehingga capaiannya menjadi 117,64 % yang artinya melampaui target.

3. Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Standar Kesehatan

Pada tahun 2024 target Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Standar Kesehatan sebanyak 32 koperasi dan terealisasinya sebanyak 36 koperasi. Sehingga capaiannya 112,48, artinya melampaui target.

4. Jumlah SDM Pengurus Koperasi yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian

Pada tahun 2024 ditargetkan sejumlah 195 orang harus mendapatkan pemahaman perkoperasian sedangkan realisasinya hanya sejumlah 54 orang.

Artinya tidak memenuhi target yang ditetapkan, sehingga presentase capaian sebesar 27,69%.

5. **Jumlah Koperasi yang mendapat dukungan Pemberdayaan dan Perlindungan**
Pada tahun 2024 ditargetkan harus sebanyak 22 koperasi yang mendapatkan dukungan pemberdayaan dan perlindungan. Realisasinya melampaui target yakni 30 koperasi atau sebesar 136,39% .

6. **Presentase UMKM yang difasilitasi dan berdaya saing**

Pada tahun 2024 target UMKM yang difasilitasi dan berdaya saing adalah 30,56% unit usaha (12,64%) yang difasilitasi dan berdaya saing realisasinya sebanyak 54 unit usaha (0,22) Tahun 2024 melampaui target yang ditetapkan sebanyak 23,44 unit usaha yang terdaftar sebanyak 24182 UMKM sehingga capaiannya 1,74%

7. **Jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil**

Padatahun2024,targetusahamikroyangmenjadiusahakecilsebanyak2,00unitusaha (0,83%) realisasinya 32 unit usaha (0,13%). Usaha mikro menjadi usaha kecil melampaui target sebesar 30 unit usaha dari total usaha mikro yang terdata 24182, sehingga capaiannya 16,00%

17. Penanaman Modal

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama **Urusan Wajib Penanaman Modal** mendukung tercapainya sasaran-sasaran Misi Ketiga, yaitu : "Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang kompetitif dan Berkelaanjutan", sebagai berikut:

- 1) **Persentase izin prinsip, izin lokasi, dan izin usaha yang ditindaklanjuti**
- 2) **Jumlah investor baru**
- 3) **Persentase Jumlah Permohonan izin yang terlayani**

Untuk Tahun 2024 sebanyak 2.100 Pelaku usaha yang terlayani pengurusan perijinan dan non perijinan

- 4) **Persentase pengaduan yang terselesaikan tepat waktu**
- 5) **Persentase Peningkatan investasi diKabupaten Ende**

Pada tahun 2024 angka realisasi penanaman modal sebesar Rp. 101.881.655.707 atau 10.188,16%, Sedangkan realisasi penanaman modal pada tahun 2023 sebesar Rp. 537.262.834.284 atau 53.726,28% Untuk nilai

realisasinya tidak mengalami penurunan dari target realisasi investasi yang ditetapkan sebesar 1 Milyar tiap tahunnya. Angka realisasi investasi diperoleh dari 76 Perusahaan yang ada di Kabupaten Ende yang rutin melapor LKPM Online secara berkala. Untuk capaian kinerja tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 43.538,11% dari tahun 2023 dikarenakan masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam melaporkan hasil kegiatan usaha melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) online.

6) **Persentase Izin yang terselesaikan**

7) **Indeks Kepuasan Masyarakat**

Untuk indikator ini pada tahun 2024 targetnya 80,00% capaiannya 92%. Capainnya melebihi target disebabkan pada tahun 2024 DPMPTSP mendapatkan alokasi dana sebesar 119.800.000 untuk pengadaan 4 buah Anjungan Pelayanan Perijinan berbasis Online. Bahwsannya telah Tersedianya Layanan Konsultasi Perizinan Berbasis Resiko.

18. Kepemudaan dan Olahraga

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama Urusan Kepemudaan dan Olahraga mendukung tercapainya sasaran-sasaran Misi Pertama, yaitu : "Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi", yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi :

1. **Persentase Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan**
2. **Persentase Wirausaha Muda**
3. **Jumlah Atlet Yang Memperoleh Medali Dalam, Olahraga Prestasi, Olahraga Masyarakat dan olahraga Pendidikan pada Kejuaraan Tingkat Provinsi dan Nasional**
4. **Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Yang Dilaksanakan**

19. Persandian

1. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama Urusan Persandian mendukung pencapaian sasaran kinerja Misi Kelima yaitu: Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan

Masyarakat”, yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi :

a.) Persentase pengamanan data dan informasi daerah.

Pengukuran Indeks layanan informasi publik mencakup Pengamanan Data dan Informasi Daerah yang didukung oleh Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi.

b). Target Kinerja dari Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi adalah 4 (empat) produk hukum. Dari target 4 (empat) produk hukum tersebut telah menghasilkan 1 (satu) produk hukum yaitu SK Bupati Ende Nomor: 165/KEP/HK/2023 Tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende, sehingga realisasi dari target tersebut adalah 25%.

20. Urusan Kebudayaan

- **Presentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan**

Presentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan pada tahun 2024 yaitu 45,94%, yang merupakan hasil perbandingan dari Jumlah Warisan Budaya yang Dilestarikan sebanyak 130 dengan Jumlah Warisan Budaya yang Ada sebanyak 283.

- **Presentase Pengembangan Kesenian Tradisional yang dilestarikan**

Presentase Pengembangan Kesenian Tradisional yang dilestarikan pada tahun 2024 yaitu 100%, yang merupakan hasil perbandingan Jumlah Kelompok Kesenian Tradisional yang Dilestarikan sebanyak 4 kelompok dengan Jumlah Kelompok Kesenian Tradisional yang Ada sebanyak 4 kelompok. Hal ini menggambarkan bahwa 4 jenis kesenian yang ada di Kabupaten Ende semuanya telah dilestarikan.

- **Cakupan Cagar Budaya setiap daerah yang dilestarikan**

Cakupan Cagar Budaya yang dilestarikan pada tahun 2024 yaitu 57,39%, yang merupakan hasil perbandingan dari Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan sebanyak 66 dengan Total Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dimiliki Daerah sebanyak 115. Pencapaian ini menggambarkan bahwa Cakupan Cagar Budaya di Kabupaten Ende yang

telah dilestarikan sebesar 57,39% dari total 115 Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Ende.

21. Perpustakaan dan Kearsipan

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama **Urusan Perpustakaan** mendukung pencapaian sasaran kinerja Misi Pertama yaitu: "Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi!", yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi:

1) Persentase Pembinaan Perpustakaan Daerah, Kelurahan dan Desa

Tahun 2024 Target Persentase Pembinaan Perpustakaan Daerah, Kelurahan dan Desa sebesar 90% dengan jumlah Perpustakaan yang akan dibina sebanyak 84. Realisasi sampai dengan akhir Tahun 2024 mencapai 100%, dimana ke-84 Perpustakaan tersebut telah dilakukan pembinaan.

2) Persentase Pengelolaan Arsip secara baku di tingkat Perangkat Daerah dan Desa

Tahun 2024 Target Persentase Pengelolaan Arsip secara baku di tingkat Perangkat Daerah dan Desa sebesar 65% dari total Perangkat Daerah dan Desa sebanyak 308. Realisasi yang dicapai adalah sebesar 57,47% atau sebanyak 177 Perangkat Daerah dan Desa.

2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

1) Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap

Produksi hasil Perikanan Tangkap pada Tahun 2024 sebesar 12304,770 Ton (63,76%) tidak mencapai target realisasi sebesar 66,58% atau sebesar 12850,328 ton. Dimana produksi ikan tangkap mengalami penurunan produksi dari target yang ditetapkan.

Permasalahan:

1. Selama Periode Tahun 2024 sering terjadi perubahan cuaca dan musim pancajona dimana terjadinya gelombang pasang dan angin kencang sehingga menyebabkan nelayan mengalami kesulitan melaut yang mengakibatkan penurunan hasil tangkapan ;
2. Pada Triwulan IV Tahun 2024 Oktober sampai Desember 2024 pasokan BBM Nelayan mengalami penurunan akibat tidak beroperasinya SPBU Nelayan akibat mengalami kerusakan yang disebabkan bencana gelombang pasang pada bulan Oktober 2024

sehingga kondisi tersebut berdampak pada sulitnya suplay kebutuhan BBM bagi nelayan untuk melaut.

Solusi:

1. Dalam menyikapi terkait belum tercapainya target produksi ikan yang ditetapkan pada tahun 2024 langkah yang diambil adalah difokuskan melalui penyuluhan kepada para nelayan dengan mendorong nelayan untuk meningkatkan jumlah trip penangkapan ikan yang selama ini dengan pola penangkapan ikan dengan durasi melaut sehari dalam sekali trip sehingga hasil tangkapan tidak maksimal. Dengan melaut lebih dari sehari dalam sekali trip penangkapan ikan diharapkan hasil tangkapan ikan lebih maksimal sehingga berdampak pada peningkatan hasil produksi ikan;
2. Selain penyuluhan juga diharapkan dukungan pemerintah berupa peningkatan bantuan sarana penangkapan ikan yang lebih memadai kepada para nelayan;
3. Program pembinaan dan penguatan keterampilan dan pengetahuan nelayan tentang pengelolaan sumber daya laut dengan penerapan Teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
4. Terkait dengan terhambatnya pasokan BBM bagi nelayan akibat kerusakan sarana SPBU Nelayan Solusi yang diambil sebagai berikut :
 - Pihak Dinas Perikanan Kabupaten Ende telah melakukan koordinasi dengan pihak BPH Migas terkait pengalihan pengambilan BBM bagi nelayan yang sebelumnya melalui SPBU nelayan dialihkan ke SPBU umum dalam wilayah Kabupaten Ende dengan menerbitkan rekomendasi oleh Dinas Perikanan melalui Aplikasi XSTAR BPH Migas sehingga pelayanan kebutuhan BBM bagi nelayan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan tetap berjalan;
 - Pihak Pemerintah Daerah selaku pemilik aset SPBU Nelayan dan KPRI Ende sebagai pengelola SPBU Nelayan akan melakukan relokasi SPBU nelayan yang terdampak kerusakan ke lokasi yang lebih aman sehingga dapat melayani kembali kebutuhan BBM bagi nelayan.

Sedangkan untuk indikator prosentase produksi ikan (tangkap) pada tahun 2024 sebesar 12304,770 ton (63,67%) mengalami kenaikan produksi sebesar

4,16% dari produksi tahun 2023 sebesar 11780,213 ton (61,04%), namun target realisasi capaian pada perubahan RPJMD Tahun 2024 sebesar 66,58% atau sebesar 12850,328 ton. Capaian prosentase produksi ikan (tangkap) mengalami kenaikan dari tahun 2023 dikarenakan bertambahnya sarana dan prasarana perikanan tangkap dan adanya pelatihan dan pendampingan terhadap kelompok usaha pelaku perikanan serta pemanfaatan sarana dan prasarana sudah efektif sehingga berpengaruh terhadap produksi dan produktifitas hasil tangkapan ikan.

Adapun program pendukung keberhasilan Prosentase Produksi Ikan (Tangkap) adalah:

- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

2) Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Produksi hasil Perikanan Budidaya pada Tahun 2024 sebesar 11,9345 Ton (96,64%) dari target realisasi capaian Target Perubahan RPJMD tahun 2024 sebesar 100%. Dimana produksi ikan budidaya tahun 2024 mengalami kenaikan produksi sebesar 19,62% dari tahun 2023, yang berpengaruh pada produktivitas hasil budidaya.

Permasalahan:

1. Terjadinya panas yang berkepanjangan sehingga sebagian kolam tidak terisi air dan mengalami kekeringan;
2. Kekurangan Stok Benih Untuk Pembesaran.

Solusi:

1. Akan terus mendampingi kelompok untuk melakukan pemijahan induk ikan agar tersedia benih untuk pembesaran;
2. Diperlukan pembuatan tandon penampungan air untuk ketersediaan air untuk mengalirkan ke setiap kolam dimana dengan adanya bak tandon air otomatis ketersediaan oksigennya akan cukup tersedia;

Sedangkan indikator prosentase produksi ikan (budidaya) tahun 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 3,5%, hal ini disebabkan karena pakannya cukup untuk diberikan pada ikan pembesaran dan kelompok sudah dibekali dengan pelatihan pembuatan pakan mandiri maka produksi ikan budidaya sedikit meningkat pada tahun 2024.

Adapun program pendukung keberhasilan Prosentase Produksi Ikan (Budidaya) adalah : Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

2. Pariwisata

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama **Urusan Pariwisata** mendukung tercapainya sasaran-sasaran Misi Ketiga yaitu: "Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang Kompetitif dan Berkelanjutan", yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi :

1. Meningkatnya Jumlah Destinasi Wisata diKab. Ende

Untuk Indikator Kinerja Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, capaian pada tahun 2024 ada 3 destinasi wisata dari target yang telah ditetapkan sebanyak 1 destinasi wisata.

2. Persentase Promosi/Pemasaran Pariwisata

Indikator Prosentase Promosi/Pemasaran Pariwisata, capaian pada tahun 2024 sebesar 90,47 % dibandingkan target tahun 2024 sebesar 100%, sehingga tidak mencapai target yang ditetapkan, dimana hanya 19 pemasaran pariwisata yang diselenggarakan tahun 2024, dibandingkan target sebanyak 21 pemasaran pariwisata

3. Meningkatnya Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif

Indikator ini menggambarkan bahwa target Usaha Ekonomi Kreatif sebanyak 5 usaha, dan direalisasikan sebanyak 5 usaha yakni: Nusa Nipa Creatif (Souvenir dan Kerang Laut, Usaha Liociri (Pisang dan Keripik Singkong), Usaha Weluwini (Keripik Pisang dan Singkong), Usaha Coffe (Jenis Usaha Kuliner/Kopi/Barista), Sanggar Mutu Lo'o (Usaha Seni mUsik dan Tari), dengan rencana tahun 2024 sebanyak 5 usaha, sehingga mencapai target indikator 100 %.

4. Meningkatnya Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dikembangkan

Indikator ini menggambarkan jumlah sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikembangkan tahun 2024 sebanyak 444 orang, dari target 437 orang, Tahun 2023 sebanyak 505 orang sehingga total secara keseluruhan s/d tahun 2024 sebanyak 949 orang untuk tahun 2024 dibuat dalam bentuk pelatihan, sosialisasi dan fasilitasi.

3. Pertanian

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama **Urusan Pilihan Pertanian** mendukung tercapainya sasaran-sasaran Misi Ketiga, yaitu : “**Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang Kompetitif dan Berkelanjutan**” yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja **Meningkatnya Produktifitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian dan Kelautan sebagai Sektor Dominan dan Penunjang Pangan Utama** dengan gambaran capaian dan target untuk masing-masing indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :

a. Padi Sawah

Capaian indikator produktivitas padi sawah adalah sebesar 5,02 ton/ha dari target 4,85 ton per/ha. Tidak tercapainya produktivitas ini dapat disebabkan beberapa faktor yaitu:

- Adanya fenomena elnino dimana hari tanpa hujan menjadi lebih panjang yang berdampak negatif pada sektor pertanian seperti kekeringan, sehingga menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman terganggu bahkan sampai gagal panen. Akibatnya penurunan kualitas tanaman yang berdampak pada tidak tercapainya target produktivitas. Fenomena elnino dapat menyebabkan terjadinya gagal tanam serta puso (kerusakan tanaman atau bagian tanaman). Puso dapat disebabkan oleh banjir, kekeringan, atau serangan OPT akibat kekeringan seluas 85,5 hektar.
- Terjadi serangan hama penyakit pada tanaman dengan intensitas sedang sampai berat seperti; hamakeongmas, penggerek batang, walang sangit, hama putih palsu serta wereng.
- Rendahnya penggunaan pupuk oleh petani dalam usaha taninya; dari alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Ende tercatat bahwa pupuk urea dari alokasi sebanyak 1.100 ton hanya diserap sebanyak 186,13 ton atau sebesar 16,9% dan pupuk NPK dari alokasi sebanyak 1.100 ton hanya diserap sebanyak 339,32 ton atau sebesar 30,8%, atau dengan kata lain sebagian petani tidak menggunakan pupuk dalam usaha tani padi.

- Sebagian besar petani menggunakan benih dari hasil panen tahun-tahun sebelumnya dimana kualitasnya semakin menurun. Bantuan benih dari pemerintah belum mengakomodir semua areal sawah yang ada.
- Bantuan sarana prasarana seperti mesin pompa air sebanyak 240 unit, handtraktor 35 unit, traktor 6 unit, 20 paket irigasi perpipaan, 11 paket irigasi perpompaan besar serta 2 paket rehabilitasi jaringan irigasi tersier untuk mengairi sawah pada periode musim tanam April–September atau musim tanam II sedikit mendongkrak produktivitas tanaman padi.

b. Padi Ladang

Capaian indikator kinerja produktivitas padi ladang adalah 3,02 ton/ha dari target 2,97 ton/ha. Jika dibandingkan dengan produktivitas padi ladang pada tahun 2023 yaitu sebesar 3,01 ton/ha maka tidak terjadi peningkatan produktivitas. Tidak terjadi peningkatan target tapi produktivitas disebabkan beberapa faktor yaitu :

- Adanya fenome Inino dimana berdampak negatif pada sektor pertanian seperti kekeringan, gagal panen serta penurunan kualitas tanaman sehingga target produktivitas yang telah ditetapkan tidak tercapai.
- Minimnya penggunaan pupuk oleh petani, dari alokasi pupuk bersubsidi untuk pupuk urea sebanyak 1.100 ton hanya digunakan sebanyak 186,13 ton atau sebesar 16,9% dan pupuk NPK sebanyak 1.100 ton digunakan sebanyak 339,32 ton atau sebesar 30,8%
- Tidak adanya bantuan benih padi unggul (benih label biru) serta pupuk pada tingkat petani,
dari total luas tanam seluas 2.367,75 hektar petani tidak menggunakan benih label unggul, yang digunakan adalah benih yang disiapkan oleh petani sendiri atau benih lokal.

c. Jagung

Capaian indikator produktivitas jagung adalah sebesar 3,22 ton/ha dari target 4,02 ton/ha. Adanya Penurunan produktifitas tahun 2024 dikarenakan :

- Adanya fenoma elnino dimana berdampak negatif pada sektor pertanian seperti kekeringan, gagal panen dan penurunan kualitas tanaman sehingga target produktivitas yang telah ditetapkan tidak tercapai dan akibatnya terjadi puso akibat kekeringan seluas 220 hektar.
- Minimnya penggunaan pupuk oleh petani; dari alokasi pupuk bersubsidi

untuk pupuk urea sebanyak 1.100 ton hanya digunakan sebanyak 186,13 ton atau sebesar 16,9% dan pupuk NPK sebanyak 1.100 ton digunakan sebanyak 339,32 ton atau sebesar 30,8%

- Minimnya bantuan benih jagung unggul (benih label biru) serta pupuk pada tingkat petani, untuk diketahui bantuan benih bersumber dari APBN untuk 200 hektar. Dari total luas tanam seluas 3.455,85 hektar, sekitar 3.155,85 hektar petani tidak menggunakan benih label unggul, tetapi malah memilih menggunakan benih yang disiapkan oleh petani sendiri.
- Serangan hama penyakit seperti Belalang, Penggerek Batang dan Tikus.

d. **Ubi Kayu**

Capaian indikator produktivitas ubi kayu sebesar 25,54 ton/ha dari target 26,00 ton/ha atau tidak mencapai target dengan selisih sebesar 0,46 ton/ha. Adanya penurunan target kinerja produktivitas tersebut disebabkan oleh:

- Adanya anomali iklim elnino yaitu memicu terjadinya kondisi kekeringan untuk wilayah Indonesia secara umum yang menyebabkan kemarau panjang/ curah hujan sedikit pada musim tanam Oktober–Maret.
- Tidak adanya bantuan bibit ubi yang unggul. Bibit ubi kayu selama ini yang diusahakan oleh petani adalah bibit lokal yang dihasilkan secara turun temurun karena tidak ada intervensi anggaran untuk pemulihan bibit tanaman ubi kayu di kabupaten Ende.

Dominan ubi yang tersedia yakni ubi kayu nuabosi yang didominasi ubi terigu sebagai ubi unggul sedangkan ada juga ubi kayu tana ai dan thoko Reko yang tersebar di kawasan Nuabosi. Untuk luas tanam ubi kayu di Kecamatan Ende seluas 128 hektar.

1.2. Meningkatnya produksi tanaman hortikultura

a. **Cabe Rawit**

Capaian indikator komoditi cabe rawit yaitu produktivitas sebesar 1,40 ton/ha dari target peningkatan produktivitas per tahun sebesar 1,39 ton/ha atau meningkat 0,01%. Tercapainya peningkatan indikator ini dapat disebabkan beberapa faktor seperti:

- ✓ Adanya gerakan tanam cabe dimana Dinas Pertanian Kab. Ende membagikan 3.000 anakan Kepada Dasa Wisma, Kelompok Tani dan kelompok masyarakat lainnya diwilayah Ende Tengah, Ende Selatan, Ende Utara dan Ende Timur.
- ✓ Adanya bantuan Pemerintah untuk mengatasi inflasi yaitu dengan membagi

anakan cabai di 5 Kecamatan yakni Kotabaru, Nangapanda, Ndona, Maurole serta Ende.

- ✓ Adanya intervensi bantuan benih cabai dan saran lainnya untuk tanaman cabai di Desa Maubasa Timur kecamatan Ndori dan Desa Saga Kec. Detusoko
- ✓ Adanya pendampingan yang intensif pada kelompok-kelompok petani hortikultura.
- ✓ Tidak adanya serangan organisme pengganggu tanaman secara sporadis pada tanaman cabai rawit.

b. **Cabe Besar**

Capaian indikator komoditi Cabe Besar tahun 2024 yaitu produktivitas sebesar 1,74 ton/ha dari target produktivitas tahun 2024 sebesar 1,60 ton/ha, meningkat 0,14% dari target yang ditetapkan. Tercapainya peningkatan target produksi ini dapat disebabkan beberapa faktor seperti:

- ✓ Adanya pendampingan oleh PPL yang intensif pada kelompok-kelompok tani hortikultura.
- ✓ Tidak adanya serangan organisme pengganggu tanaman secara sporadis pada tanaman cabai besar.

Namun akibat dari adanya anomali iklim elnino yaitu memicu terjadinya kondisi kekeringan sehingga jumlah luas tanam menurun dari tahun 2023. Di tahun 2023 luas tanam seluas 26,04 hektar sedangkan di tahun 2024 luas tanam menurun menjadi 21,85 hektar dengan produksi cabe besar 381 kwintal.

c. **Bawang Merah**

Capaian indikator Komoditi Bawang Merah yaitu produktivitas sebesar 2,66 ton/ha dari target tahun 2024 sebesar 2,46 ton/ha atau meningkat 0,20 ton/ha dari target yang ditetapkan. Tercapainya peningkatan target produksi ini dapat disebabkan beberapa faktor seperti:

- ✓ Ada bantuan Pemerintah berupa pupuk organik cair untuk komoditi hortikultura termasuk Tanaman bawang merah.
- ✓ Adanya pemanfaatan lahan, khususnya di lahan sawah tadah hujan pada periode Oktober –maret (Okmar) dimana setelah panen pada bulan maret-mei petani menanam bawang merah.
- ✓ Adanya pendampingan rutin dari PPL dilapangan untuk budidaya Bawang

Merah ditingkat

Kelompok tani/petani.

d. **Bawang Putih**

Capaian indikator Komoditi Bawang Putih yaitu produktivitas sebesar 2,66 ton/hadari target peningkatan produksi per tahun sebesar 2,31 ton/ha atau meningkat 0,35 ton/ha dari target yang ditetapkan. Tercapainya peningkatan target produksi ini dapat disebabkan beberapa faktor seperti; adanya pendampingan rutin dari PPL di lapangan untuk budidaya Bawang putih di tingkat kelompok tani/petani, namun akibat dari adanya anomali iklimlnino yaitu memicu terjadinya kondisi kekeringan sehingga jumlah luas tanam menurun dari tahun 2023. Di tahun 2023 luas tanam seluas 8 hektar sedangkan di tahun 2024 luas tanam menurun menjadi 5 hektar. Menurun seluas 3 hektar dengan produksinya 130 kwintal.

e. **Pisang**

Capaian indikator komoditi Pisang tahun 2024 berupa produktivitas sebesar 7,74 ton/ha dari target IKU tahun 2024 sebesar 8,41 ton/ha atau menurun 0,67 ton/ha dari target yang tetapkan. Faktor utama dari penurunan produktivitas adalah terserangnya pisang oleh penyakit darah pisang (*Banana Blood Disease*) yang disebabkan oleh bakteri *Ralstonia solanacearum* yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Ende.

Sampai dengan saat ini belum ada obat untuk menangani penyakit tersebut namun langkah-langkah pencegahan telah dilakukan oleh Dinas Pertanian yaitu dengan melakukan sosialisasi di lapangan tentang bagaimana cara meminimalisir penyebaran penyakit tersebut.

f. **Mangga**

Capaian indikator komoditi Mangga tahun 2024 berupa produktivitas sebesar 6,99 ton/ha dari target tahun 2024 sebesar 6,69 ton/ha. Pengembangan tanaman mangga tersebar di semua kecamatan dengan luas lahan terbesar ada di kecamatan Nangapanda yaitu seluas 28 hektar dengan produksi total kabupaten sebanyak 1.447 ton. Untuk pengembangan budidaya mangga dilakukan secara mandiri oleh petani.

g. **Alpukad**

Capaian indikator komoditi Alpukad tahun 2024 berupa produktivitas sebesar 5,04 ton/ha dari target tahun 2024 sebesar 5,10 ton/ha atau menurun 1,08 ton/ha. Pengembangan tanaman Alpukad

tersebar di semua kecamatan dengan luas lahan terbesar ada di kecamatan Ende yaitu seluas 9 hektar dengan produksi total kabupaten sebanyak 373 ton, untuk pengembangan budidaya Alpukad dilakukan secara mandiri oleh petani.

h. Jahe

Capaian indikator komoditi Biofarmaka dalam hal ini jahe tahun 2024 berupa produktivitas sebesar 12,97 ton/ha dari target tahun 2024 sebesar 11,93 ton/ha atau meningkat 1,04 ton/ha dari target yang ditetapkan. Luas tanam 181 hektar dengan Produksi jahe pada tahun 2024 sebanyak 2.348,29 ton dengan sentra produksi di kecamatan Kelimutu dan Lepembusu Kelisoke. Tercapainya target produksi ini dapat disebabkan beberapa faktor seperti adanya pasar yang jelas.

i. Kunyit

Capaian indikator komoditi Biofarmaka dalam hal ini kunyit tahun 2024 berupa produktivitas sebesar 7,70 ton/ha dari target tahun 2024 sebesar 7,68 ton/ha. Produksi kunyit pada tahun 2024 sebanyak 411,83 ton dengan sentra produksi di kecamatan Kelimutu dan Lepembusu Kelisoke. Budidaya masih mengandalkan swadaya petani untuk sarana produksinya.

j. Kencur

Capaian indikator komoditi Biofarmaka dalam hal ini kencur tahun 2024 berupa produktivitas sebesar 7,94 ton/ha dari target tahun 2024 sebesar 7,59 ton/ha. Produksi kencur pada tahun 2024 sebanyak 286 ton dengan sentra produksi di kecamatan Kelimutu, Wolojita dan Ndona Timur. Budidaya masih mengandalkan swadaya petani.

1.3. Meningkatnya produksi tanaman perkebunan (7 komoditi tiunggulan daerah)

a. Kelapa

Capaian indikator produksi komoditi kelapa tahun 2024 sebesar -0,69 % dari target tahun 2023 sebesar 0,15 % atau kurang -0,84 % dari target yang ditetapkan. Tidak tercapainya indikator kinerja ini disebabkan beberapa faktor seperti :

- Kondisi pertanaman kelapa saat dalam usia tua dan perlunya peremajaan kelapa di tingkat petani atau menggantikan tanaman kelapa yang tua dengan tanaman kelapa yang baru. Untuk diketahui pada tahun

2024 adanya kegiatan peremajaan tanaman kelapa 100 ha sumber dana APBN 2024 di Kecamatan Nangapanda, Kecamatan Ndori, Kecamatan Wolowaru, Kecamatan Ende Selatan dan Kecamatan Wewaria yang akan dipanen 3-4 tahun

- Adanya anomali iklim elnino yaitu memicu terjadinya kondisi kekeringan untuk wilayah Indonesia secara umum yang menyebabkan kemarau panjang sehingga dapat mengganggu pertumbuhan produksi kelapa.
- Pengelolaan tanaman kelapa yang tidak optimal antara lain; tidak adanya pemupukan Dan penyirian yang dapat menghambat pertumbuhan kelapa.

Luas lahan kelapa saat ini 12.331,16 hektar yang tersebar di 20 kecamatan dengan luas lahan terbesar di Kecamatan nangapanda yaitu 2.398,2 hektar.

b. Kakao

Capaian indikator produksi komoditi kakao tahun 2024 sebesar 0,52% dari target tahun 2024 sebesar 0,17% atau naik 0,35% dari target yang tetapkan. Tercapainya indikator kinerjainidisebabkan beberapa faktor seperti :

- Harga Kakao yang Stabil berkisar antara 90.000 sampai dengan 110.000 perKg, dengan
Harga yang stabil dan tinggi dipasaran, petani lebih termotivasi untuk meningkatkan produksi.
- Adanya Permintaan Pasar yang Meningkat untuk produk berbasis kakao yang tinggi di Pasar domestik dan internasional mendorong peningkatan produksi ditingkat petani.
- Adanya pendampingan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di lapangan tentang cara peningkatan produksi kakao antara lain melalui pemangkasan, pemupukan, peremajaan, sanitasi dan lain-lain.

Luas lahan kakao saat ini 9.771,96 hektar yang tersebar di 21 kecamatan dengan luas lahan terbesar di Kecamatan Nangapanda yaitu 1.638 hektar dan produksi kakao tahun ini sebanyak 4.603,22 ton.

c. Jambu Mete

Capaian indikator produksikomoditi Jambu Metetahun 2024 sebesar 0,88 % dari target tahun2024 sebesaro,05%, atau naik 0,54% dari

target yang tetapkan. Adanya peningkatan Produksi jambu mete pada tahun 2024 sebesar 3.988,21 ton dibandingkan tahun 2023 sebesar 3.953,34 ton atau meningkat 34,87 ton. Tercapainya indikator kinerja ini disebabkan beberapa faktor seperti :

- Peningkatan produksi tahun ini disebabkan karena rendahnya produksi tahun 2023 dikarenakan adanya hujan pada saat proses pembuahan sehingga produksitanaman jambu mete tidak maksimal, sedangkan pada tahun 2024 saat proses pembuahan pada bulan Juni–Oktober 2024 tidak ada curah hujan sehingga produksitanaman jambu mete lebih baik.
- Sekalipun ada peningkatan produksi namun belum maksimal dilihat dari rata-rata produktivitas tahun 2024 sebesar 756,91 Kg/Ha dimana untuk tanaman jambu mete produktivitas bisa mencapai 1.500 Kg/Ha, hal ini dikarenakan kurangnya peremajaan jambu mete di tingkat petani atau menggantikan tanaman jambu mete yang tua dengan tanaman jambu mete yang baru dan disebabkan juga minimnya penerapan inovasi oleh petani tentang cara peningkatan produksi jambu mete antara lain melalui pemangkas, pemupukan, peremajaan, sanitasi dan lain-lain.

Total luas lahan jambu mete di Kabupaten Ende seluas 9.254,36 hektar yang tersebar di 20 kecamatan dan yang terluas di kecamatan Wewaria yaitu seluas 1.638 hektar.

d. Kopi

Capaian indikator produksi komoditi Kopi tahun 2024 sebesar 15,94% dari target Tahun 2024 sebesar 0,16 % atau kurang 15,78% dari target yang tetapkan. Produksi kopi pada tahun 2024 sebesar 2.891,98 ton dan tahun 2023 sebesar 3.406,63 ton, maka terjadi penurunan produksi sebesar 514,65 ton. Belum tercapainya target Capaian indikator kinerja ini disebabkan beberapa faktor seperti :

- Penurunan produksi kopi setelah tahun dengan produksi tinggi adalah fenomena alami yang disebut "**biennial bearing**" atau "**alternasi hasil**". Ini terjadi karena tanaman kopi memiliki pola berbuah yang bergantian antara tahun produksi tinggi dan tahun produksi rendah (Setelah tahun dengan produksi tinggi, tanaman mengalami kelelahan karena telah menghabiskan banyak energi untuk pembentukan bunga dan buah Akibatnya pada tahun berikutnya, pertumbuhan bunga dan buah

menjadi lebih sedikit), hal ini dapat dilihat dari produksi yang tinggi pada tahun 2023.

- Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Pertanian Kabupaten Ende khususnya bidang perkebunan mendapatkan alokasi Program Kegiatan Peremajaan dan Pengembangan sumber dana APBN berupa bibit Kopi Arabika Sigurutan seluas 50 Ha yang diperdiksi akan berubah pada 3 tahun kedepan.

Luas lahan kopi di Kabupaten Ende seluas 7.738,2 Hektar yang terdiri kopi Arabika Seluas 3.311,31 hektar dan kopi Robusta seluas 4.426,89 hektar.

e. Pala

Capaian indikator produksi komoditi pala tahun 2024 sebesar 8,13% dari target tahun 2024 sebesar 1,22 %. atau menurun sebesar 6,91 % dari target yang tetapkan. Produksi pala pada tahun 2024 sebesar 238,21 ton dan tahun 2023 sebesar 259,30 ton, maka terjadi penurunan produksi sebesar 21,09 ton. Tidak tercapainya target indikator kinerja ini disebabkan beberapa faktor seperti :

Adanya anomali iklim elnino dimana kemarau yang berkepanjangan yang faktor utama turunnya produksi pala tahun 2024. Tanaman pala secara umum dapat tumbuh pada daerah dengan ketinggian sekitar 0-700 mdpl dengan kebutuhan curah hujan yang cukup tinggi yaitu 2000-3500 mm/tahunnya dan kelembapan udara sekitar 50-80%. Tanaman ini dapat tumbuh biasanya hingga ketinggian pohon 5-15 meter atau bahkan dapat mencapai 30 meter. Pala cocok tumbuh pada suhu udara sekitar 20-30°C dengan struktur tanah tempat tumbuhnya memiliki rentang yang cukup besar yaitu dari tanah padat hingga berpasir serta memiliki derajat keasaman 5,5-7. Sedangkan suhu pada tahun 2024 di Kabupaten Ende mencapai 34-36°C dan curah hujan kurang, hal inilah salah satu penyebab penurunan produksi tanaman pala.

1.4. Meningkatnya Produksi Hasil Ternak

Indikator kinerja ini didukung oleh indikator kinerja Produksi daging dan Indikator Kinerja Produksi telur. Data produksi daging merupakan hasil kompilasi data diambil dari data pemotongan di Rumah Potong Hewan (RPH) maupun data pemotongan di luar RPH yang tercatat serta laporan petugas lapangan dan asumsi pemotongan di luar RPH yang

tidak tercatat. Dengan demikian data konsumsi atau data pemotongan sangat mempengaruhi perhitungan data produksi daging.

Capaian Kinerja ini realisasi rata-rata 5,25% dari target 1,23% atau meningkat sebesar 4,02 dari target dengan rincian sebagai berikut :

a. Sapi

Capaian indikator produksi daging sapi tahun 2024 sebesar 5,89% dari target tahun 2024 sebesar 1,50%. Atau melebihi target sebesar 3,39% dari target yang tetapkan, tercapainya indikator ini disebabkan salah satu faktor yaitu adanya peningkatan konsumsi daging sapi di tingkat masyarakat. Terlihat Produksi daging sapi tahun 2024 sebanyak 463.908 Kg jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 438.112 Kg artinya ada peningkatan sebanyak 25.796 Kg, dengan populasi ternak sapi di kabupaten Ende sebanyak 37.995 ekor yang tersebar di 20 kecamatan; dengan populasi tertinggi ada di Kecamatan Wewaria sebanyak 9.871 ekor.

Untuk data Produksi daging sapi dari sumber utama yaitu Rumah potong hewan Nanganesa Kecamatan Ndona bahwa jumlah pemotongan sapi pada tahun 2024 sebanyak 1.211 ekor dengan produksi daging sebanyak 121.706 Kg.

b. Babi

Capaian indikator kinerja produksi daging ternak babi sebesar 4,98 % dari target sebesar 1,00%, ada peningkatan dari target yang ditetapkan sebesar 3,98%, hal ini disebabkan tingkat konsumsi daging cukup tinggi di tingkat konsumen. Untuk diketahui pada tahun 2024 tingkat konsumsi daging mencapai 713.176 kg.

populasi ternak babi di kabupaten Ende sebanyak 75.456 ekor yang tersebar di 21 kecamatan, dengan populasi tertinggi ada di Kecamatan Wewaria dengan populasi ternak babi sebanyak 10.122 ekor.

c. Kambing

Capaian indikator kinerja produksi daging untuk ternak kambing sebesar 2,16% dari target sebesar 1,00%. Melebihi target sebesar 1,16% dengan produksi daging sebanyak 46.000 Kg. Produksi daging babi meningkat jika dibandingkan dengan produksi tahun 2023 sebanyak 44.961 kg atau meningkat 1.039 Kg. jumlah pemotongan tercatat oleh

petugas sebanyak 1.840 ekor, konsumsi daging kambing terbanyak dari rumah makan yang tersebar di Kab.Ende.

populasi ternak kambing di kabupaten Ende sebanyak 27.276 ekor yang tersebar di 21 kecamatan, dengan populasi tertinggi ada di Kecamatan Nangapanda dengan populasi ternak kambing sebanyak 2.869 ekor.

d. Ayam

Capaian indikator kinerja produksi daging untuk ternak ayam sebesar 7,90 % lebih tinggi dari target yaitu 1,00%, atau meningkat 6,90% dengan produksi daging sebanyak 227.167 Kg, adanya peningkatan ini dikarenakan tingginya tingkat konsumsi daging ayam ditingkat konsumen/masyarakat.

populasi ternak ayamdi kabupaten Ende sebanyak 548. 762 ekor yang terbagi menjadi ayam bukan ras (Buras) sebanyak 307.131, ayam petelur sebanyak 39.700 ekor dan ayamras pedaging 201.932 ekoryang tersebar di 21 kecamatan.

b. Perdagangan dan Perindustrian

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama **Urusan Perindustrian** mendukung tercapainya sasaran-sasaran Misi Ketiga yaitu:"Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang Kompetitif dan Berkelanjutan ", sebagai berikut:

- Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Pendapatan IKM yang dibina.

Indikator tersebut dijabarkan melalui 3 Program pendukung Yakni Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Data IKM yang aktif Tahun 2023 s/d 2024 setelah dibina mengalami peningkatan pendapatan sebesar 10%. Nilai pendapatan IKM diperoleh dari Nilai Penjualan dikurangi Biaya Produksi. Tahun 2023 ditargetkan sebesar 10% dan realisasi 7,14% dengan Perhitungan/Formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{Total Pendapatan IKM setelah dibina} - \text{Total Pendapatan IKM sebelum dibina}}{\text{Total Pendapatan IKM sebelum dibina}} \times 100\%$$

=Rp9.318.192-Rp8.697.060x100%

Rp 8.697.060

= 7,14%

Tahun 2024 ditargetkan sebesar 10% dan realisasi 10% dengan Perhitungan/Formulanya sebagai berikut :

Total Pendapatan IKM setelah dibina-Total Pendapatan IKM sebelum dibinaX100% Total Pendapatan IKM sebelum dibina

=Rp10.544.602-Rp9.585.577x100%

Rp 9.585.577

= 10%

- Indikator Persentase Pelaku Usaha yang Tertib Ukur dan Tertib Niaga.

Indikator tersebut dijabarkan melalui Program pendukung yakni Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen melalui Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, tera Ulang dan Pengawasan. Dengan 3 (Tiga) Sub Kegiatan yakni : Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera-Tera Ulang, Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal dan Penyidikan Metrologi Legal. Sasarannya meliputi para Pemilik Toko/Kios dan Distributor di Kabupaten Ende.

Tahun 2024 ditargetkan 100 % yakni sebanyak 100 orang pelaku usaha yang tertib ukur dan tertib niaga dengan realisasi sebanyak 91 orang pelaku usaha yang tertib ukur dan tertib niaga@ 91 %. Berdasarkan Perhitungan/Formulanya sebagai berikut :

=Total realisasi Pelaku Usaha yang Tertib Ukur dan Tertib Niaga Tahun 2024X100% Jumlah Target Pelaku Usaha yang Tertib Ukur dan Tertib Niaga Tahun 2024

=91X 100% =91%

- Indikator Persentase Peningkatan Nilai Perdagangan Komoditi Unggulan Daerah dijabarkan melalui Program pendukung yakni Program Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan, Program peningkatan

Sarana Distribusi Perdagangan dan Program Stabilisasi Harga barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Pengembangan Ekspor (Volume antar Pulau) yang terdiri dari beberapa jenis Komoditi Unggulan

Daerah yang di antar pulaukan yakni: Kopra, Kemiri, Kopi, Kakao, Jambu Mente, Cengkeh dan Kelapa.

Tahun 2024 ditargetkan sebesar 19.100 Ton@0,001% dan realisasinya sebesar 17.802 ton @-6,673% (Belum mencapai Target). Data tersebut bersumber dari Kantor Kesyah bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Ende. Hal tersebut disebabkan karena Komoditi yang diantar pulaukan tidak selamanya melalui Pelabuhan laut di Kabupaten Ende dan tercatat oleh Kantor Kesyah bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Ende, tetapi juga melalui Angkutan Darat dan pelabuhan laut lainnya di daratan Flores .

Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi telah dilakukan. Hal tersebut disebabkan karena Komoditi yang diantarpulaukan tidak selamanya melalui Pelabuhan Laut di Kabupaten Ende dan tercatat oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Ende, tetapi juga melalui Angkutan Darat dan pelabuhan laut lainnya di daratan Flores. Solusi yang dilakukan adalah tetap melakukan koordinasi dengan para pelaku Perdagangan Antar Pulau untuk memantau komoditi yang di antar pulaukan.

c. Transmigrasi

Indikator Capaian kinerja Program dan kegiatan urusan Transmigrasi adalah:

1) Jumlah Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)

Pada Tahun 2024 belum terdapat Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi yang disiapkan untuk menjadi pedoman penyusunan Satuan Pemukiman Baru yang sudah direncanakan di tahun 2013 dan sementara ditindak lanjuti sampai pada tahun 2024 dikarenakan keterbatasan anggaran.

1) Jumlah Kawasan Transmigrasi Yang Dibangun / kembangkan

Pada tahun 2024 Satuan pemukiman dalam Kawasan transmigrasi yang dibangun/kembangkan belum ada dikarenakan keterbatasan anggaran.

2) Jumlah Kawasan Transmigrasi Yang dikembangkan

Pada tahun 2024 ada kegiatan Pelatihan yaitu 2 Jenis pelatihan yaitu pelatihan Maubeler dan Handcraf bagi warga transmigrasi di Desa Kolikapa-Kecamatan Maukaro untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat bagi 20 Kepala Keluarga di lokasi Satuan Pemukiman Kawasan Transmigrasi.

2.1.3.4. Fokus Layanan Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Capaian indikator-indikator kinerja utama Urusan Perencanaan, untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran Misi Kelima yaitu : “Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat”, yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi :

- a. Indikator presentasi konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD juga mencapai target yang ditetapkan.

Indikator ini diukur melalui hasil perbandingan jumlah program yang direncanakan di dalam RKPD/jumlah program yang direncanakan di dalam RPMD x 100%. Hal ini menggambarkan bahwa semua perangkat daerah konsisten merencanakan program sesuai dengan program yang ditetapkan dalam RPJMD Kab. Ende 2019-2014.

- b. Indikator presentasi penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD juga mencapai target yang ditetapkan.

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah program yang dianggarkan (APBD)/jumlah program yang direncanakan (RKPD)x100%. Pencapaian 100% ini menggambarkan bahwa konsistensi pelaksanaan program dalam RKPD Kab. Ende Tahun 2025 juga sebanding dengan program dalam APBD Kab. Ende Tahun 2024

- c. Indikator presentasi pengendalian dan evaluasi hasil rencana pembangunan juga mencapai target yang ditetapkan.

Indikator ini diukur dengan menghitung rata-rata persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Renstra dengan Renja, RPJMD dengan RKPD, RKPD dengan KUA PPAS dengan menggunakan SIPD Bappeda dapat menjaga konsistensi kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara dokumen perencanaan Kab. Ende Tahun 2024

- d. Indikator presentasi kajian yang digunakan dalam perumusan perencanaan pembangunan belum mencapai target yang diharapkan.

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah kajian yang digunakan untuk perumusan perencanaan pembangunan dibagi jumlah kajian yang tersusun x 100%. Indikator persentase kajian yang digunakan dalam perumusan perencanaan pembangunan belum mencapai target karena ada beberapa kajian yang telah direncanakan pada Tahun 2024

melalui kajian akademisi belum bisa terlaksana sebagai akibat waktu pelaksanaan yang tidak cukup.

Capaian Kinerja Program sesuai dengan Target Kinerja

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama **Fungsi Keuangan** mendukung tercapainya sasaran-sasaran Misi ketiga, yaitu : “Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang Kompetitif dan Berkelanjutan”, yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi:

1) Persentase Pendapatan dari Retribusi dan Pajak Daerah terhadap PAD

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende secara makro pada tahun 2024 menetapkan target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 101.871.980.156 dengan realisasi Rp. 63.555.327.443 atau 62,39 %.

Realisasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah diperoleh dari Presentase Pendapatan Dari Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap PAD, dimana Tahun 2024 Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp. 17.393.358.960,- dengan Target sebesar Rp. 33.138.224.500 dan Realisasi Retribusi Daerah Rp. 3.690.728.675,- dengan Target sebesar Rp. 5.638.548.000,-

Capaian Kinerja diperoleh dari akumulasi realisasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 21.084.087.635,- dibandingkan dengan Target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 101.871.980.156 maka capaian kinerja adalah 20,70 %.

A. Capaian Kinerja Program sesuai dengan Target Kinerja

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama **Fungsi Keuangan** mendukung tercapainya sasaran-sasaran kinerja Misi kelima, yaitu: “Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat”, yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi:

1. Terwujudnya Ketepatan Waktu Penyusunan dan Penetapan APBD

Pada tahun 2024 capaian indikator kinerja penyusunan dan penetapan APBD di lakukan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

2. Meningkatnya Opini BPK

Capaian indikator meningkatnya opini BPK pada tahun 2023 target dan capaian realisasinya yaitu WTP, sedangkan untuk tahun 2024 targetnya WTP dan capaian realisasinya belum ada karena BPK belum selesai melaksanakan audit.

3. Terwujudnya Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

Pada tahun 2023 capaian indikator penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah tepat waktu karena penyampaian dokumen RKBMD pengadaan disampaikan ke pengguna barang paling lambat minggu ketiga bulan Juni dan di tahun 2024 dokumen RKBMD dari SKPD dilaporkan pada minggu kedua bulan Juni.

A. Capaian Kinerja Program sesuai dengan Target Kinerja.

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama **Fungsi Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia** mendukung tercapainya sasaran-sasaran Misi Kelima yaitu: "Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat", yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi :

1) Persentase ASN yang mengikuti diklat kompetensi

Tahun 2024 target untuk indikator ini sebesar 9,50 %. Jumlah ASN yang mengikuti diklat sebanyak 586 dari Total ASN sebanyak 6.342 sehingga realisasinya sebesar 9,24%, dan capaiannya 97,26%. Indikator ini belum sampai pada target yang diharapkan karena pada tahun 2024 penambahan jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis fungsional atau uji kompetensi tidak banyak jumlahnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yakni :

1. Jumlah pejabat struktural yang mengikuti Diklat PIM II, III, dan IV dari tahun ke tahun tidak banyak disebabkan karena keterbatasan anggaran untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan yaitu biaya pengiriman peserta untuk mengikuti diklat ke badan diklat terakreditasi sangat besar.
2. Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi tidak banyak
3. Pelaksanaan tugas dan kegiatan yang menyangkut pendidikan dan

pelatihan kepemimpinan selalu berkoordinasi dengan lembaga yang terakreditasi yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT.

2) Persentase Pelayanan Kepegawaian

Target indikator Persentase Pelayanan kepegawaian tahun 2024 sebesar 81%. Jumlah pelayanan kepegawaian kepada ASN sebanyak 6342 dari total ASN pada akhir tahun 2024 sebanyak 6342. Sehingga realisasinya sebesar 100%, dan capaiannya 123,46%. Pada tahun 2024 selain pelayanan kepegawaian rutin, juga ada kegiatan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi data ASN yang menyebabkan seluruh ASN terlayani terkait pemutakhiran data. Hal ini menyebabkan persentase pelayanan kepegawaian sebesar 100%. Capaian indikator ini bernilai cukup besar karena target yang ditentukan pada awalnya adalah 80,20%.

B. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Pengembangan Pegawai:
 - ✓ Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas lingkup Pemerintah Kabupaten Ende tidak dapat di laksanakan.
 - ✓ Uji Kesesuaian Kompetensi (Job Fit) JPT Pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ende tidak Dapat dilaksanakan karena tidak mendapat ijin dari Menteri Dalam Negeri.
 - ✓ Pengisian Jabatan Administrator dan Pengawas tidak dapat di laksanakan karena belum mendapat ijin Pelantikan dari Menteri Dalam Negeri sampai dengan berakhirnya Pertimbangan Teknis Kepala BKN tentang pengisian Jabatan Administrator dan Pengawas.
 - ✓ Pengukuhan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional Dinas Perhubungan Kabupaten Ende belum dapat di laksanakan sampai dengan berakhirnya Pertimbangan Teknis Kepala BKN tentang Pengukuhan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional.
 - ✓ Kurangnya kesadaran sebagian ASN akan tugas pokok dan fungsikjerjanya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat serta tanggung jawabnya dalam menjunjung tinggi martabat pemerintah dan martabat PNS (Indisipliner

terhadap ketentuan jam kerja, masalah etika dan moralitas serta tindak pidana baik tindak pidana khusus maupun tindak pidana umum), pembinaan disiplin Aparatur Sipil Negara secara khusus terhadap pelanggaran disiplin masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja oleh atasan secara berjenjang belum maksimal.

- **Mutasi dan Informasi Kepegawaian:**

- ✓ Masih terdapat Anomali Data (Disparitas Data) SKP tahun sebelumnya sebanyak 32 orang dan NIK belum valid sebanyak 29 orang.
- ✓ Arsip Digital dokumen kepegawaian masih secara manual pada Komputer sehingga rawan terjadi Kehilangan data pegawai.
- ✓ Penarikan data pegawai dan perubahan data pegawai / peremajaan pada aplikasi SIASN sering terkendala maintenance aplikasi SIASN.
- ✓ Keterlambatan perangkat daerah dalam menjawab permohonan pertimbangan teknis.
- ✓ Masih terdapat PNS Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan yang tidak dapat diproses kenaikan pangkat karena kekurangan Angka Kredit

- **Pengembangan SDM:**

- ✓ Sumber Daya Manusia Aparatur khusus dalam pengelolaan Pengembangan SDM jumlahnya masih kurang.
- ✓ Belum terinventarisasinya seluruh data terkait dengan pengembangan kompetensi (diklat-diklat) bagi ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Ende.
- ✓ Kurangnya sosialisasi terkait regulasi tentang pengembangan SDM Kepada ASN

- **Kesejahteraan Pegawai, Cuti dan Pensiun:**

- ✓ Terbatasnya SDM Aparatur dalam bidang teknologi informasi.
- ✓ Terdapat sejumlah kegiatan secara legal formal berada dalam kewenangan Instansi luar dan prosesnya masih semi digitalisasi yakni antara lain Penerbitan Kartu Istri, Kartu Suami dan Kartu Pegawai berada dalam kewenangan Badan Kepegawaian Negara Regional X Denpasar dan Penerbitan Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, berada dalam kewenangan Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri.

2. Solusi

Untuk mengatasi hambatan tersebut diperlukan upaya-upaya penanggulangan antara lain sebagai berikut:

- Sejalan dengan ketentuan Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menegaskan bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Wali kota atau Wakil Wali kota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum Tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri maka :

- ✓ Pemerintah Kabupaten Ende melalui BKPSDM Kabupaten Ende terus berkoordinasi dengan Kementerian

Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara dan Gubernur NTT agar Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas dapat di laksanakan tahun 2025.

- ✓ Menyiapkan surat perpanjangan rekomendasi hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama ke Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- Menyiapkan anggaran serta menyediakan administrasi pelaksanaan Uji Kesesuaian Kompetensi (Job Fit) JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende.
- Berkoordinasi dengan BKN dan KEMENDAGRI serta menyiapkan administrasi Pengisian Jabatan Administrator dan Pengawas.
- Berkoordinasi dengan BKN dan KEMENDAGRI serta menyiapkan administrasi Pengukuhan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional Dinas Perhubungan Kabupaten Ende.
- Untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS

dilakukan upaya preventif (pencegahan) seperti sosialisasi berkelanjutan tentang disiplin ASN dan kode etik PNS lingkup Pemkab. Ende serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian, himbauan melalui surat edaran tentang etika PNS, disiplin kerja pegawai, serta melakukan monitoring dan pengawasan berjenjang. Selain itu juga melakukan penindakan (ASN yang melakukan pelanggaran patut diberikan pembinaan dan penjatuhan hukuman). Untuk keterbatasan anggaran solusinya adalah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk biaya kegiatan preventif, penindakan sampai pada biaya penyelesaian masalah hukum sebagai akibat dari keputusan atau tindakan hukum yang dilakukan pada ASN yang melakukan pelanggaran disiplin serta melanggar peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian.

- Monitoring, konsultasi dan evaluasi secara langsung maupun tidak langsung terhadap PD yang melapor.
 - Terus melakukan peremajaan dengan melibatkan bidang-bidang yang telah diberikan kewenangan untuk menginput data.
 - Bersurat kesetiap perangkat daerah agar segera menyampaikan SKP dan menghubungi ASN bersangkutan Untuk menyelesaikan NIK dan KK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - Melakukan penyimpanan melalui google drive dengan biaya internet pertahun 1.350.000,-
 - Melakukan koordinasi dengan BKN terkait kendala intenance aplikasi SIASN.
 - Melakukan Penarikan data dan peremajaan data secara berkala.
 - Tetap melakukan koordinasi permohonan pertimbangan teknis baik melalui surat maupun telpon.
 - Melakukan koordinasi dengan Bidang Pengembangan Pegawai, Pengelola Kepegawaian pada Unit Kerja ASN dan ASN itu sendiri terkait kendala kenaikan pangkat.
 - Mengirim ASN di Bidang Pengembangan SDM untuk mengikuti bimbingan teknis / diklat TOT dan MOT.
 - Diharapkan dukungan anggaran yang lebih memadai, terutama untuk peningkatan pengembangan SDM bagi ASN terutama mengenai diklat fungsional, diklat struktural dan melalui jalur pendidikan formal.
 - Diharapkan adanya pengalokasian anggaran yang cukup untuk mengakomodir kegiatan bimtek peningkatan
- SDM aparatur dibidang teknologi informasi. Jika anggaran terbatas sehingga tidak dapat mengakomodir kegiatan bimtek, maka solusi lain yakni penempatan tenaga ASN yang memiliki kompetensi di bidang IT.

A.Capaian Kinerja Program sesuai dengan Target Kinerja

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama **Fungsi Pengawasan** untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran Misi Kelima yaitu : Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat”, yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi :

1. Sasaran Meningkatnya Birokrasi yang bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien

1) Presentase Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi Temuan BPK

Pada Tahun 2024 Jumlah Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti sebanyak 768 temuan dari jumlah Rekomendasi BPK sebanyak 1017 temuan sehingga capaian indikatornya sebesar 75,52%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar 61,96 %, maka ada peningkatan capaian.

2) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan APIP

Pada Tahun 2024 Jumlah Rekomendasi APIP Yan Ditindaklanjuti sebanyak 1912 rekomendasi dari Jumlah Rekomendasi APIP sebanyak 2844 rekomendasi sehingga capaian indikator ini sebesar 67,23% belum mencapai target dari target sebesar 100%.

A.Capaian Kinerja Program sesuai dengan Target Kinerja

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama **Fungsi Penunjang** yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi : Sasaran Meningkatnya Koordinasi Urusan Pemerintahan Daerah

1)Penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat Tepat Waktu

Indikator ini diukur berdasarkan penyerahan LPPD Pemerintah Kabupaten Ende yang dikirimkan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pada tahun 2024 LPPD Pemerintah Kabupaten Ende telah dikirimkan pada bulan Maret 2024 sehingga capaian kinerja atas indikator ini memenuhi target yang ditetapkan.

2) Persentase kerjasama yang aktif

Indikator ini diukur dengan membandingkan antara jumlah perjanjian kerja sama yang diselenggarakan dengan jumlah perjanjian kerja sama yang direncanakan. Pada tahun 2024 jumlah perjanjian kerja sama yang diselenggarakan sebanyak 19 PKS sedangkan jumlah perjanjian kerja sama yang direncanakan sebanyak 25 PKS dengan target sebesar 100%. Sehingga realisasi atas indikator ini diperoleh sebesar 76% dengan capaian kinerja sebesar 76%.

3) Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat

Indikator ini diukur dengan membandingkan antara jumlah dokumen dan laporan koordinasi bidang fasilitasi bina mental, kesejahteraan sosial dan masyarakat yang dihasilkan dengan jumlah dokumen dan laporan koordinasi

bidang fasilitasi bina mental, kesejahteraan sosial dan masyarakat yang direncanakan. Pada tahun 2024 jumlah dokumen dan laporan koordinasi bidang fasilitasi bina mental, kesejahteraan sosial dan masyarakat yang dihasilkan sebanyak 22 dokumen sedangkan jumlah dokumen dan laporan koordinasi bidang fasilitasi bina mental, kesejahteraan sosial dan masyarakat yang direncanakan sebanyak 41 dokumen dengan target sebesar 100%. Indikator ini tidak memenuhi target yang ditetapkan dengan nilai capaian kinerja sebesar 53,66%.

4) Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang diundangkan menjadi Peraturan Daerah.

Indikator ini diukur dengan membandingkan antara jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang direncanakan. Pada tahun 2024 jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan sebanyak 5 Perda sedangkan jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang direncanakan sebanyak 6 Ranperda dengan target sebesar 100%. Sehingga realisasi atas indikator ini diperoleh sebesar 83,33% dengan capaian kinerja sebesar 83,33%. Capaian atas indikator ini belum memenuhi target yang ditetapkan. Salah satu faktor penghambat adalah dukungan dari Perangkat Daerah penginisiasi dan koordinasi yang belum optimal dengan lembaga legislatif dalam hal ini yakni DPRD Kabupaten Ende sebagai pihak yang mensahkan atas penetapan dari produk hukum ini.

5) Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang pembangunan

Indikator ini diukur dengan membandingkan antara jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan fisik pembangunan yang dihasilkan dengan jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan fisik pembangunan yang direncanakan. Pada tahun 2024 jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan fisik pembangunan yang dihasilkan sebanyak 24 laporan sedangkan jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan fisik pembangunan yang direncanakan juga sebanyak 24 laporan dengan target sebesar 100%. Sehingga realisasi atas indikator ini diperoleh sebesar 100% dengan capaian kinerja yang memenuhi target sebesar 100%.

6) Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian

Indikator ini diukur dengan membandingkan antara jumlah dokumen dan laporan hasil koordinasi dan monitoring BUMD, BLUD, Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil yang dihasilkan dengan jumlah dokumen dan

laporan hasil koordinasi dan monitoring BUMD, BLUD, Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil yang direncanakan. Pada tahun 2024 jumlah dokumen dan laporan hasil koordinasi dan monitoring BUMD, BLUD, Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil yang dihasilkan sebanyak 3 dokumen sedangkan jumlah dokumen dan laporan hasil koordinasi dan monitoring BUMD, BLUD, Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil yang direncanakan juga sebanyak 3 dokumen dengan target sebesar 100%. Sehingga realisasi atas indikator ini diperoleh sebesar 100% dengan capaian kinerja yang memenuhi target sebesar 100%.

7) **Presentase penanganan permasalahan kebijakan bidang SDA**

Indikator ini diukur dengan membandingkan antara jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan bidang SDA yang dihasilkan dengan jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan bidang SDA yang direncanakan. Pada tahun 2023 jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan bidang SDA yang dihasilkan sebanyak 1 dokumen sedangkan jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan bidang SDA yang direncanakan juga sebanyak 1 dokumen dengan target sebesar 100%. Sehingga realisasi atas indikator ini diperoleh sebesar 100% dengan capaian kinerja yang memenuhi target sebesar 100%.

8) **Presentase pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik**

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah OPD yang menginput dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dalam aplikasi SPSE dengan jumlah OPD yang wajib menginput dan mengumumkan RUP dalam aplikasi SPSE. Pada tahun 2024 berdasarkan data dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ende jumlah OPD yang menginput dan mengumumkan RUP dalam aplikasi SPSE sejumlah 114 OPD dari target sejumlah 114 OPD. Sehingga realisasi kinerja atas indikator ini sebesar 100% dengan besaran capaian kinerja sebesar 100%. Target serta realisasi kinerja yang tercapai atas 114 OPD ini termasuk diantaranya yakni 54 Perangkat Daerah beserta unit kerja/bagian dari masing-masing Perangkat Daerah dimaksud.

9) **Indeks Tata Kelola Pengadaan**

Nilai berupa bobot pada indikator ini diperoleh dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia. Berdasarkan

hasil penilaian oleh LKPP besaran Indeks Tata Kelola Pengadaan untuk Pemerintah Kabupaten Ende sebesar 42,36 dengan kategori "Kurang". Capaian Indikator ini belum memenuhi target yang ditetapkan. Rendahnya hasil penilaian oleh LKPP dikarenakan rendahnya nilai e-purchasing (katalog elektronik) dan ketersediaan SDM UKPBJ (Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa) yang masih jauh dari target yang ditentukan oleh LKPP-RI.

10) Nilai AKIP Setda

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Daerah berasal dari proses penilaian atas LKj-IP Sekretariat Daerah yang dinilai oleh tim dari Inspektorat Daerah. Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD oleh Inspektorat Kabupaten yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi, Sekretariat Daerah memperoleh nilai 69,15 dengan predikat "B".

11) Persentase Capaian Kinerja bidang Administrasi Umum serta layanan dinas kepada pimpinan (Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda)

Indikator ini diukur dengan membandingkan antara jumlah capaian realisasi kegiatan pelayanan kedinasan KDH, WKDH, dan Sekda yang dilaksanakan dengan jumlah kegiatan pelayanan kedinasan KDH, WKDH, dan Sekda yang direncanakan. Pada tahun 2024 jumlah capaian realisasi kegiatan pelayanan kedinasan KDH, WKDH, dan Sekda dilaksanakan oleh 3 (tiga) Bagian yakni Bagian Umum, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, dan Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan Pelaksanaan kegiatan sebanyak 4 kegiatan dengan capaian kinerja diperoleh sebesar 95% dimana faktor penyebab tidak terpenuhinya target ini dikarenakan salah satu target dalam dokumen pelaksanaan kegiatan di Bagian Umum yakni Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditargetkan sebanyak 4 dokumen dari 4 orang terealisasi sebanyak 3 dokumen dari 3 orang selama tahun 2024, sehingga capaian kegiatan ini tidak memenuhi target yang ditetapkan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Tingkat Komsumsi Rumah Tangga

Persentase pengeluaran makanan dari suatu rumah tangga terhadap pengeluaran total mencerminkan kemampuan ekonomi rumah tangga.

Semakin tinggi persentasenya maka semakin rendah tingkat kesejahteraan atau semakin miskin rumah tangga tersebut. Data rata-rata pengeluaran untuk konsumsi penduduk Kabupaten Ende selama periode Tahun 2017-2023 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran kelompok makanan cenderung menurun dari 62,39% pada Tahun 2017 menjadi 53,89% pada Tahun 2023. Sebaliknya, rata-rata pengeluaran untuk kelompok bukan makanan cenderung meningkat dari 37,61% menjadi 46,11% dalam periode tahun yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan rumah tangga atau penduduk di Kabupaten Ende semakin meningkat.

Tabel 2.31. Rata-rata Pengeluaran Perkapita perbulan (Rp) di Kabupaten Ende

Tahun 2009-2023

Tahun	Makanan	Bukan Makanan	Seluruh Pengeluaran
2009	188.771 (61,35%)	118.938 (38,65%)	307.709
2010	212.714 (61,33%)	134.139 (38,67%)	346.853
2011	231.248 (59,99 %)	154.223 (40,01 %)	385.471
2012	295.873 (56,94 %)	223.715 (43,06 %)	519.588
2013	216.823 (57,91 %)	216.823 (42,09 %)	515.147
2014	327.976 (56,99 %)	247.544 (43,01 %)	575.520
2015	338.518 (57,67 %)	248.472 (42,33%)	586.990
2016	352.019 (56,63 %)	269.533 (43,36%)	621.533
2017	436.895 (62,39 %)	263.331 (37,61 %)	700.226
2018	429.670 (59,44%)	293.210 (40,56%)	722.880
2019	423.685 (58,84%)	296.403 (41,16%)	720.088
2020	468.612 (54,28%)	394.683 (45,72%)	863.295
2021	501.016 (55,53%)	401.293 (44,47%)	902.309
2022	560.519 (55,58%)	447.930 (44,42%)	1.008.449
2023	604.521 (53,89%)	517.312 (46,11%)	1.121.834

Sumber:Susenas 2009-2023 PDRB

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a. Sarana Transportasi

Jalan sebagai sarana penunjang transportasi memiliki peran penting khususnya untuk transportasi darat. Guna mendukung transportasi darat, di kabupaten Ende telah dibangun jalan sepanjang 1.453,9 km yang terdiri dari jalan Negara sepanjang dan 130,30 km, jalan provinsi 160,30 km, jalan kabupaten 824,60 km dan jalan poros desa sepanjang 338,70 km.

Adanya penurunan panjang jalan dalam kondisi baik dari tahun 2019 ke tahun 2020 disebabkan adanya perubahan standar jalan kondisi baik, sesuai Peraturan

Menteri PUPR Nomor 13 tahun 2011 yang menetapkan jalan dalam kondisi baik dengan kriteria, sebagai berikut:

- Aspal
- Memiliki drainase
- Memiliki bahu jalan/trotoar
- Permukaan jalan rata
- Permukaan jalan tidak bergelombang

Tabel 2.30. Kondisi Jalan dan Alat Transportasi di Kabupaten Ende
Tahun 2020-2022

Uraian	2020	2021	2022
Kondisi Jalan (km)			
Baik	291,33	328,31	342,80
Sedang	5,90	82,95	62,50
Rusak	21,72	41,01	38,07
Rusak Berat	496,05	362,73	371,63
Kendaraan (Unit)			
Mobil Penumpang	11.189	11.325	11.485
Mobil Barang	3.120	3.270	3.451
Mobil Bus	203	207	212
Kendaraan Khusus	52	52	53
Sepeda Motor	54.955	56.411	58.590

Sumber: Ende Dalam Angka 2021-2022

b. Sarana Telekomunikasi

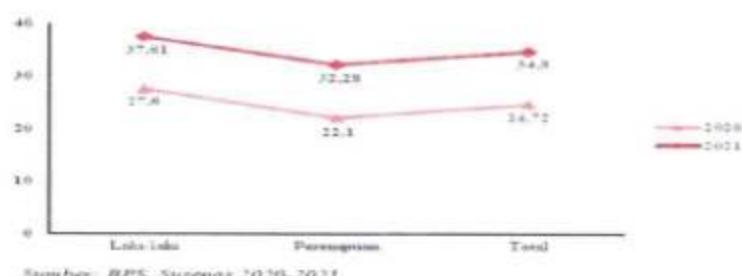
Sesuai dengan perkembangan teknologi, alat komunikasi seperti telepon, telepon selular (handphone/HP), dan komputer menjadi salah satu fasilitas perumahan yang sangat pesat pertumbuhannya. Data Susenas Tahun 2021 menunjukkan bahwa 81,24% penduduk di Kabupaten Ende menggunakan telepon seluler dan sisanya 18,76% tidak menggunakan telepon selular.

Tabel 2.31. Persentase Penduduk Menurut Penggunaan dan Kepemilikan Telpon Selular Tahun 2021

No	Kepemilikan Sarana Komunikasi	2021 (%)
1	Menggunakan Telepon Selular	81,24
2	Memiliki Telepon Selular	46,31
3	Tidak Memiliki Telepon Selular	53,69
4	Tidak Menggunakan Telpon Selular	18,76

Sedangkan untuk Persentase penduduk berusia 5 tahun ke atas yang mengakses internet meningkat hingga sepuluh persen, dibandingkan pada tahun 2020 yaitu 24,72 persen. Penduduk berjenis kelamin laki-laki yang mengakses internet pada tahun 2021 sebanyak 37,61 persen sedangkan penduduk perempuan sebanyak 32,28 persen.

Grafik 2.1 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun keatas yang Mengakses Internet Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2021



c. Perbankan

Perkembangan sektor perbankan di Kabupaten Ende selama periode 2013-2015 mengalami peningkatan jumlah simpanan. Tabungan menyumbang jumlah tertinggi dari total dana bank yang tersimpan pada Tahun 2015 dengan jumlah 371.379,3 miliar rupiah, selanjutnya simpanan berjangka sebanyak 88.776,1 miliar rupiah, mengalami peningkatan dari Tahun 2014. Dana Giro yang disimpan di bank pada Tahun 2015 mencapai 67.033,9 miliar rupiah meningkat dari 49.206,9 miliar rupiah pada Tahun 2014. Sementara itu, posisi tabungan ONH pada tahun 2015 sebanyak 2.774,6 Juta rupiah, masih sama dengan Tahun 2014.



Posisi pinjaman yang diberikan beberapa Bank di Kabupaten Ende dalam kurun waktu 2013- 2015 terus meningkat. Pada tahun 2013 posisi pinjaman bank sebanyak 479.686 miliar meningkat menjadi 527.234 miliar rupiah pada tahun 2014, dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 668.652 miliar.

Dilihat menurut sektor ekonomi, posisi pinjaman, yaitu: pertanian (0,18%), pertambangan (0,03) industri (0,69%), perdagangan (29,24%), dan lain-lain (69,86%).

d. Jumlah Perusahaan

Jumlah Perusahaan yang teridentifikasi sebanyak 13 perusahaan, yaitu: 1) PT. Alfa Mart yang berlokasi di beberapa wilayah di Kabupaten Ende dengan nilai investasi masing-masing >Rp.500.000.000,-; 2) PT. Krisna Pratama Teknik dengan nilai investasi sebesar ± Rp.4,1 miliar; 3) Toko Kembang dengan nilai investasi sebesar ± Rp. 2 miliar; 4) Toko Gloria dengan nilai investasi sebesar ± Rp.4 miliar; 5) PT.Nusa Bunga dengan nilai investasi sebesar ±Rp.1,3 Miliar; 6) PT. Beta Tirta dengan nilai investasi sebesar ± Rp.900 juta; 7) PT. Gempar Cahaya Perkasa dengan nilai investasi sebesar ± Rp. 800 juta; 8) PT. Firma Diva dengan nilai investasi sebesar ± Rp. 2,7 miliar; 9) CV. Rahmat Raya dengan nilai investasi sebesar ± Rp. 550 juta; 10) CV. Armando Jaya dengan nilai investasi sebesar ± Rp.1 miliar; 11) CV.Bintang Utama dengan nilai investasi sebesar ± Rp.2,3 miliar; 12) CV. Tifa Putra Mandiri dengan nilai investasi sebesar ± Rp. 600 juta; dan 13) CV. Leon dengan nilai investasi sebesar ± Rp. 1 Miliar.

e. Fasilitas Penginapan (Hotel)

Pada Tahun 2024 terdapat 122 usaha akomodasi di Kabupaten Ende, Sementara jumlah kamar yang tersedia 816 kamar dengan tempat tidur yang tersedia sebanyak 1.068

Tabel 2.32 Jumlah Akomodasi Hotel (Bintang+Non Bintang)

di Kabupaten Ende Tahun 2019-2024

Wilayah	Jumlah Akomodasi Hotel (Bintang+Non Bintang)														
	Hotel						Kamar						Tempat Tidur		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2024
Kabupaten Ende	59	51	54	85	116	122	684	474	559	702	795	816	1056	739	1.068

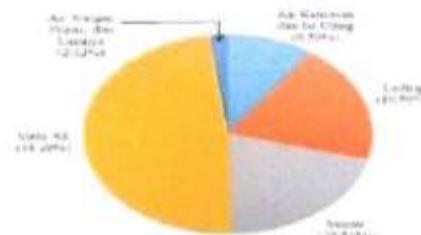
Sumber: BPS, Kabupaten Ende Dalam Angka

F.Air Bersih

Di antara sekian banyak jenis sumber air, mata air merupakan sumber air yang paling banyak digunakan sebagai air minum oleh rumah tangga di Kabupaten Ende. Pada tahun 2021, rumah tangga yang memenuhi keperluan air minumannya berasal dari sumber mata air sebesar 48,29 persen, diikuti sumber air leding sebesar 20,53 persen. Selain mata air dan sumur, leding juga banyak digunakan di Kabupaten Ende sebesar 19,59 persen; air kemasan dan isi ulang sebesar 9,59 persen dan persentase terkecil adalah air sungai, hujan dan lainnya sebesar 2,02 persen.

Gambar 2. 9 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum

Tahun 2021



Sumber data: BPS Ende, Inkesra Kab. Ende Tahun 2019

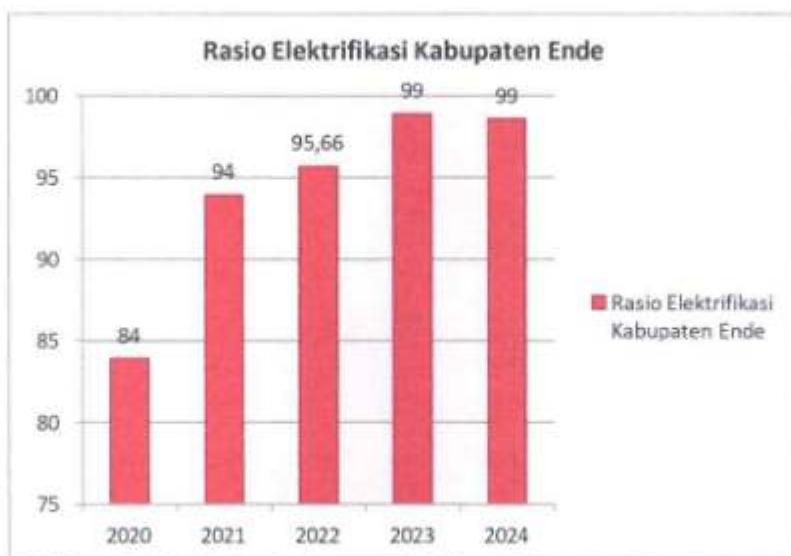
g. Listrik

Salah satu pendukung kegiatan perekonomian dan kelangsungan kegiatan masyarakat adalah ketersediaan energi listrik. Adapun fungsi dari energi listrik adalah untuk mendukung kegiatan industri, kegiatan rumah tangga, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan perkantoran, kegiatan industri, kegiatan fasilitas sosial dan penerangan jalan. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah pelanggan listrik PLN yang mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Rasio elektrifikasi adalah persentase perbandingan jumlah rumah tangga yang berlistrik dengan total jumlah rumah tangga di suatu wilayah. Rasio elektrifikasi dapat digunakan untuk wilayah provinsi, kabupaten, atau nasional. Jika dihitung

dengan jumlah pelanggan listrik kabupaten Ende untuk 2020-2025, maka data tersebut ditampilkan dalam grafik berikut ini ;

Grafik 2. 2 Rasio Elektrifikasi Kabupaten Ende



Sumber : Ende Dalam Angka 2025 (BPS Ende)

Sementara itu bila dilihat dari jumlah pelanggan di Kabupaten Ende, di tahun 2024 tercatat sebanyak 43.075 pelanggan, meningkat menjadi 48.545 pelanggan pada Tahun 2018, dan terus meningkat menjadi 51.403 pelanggan pada Tahun 2019, meningkat lagi menjadi 55.284 pelanggan pada Tahun 2020, dan pada Tahun 2021 pelanggan listrik di Kabupaten Ende sedikit menurun menjadi sebanyak 54.998 pelanggan.

Tabel 2.37 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan Tahun 2017-2021

Kecamatan Subdistrik	2017	2018	2019	2020	2021
II	40	40	40	40	40
Nangapanda	2.940	2.790	2.794	2.942	2.825
Pulau Ende	1.375	1.625	1.625	1.628	1.607
Maukan	2.325	1.502	1.508	1.707	1.708
Ende, Ende Selatan, Ende Timur, Ende Tengah, Ende Utara	28.125	25.624	28.155	31.220	29.421
Ndona	977	986	1.063	927	-
Woroworo, Wokojita, Kefmatia, Detakehi, Ndona Timur	5.046	4.668	4.706	4.738	7.112
Ndon, Ile Timur	985	1.018	1.018	1.022	1.005
Maumere	1.110	1.295	1.116	1.174	1.098
Katalanu	-	-	-	-	-
Dobatuwu, Lepemburu, Kintuoke	2.818	3.532	3.541	3.549	3.496
Wewata	1.830	3.522	3.554	4.041	4.043
Kabupaten Ende	46.375	48.545	51.403	55.284	54.998

Sumber data: BPS, Kabupaten Ende Dalam Angka 2025

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

i) Angka Kriminalitas

Data menunjukkan angka kriminal yang terjadi di Kabupaten Ende secara khusus belum mengancam iklim investasi. Kondisi riil menunjukkan jenis kejahatan dan kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Ende perkara biasa dan pelanggaran. Data

BPS dalam Ende Dalam Angka Tahun 2023, menunjukkan bahwa pada Tahun 2020 terdapat sebanyak 2.983 kasus, menurun pada tahun 2021 menjadi sebanyak 2.077 kasus, dan menurun drastis pada tahun 2022 menjadi sebanyak 237 kasus.

2) Demonstrasi / Unjuk Rasa

Jumlah demonstrasi/unjuk rasa damai yang terjadi Pada Tahun 2022 terdapat sebanyak 8 (delapan) kasus, yang dapat terdektksi dini dan difasilitasi penyelesaiannya oleh Badan Kesbangpollinmas Kabupaten Ende.

3) Kemudahan Investasi

Iklim investasi di Kabupaten Ende cukup menjanjikan, Dalam tataran kebijakan pemerintah Kabupaten Ende sangat terbuka dengan investor, Permasalahan klasik terkait status lahan telah menjadi perhatian, dengan menempatkan pemangku kepentingan (pemilik lahan/penguasa ulayat) dalam konsep LIKA MBOKO TELU sebagai kekuatan utama membangun Ende. Pada tataran normatif, pelaksanaan perijinan mulai dibenahi dengan peningkatan kualitas layanan perijinan. Untuk memberikan kemudahan pelayanan perijinan bagi investor maupun masyarakat yang membutuhkannya, telah dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPPTSP). Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, dapat dilihat dari hasil pelayanan perijinan kepada masyarakat yang sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah pelayanan perijinan yang diperoleh sebesar 100 persen, dimana dari 2.300 permohonan perijinan, semuanya terlayani.

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

1) Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja sebagai ukuran daya saing daerah ditunjukkan dengan kondisi tingkat pendidikan masyarakat. Data menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022, jumlah penduduk usia 15 tahun keatas sebagian besar mempunyai Ijazah tertinggi adalah Sekolah Dasar, yaitu sebesar 45,31%, diikuti yang menamatkan pendidikan SMA/SMK sebesar 27,26%.

Tabel 2.38 Persentase Penduduk Kabupaten Ende 15 tahun ke atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2019-2022

No	Ijazah Tertinggi yang Dimiliki	2019	2020	2021	2022
1	Tidak Punya	25,00	-	-	-
2	Sekolah Dasar	27,70	50,03	47,21	45,31
3	SMP	13,52	11,92	12,10	13,29
4	SMA dan SMK	23,02	25,57	26,75	27,26
5	Diploma III	01,59			
6	Diploma IV, Sarjana S1/S2/S3	08,15	12,46	15,94	14,18

Sumber data: BPS, Ende Dalam Angka Tahun 2022

2) Tingkat Ketergantungan

Beban Ketergantungan adalah angka yang menunjukkan besarnya penduduk golongan umur produktif (15-64 tahun) yang dapat menghasilkan barang dan jasa

ekonomi bagi golongan umur muda (0-14 tahun) dan umurtua (> 65 tahun/ golongan umur tidak produktif). Angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah apakah tergolong wilayah maju atau wilayah yang sedang berkembang. Rasio ketergantungan memiliki dua fungsi utama, yaitu: 1) Sebagai indikator demografi artinya : perhitungan rasio ketergantungan bisa digunakan untuk mencari tahu tingkat beban ketergantungan penduduk di suatu wilayah. Apabila dependency ratio tinggi, beban ketergantungan penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, terhadap usia produktif akan semakin tinggi. Sedangkan jika rasio ketergantungannya rendah, beban ketergantungannya akan semakin rendah pula, dan 2) Indikator keadaan ekonomi suatu negara artinya bisa diketahui apakah suatu negara sudah tergolong maju atau masih di tahap negara berkembang. Selama periode 2020-2022, terlihat angka beban ketergantungan di Kabupaten Ende mengalami penurunan dari 32,50 persen pada tahun 2020 menurun menjadi 32,49 persen pada tahun 2021, dan kembali menurun menjadi 26,28 persen pada tahun 2022.

Tabel 2. 39 Ratio Beban Ketergantungan di Kabupaten Ende Tahun 2020-2022

Tahun	Ratio Beban Ketergantungan		Total
	Anak (0 – 14 Tahun)	Lanjut Usia (> 65 Tahun)	
2020	25,80	6,70	32,50
2021	25,67	6,82	32,49
2022	25,55	0,74	26,28

Sumber: BPS, Ende Dalam Angka (data olahan Bappeda)

2.2. Pencapaian Target Sustainability Development Goals (SDGs)

SDGs merupakan sebuah program pembangunan berkelanjutan dimana menggantikan program sebelumnya yaitu MDGs (Millenium Development Goals) sebagai tujuan pembangunan bersama sampai tahun 2030 dalam Forum PBB. Sejalan dengan upaya percepatan pencapaian SDGs nasional sebagaimana yang tertuang

dalam Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang harus diikuti rencana aksi daerah pada tataran perencanaan provinsi dan kabupaten/kota, maka dalam penyusunan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2026 perlu d'integrasikan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs dengan jelas. Untuk itu evaluasi atas pencapaian target tujuan SDGs Kabupaten Ende sampai dengan kondisi sebelum tahun rencana menjadi hal penting, dalam satu kesatuan perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2025.

Badan dunia PBB telah mengeluarkan 169 target dan 241 indikator yang menjadi panduan berbagai negara untuk mengukur pencapaian SDGs tersebut. Mengingat kondisi spesifik di Kabupaten Ende, maka tidak semua indikator yang dikeluarkan PBB tersebut dapat diukur secara langsung. Oleh karena itu dalam evaluasi dilakukan melalui penyesuaian dengan mempertimbangkan ketersediaan data dan indikator pembangunan Kabupaten Ende.

Ringkasan status pencapaian Tujuan SDGs di Kabupaten Ende yang menjadi perhatian dalam perumusan sasaran RKPD tahun 2026 adalah, sebagai berikut:



Tabel 2. 44 DATA CAPAIAN SDGs KABUPATEN ENDE TAHUN 2019 - 2024

KODE	DESKRIPSI	SUMBER	SUMBER_DETAIL	DISAGREGASI	CAPAIAN DATA TAHUN					SATUAN
					2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	Susenas Konsumsi dan Pengeluaran (BPS)	Kabupaten	23,76	24,13	23,00	22,86	22,57	Persen
1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar: (1) akses pada layanan air minum	BPS	Susenas Kor (BPS)	Kabupaten	39,99	43,89	48,67	98,45		Persen
1.4.1*	Proporsi penduduk / rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar: (2) akses pada layanan sanitasi dasar	BPS	Susenas Kor (BPS)	Kabupaten	89,59	86,63	88,09	88,45		Persen
1.4.1*	Proporsi penduduk / rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar: (3) akses pada fasilitas penyehatan dasar	BPS	Susenas Kor (BPS)	Kabupaten	70,65	63,62	62,82			Persen
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang	K/L	Susenas Kor (BPS)	Kabupaten	87,45	82,01	89,99			Persen

KODE	DESKRIPSI	SUMBER	SUMBER_DETAIL	DISAGREGASI	CAPAIAN DATA TAHUN					SATUAN
					2020	2021	2022	2023	2024	
	didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan: (1) Proporsi rumah tangga dengan rumah milik									
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	K/L	Riskesdas 2013 dan 2018, \ SSGBI 2019, SSGI 2021 dan 2022 (Kemenkes)	Kabupaten		27,20		1,44		Persen
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	K/L	Riskesdas 2013 dan 2018,\ SSGBI 2019, SSGI 2021 dan 2022 (Kemenkes)	Kabupaten	n/a	13,00	0,01	8,10		Persen
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	BPS	Susenas Kor (BPS)	Kabupaten	94,93	96,22	95,95			Persen

KODE	DESKRIPSI	SUMBER	SUMBER_DETAIL	DISAGREGASI	CAPAIAN DATA TAHUN					SATUAN
					2020	2021	2022	2023	2024	
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (b) di fasilitas kesehatan	BPS	Susenas Kor (BPS)	Kabupaten	93,22	96,22	93,79			Persen
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang	K/L	Profil Kesehatan Indonesia (Kemenkes)	Kabupaten	0,02	0,01	0,02	0,02		Kasus per 1000 orang
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan: (b) Proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobati	K/L	Kemenkes	Kabupaten	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0		Persen
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	K/L	Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)	Kabupaten	94,88	93,77		77,49		Persen
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	BPS	Susenas Kor (BPS)	Kabupaten	25,23	26,05	29,04			Persen
4.4.1.(a)	Proporsi dewasa (usia 15-59 tahun)	BPS	Susenas Kor (BPS)	Kabupaten	n/a	n/a	63,13			Persen

KODE	DESKRIPSI	SUMBER	SUMBER_DETAIL	DISAGREGASI	CAPAIAN DATA TAHUN					SATUAN
					2020	2021	2022	2023	2024	
	dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)									
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	BPS	Susenas Kor (BPS)	Kabupaten	n/a	n/a	86,03			Persen
4.5.1*	(ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/SMK/sederajat: (a) perempuan/laki-laki	BPS	Susenas Kor (BPS)	Kabupaten	86,45	119,7 5	118,3 2	89,14	76,35	Persen
4.5.1*	(ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat: (a) perempuan/laki-laki	BPS	Susenas Kor (BPS)	Kabupaten	122,3 4	138,9 6	105,7 4	100,19	97,49	Persen
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat: (a) perempuan/laki-laki	BPS	Susenas Kor (BPS)	Kabupaten	103,5 5	88,46	96,43	95,67	96,99	Persen
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat: (c) kuintil	BPS	Susenas Kor (BPS)	Kabupaten	97,02	118,2 5	107,8 6			Persen

KODE	DESKRIPSI	SUMBER	SUMBER_DETAIL	DISAGREGASI	CAPAIAN DATA TAHUN					SATUAN
					2020	2021	2022	2023	2024	
	terbawah/teratas									
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	BPS	Susenas Kor (BPS)	Kabupaten	70,65	n/a	98,12	98,19	97,52	Persen
5.b.1*	Proporsi individu (usia > 5 tahun) yang menguasai/memiliki telepon genggam	BPS	Susenas Kor (BPS)	Kabupaten	89,59		55,91	51,93		Persen
6.2.1*	a) Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Cuci Tangan dengan Air dan Sabun	BPS	Badan Pusat Statistik	Kabupaten	0,53	63,62	62,82			Persen
6.2.1*	(b) Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak	BPS	Badan Pusat Statistik	Kabupaten	0,53	86,63	88,09	88,45		Persen
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	BPS/KL	Badan Pusat Statistik: Survei Sosial Ekonomi Nasional dan Kementerian Energi dan Sumber Daya	Kabupaten	n/a	0,81	0,84	1,50		Persen

KODE	DESKRIPSI	SUMBER	SUMBER_DETAIL	DISAGREGASI	CAPAIAN DATA TAHUN					SATUAN
					2020	2021	2022	2023	2024	
			Mineral							
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	BPS	Badan Pusat Statistik	Kabupaten	-0,12	1,55	2,54	2,82		Persen
8.1.1.(a)	PDB per kapita	BPS	Badan Pusat Statistik	Kabupaten	22,45 6	23,20 9	24,83 1	26.471		Ribu Rupiah
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	BPS	Badan Pusat Statistik	Kabupaten	n/a	n/a	9,88			Persen
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	K/L	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kabupaten	98,52	99,9 0	n/a			Persen
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	Badan Pusat Statistik: Survei Sosial Ekonomi Nasional	Kabupaten	23,76	24,13	23,00			Persen
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan	BPS	Badan Pusat Statistik	Kabupaten	41,75	49,15	51,09			Persen

KODE	DESKRIPSI	SUMBER	SUMBER_DETAIL	DISAGREGASI	CAPAIAN DATA TAHUN					SATUAN
					2020	2021	2022	2023	2024	
	terjangkau									
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	BPS	SUSENAS	Kabupaten	23,84	n/a	51,09			Persen
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	BPS	SUSENAS	Kabupaten	52,20	n/a	51,09			Persen
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	BPS	SUSENAS	Kabupaten	63,94	n/a	51,09			Persen
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BPS/KL	Kementrian Keuangan dan BPS	Kabupaten	1,55	n/a	51,09			Persen
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	BPS/KL	Kementrian Keuangan dan BPS	Kabupaten	0,26	49,15	51,09			Persen
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	K/L	Kementrian Keuangan	Kabupaten	7,78	n/a	51,09			Persen

1. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

1) Evaluasi SPM Urusan Pendidikan

Gambar 2.1 Capaian Kinerja SPM Urusan Pendidikan kondisi Tahun 2024



Capaian kinerja SPM Bidang Pendidikan kondisi sampai dengan tahun 2024: Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini sebesar 59,99 persen, Pendidikan Dasar sebesar 86,80 persen, dan Pendidikan Kesetaraan sebesar 33,84 persen.

Tabel 2.5 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					60.21 %
1.	Pendidikan Anak Usia Dini					59.99 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	52.07 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	8597	5596	3001	65.09 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					7.92 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	39.60 %
	1. Angka partisipasi sekolah	%	100	78.39	21.61	78.39 %
	2. Angka partisipasi mumi	%	100	52.55	47.45	52.55 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	3 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	100	64.06	35.94	64.06 %
	4 . Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	100	43.18	56.82	43.18 %
	5 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	100	0.75	99.25	0.75 %
	6 . Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	0	100.00 %
	7 . Indeks distribusi guru	%	100	0.45	99.55	0.45 %
	8 . Proporsi PTK bersertifikat	%	100	16.86	83.14	16.86 %
	9 . Proporsi PTK penggerak*	%	100	0.17	99.83	0.17 %
2 .	Pendidikan Dasar					86.80 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	73.53 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	47987	44107	3880	91.91 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					13.27 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	66.36 %
	SD (2024)					64.75 %
1.	Angka partisipasi kasar	%	100	104.39	-4.39	100.00 %
2.	Angka partisipasi sekolah	%	100	98.91	1.09	98.91 %
3 .	Kemampuan literasi	Nilai	100	46.61	53.39	46.61 %
4 .	Kemampuan numerasi	Nilai	100	35.56	64.44	35.56 %
5 .	Perbedaan skor literasi	Nilai	0	0	0	100.00 %
6 .	Perbedaan skor numerasi	Nilai	0	0	0	100.00 %
7 .	Indeks iklim keamanan	Nilai	100	65.87	34.13	65.87 %
8 .	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	100	71.15	28.85	71.15 %
9 .	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	100	51.81	48.19	51.81 %
10 .	Kecukupan formasi guru ASN	%	100	46.57	53.43	46.57 %
11 .	Indeks distribusi guru	%	100	0.45	99.55	0.45 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	100	24.78	75.22	24.78 %
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	0	100.00 %
	SMP (2024)					67.98 %
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	109.11	-9.11	100.00 %
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	93.75	6.25	93.75 %
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	100	58.5	41.5	58.50 %
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	100	52.89	47.11	52.89 %
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	0	0	0	100.00 %
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	0	0	0	100.00 %
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	100	67.06	32.94	67.06 %
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	100	73.87	26.13	73.87 %
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	100	56.14	43.86	56.14 %
	10 . Kecukupan formasi	%	100	48.32	51.68	48.32 %
	guru ASN					
	11 . Indeks distribusi guru	%	100	0.34	99.66	0.34 %
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	100	32.87	67.13	32.87 %
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	0	100.00 %
3 .	Pendidikan Kesetaraan					33.84 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	21.42 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2301	616	1685	26.77 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					12.42 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	62.10 %
	1 . Angka partisipasi kasar	%	0	0	0	100.00 %
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	1.48	98.52	1.48 %
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	100	40	60	40.00 %
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	100	38.1	61.9	38.10 %
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	100	18.86	81.14	18.86 %
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	100	17.04	82.96	17.04 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	100	60.92	39.08	60.92 %
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	100	63.8	36.2	63.80 %
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	100	67.16	32.84	67.16 %
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	0	100.00 %
	11 . Indeks distribusi guru	%	0	0	0	100.00 %
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	0	0	0	100.00 %
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	0	100.00 %

Sumber data : Dinas P dan K Kab. Ende 2024 (e-spm 2024).

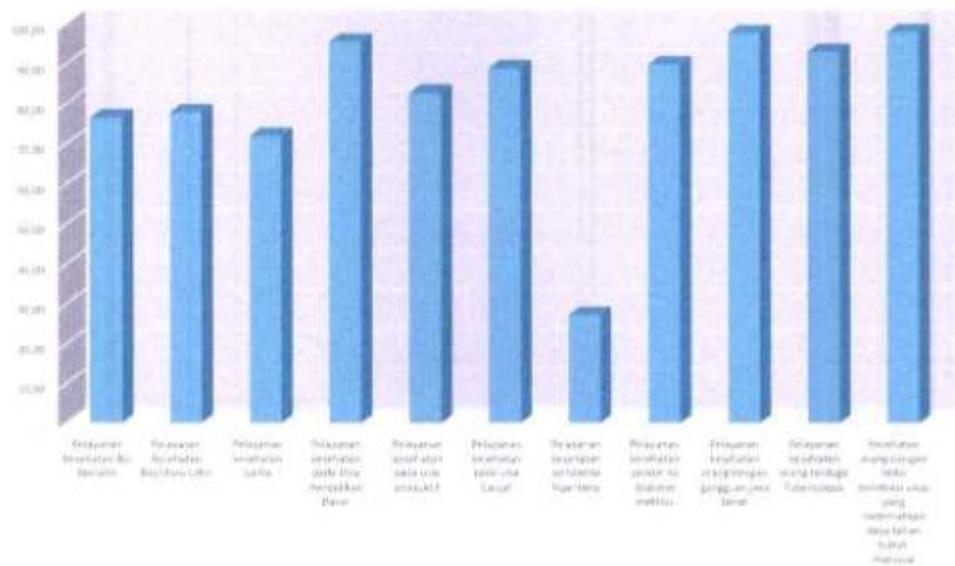
Catatan:

Dari data di atas menggambarkan bahwa Indeks pencapaian SPM urusan Pendidikan tahun 2024 adalah 60,21 % kategori : Tuntas Muda, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 mencapai 81,74 % dengan kategori : Tuntas Madya. Khusus Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2024 pencapaian SPM (59,99 %) Kategori Belum Tuntas, dan Pendidikan Kesetaraan 33,84 % kategori **Belum Tuntas**.

2) Evaluasi SPM Urusan Kesehatan

Gambar 2.2 Capaian Kinerja SPM Urusan Kesehatan kondisi Tahun 2024

Capaian Kinerja SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024



Capaian kinerja SPM Bidang Kesehatan kondisi sampai dengan tahun 2024: Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebesar 68,58 persen, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebesar 76,61 persen, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebesar 77,86 persen , Pelayanan kesehatan balita sebesar 72,02 persen, Pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sebesar 95,55 persen, Pelayanan kesehatan pada usia produktif sebesar 82,66 persen, Pelayanan kesehatan pada usia Lanjut sebesar 88,95 persen, Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sebesar 27,21 persen, Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus sebesar 89,89 persen, Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sebesar 97,78 persen, Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberculosis sebesar 93,12 persen, Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) sebesar 98 persen.

Tabel 2.6 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUA N	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS MADYA				80.54 %
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						66.85 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	50.20 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	5108	3205	1903	62.74 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					16.66 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	83.28 %	
1.	Vaksin Tetanus Difteri	Vaksin	108211	82798	25413	76.52 %	
2.	Tabelt tambah darah (180 tabelt x jumlah ibu hamil)	Tabelt	919.458	2948	-2.028.542	100.00 %	
3.	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang	5108	3205	1903	62.74 %	
4.	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	5108	3205	1903	62.74 %	
5.	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	5108	3205	1903	62.74 %	

6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	776	776	0	100.00 %	
7 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	5108	3205	1903	62.74 %	
8 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	5108	3205	1903	62.74 %	
9 . Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	5108	3205	1903	62.74 %	
10 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	1	1	0	100.00 %	
11 . Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	340	340	0	100.00 %	
12 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)"	Orang	2	2	0	100.00 %	
13 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	447	447	0	100.00 %	

	14 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	324	324	0	100.00 %	
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	23	23	0	100.00 %	
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	29	29	0	100.00 %	
	17 . Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	5108	3205	1903	62.74 %	
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						76.61 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	58.41 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	5062	3696	1366	73.01 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					18.20 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	91.00 %	
1 .	Formulir partografi	Formulir	5062	3696	1366	73.01 %	
2 .	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	5062	3696	1366	73.01 %	
3 .	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	5062	3696	1366	73.01 %	

	(Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)						
4 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	1	1	0	100.00 %		
5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	2	2	0	100.00 %		
6 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Paket	368	368	0	100.00 %		
7 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	490	490	0	100.00 %		
8 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	37	37	0	100.00 %		
9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	48	48	0	100.00 %		
3 . Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						77.86 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	61.85 %		
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	4752	3674	1078	77.31%		

PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						16.01 %	
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	80.03 %		
1 . Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	4752	3674	1078	77.31 %		
2 . Vitamin K1 injeksi	Ampul	4752	3674	1078	77.31 %		
3 . Salep/tetes mata antibiotik	Orang	4752	3674	1078	77.31 %		
4 . Formulir bayi baru lahir	Formul ir	5	0	5	0.00 %		
5 . Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formul ir	14256	3674	10582	25.77 %		
6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	5108	3205	1903	62.74 %		
7 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	1	1	0	100.00 %		
8 . Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	2	2	0	100.00 %		
9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	368	368	0	100.00 %		
10 . Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	490	490	0	100.00 %		
11 . Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	37	37	0	100.00 %		
12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	31	31	0	100.00 %		
13 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	48	48	0	100.00 %		
14 . Kader Kesehatan	Orang	3340	3340	0	100.00 %		
4 . Pelayanan Kesehatan Balita						72.02 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	59.91 %		

PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Yang Harus Dilayani		Yang Terlayani		Terlayani		
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		Orang		21817		16339	5478	78.9 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)							12.10 %	
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		60.51 %	
1 . Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	1	1	0		100.00 %		
2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	1	1	0		100.00 %		
3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang	5108	3205	1903		62.74 %		
4 . Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	3781	3326	455		87.97 %		
5 . Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	14442	13784	658		95.44 %		
6 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	121633	78766	42867		64.76 %		
7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	118484	70677	47807		59.65 %		
8 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	118484	65.588	118.418.412		0.06 %		
9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB - Hib	Vaksin	118484	56.505	118.427.495		0.05 %		
10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	118484	68.429	118.415.571		0.06 %		

11 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - Vaksin HB -Hib	Vaksin	115964	55.206	115.908.794	0.05 %	
12 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	4737	0	4737	0.00 %	
13 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	26	26	0	100.00 %	
14 . Peralatan Anafilaktik	Paket	26	26	0	100.00 %	
15 . Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	1	1	0	100.00 %	
16 . Tenaga medis : Dokter	Orang	41	0	41	0.00 %	
17 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	368	368	0	100.00 %	
18 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	490	490	0	100.00 %	
19 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	48	48	0	100.00 %	
20 . Guru PAUD	Orang	0	0	0	0.00 %	
21 . Kader Kesehatan	Orang	3340	3340	0	100.00 %	
5 . Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					95.55 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	77.89 %	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	44143	42977	1166	97.36 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					17.66 %	

B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	88.31 %	
1 . Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Buku	44143	42977	1166	97.36 %	
2 . Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Buku	44143	42977	1166	97.36 %	
3 . Kuesioner skrining kesehatan Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	44143	42977	1166	97.36 %	
5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir	1	1	0	100.00 %	
6 . Tabel Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	Tablet	44143	42977	1166	97.36 %	

(Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota)					
7 . Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)	Alat	1	1	0	100.00 %
8 . Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)	Strip	1	1	0	100.00 %
9 . Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	1	1	0	100.00 %
10 . Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	113960	100.024	113.859.976	0.09 %
11 . Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	7	7	0	100.00 %

12 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	368	368	0	100.00 %	
13 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	490	490	0	100.00 %	
14 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	48	48	0	100.00 %	
15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	23	23	0	100.00 %	
16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	43	43	0	100.00 %	
17 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	0	0	0	0.00 %	
18 . Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	3340	3340	0	100.00 %	
6 . Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					82.66 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	64.77 %	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	172259	139460	32799	80.96 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					17.90 %	

B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	89.48 %	
1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	1	1	0	100.00 %	
2 . Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	26	26	0	100.00 %	
3 . Alat : Tensimeter	Unit	26	26	0	100.00 %	
4 . Alat : Glukometer	Unit	26	26	0	100.00 %	
5 . Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	26	26	0	100.00 %	
6 . Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	26	26	0	100.00 %	
7 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	26	26	0	100.00 %	
8 . Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	26	26	0	100.00 %	
9 . Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit	26	26	0	100.00 %	
10 . Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	Doku men	1	1	0	100.00 %	
11 . Alat Pelayanan KB	Unit	78	78	0	100.00 %	
12 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Doku men	1	0	1	0.00 %	
13 . Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul	108.211	82.798	108.128.202	0.08 %	
14 . Tenaga medis : Dokter	Orang	41	41	0	100.00 %	
15 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	368	368	0	100.00 %	

16 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	490	490	0	100.00 %	
17 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	48	48	0	100.00 %	
18 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	43	43	0	100.00 %	
19 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	3340	3340	0	100.00 %	
7 . Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					88.95 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	68.95 %	
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani		
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	32415	27937	4478	86.19%	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani /Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
1 . Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	26	26	0	100.00 %	
2 . Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	26	26	0	100.00 %	

PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	8.87 %	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	93081	10323	82758	11.09 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						18.33 %
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	91.67 %	
1. Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket		1	1	0100.00 %	
2 . Obat Hipertensi	Paket	26	26	0	100.00 %	
3 . Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	26	26	0	100.00 %	
4 . Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	1	1	0	100.00 %	
5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	1	1	0	100.00 %	
6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	40	40	0	100.00 %	
7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	368	368	0	100.00 %	

8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	490	490	0	100.00 %	
9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	48	48	0	100.00 %	
10 . Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	31	31	0	100.00 %	
11 . Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	23	0	23	0.00 %	
12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	43	43	0	100.00 %	
9 . Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						89.89 %
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	69.89 %	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2097	1832	265	87.36%	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100.00 %	
1 . Obat Diabetes Melitus	Paket	1	1	0	100.00 %	
2 . Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit	26	26	0	100.00 %	

3 . BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	26	26	0	100.00 %	
4 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	1	1	0	100.00 %	
5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	Paket	1	1	0	100.00 %	
6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	40	40	0	100.00 %	
7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	368	368	0	100.00 %	
8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	490	490	0	100.00 %	
9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	23	23	0	100.00 %	
10 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	43	43	0	100.00 %	
11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	48	48	0	100.00 %	

	12 . Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	41	41	0	100.00 %	
10 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat						97.78 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	998	998	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					17.78 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	88.89 %	
	1 . Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) bentuk fisik atau elektronik)	Buku	1	1	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Jenus	1	1	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan	Formulir	1	1	0	100.00 %	

jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)					
4 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi Kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	1	1	0	100.00 %
5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	1	1	0	100.00 %
6 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	40	40	0	100.00 %
7 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	26	26	0	100.00 %
8 . Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	26	26	0	100.00 %
9 . Tenaga profesional lainnya	Orang	0	0	0	0.00 %
11 . Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					93.12 %
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	73.34 %
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	4421	4053	368	91.68%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.78 %

	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	98.89 %	
1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	1	1	0	100.00 %		
2 . Reagen Zn TB	Kit	4421	4053	368	91.68 %		
3 . Masker bedah dan Masker N95	Paket	26	26	0	100.00 %		
4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	1	1	0	100.00 %		
5 . Katrid tes cepat molekuler	Test	1	1	0	100.00 %		
6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Doku men	1	1	0	100.00 %		
7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Doku men	1	1	0	100.00 %		
8 . Tuberkulin	Vial	4421	4053	368	91.68 %		
9 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	40	40	0	100.00 %		
10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	490	490	0	100.00 %		
11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	23	23	0	100.00 %		
12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	43	43	0	100.00 %		
13 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik	Orang	41	41	0	100.00 %		

	(ATLM)					
	14 . Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	10	10	0	100.00 %
	15 . Kader Kesehatan	Orang	3340	3340	0	100.00 %
12 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)					98.0 0 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	6056	6954	-898	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					18.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	90.00 %
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	1	1	0	100.00 %
	2 . Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	6056	6954	-898	100.00 %
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sputit yang sesuai/Vacutainer dan	Paket	3	3	0	100.00 %

	Jarum Sesuai						
	4 . Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	28	28	0	100.00 %	
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	40	40	0	100.00 %	
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	368	368	0	100.00 %	
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	490	490	0	100.00 %	
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	41	41	0	100.00 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	43	43	0	100.00 %	
	10 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	0	0	0	0.00 %	

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Ende (e-spm tahun 2024).

Dari data di atas menggambarkan bahwa jenis pelayanan dasar urusan kesehatan dari 12 (dua belas) jenis indikator layanan dasar indikator pencapaian pada tahun 2024 adalah sebesar : 80,54 % atau **kategori Tuntas Madya** mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 sebesar 81,67% atau **kategori Tuntas Madya**. Namun di tahun 2024 Jenis Indikator Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (27,21 %), yang perlu menjadi perhatian untuk bisa ditingkatkan.

3) Evaluasi SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Gambar 2.3 Capaian Kinerja SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kondisi Tahun 2024



Capaian kinerja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kondisi sampai dengan tahun 2024: Pelayanan Dasar Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sebesar 88,16 persen, dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik sebesar 77,89 persen.

Tabel 2.7 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS MADYA			83.03 %

1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					88.16 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	72.90 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	273553	249268	24285	91.12%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					15.27 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	76.33 %
	1. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	64117	38222	25895	59.61 %
	2. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	64117	38222	25895	59.61 %

	3. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	25895	24095	1800	93.05 %
	4. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	25895	24095	1800	93.05 %
2 .	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					77.89 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	69.89 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	273553	238990	34563	87.37 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					8.00 %

	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	40.01 %
1	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	64117	11641	52476	18.16 %
2	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga	64117	11641	52476	18.16 %
3	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per	Rumah Tangga	52476	43938	8538	83.73 %

hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar					
--	--	--	--	--	--

Sumber data : Dinas PUPR Kabupaten Ende tahun 2024 (e-SPM).

Adapun Realisasi Pencapaian SPM, Sub Urusan Pekerjaan Umum tahun 2024 yakni sebesar 83,03 % , kategori Tuntas Madya, dengan rincian :

1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	88.16 %	Tuntas Madya
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	77.89 %	Tuntas Pratama

Mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023, hanya pencapaian sebesar 55,05 % kategori BelumTuntas.

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa dari 2 (dua) jenis indikator jenis pelayanan dasar indikator pencapaian yakni belum tuntas atau 55,05 %, dengan rincian :

1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebesar 66,60 %
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik sebesar 43,51%.

Hal ini disebabkan oleh salah satunya adalah belum terpenuhinya penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik kepada masyarakat

4) Evaluasi SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Gambar 2.4 Capaian Kinerja SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kondisi Tahun 2024



Capaian kinerja SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kondisi sampai dengan tahun 2024: berdasarkan hasil penghitungan Total Indeks Pencapaian SPM dan Kategori Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman sebesar 75,50 % atau Tuntas Pratama

Tabel 2.8 Realisasi Capaian Kinerja SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kondisi Tahun 2024

Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PRATAMA			75.50 %	
Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					51.00 %	
Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)					5308	
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	48.00 %	
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI	Orang	10	6	4		
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	3.00 %	
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani /Tepenuhi		
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					15.00 %	
1 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	0.00 %	
2 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	10	6	4	60.00 %	
3 . Pemukiman kembali bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	0.00 %	
4 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	0.00 %	

Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				-100%	100.00	%
Ada Relokasi Program Pemerintah					5308	
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%		
		Jumlah Total Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI	Orang	0	0	0	100 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani /Tepenuhi		
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00	%
1.PENDATAAN						
Form 4.A.4 Identifikasi Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	Down load			100		
Form 4.A.5 Identifikasi Lahan Potensial Sebagai Relokasi Perumahan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	Down load			100		
Form 4.A.6 Pengumpulan Data Rumah Yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	Down load			100		
Form 4.A.10 Identifikasi Perumahan Di Lokasi Yang Menimbulkan Bahaya Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	Down load			100		

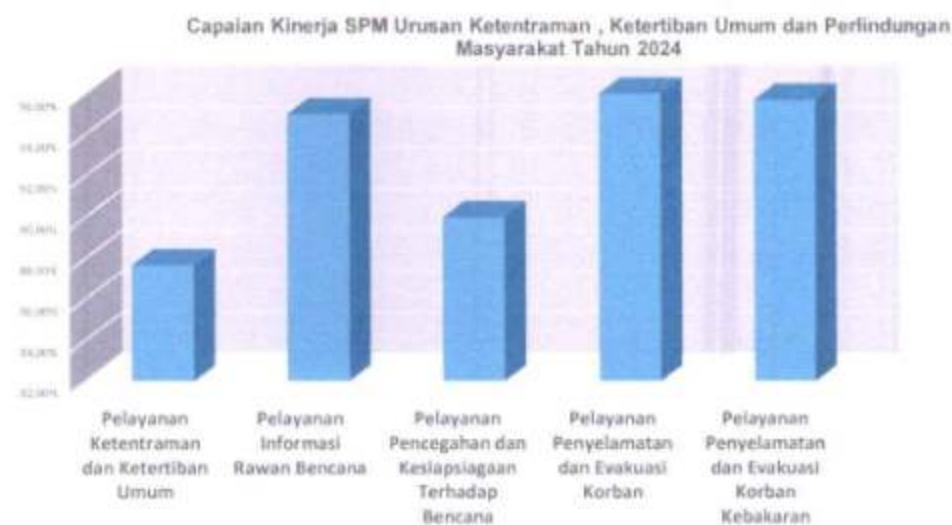
Form 4.A.11 Identifikasi Perumahan Di Atas Lahan Bukan Fungsi Permukiman Di Kabupaten/Kota	Down load		100			
Form 4.A.12 Identifikasi Perumahan Di Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota (<10 Ha)	Down load		100			
Form 4.A.13 Pengumpulan Data Rumah Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Down load		100			
DOWNLOAD		100				
DOWNLOAD		100				
DOWNLOAD		100				
DOWNLOAD		100				
DOWNLOAD		100				
DOWNLOAD		100				
DOWNLOAD		100				
2.PERHITUNGAN						
Form 4.B.3 Penghitungan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	Down load		100			
Form 4.B.4 Penghitungan Kebutuhan Biaya Layanan Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Terkena Bencana Kabupaten/Kota :	Down load		100			
Form 4.B.7 Penghitungan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :	Down load		100			
Form 4.B.8 Penghitungan Kebutuhan Biaya Layanan Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Down load		100			
Download		100				
Download		100				

Download	100					
3. PERENCANAAN						
Form 4.C.2 Rencana Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota :	Download		100			
Form 4.C.4 Rencana Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota :	Download		100			
Download		100				
Download		100				

Sumber data : Dinas PRKP2 Kabupaten Ende, 2024 (e-spm).

5) Evaluasi SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Gambar 2.4 Capaian Kinerja SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024



Capaian kinerja SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat kondisi sampai dengan tahun 2024: Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar 87,68 persen, Pelayanan Informasi Rawan Bencana sebesar 95 persen, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sebesar 90 persen, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban sebesar 96 persen, dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sebesar 95,70 persen.

Tabel 2.9 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas kondisi Tahun 2024

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	TOTAL TRANTIBUM LINMAS						92,35 %
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						87.68 %
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)					87.68 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)						78.92 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	86867	85689	1178	98.64 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)						8.77 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					43.83 %	
	1. Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	Unit	417	417	0	100.00 %	

2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	7	6	1	85.71%	
Data Dukung : 5308-20241017074324SOP PERDA, TRANTIB.doc Status : Approved						
3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	Orang	110	85	25	77.27 %	
4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan	Dokumen	1	1	0	0.00 %	

	perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal					
Data Dukung : Data Dukung Belum Di Upload						
5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang	0	0	0	0.00 %	
6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	Orang	0	0	0	0.00 %	
KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						93.67 %
1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					95.00 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)						-80% 80.00 %
	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum Terlayani			
	Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani			
A. JUMLAH YANG	Orang	2051	2051	0	100.00 %	

	HARUS DILAYANI :					
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)	-20%	15.00 %			
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					75.00 %	
1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Dokumen	0	0	0	0.00 %	
Data Dukung : Data Dukung Belum Di Upload						
2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	Orang	278581	278581	0	100.00 %	
3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang	2051	2051	0	100.00 %	
4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	18	18	0	100.00 %	
2 . Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					90.00 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	80.00 %
		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum		

		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2051	2051	0	100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)			-20%	10.00 %	
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani /Terpenuhi	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					50.00 %
1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	Unit	40	40	0	100.00 %
2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	0	0	0	0.00 %
3 . Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					96.00 %
Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)					
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			-80%	80.00 %	
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	543	543	0	100.00%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)			-20%	16.00 %	

			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI						80.00 %	
1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	Posko	2	2	0	100.00 %		
2 . Pendataan terhadap Orang warga yang terkena/menjadi korban bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Orang	543	543	0	100.00 %		
3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	2	2	0	100.00 %		
4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/ wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	Layanan	92	92	0	100.00 %		
5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	0	0	0	0.00 %		

KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						95.70 %
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					95.70 %
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)						80.00 %
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	30	30	0	100.00 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)						15.70 %
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					78.51 %	
1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan	15	15	0	100.00 %	
2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadam di Pemukiman,... dst.)	Dokumen	1	1	0	0.00 %	
Data Dukung : Data Dukung Belum Di Upload						

3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, dll.)	Unit	153	121	32	79.08 %	
4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	50	46	4	92.00 %	
5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan	13	13	0	100.00 %	
6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	13	13	0	100.00 %	

Sumber data : Satpol PP dan Linmas (e-spm) 2024

Dari data di atas, menggambarkan bahwa Total Capaian SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (TrantibumLinmas) tahun 2024, sebesar 92,35 %, Kategori **TUNTAS UTAMA**. Untuk pencapaian penerapan SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat tahun 2024, dapat di lihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.5.3.1 Realisasi Penerapan SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024



Sumber : aplikasi e-spm 2024, diolah oleh Tim Penerapan SPM Kabupaten Ende

Dari grafik di atas menggambarkan bahwa capaian Urusan Trantibum Linmas secara keseluruhan tahun 2024 adalah 92,35 % atau Kategori Tuntas Utama mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 hanya mencapai 68,23 % atau Kategori Tuntas Muda.

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				Belum		
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	424	424	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					15.38 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	76.92 %	
	1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	38	38	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	280	280	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	3	3	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	(merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)						
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	0	0	0	0.00 %	
	5 . Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	30	30	0	100.00 %	
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	0	0	0	0.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	37	37	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsi sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)						
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	28	28	0	100.00 %	
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ Bukti kepemilikan NIK	Orang	0	0	0	0.00 %	
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	2	2	0	100.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan	Orang	4	4	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	reunifikasi)						
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	0	100.00 %	
	(pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)						
	13 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	1	1	0	100.00 %	
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti					86.67 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	602	602	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					6.67 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	33-33 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	17	17	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	Orang	0	0	0	0.00 %	
	3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/ atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/ orang/hari)	Orang	0	0	0	0.00 %	
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	505	505	0	100.00 %	
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan,	Orang	0	0	0	0.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)						
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	32	32	0	100.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga /masyarakat)	Orang	48	48	0	100.00 %	
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	0	0	0	0.00 %	
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0	0.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	(kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)						
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	0	0	0	0.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial. bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	33	33	0	100.00 %	
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar(pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/ nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/ masyarakat)	Orang	33	33	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	0	0	0	0.00 %	
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	0	0	0	0.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/ Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	0	0	0	0.00 %	
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	0	0	0	0.00 %	
	13 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	0	0	0	0.00 %	
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					88.33 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total Yang Belum		80.00 %	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	25	25	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					8.33 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	41.67 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	10	10	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	Orang	10	10	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/ orang/hari)	Orang	10	10	0	100.00 %	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	0	0	0	0.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)						
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	0	0	0	0.00 %	
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsi sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	10	10	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis(pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	0	0	0	0.00 %	
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	0	0	0	0.00 %	
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/ klinik/ rumah sakit)	Orang	0	0	0	0.00 %	
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang	0	0	0	0.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	1	1	0	100.00 %	
	12 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada	Orang	0	0	0	0.00 %	

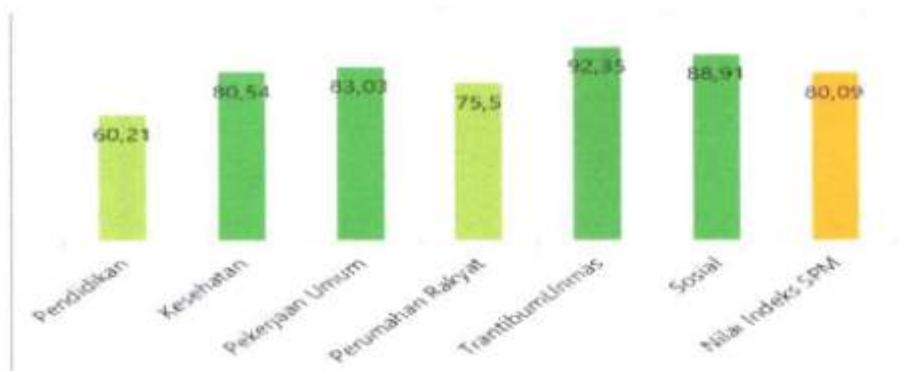
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)						
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					88.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	38	38	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					8.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	40.00 %	
	1. Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	38	38	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	38	38	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Unit	0	0	0	0.00 %	
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.	Orang	0	0	0	0.00 %	
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.	Orang	0	0	0	0.00 %	

Sumber data : Dinas Sosial Kabupaten Ende tahun 2024 (e-spm).

Dari data di atas menggambarkan bahwa realisasi pencapaian SPM Urusan Sosial adalah 88.91 % atau **Kategori Tuntas Madya**. Kesimpulan akhir, dari keseluruhan pencapaian SPM dari 6 (enam) urusan yakni, sesuai dengan grafik yang tertera di bawah ini :

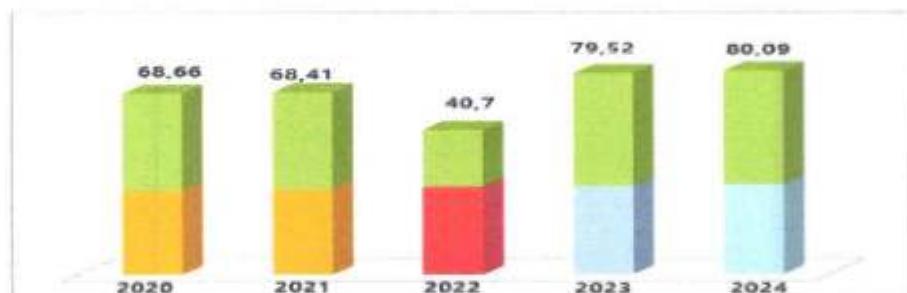
Grafik 3.1: Pencapaian SPM Kabupaten Ende Tahun 2024



Sumber : Tim SPM Kab.Ende, 2024 (aplikasi e-spm)

Data tersebut menggambarkan total pencapaian SPM Kabupaten Ende, tahun 2024 yakni sebesar **80,09** kategori **Tuntas Madya**, dimana untuk urusan pendidikan dengan tingkat pencapaian yang rendah yakni **60,21 %**, kategori **Tuntas Muda**, secara umum mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 dengan pencapaian **79,52 %**, dengan nilai kategori **Tuntas Pratama**. Adapun Trend pencapaian SPM tahun 2019-2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

Grafik 3.2 : Trend Pencapaian SPM Kabupaten Ende Tahun 2020-2024



Sumber : Sekber SPM Ditjen Bina Bangda Kemendagri, RI.

Data tersebut menggambarkan trend pencapaian SPM Kabupaten Ende, tahun 2020- 2024 mengalami fluktuasi, dimana total pencapaian terendah tahun 2022 yakni sebesar **40,7 %**, dengan nilai kategori **Belum Tuntas**.

Disamping adanya trend pencapaian SPM Kabupaten Ende, mengalami peningkatan, namun ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Ende, tahun 2024 yakni :

1. Belum adanya dokumen Rencana Aksi Daerah SPM Kabupaten, sehingga penetapan II-185 I Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Ende Tahun 2026

- target capaian SPM belum berdasarkan data dan perhitungan yang tepat ;
2. Keterbatasan pengetahuan, yang dialami oleh tim penerapan SPM Kabupaten dan pengampu SPM Organisasi Perangkat Daerah teknis terkait, sehingga pelaporan Standar Pelayanan Minimal dalam aplikasi e-spm, banyak yang tidak terisi, khususnya di tahapan penerapan Standar Pelayanan Minimal, ataupun data yang terisi dalam tahapan penerapan maupun pencapaian belum dilakukan sesuai dengan penghitungan yang tepat;
 3. Adanya kebijakan politik anggaran yang belum berpihak pada pemenuhan SPM, sehingga banyak kegiatan yang tidak bisa dibiayai, salah satunya Dokumen Kajian Resiko Bencana, yang merupakan salah satu dokumen penting berkaitan dengan strategi kebencanaan daerah, serta keterbatasan anggaran dapat menghambat penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memenuhi SPM ;
 4. Belum dilakukannya monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM, sehingga tidak bisa memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat memenuhi standar yang telah ditetapkan dan terus ditingkatkan kualitasnya.

Solusi pemecahannya :

1. Menyusun Rencana Aksi Daerah SPM Berbasis Data dan Kebutuhan, yakni dengan cara Mengumpulkan data dasar terkait kondisi pelayanan publik di daerah, termasuk capaian SPM saat ini, kebutuhan prioritas, sesuai dengan rencana kegiatan yang ditetapkan ;
2. Mengadakan pelatihan khusus tentang SPM bagi tim penerapan, termasuk pemahaman konsep, regulasi, dan teknis implementasi, dengan mengundang narasumber ahli dari pemerintah propinsi, akademisi, atau konsultan yang berpengalaman dalam penerapan SPM ;
3. Melakukan advokasi secara intens kepada para pemangku kebijakan (seperti DPRD, kepala daerah, dan pejabat terkait) tentang pentingnya SPM bagi kesejahteraan masyarakat ;

Membuat jadwal untuk monitoring pelaksanaan program agar proses ini menjadi bagian integral dari penerapan dan pencapaian SPM, dengan melibatkan semua pihak terkait, serta mengadakan rapat evaluasi untuk membahas realisasi dan target rencana serta permasalahan dan solusi pemecahannya, serta menyusun rekomendasi.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Sejalan dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bab ini memuat uraian **Kondisi Ekonomi Kabupaten Ende tahun sebelumnya dan perkiraan tahun berjalan**, yang mencakup Pertumbuhan Ekonomi Daerah, sumber-sumber Pendapatan dan Kebijakan Pemerintahan Daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Penyusunan rancangan kerangka ekonomi daerah yang cermat menjadi syarat bagi perumusan kebijakan keuangan daerah yang tepat menuju postur APBD Kabupaten Ende yang benar-benar menggambarkan fungsinya sebagai instrumen fiskal yaitu **fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi**.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan sampai Tahun 2025

Secara umum gambaran tentang kondisi ekonomi daerah merupakan kondisi yang terjadi sebagai dampak baik langsung maupun tidak langsung dari perkembangan perekonomian global, perkembangan ekonomi nasional dan perkembangan ekonomi makro regional Provinsi NTT.

Referensi yang digunakan diambil dari publikasi kementerian keuangan. Gambaran **proyeksi ekonomi tahun 2025 diperkirakan menguat**. Selengkapnya artikel untuk referensi disajikan berikut ini.

a. Perkembangan Perekonomian Global

Berdasarkan laporan kebijakan Moneter Bank Indonesia Triwulan II Tahun 2025 pada halaman (<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/Laporan-Kebijakan-Moneter-Triwulan-II-2025.aspx>) bahwa Perekonomian global, khususnya di negara maju, diprakirakan semakin melemah akibat kebijakan kenaikan tarif resiprokal AS yang direncanakan berlaku mulai 1 Agustus 2025. Prospek ekonomi AS masih melambat, disertai kenaikan risiko fiskal. Kinerja ekonomi Tiongkok ke depan juga diprakirakan belum kuat, di tengah berbagai strategi diversifikasi ekspor. Kebijakan kenaikan tarif AS juga berdampak pada lebih rendahnya prospek ekonomi Eropa dan Jepang. Sementara itu, kinerja perekonomian India diprakirakan akan tetap baik didukung permintaan domestik. Dengan berbagai perkembangan tersebut, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi dunia 2025 masih belum kuat sekitar 3,0%. Ke depan, kewaspadaan serta respons dan koordinasi kebijakan yang lebih kuat diperlukan guna memitigasi ketidakpastian perekonomian dan pasar

keuangan global yang masih tinggi, serta menjaga ketahanan eksternal, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

Dari domestik, berbagai respons kebijakan perlu terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah prospek perekonomian global yang melemah. Pertumbuhan ekonomi semester II 2025 diprakirakan membaik dan secara keseluruhan tahun 2025 diprakirakan berada dalam kisaran 4,6–5,4%. Di samping membaiknya permintaan domestik, perbaikan ini juga didukung oleh tetap positifnya kinerja ekspor sejalan dengan hasil perundingan tarif dengan Pemerintah Amerika Serikat. Berbagai respons bauran kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia juga meningkatkan keyakinan pelaku ekonomi yang pada akhirnya akan mendorong kegiatan ekonomi. Dalam kaitan ini, stimulus fiskal ditempuh Pemerintah untuk perlindungan sosial dan implementasi program-program unggulan dalam Asta Cita. Disamping menjaga stabilitas, kebijakan Bank Indonesia juga diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penurunan BI-Rate, pelonggaran likuiditas, serta peningkatan insentif makroprudensial kepada perbankan guna mendorong kredit/pembiayaan ke sektor-sektor prioritas. Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, bersinergi erat dengan kebijakan stimulus fiskal dan sektor riil Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketahanan eksternal ekonomi Indonesia diprakirakan tetap baik. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) 2025 diprakirakan akan mencatat defisit transaksi berjalan yang lebih rendah dalam kisaran defisit 0,5% sampai dengan 1,3% dari PDB dengan surplus transaksi modal dan finansial yang berlanjut, di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Nilai tukar Rupiah diprakirakan stabil didukung komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik. Bank Indonesia terus memperkuat respons kebijakan stabilisasi, termasuk intervensi terukur di pasar off-shore NDF dan strategi triple intervention pada transaksi spot, DNDF, dan SBN di pasar sekunder. Seluruh instrumen moneter juga terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter pro-market melalui optimalisasi instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), untuk

memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk investasi portofolio asing dan mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah.

Bank Indonesia meyakini makin rendahnya prakiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 dalam sasaran $2,5\pm1\%$. Inflasi inti diprakirakan lebih rendah dari prakiraan seiring ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas ekonomi yang memadai, *imported inflation* yang terkendali, dan dampak positif dari digitalisasi. Selain itu, inflasi *Volatile Food* (VF) diprakirakan terkendali didukung oleh sinergi pengendalian inflasi Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kredit perbankan perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia akan terus mendorong penyaluran kredit perbankan, termasuk melalui kebijakan makroprudensial yang akomodatif. Bank Indonesia juga akan terus mempererat koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk mendorong pertumbuhan kredit dalam mendukung pembiayaan ekonomi, serta memitigasi berbagai risiko ekonomi global dan domestik yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Di samping itu, kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) akan terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan melalui optimalisasi insentif pada sektor yang berkontribusi tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja serta selaras dengan program-program Asta Cita Pemerintah.

b. Perkembangan Perekonomian Nasional (kondisi Triwulan II)

Gambaran Kebijakan keuangan negara pada saat disusunnya RKPD ini, dapat dilihat pada halaman: (<https://www.bi.go.id/id/iru/highlight-news/Pages/National-Economy-Grows-5.12-in-Second-Quarter-of-2025.aspx>), sebagai berikut:

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi triwulan II 2025 tumbuh sebesar 5,12% (yoY), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan sebelumnya sebesar 4,87% (yoY). Ke depan, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tahun 2025 diprakirakan berada dalam kisaran 4,6–5,4%.

Dari sisi pengeluaran, PDB triwulan II 2025 ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik serta kinerja eksport-impor yang meningkat. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,97% (yoY) seiring dengan aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat yang meningkat selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan libur sekolah. Investasi tumbuh

sebesar 6,99% (yoY) didukung oleh realisasi penanaman modal yang tumbuh positif. Konsumsi Pemerintah terkontraksi sebesar 0,33% (yoY) seiring dengan normalisasi belanja Pemerintah dibandingkan dengan periode tahun 2024 yang tercatat tinggi untuk penyelenggaraan Pemilu. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh sebesar 7,82% (yoY). Ekspor tumbuh sebesar 10,67% (yoY) ditopang oleh permintaan mitra dagang utama yang tetap tumbuh positif, serta kenaikan ekspor jasa sejalan dengan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. Sementara itu, pertumbuhan impor didorong oleh permintaan domestik.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), seluruh LU menunjukkan kinerja positif. LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan, serta LU Informasi dan Komunikasi sebagai kontributor utama pertumbuhan juga tumbuh baik seiring peningkatan permintaan domestik dan eksternal. Sementara itu, dari sisi spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025 seluruh wilayah tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di wilayah Jawa, diikuti Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), Sumatera, Kalimantan, dan Bali-Nusa Tenggara (Balinusra).

c. Perkembangan Ekonomi Makro

Memasuki awal triwulan I-2025, perkembangan perekonomian dan pasar keuangan terus dipantau dan diantisipasi seiring berlanjutnya downside risk dan dinamika eksternal. Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sebagaimana disepakati dalam rapat berkala KSSK I tahun 2025 pada Selasa (21 Januari 2025), akan terus memperkuat kewaspadaan serta meningkatkan koordinasi dan sinergi antarlembaga, dalam upaya memitigasi potensi dampak rambatan faktor-faktor risiko global terhadap perekonomian dan sektor keuangan dalam negeri.

Divergensi pertumbuhan ekonomi dunia melebar disertai ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat. Pada triwulan IV-2024, perekonomian Amerika Serikat (AS) diprakirakan tumbuh lebih kuat, sedangkan ekonomi Eropa dan Jepang masih lemah. Sementara itu, berdasarkan rilis terbaru di bulan Januari 2025, pertumbuhan ekonomi Tiongkok terakselerasi menjadi sebesar 5,4% yoY pada triwulan IV-2024, didorong oleh stimulus ekonomi. Arah kebijakan

Pemerintah dan bank sentral AS berpengaruh pada ketidakpastian pasar keuangan global. Kuatnya ekonomi AS dengan pasar tenaga kerja yang membaik, serta dampak kebijakan tarif menahan proses disinflasi di AS yang meningkatkan ketidakpastian terhadap ekspektasi penurunan Fed Funds Rate (FFR). Kebijakan fiskal AS yang lebih ekspansif mendorong yield US Treasury tetap tinggi, baik pada tenor jangka pendek maupun panjang. Bersamaan dengan ketegangan politik global yang meningkat, preferensi investor makin besar terhadap aset keuangan AS. Indeks mata uang dolar AS (DXY) masih berada dalam tren meningkat yang semakin menambah tekanan pelemahan berbagai mata uang dunia. Untuk 2025, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 stagnan sebesar 3,3% yoy. Di sisi lain, kebijakan Presiden Trump yang diumumkan pasca pelantikan dipandang lebih moderat dibandingkan yang diprakirakan sebelumnya oleh pasar. Perkembangan ini akan terus dipantau ke depan.

Ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2024 diprakirakan tetap baik ditopang terutama oleh kenaikan investasi dan terjaganya konsumsi rumah tangga, serta peningkatan belanja Pemerintah. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada bulan November 2024 dan musim libur di akhir tahun, termasuk Natal dan Tahun Baru, menjadi faktor positif untuk prospek ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2024. Di sisi eksternal, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan berturut-turut untuk tahun ke-5 pada 2024, disertai indeks PMI Manufaktur Indonesia di bulan Desember 2024 kembali ke zona ekspansif. Ekonomi Indonesia diprakirakan tumbuh 5% yoy di tahun 2024 dan 5,2% yoy di tahun 2025.

Nilai tukar Rupiah tetap terkendali di tengah ketidakpastian global yang tinggi, didukung oleh kebijakan stabilisasi BI. Secara keseluruhan tahun 2024, hingga 31 Desember 2024, Rupiah tercatat di level Rp16.095, melemah 4,34% yoy secara point to point (ptp). Perkembangan Rupiah tersebut lebih baik dibandingkan dengan mata uang sejumlah negara lain seperti won Korea, peso Mexico, real Brasil, yen Jepang, dan lira Turki. Memasuki awal tahun 2025, tekanan mata uang dolar AS tetap kuat. Nilai tukar Rupiah hingga 23 Januari 2025 tercatat melemah sebesar 1,14% ytd secara ptp, relatif sejalan dengan pelemahan nilai tukar mata uang regional lainnya. Sebaliknya, nilai tukar Rupiah menguat terhadap mata uang kelompok negara maju di luar dolar

AS, dan stabil terhadap mata uang kelompok negara berkembang. Perkembangan tersebut sejalan dengan kebijakan stabilisasi BI serta didukung oleh aliran masuk modal asing yang masih berlanjut, imbal hasil instrumen keuangan domestik yang menarik, serta prospek ekonomi Indonesia yang tetap baik. Posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2024 tercatat tinggi yakni sebesar USD155,7 miliar, setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Saat ini Pemerintah tengah menyiapkan revisi PP 36 Tahun 2023 yang mengatur kebijakan tentang devisa hasil ekspor atas sumber daya alam dengan mekanisme yang tetap mempertimbangkan kondisi keuangan eksportir. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat posisi cadangan devisa dan mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2024 terjaga dalam kisaran sasaran $2,5\pm1\%$, sejalan inflasi IHK Desember 2024 yang tercatat sebesar 1,57% yoy. Inflasi inti terkendali pada level 2,26% yoy sejalan dengan konsistensi suku bunga kebijakan BI (BI-Rate) untuk mengarahkan ekspektasi inflasi sesuai dengan sasarannya. Sementara itu, inflasi volatile food (VF) terus menurun didukung oleh peningkatan pasokan pangan seiring berlanjutnya musim panen, serta eratnya sinergi pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Ke depan, Pemerintah dan BI meyakini inflasi terkendali dalam sasarnya sebesar $2,5\pm1\%$ pada 2025 dan 2026. Inflasi inti juga diprakirakan terkendali karena ekspektasi inflasi yang terjaga, kapasitas ekonomi yang memadai, imported inflation yang terkendali, dan dampak positif dari digitalisasi. Sementara itu, inflasi VF diprakirakan terkendali didukung sinergi pengendalian inflasi oleh Pemerintah dan BI.

APBN hingga akhir tahun 2024 bekerja keras meredam gejolak untuk melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi. Pendapatan Negara tumbuh positif 2,1% yoy, Belanja Negara tumbuh kuat 7,3% yoy, Keseimbangan Primer negatif Rp19,4 triliun namun bergerak menuju positif, dan **defisit anggaran terkendali dalam batas aman sebesar Rp507,8 triliun (2,29% PDB)**.

Kinerja Pendapatan Negara tumbuh positif di tengah gejolak perekonomian global dan harga komoditas yang temoderasi. Realisasi

sementara Pendapatan Negara dan Hibah mencapai Rp2.842,5 triliun (101,4% dari APBN) atau tumbuh 2,1% yoy, ditopang oleh Penerimaan Perpajakan yang tumbuh 3,6% yoy atau sebesar Rp2.232,7 triliun (96,7% dari target APBN) dan PNBP sebesar Rp579,5 triliun atau mencapai 117,8% dari target APBN. Kinerja positif ini terutama didukung oleh aktivitas ekonomi, efektivitas reformasi perpajakan, optimalisasi pengelolaan SDA, meningkatnya kontribusi BUMN, serta inovasi layanan K/L dan kinerja BLU yang semakin baik.

Kinerja Belanja Negara tumbuh kuat 7,3% yoy, peran APBN sebagai shock absorber yang optimal terus mendukung pencapaian target pembangunan. Realisasi sementara Belanja Negara mencapai Rp3.350,3 triliun (100,8% dari APBN) atau tumbuh 7,3% yoy, terdiri atas realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp2.486,7 triliun (11,0% yoy) dan Transfer ke Daerah Rp863,5 triliun (7,7% yoy). Belanja Negara diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, serta memelihara momentum pertumbuhan melalui pemberian bantuan pangan dan stabilisasi pasokan harga pangan (SPHP). Berbagai program perlindungan sosial juga diberikan, antara lain melalui Program Keluarga Harapan/PKH, kartu sembako, beasiswa (PIP dan KIP kuliah), bantuan premi BPJS kesehatan (PBI JKN), subsidi dan kompensasi BBM, listrik dan LPG 3 kg, subsidi pupuk, serta subsidi bunga KUR. Belanja juga diberikan untuk mendukung pelaksanaan pemilu, pilkada serentak, pemberian THR, kenaikan gaji bagi ASN/TNI/Polri, penyelesaian infrastruktur, percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem, serta pembangunan IKN.

Pembiayaan anggaran dilakukan secara *prudent* dan *sustainable* untuk mendukung agenda pembangunan. Realisasi pembiayaan anggaran 2024 mencapai Rp553,2 triliun (105,8% dari APBN) yang terdiri dari pembiayaan utang sebesar Rp556,6 triliun (85,9% dari APBN) dan pembiayaan nonutang sebesar minus Rp3,4 triliun. Realisasi pembiayaan utang lebih rendah dari yang direncanakan dan dipenuhi melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp450,7 triliun dan pinjaman neto sebesar Rp105,8 triliun. Pembiayaan utang tersebut dilakukan secara hati-hati dan terukur selaras dengan kebutuhan, serta mencermati dinamika pasar keuangan dan menjaga keseimbangan antara upaya memelihara momentum dengan tetap menjaga risiko terkendali dalam batas *manageable*. Selain itu, Pemerintah juga senantiasa

berkoordinasi dengan BI dalam mengelola pembiayaan utang Pemerintah dan mendukung operasi moneter.

Selama tahun 2024, Pemerintah terus mengoptimalkan peran APBN sebagai *shock absorber* di tengah gejolak perekonomian global melalui beberapa kebijakan, antara lain:

1. Kebijakan **insentif tambahan berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)** yang ditanggung Pemerintah (DTP) atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun selama periode 1 September hingga 31 Desember 2024. Insentif ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui stimulasi daya beli masyarakat di sektor perumahan.
2. Kebijakan **insentif PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)** yang berlanjut hingga tahun 2025. Insentif ini diberikan atas impor dan/atau penyerahan KBLBB bagi investor baru maupun produsen dalam negeri yang memiliki komitmen untuk memproduksi KBLBB di dalam negeri ke depannya.
3. Kebijakan **bea masuk antidumping (BMAD)** atas impor produk yang harganya lebih rendah dari nilai normalnya dan menyebabkan kerugian. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi produk dalam negeri, antara lain tekstil dan besi baja.
4. Pemerintah telah merevisi ketentuan mengenai pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang dapat dibebankan oleh perbankan dan perusahaan pembiayaan. Kebijakan ini bertujuan untuk menyelaraskan antara perlakuan dalam konteks fiskal dan komersial dengan standar akuntansi yang berlaku sehingga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha terkait.

Selain itu, dalam rangka mendukung iklim investasi yang lebih sehat, kompetitif, dan berkeadilan, Pemerintah:

- a. Menerapkan Kebijakan tarif PPN 12% hanya untuk barang mewah melalui PMK 131/2024 yang berlaku sejak Januari 2025, disertai pemberian stimulus ekonomi untuk kesejahteraan sebesar Rp38,6 triliun sebagai berikut:
 - **Rumah tangga:** bantuan pangan sebesar 10 kg untuk 16 juta KPM selama 2 bulan (Januari dan Februari) dan Diskon listrik 50% untuk pelanggan 2200 VA ke bawah selama 2 bulan (Januari dan Februari).

- **Pekerja:** kemudahan akses jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja yang terkena PHK.
- **UMKM:** perpanjangan masa berlakunya PPh final 0,5% bagi WP UMKM selama tahun 2025.
- **Industri Padat Karya** antara lain terhadap PPh pasal 21 DTP untuk industri padat karya (tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan furnitur) dengan maksimal penghasilan Rp10 juta per bulan, pembiayaan industri padat karya untuk revitalisasi mesin dengan subsidi bunga 5%, dan bantuan 50% untuk jaminan kecelakaan kerja pada sektor padat karya selama 6 bulan.
- **Mobil Listrik dan Hybrid:** insentif PPN DTP 10% untuk KBLBB CKD, PPnBM 15% DTP untuk KBLBB impor CBU dan CKD, Bea Masuk 0% untuk KBLBB CBU, dan PPnBM DTP 3% untuk kendaraan hybrid.
- **Perumahan:** PPN DTP atas penjualan rumah dengan harga hingga Rp5 miliar, untuk bagian harga sampai dengan Rp2 miliar, sebesar 100% (periode Januari hingga Juni 2025) dan 50% (periode Juli hingga Desember 2025).

b. Berkomitmen mengatasi penggerusan basis pajak dan pergeseran laba (*base erosion and profit shifting - BEPS*) melalui penerbitan PMK 136/2024 yang mengatur pengenaan pajak minimum sebesar 15% mulai tahun pajak 2025 bagi wajib pajak badan yang merupakan bagian dari grup perusahaan multinasional (MNC) dengan omzet sedikitnya EUR750 juta. Dengan kebijakan ini, MNC akan dikenakan pajak minimal 15% di manapun lokasi usahanya sehingga tren *race to the bottom* pajak dapat diminimalisasi.

BI terus memperkuat respons bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan moneter diseimbangkan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan (*pro-stability and growth*), sedangkan kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan (*pro-growth*). BI terus mengoptimalkan bauran kebijakan untuk tetap menjaga stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta mendukung penuh implementasi program-program Pemerintah dalam Asta Cita, termasuk untuk

ketahanan pangan, pembiayaan ekonomi, serta akselerasi ekonomi dan keuangan digital.

Sejalan dengan arah bauran kebijakan tersebut, Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 14-15 Januari 2025 memutuskan untuk menurunkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,50%. Keputusan ini konsisten dengan tetap rendahnya prakiraan inflasi pada tahun 2025 dan 2026 yang terkendali dalam sasaran $2,5\pm1\%$, terjaganya nilai tukar Rupiah yang sesuai dengan fundamental untuk mengendalikan inflasi dalam sasarannya, dan perlunya upaya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Ke depan, BI akan terus mengarahkan kebijakan moneter untuk menjaga inflasi dalam sasarannya dan nilai tukar yang sesuai fundamental, dengan tetap mencermati ruang untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dinamika yang terjadi pada perekonomian global dan nasional. BI terus memperkuat strategi operasi moneter pro-market guna meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, mempercepat pendalaman pasar uang dan valuta asing (valas), serta mendorong aliran masuk modal asing, melalui: (a) Optimalisasi SRBI, SVBI, dan SUVBI; (b) menjaga struktur suku bunga instrumen moneter untuk tetap menarik aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik; (c) memperkuat strategi transaksi term-repo dan swap valas; dan (d) memperkuat peran Primary Dealer (PD) untuk meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi repurchase agreement (repo) antarpelaku pasar. BI juga terus melakukan penguatan strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah yang sesuai dengan fundamental melalui intervensi di pasar valas pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan SBN di pasar sekunder.

Kebijakan makroprudensial longgar ditempuh untuk meningkatkan kredit/pembiayaan perbankan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan, dengan:

- a. memperkuat strategi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk meningkatkan kredit/pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, termasuk UMKM dan ekonomi hijau mulai Januari 2025, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Hingga minggu kedua Januari 2025, BI telah menyalurkan insentif KLM sebesar Rp295 triliun, atau meningkat sebesar Rp36 triliun dari Rp259 triliun pada akhir Oktober 2024. Insentif dimaksud telah disalurkan antara lain ke

sektor pertanian, perdagangan, manufaktur, transportasi, pergudangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, konstruksi, real estate, perumahan rakyat, serta UMKM, Ultra Mikro, dan hijau, melalui bank BUMN sebesar Rp129,1 triliun, bank BUSN sebesar Rp130,6 triliun, BPD sebesar Rp29,9 triliun, dan KCBA sebesar Rp5 triliun;

- b. mempertahankan: (i) rasio Counter-cyclical Capital Buffer (CCyB) sebesar 0%, (ii) Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84-94%, (iii) rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti paling tinggi sebesar 100% dan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bank paling rendah sebesar 0% berlaku efektif 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, (iv) Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 5% dengan fleksibilitas repo 5% dan Rasio PLM Syariah 3,5% dengan fleksibilitas repo 3,5%, serta (v) rasio Pendanaan Luar Negeri (RPLN) sebesar 30% dengan parameter kontrasiklikal 0% atau ±5%;
- c. memperkuat publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan KLM.

Kebijakan Sistem Pembayaran diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan, khususnya sektor perdagangan dan UMKM, serta memperkuat akseptasi pembayaran digital masyarakat, antara lain melalui perluasan layanan BI-FAST yang mencakup layanan transfer secara kolektif (*bulk transfer*), pembayaran atas dasar permintaan (*request for payment*), dan transfer debit secara langsung (*direct debit*) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam transaksi ekonomi dan keuangan yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal terhitung sejak tanggal 21 Desember 2024. BI juga terus mendorong penguatan implementasi inisiatif elektronifikasi untuk mendukung program-program Pemerintah melalui digitalisasi program kesejahteraan sosial dan elektronifikasi sektor transportasi. Selain itu, BI akan tetap memastikan stabilitas sistem pembayaran terjaga ditopang oleh struktur industri yang sehat dan infrastruktur yang stabil.

Kebijakan pendalaman pasar keuangan terus dilakukan dengan mengintegrasikan pengembangan produk, harga, dan pelaku pasar, serta infrastruktur, termasuk implementasi Central Counterparty (CCP) sebagai infrastruktur pasar keuangan sistemik yang menjalankan fungsi kliring dan novasi guna mengakselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas,

meningkatkan efisiensi pasar, serta mendukung transmisi kebijakan moneter sehingga meningkatkan kapasitas pembiayaan.

BI juga memperkuat dan memperluas kerja sama internasional di area kebanksentralan, termasuk melalui koneksi sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas, bekerja sama dengan instansi terkait.

BI terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertama, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal diperkuat dalam pembelian SBN dari pasar sekunder oleh BI melalui bilateral buyback/debt switching. Kedua, dukungan memperkuat ketahanan pangan melalui program GNPIP di berbagai daerah dalam TPIP dan TPID. Ketiga, mendorong pembiayaan ekonomi melalui KLM ke sektor-sektor prioritas, termasuk pembiayaan inklusi dan hijau. Keempat, dukungan untuk akselerasi transformasi digital Pemerintah pada program kesejahteraan sosial, elektronifikasi transaksi keuangan Pemerintah Daerah dan sektor transportasi antara lain melalui koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

Stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga stabil di tengah dinamika perekonomian global, didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, profil risiko yang manageable, serta kinerja sektor jasa keuangan yang tumbuh positif.

Kinerja intermediasi perbankan tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga. Pertumbuhan kredit perbankan sepanjang tahun 2024 mencatatkan double digit growth sebesar 10,39% yoy menjadi Rp7.827 triliun, didorong oleh Kredit Investasi yang tumbuh tinggi sebesar 13,62% yoy dan diikuti oleh Kredit Konsumsi 10,61% yoy, sedangkan Kredit Modal Kerja tumbuh 8,35% yoy. Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,08% dan NPL net sebesar 0,74%. Loan at Risk (LaR) juga menunjukkan tren penurunan menjadi sebesar 9,28%. Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tercatat tumbuh sebesar 4,48% yoy menjadi Rp8.837 triliun, dengan giro, tabungan, dan deposito masing-masing tumbuh sebesar 3,34%, 6,78%, dan 3,50% yoy.

Ketahanan perbankan terjaga kuat dengan tingkat permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) Perbankan yang berada di level tinggi sebesar

26,68%. Likuiditas perbankan pada Desember 2024 tetap memadai dengan rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) masing-masing tercatat sebesar 112,87% dan 25,59%, jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

Di tengah berbagai tantangan ketidakpastian geopolitik global, sepanjang tahun 2024 perkembangan Pasar Modal Indonesia tetap menunjukkan resiliensinya. Meski pasar saham domestik sepanjang tahun 2024 ditutup melemah ke level 7.079,91 atau turun 2,65%, investor nonresiden masih membukukan net buy sebesar Rp16,53 triliun serta nilai kapitalisasi pasar naik menjadi Rp12.336 triliun atau tumbuh sebesar 5,74%. Penghimpunan dana oleh korporasi di pasar modal di 2024 juga dalam tren positif, tercatat nilai penawaran umum mencapai Rp259,24 triliun dengan 43 emiten baru. Memasuki Januari 2025, pasar keuangan domestik masih bergerak fluktuatif seiring ekspektasi melambatnya laju pemangkasan Fed Funds Rate (FFR) dan potensi kebijakan pemerintahan AS. IHSG ditutup pada posisi 7.232,64 per 23 Januari 2025 menguat 2,16% dibandingkan penutupan IHSG akhir 2024 (7.079,91). Nonresiden di pasar saham domestik per 23 Januari 2025 mencatatkan net sell sebesar Rp3,04 triliun ytd.

Di Sektor Perasuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP), aset industri asuransi per Desember 2024 mencapai Rp1.133,87 triliun atau tumbuh 2,03% yoy.

(<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/STABILITAS-SISTEM-KEUANGAN-TETAP-TERJAGA-%281%29>)

c. Perkembangan Ekonomi Makro Regional Provinsi NTT

Gambaran Ekonomi Makro Regional Provinsi NTT, disadur dari BPS NTT, Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur 05 Agustus 2025, sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT.

Perekonomian Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Triwulan II-2025 mencapai Rp 37,40 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 20,84 triliun.

Ekonomi NTT triwulan II-2025 tumbuh sebesar 5,44 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024 (y-on-y). Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 12,90 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 39,89 persen.

Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-to-q), ekonomi NTT pada triwulan II-2025 mengalami pertumbuhan sebesar 7,54 persen. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yang meningkat sebesar 21,55 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 63,53 persen.

Perekonomian NTT pada Semester I-2025 tumbuh sebesar 5,10 persen (c-to-c). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 12,42 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 23,27 persen.

Struktur Ekonomi NTT pada triwulan II-2025 masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sebesar 30,48 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 64,87 persen.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari 2025 sebanyak 3,08 juta orang, naik 0,02 juta orang dibanding Februari 2024. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turun sebesar 0,96 persen poin dibanding Februari 2024. Penduduk yang bekerja pada Februari 2025 sebanyak 2,98 juta orang, naik sebanyak 12,58 ribu orang dari Februari 2024. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 89,01 ribu orang. Pada Februari 2025 sebanyak 0,76 juta orang (25,58 persen) bekerja pada kegiatan formal, turun sebesar 0,25 persen poin dibanding Februari 2024. Persentase setengah pengangguran pada Februari 2025 naik sebesar 0,91 persen poin dan pekerja paruh waktu pada Februari 2025 turun sebesar 0,89 persen poin dibanding Februari 2024. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari

2025 sebesar 3,23 persen, naik sebesar 0,06 persen poin dibanding pada Februari 2024.

3. Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 18,60 persen, menurun 0,42 persen poin terhadap September 2024 dan menurun 0,88 persen poin terhadap Maret 2024. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 1,09 juta orang, menurun 19,16 ribu orang terhadap September 2024 dan menurun 38,79 ribu orang terhadap Maret 2024. Pada Maret 2025, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi NTT yang diukur menggunakan Gini Ratio adalah sebesar 0,315. Angka ini menurun 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2024 yang sebesar 0,316 dan menurun 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2024 yang sebesar 0,3162.

4. Indeks Pembangunan Manusia

Pertumbuhan IPM 2024 mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama dimensi pengetahuan. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,83 tahun, meningkat 0,26 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF). Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,22 menjadi 13,23 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,20 tahun, dari 7,82 tahun menjadi 8,02 tahun pada tahun 2024. Sumber data HLS dan RLS menggunakan hasil Susenas Maret. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 286 ribu rupiah (3,47 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber data pengeluaran riil per kapita per tahun menggunakan hasil Susenas Maret.

5. Inflasi Provinsi NTT

Pada Agustus 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 2,71 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,94. Inflasi tertinggi terjadi di Maumere sebesar 4,82 persen dengan IHK sebesar 111,18 dan Inflasi terendah terjadi di Waingapu sebesar 1,51 persen dengan IHK sebesar 108,47. Inflasi y-on-y Agustus 2025 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 9 dari 11 indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 5,65 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,24 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,04 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,29 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,99 persen; kelompok transportasi sebesar 0,12 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,95 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,03 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,25 persen. Sementara, kelompok yang mengalami penurunan indeks harga, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,72 persen dan kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,16 persen pada Agustus 2025. Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami deflasi month to month (m-to-m) sebesar 0,55 persen pada Agustus 2025. Dan terjadi inflasi year-to-date (y-to-d) sebesar 1,45 persen pada Agustus 2025.

d. Perkembangan Ekonomi Kabupaten Ende

Gambaran tentang Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Ende dapat dilihat dari perkembangan PDRB Kabupaten Ende. Mengacu kepada data yang dirilis oleh BPS Kabupaten Ende, dalam buku PDRB Kabupaten Ende Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024, dapat diketahui bahwa Nilai PDRB Berdasarkan Harga Berlaku 2010 untuk kondisi pada tahun 2024 mencapai 7.885,46 miliar rupiah. Secara nominal nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 511,08 miliar dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 7.374,38 miliar rupiah. sedangkan Nilai PDRB Berdasarkan Harga Konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Ende pada tahun 2024 meningkat yaitu mencapai 4.630,780 miliar rupiah atau naik 173,09 miliar dari 4.457,690 miliar pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan terjadi ekspansi ekonomi sebesar 3,88 persen mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 yang mencapai 3,87 persen. Peningkatan tersebut

dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yaitu sebesar 10,55 persen. Lapangan Usaha ini mengalami kondisi yang fluktuatif, dimana setelah mengalami penurunan sebesar 1,46 pada tahun 2021, selanjutnya mengalami peningkatan sebesar 6,75 pada tahun 2022 dan terus bertumbuh positif menjadi sebesar 11,29 persen pada tahun 2023 dan menurun pada tahun 2024 sebesar 10,55 persen.

Dari 17 lapangan usaha yang ada, rata-rata mengalami pertumbuhan yang positif, ada 9 lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif diatas agregat, namun ada 8 lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif dibawah pertumbuhan ekonomi agregat, yaitu: lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (2,96), Pengadaan Listrik dan Gas (10,55), Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur ulang (2,57), Konstruksi (1,37), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (10,16), Informasi dan Komunikasi (4,13), Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial (3,44), serta Jasa lainnya (2,77).

Dilihat dari peranan masing-masing Lapangan Usaha dalam pembentukan PDRB Kabupaten Ende, maka diketahui bahwa ada 5 (lima) kategori Lapangan Usaha yang mendominasi pembentukan PDRB, yaitu: (1) Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; (2) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (3) Transportasi dan Pergudangan; (4) Konstruksi; dan Lapangan Usaha (5) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mempunyai peran terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Ende Tahun 2024, yaitu mencapai 31,35 persen, selanjutnya Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,43 persen, Jasa Pendidikan sebesar 9,14 persen; Konstruksi sebesar 8,80 persen; dan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,59 persen.

Tabel 12.3 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Ende (persen), 2020–2024
Percentage Distribution of Gross Regional Domestic Product at Current Market Prices by Industry in Ende Regency (percent), 2020–2024

III-17 Rancang	Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022	2023*	2024**
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
	I. Real Estate/Fixed Assets Activities	2,61	2,3	2,54	2,45	2,86
	M.Bi Jasa Profesional/Business Activities	8,23	8,15	8,19	8,15	8,19
	O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Keamanan Sosial Wajib/PabR, Administration and Defense, Compulsory Social Security	10,25	9,88	9,38	8,10	8,19
	P Jasa Administrasi dan Layanan	18,78	15,56	9,74	9,37	9,14

Sementara gambaran tentang **Inflasi di Kabupaten Ende**, dapat dilihat dari publikasi BPS Kabupaten Sumba Timur tentang kondisi Inflasi yang terjadi di Kabupaten Sumba Timur dan cenderung mengalami kondisi yang hampir sama dengan Kabupaten Ende. Sesuai data BPS Kabupaten Sumba Timur yang dirilis tanggal 1 Agustus 2025 bahwa terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kota Waingapu pada keadaan bulan Juli 2025 sebesar 2,95 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,88. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 8 dari 11 indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,68 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 5,91 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,86 persen; kelompok transportasi sebesar 0,84 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 5,03 persen; kelompok pendidikan sebesar 3,47 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,11 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,07 persen. Pada Juli 2025, inflasi month to month (m-to-m) Kota Waingapu sebesar 0,47 persen. Untuk tingkat inflasi year to date (y-to-d) Kota Waingapu bulan Juli 2025 sebesar 3,05 persen.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Ende dirumuskan dengan memerhatikan perkembangan ekonomi dan kondisi riil ekonomi Kabupaten Ende terkini. Sejalan dengan tema perencanaan yang diarahkan pada peningkatan

kualitas sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan ekstrim untuk mendukung pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Pertumbuhan ekonomi pada keseluruhan tahun 2024 telah bertumbuh positif pada angka 3,88 persen atau meningkat dari kondisi tahun 2023 sebesar 3,87 persen. Ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian telah menunjukkan trend terus menuju ke arah positif. Ini menandakan bahwa perekonomian di Kabupaten Ende telah bangkit kembali, setelah dihantam wabah covid-19 pada tahun 2019 yang lalu.

Sementara untuk itu tingkat inflasi dengan merujuk kepada data Kota Waingapu sebesar 2,37 persen perlu mendapatkan perhatian pemerintah untuk dapat menekannya, dengan menstabilikan harga barang serta mengantisipasi faktor-faktor yang menyebabkan pemicu terjadinya inflasi di Kabupaten Ende, termasuk kondisi inflasi beras dan pisang yang perlu mendapat perhatian khusus, serta kelangkaan bahan-bahan pokok kebutuhan masyarakat termasuk mengatasi kondisi tingginya harga beras, dimana inflasi beras juga dialami oleh seluruh kabupaten/kota di NTT

Sejalan dengan itu pertumbuhan 8 lapangan usaha yang telah mengalami pertumbuhan positif dibawah pertumbuhan ekonomi agregat, yaitu: lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (2,96), Pengadaan Listrik dan Gas (10,55), Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur ulang (2,57), Konstruksi (1,37), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (10,16), Informasi dan Komunikasi (4,13), Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial (3,44), serta Jasa lainnya (2,77). dapat didorong untuk mengalami pertumbuhan positif diatas agregat.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

RKPD merupakan dokumen perencanaan, yang dalam konteks pencapaian target tidak terlepas dari ketersediaan anggaran. Oleh karena itu dalam perumusannya perlu didahului dengan analisis keuangan, yang dilakukan melalui penelaahan kinerja dan kebijakan pengelolaan keuangan tahun-tahun sebelumnya, serta kebijakan perencanaan anggaran jangka menengah (RPJMD). Analisis keuangan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2026 didasarkan pada data dokumen APBD, LKPJ, Laporan Keuangan, sumber-sumber relevan serta memerhatikan kebijakan anggaran pada RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2029 untuk tahun 2026 dan arah kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran oleh pemerintah pusat.

Kebijakan keuangan pada tahun 2026, digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang mendukung visi dan misi Kabupaten Ende yaitu “**Mewujudkan Kabupaten Ende yang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan Berbasiskan Iman dan Budaya Ende Lio Nage Sare Pawe**” dengan 12 program unggulan sebagaimana telah tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan secara tahunan dalam RKPD Kabupaten Ende Tahun 2026. Selain itu, juga mendukung program dan kegiatan strategis jangka menengah diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial dalam mewujudkan Indonesia yang Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera melalui 8 (delapan) strategi yang difokuskan pada: (i) ketahanan pangan; (ii) ketahanan energi; (iii) Makan Bergizi Gratis (MBG); (iv) program pendidikan; (v) program kesehatan; (vi) pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; (vii) pertahanan semesta; serta (viii) akselerasi investasi dan perdagangan global.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan dilaksanakan untuk memperkirakan penerimaan daerah (pendapatan dan penerimaan pembiayaan), sehingga pengeluaran daerah (belanja wajib dan pengeluaran pembiayaan) dapat dirumuskan secara rasional dan terukur. Perumusan proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan, didasarkan pada kertas kerja (*working paper*), yang meliputi analisis sumber-sumber pendapatan, kinerja realisasi pendapatan, analisis pertumbuhan belanja dan neraca daerah. Dalam konteks formulasi kebijakan anggaran (*budget policy formulation*) perumusan kebijakan keuangan diarahkan dalam rangka implementasi Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target dalam dokumen RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025-2029.

Kemampuan keuangan dan kerangka pendanaan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2026 dirumuskan dengan skema $(A+B = C+D)$ atau digambarkan sebagai berikut:



pada RKPD 2025, disimpulkan beberapa hal sebagai dasar dalam perumusan prioritas pembangunan Tahun 2026, antara lain:

1. Adanya kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Adanya *program baru* yang diarahkan dalam rangka mempercepat capaian indikator, serta merupakan *arahannya kebijakan nasional dan provinsi*, antara lain perubahan Kebijakan DAK yang bersifat tematik, holistik, integratif dan spasial (THIS) dengan strategi lokasi prioritas 3T (tertinggal, terluar dan terdepan) serta proyek strategis nasional dan program strategis nasional.

2. Telaahan Prioritas Pembangunan Nasional Dalam RKP Tahun 2026

Telaahan RKP yang disajikan, mengacu kepada bahan Rancangan RKP Tahun 2026 sebagai berikut:

Tema RKP 2026: “**Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif**”. yang merupakan fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi sebagaimana yang termuat di dalam RPJPN 2025-2045 dengan rumusan visi Indonesia Emas 2045, yaitu negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik.

Sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2026, antara lain:

- Pertumbuhan ekonomi sebesar : 5,8 – 6,3
- Tingkat kemiskinan sebesar : 6,5 – 7,5 %
- Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar : 4,44 – 4,96
- Rasio Gini (nilai) sebesar : 0,377 – 0,380
- Indeks Modal Manusia sebesar : 0,57
- Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar: 37,14

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (ProSN)

Program Strategis Nasional merupakan program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan program/proyek yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RKP yang mencakup Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, dan Proyek Strategis Nasional yang memiliki sifat strategis dan menjadi tanggung jawab

pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta menjaga keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, ProSN menjadi acuan penting bagi Pemerintah Daerah dalam menyelaraskan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan agar mendukung agenda strategis nasional secara terpadu dan berkelanjutan. Pelaksanaan ProSN diarahkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah. Dalam hal ini, keterpaduan antara program pusat dan daerah menjadi kunci dalam menciptakan pemerataan infrastruktur, peningkatan daya saing wilayah, serta pemerataan akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi di seluruh Indonesia. Selain aspek ekonomi, ProSN juga memuat dimensi strategis dalam menjaga stabilitas nasional, khususnya melalui program-program yang mendukung ketahanan energi, pangan, dan pertahanan negara. Pemerintah Daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung program-program tersebut melalui penguatan kapasitas wilayah dan sinergi lintas sektor, demi menciptakan lingkungan yang aman, tangguh, dan resilien. Pada akhirnya, seluruh inisiatif dalam Program Strategis Nasional bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pelaksanaan ProSN yang terarah dan terkoordinasi dengan baik, diharapkan tercipta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang tidak hanya menciptakan pertumbuhan, tetapi juga memastikan bahwa manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Berikut Program Strategis Nasional (ProSN):

Tabel. 4.15 Program Strategis Nasional (ProSN)

No	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	
1.	Pengentasan Kemiskinan	1	Penanggulangan Kemiskinan
		2	Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
		3	Sekolah Rakyat
		4	Pembangunan 3 Juta Rumah
2.	Ketahanan Pangan	1	Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)
		2	Pendayagunaan Penyuluhan Pertanian
		3	Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah
		4	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)
3.	Kesehatan untuk semua	1	Stunting
		2	Pemeriksaan Kesehatan Gratis
		3	Jaminan Kesehatan Nasional
		4	Penuntasan TBC

No	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	
		5	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota
4.	Perluasan Pendidikan Akses	1	Pembangunan dan Revitalisasi PAUD
		2	Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah
		3	Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran
		4	Makan Bergizi Gratis
5.	Pertumbuhan Ekonomi	1	Pengendalian Inflasi
		2	Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
		3	Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
		4	Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan,)
		5	Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah

3. Telahaan Prioritas Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2026

Prioritas Pembangunan Provinsi NTT tahun 2026 antara lain sebagai berikut;

1. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan;
2. Pemberdayaan Komunitas;
3. Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan;
4. Pemerataan Akses dan Layanan Kesehatan;
5. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan;
6. Reformasi Birokrasi dan HAM; dan
7. Kolaborasi Ayo Bangun NTT.

Selain Prioritas yang merupakan pilar dari Gubernur dan Wakil Gubernur juga terdapat dasa cita yang merupakan Program Pembangunan Daerah antara lain:

1. Dasa Cita 1 : Dari ladang dan Laut ke Pasar:Efisiensi, Modern, dan Aman;
2. Dasa Cita 2 : Milenial dan Perempuan Motot Kreativitas Lokal;
3. Dasa Cita 3 :Wisata NTT Pengerak Ekonomi Lokal;
4. Dasa Cita 4: Kesejahteraan Bersama; Jaminan Kesehatan dan ketenagakerjaan untuk masyarakat;
5. Dasa Cita 5 : Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan bebas Stunting
6. Dasa Cita 6 : Sekolah Vokasi Unggulan Berbasis Potensi Unggulan;
7. Dasa Cita 7 : Jalan, Air, Listrik, Rumah Layak Huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera
8. Dasa Cita 8 : Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin
9. Dasa Cita 9 : Membangun NTT Digital : Akses Merata, Komunikasi Lancar
10. Dasa Cita 10 : Ayo Bangun NTT, Kolaborasi Bersama

4. Kemampuan Keuangan Daerah

Besaran kema

Rencana Penggunaan Kapasitas Ril Keuangan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2026 (dalam Miliar)

No	Uraian	Rencana RKPD 2026	Proporsi thd Kap. Ril (%)	Ket.
A.	Prioritas I	116,9	15,49	
1	Pelayanan Dasar	116,9		
B.	Prioritas II	354,50	46,95	

Sumber data: BAB III RKPD Tahun 2025

5. Prioritas Kabupaten Ende Tahun 2026

Berdasarkan proses perumusan sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, serta memerhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2026, yang pada prinsipnya mendukung 10 (sepuluh) Program Prioritas Daerah (PPD) Provinsi NTT Tahun 2026 dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas Nasional (PPN) Tahun 2026, sebagai berikut:

Keterkaitan Program Prioritas Daerah Kabupaten Ende (PD) dengan Program Prioritas Provinsi (PP) dan Prioritas Nasional (PN) Tahun 2026

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		Program Prioritas Berdasarkan Kepmendagri No.900.1-2850 tahun 2025	PROGRAM PRIORITAS PROPINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
1	ENDE CEMERLANG " Membangun Kabupaten Ende melalui peningkatan SDM, dan mewujudkan Ende sebagai Kota Pendidikan"	Program Pengelolaan Pendidikan	DC 6 dan 3	PPN 8
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		
2	ENDE SEHAT "Membangun investasi masyarakat yang sehat melalui Optimalisasi Pelayanan dan Sadar Kesehatan"	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DC 5	PPN 7
		1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		
		2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		
3	ENDE UNGGUL "Membangun Kabupaten Ende yang memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif melalui Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan, kesehatan	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	DC 2	PPN 14
		2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DC 1	

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		Program Prioritas Berdasarkan Kepmendagri No.900.1- 2850 tahun 2025	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS
	" dan ekonomi (berfokus pada aspek ekonomi)"			
		3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DC 3	
		3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	DC 3	
		2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	DC 2	PPN 14
		2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		
4	ENDE PRODUKTIF "Membangun Kabupaten Ende melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan , UMKM Pemberdayaan Masyarakat dengan Optimalisasi SDA"	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DC 1	PPN 1
		2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	DC 1	PPN 1
		3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DC 1	PPN 1
		3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DC 1	
		3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DC 1	
		3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DC 3	
		3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	DC 3	
		2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		
5	ENDE TOLERAN "Membangun Kabupaten Ende dalam semangat kebersamaan di atas penghargaan terhadap keberagaman sebagai identitas Masyarakat"	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	DC 3	PPN 16
		8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	DC 3	PPN 16
6	ENDE MELAYANI "Membangun Kabupaten Ende melalui peningkatan kualitas perlindungan kepada masyarakat"	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DC 2	
		1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DC 8	

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		Program Prioritas Berdasarkan Kepmendagri No.900.1-2850 tahun 2025	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS
		1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		PPN 10
		1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	DC 2	
		1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	DC 2	
		1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	DC 2	
7	ENDE MEMBANGUN "Membangun Kabupaten Ende melalui ketersediaan dan peningkatan daya dukung infrastruktur dasar (Jalan, jembatan, air bersih,)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		PPN 15
		1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		PPN 15
		1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN	DC 7	PPN 13
		1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		
		1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		
		1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	DC 7	PPN 13
8	ENDE KREATIF "Membangun Kabupaten Ende yang berdaya saing melalui Peningkatan pertumbuhan di berbagai bidang (fokus pada bidang pertanian: argoindustri, agrowisata)	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	DC 1	PPN 1
		2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DC 1	PPN 1
		2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	DC 1	PPN 1
		2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	DC 1	PPN 1

Sumber : Olahan Bappeda

4.3. Data Inovasi

Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mendorong peningkatan daya saing global. Salah satunya melalui inovasi. Untuk menjamin pelaksanaan dan keberlangsungan inovasi, maka inovasi dijalankan dalam suatu sistem, dimana di dalamnya terdapat pelaku, kelembagaan, hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan, kecepatan dan difusi dari suatu inovasi. Pelaksanaannya di daerah dikenal dengan istilah sistem inovasi

daerah, merupakan bagian integral dari sistem inovasi nasional.

Salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan inovasi adalah melalui pengukuran indeks inovasi daerah, dimana penghargaan dan pembinaan diberikan kepada daerah berdasarkan predikat inovasinya. Indeks inovasi daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah, adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah dalam suatu periode tertentu. Lembaga yang bertugas memberikan penilaian , penghargaan dan insentif kepada daerah yang berhasil melaksanakan inovasi adalah kementerian dalam negeri.

Pemberian penghargaan dan insentif ditujukan agar daerah termotivasi untuk melakukan inovasi, yang pada ujungnya berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penilaian indeks inovasi daerah tahun 2022 sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6301.A tahun 2022 tentang Indeks Inovasi daerah Provinsi, kabupaten dan Kota tahun 2022, Kabupaten Ende memperoleh nilai 0,40 dengan predikat kurang Inovatif karena Pelaporan yang disampaikan pada tahun 2022 hanya 1 inovasi tanpa melaporkan data Indikator. Pada tahun 2023 sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11- 6301.A tahun 2022 tentang Indeks Inovasi daerah Provinsi, kabupaten dan Kota tahun 2023, Kabupaten Ende memperoleh nilai 19,98 dengan predikat kurang Inovatif . Adapun jumlah inovasi yang dilakukan pada tahun 2023 sebanyak 9 inovasi pada 6 Perangkat Daerah yang dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

1.Judul inovasi : **Garugiwa In-Line (Gerai Urusan Pelanggan Insan Adminduk Terintegrasi dan Online)**

1) Dasar Hukum:

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tentang Penetapan Inovasi Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2) Ketersediaan Sumber Daya:

Keberhasilan suatu program tentu harus ada dukungan financial maupun sumber daya manusia yang baik. Namun Inovasi GARUGIWA In-Line tidak membutuhkan biaya yang tinggi dan khusus. Karena inovasi ini lahir dari komitmen dan semangat yang sama. Berbagai sumber daya diantaranya:

1. Sumber biaya

Biaya yang digunakan dalam inovasi ini diambil dari alokasi dan pada Disdukcapil Kabupaten Ende yang terdiri dari: APBD Tahun 2020 sebesar Rp.1.138.006.896; Tahun 2021 sebesar Rp.883.676.053; Tahun 2022 sebesar Rp.2.164.445.134; APBN DAK Tahun 2020 sebesar Rp.1.459.153.104; Tahun 2021 sebesar Rp.2.088.566.367; ditambah dengan dukungan biaya dari Topdown dana APBD Desa dan Kelurahan.

2. Sumber daya Manusia

Sumber daya manusia yang terlibat dalam inovasi ini:

- 1) Operator dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende sebanyak: 22 orang;
- 2) Petugas Registrasi Desa: 255 orang, Kelurahan :23 orang;
- 3) Petugas Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit dan Puskesmas sebanyak 9 orang (untuk inovasi LAPAK dan MANDA);
- 4) Petugas Pemakaman 7 orang (untuk inovasi MANDA).

3. Sumber daya material dan peralatan

Operasional yang digunakan dalam inovasi ini adalah: komputer, alat tulis kantor, formulir persyaratan, leafet, baner, baliho, kalender, sistem informasi, website dan fasilitas internet.

3) Latar belakang Inovasi :

Memahami bahwa pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) merupakan jenis pelayanan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Ende harus melakukan pelayanan yang memudahkan masyarakat. Masyarakat selalu menuntut kualitas pelayanan yang baik, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan dan keinginan yang dapat membahagiakan masyarakat.

Kabupaten Ende memiliki penduduk 276.740 ribu jiwa (DKB Semester 2 Tahun 2020), dari jumlah penduduk tersebut masih banyak sekali masyarakat yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan. Disdukcapil Kabupaten Ende dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat, namun dalam pelaksanaannya masih banyak sekali kendala dalam pelayanan yang terjadi diantaranya: 1.Pelayanan masih dianggap ber-belit-belit, lambat, ber-resiko dan membuat lelah masyarakat; 2.waktu penyelesaian masih membutuhkan beberapa hari

bahkan sampai beberapa minggu dan bulan; 3.pelayanan belum menerapkan

sistem pelayanan yang cepat, mudah dan langsung jadi; 4.pelayanan masih terpusat hanya ada di kantor dinas, belum ada layanan terintegrasi, layanan di desa dan layanan online, tentu hal ini mempersulit masyarakat untuk memperoleh dokumen administrasi kependudukan.

Capaian Target Indikator Pusat Tahun 2020 terhadap kepemilikan dokumen Adminduk Kabupaten Ende sangat rendah. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia, jumlah anak (usia 0–17 Tahun) di Kabupaten Ende Tahun 2020 yang memiliki akta kelahiran baru mencapai 44 %, sehingga masih ada 56 % anak yang belum memiliki akta kelahiran. Sedangkan jumlah anak yang memiliki Kartu Identitas Anak hanya sebanyak 1.460 anak. Berangkat dari latar belakang permasalahan maka Inovasi GARUGIWA INLINE (GerAI uRUsan pelanGgan Insan Wajib Adminduk Terintegrasi dan Online) digagas, diinisiasi, dan diterapkan untuk memudahkan dan mempercepat kepemilikan dokumen adminduk bagi masyarakat. Inovasi ini di inisiasi, digagas dan penerapannya pada tahun 2020 namun dalam pelaksanaan penerapannya terdapat beberapa inovasi yang terintegrasi dalam inovasi yang pelaksanaan penerapannya ada ditahun 2020, 2021, dan 2022. Inovasi ini memberikan layanan yang efektif dan efisien dalam penerbitan dokumen Adminduk karena dapat dilakukan secara Offline Terintegrasi dan secara Online. Dampak yang di peroleh dari inovasi ini adalah layanan menjadi mudah, murah, cepat dan langsung jadi. Inovasi GARUGIWA In-Line tidak hanya ada di kantor dinas tapi ada juga di kantor desa, layanan online, mobil keliling dan layanan ini tidak hanya tersedia pada hari kerja reguler tetapi juga pada hari libur. Inovasi ini sesuai dengan tujuan SDGs yaitu “Mengatasi kemiskinan, membangun kehidupan sehat dan sejahtera dan membangun kemitraan untuk mencapai tujuan untuk pembangunan berkelanjutan di semua tingkatan.

4) Tujuan Inovasi :

1. Terwujudnya percepatan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan bagi masyarakat;
2. Meningkatnya target capaian indicator kepemilikan dokumen administrasi kependudukan;
3. Mempersingkat prosedur alur pelayanan;
4. Memiliki fleksibilitas waktu terkait pengajuan pendaftaran administrasi kependudukan;

5. Memberikan kemudahan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan layanan yang efektif, mudah, tepat, cepat, gratis dan bebas pungli atau calo dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan.

5) Manfaat Yang diperoleh :

1. Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan akan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan;
2. Mempersingkat prosedur alur pelayanan bagi masyarakat untuk memperoleh beberapa dokumen dalam sekali urus karena memiliki layanan terintegrasi;
3. Memudahkan masyarakat dalam mengakses kepengurusan dokumen administrasi kependudukan dari mana saja Dan kapan saja Karena tersedia layanan online;
4. Memiliki fleksibilitas waktu terkait pengajuan dokumen administrasi kependudukan dan bebas dari calo dan pungli.

Sedangkan kebaharuan dari Inovasi ini adalah; memiliki 6 (enam) inovasi layanan terintegrasi yang mana dengan layanan terintegrasi dalam sekali urus masyarakat dapat memiliki beberapa dokumen sekaligus. Adapun layanan GARUGIWA Terintegrasi diantaranya :

- **Inovasi LAPAK 3in1 (LAhir daPat Adminduk)** jika ada ibu yang melahirkan di Faskes bayinya akan memperoleh dokumen administrasi kependudukan (Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA). Inovasi ini telah dilakukan kerjasama/MoU dengan Faskes seperti Rumah Sakit dan Puskesmas;
- **Inovasi MANDA 3in1 (MAti Nanti Dapat Adminduk)** jika ada keluarga yang meninggal di faskes akan memperoleh dokumen administrasi kependudukan (Akta Kematian, Kartu Keluarga, KTP Perubahan Status). Inovasi ini telah dilakukan kerjasama/MoU dengan Faskes seperti Rumah Sakit dan Puskesmas;;
- **Inovasi KANDA 3in1 (KAwin Nanti Dapat Adminduk)** jika ada pasangan yang menikah akan memperoleh dokumen administrasi kependudukan (Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, KTP-El (perubahan status). Inovasi ini telah dilakukan kerjasama/MoU dengan Gereja;
- **Inovasi PANDA 3in1 (PermAndian Nanti Dapat Adminduk)** jika ada anak yang dipermandikan di gereja akan memperoleh dokumen

administrasi kependudukan (Surat Permandian, Kartu Keluarga, KIA). Inovasi ini telah dilakukan kerjasama/MoU dengan Gereja;

- **Inovasi CANDA 3in1 (CerAi Nanti Dapat Adminduk)** jika ada pasangan yang bercerai akan memperoleh dokumen administrasi kependudukan (Kartu Keluarga, Akta Perceraian/Buku Cerai, KTP-EI). Inovasi ini telah dilakukan kerjasama/MoU dengan Kantor Kementerian Agama dan Kantor Pengadilan Agama.
- **Inovasi KAIDA 3in1 (KAwin Isbak Dapat Adminduk)** jika ada pasangan yang menikah isbak akan memperoleh dokumen administrasi kependudukan (Kartu Keluarga, Buku Nikah, KTP-EI). Inovasi ini telah dilakukan kerjasama/MoU dengan Kantor Kementerian Agama dan Kantor Pengadilan Agama.

2. Memiliki 4 (empat) layanan online (1. Akta Kelahiran Online; 2. Kartu Keluarga Online; 3. Kartu Identitas Anak Online;
3. Konsolidasi NIK Online) yang mudah diakses dari mana saja dan kapan saja 24 jam pada website dinas <https://disdukcapil.endekab.go.id/dukcapil/layanan-online>)
4. Memiliki gerai layanan di desa dilengkapi dengan petugas registrasi desa.
5. Adanya gerai layanan keliling jemput bola dengan menggunakan bus ke desa, sekolah, dan tempat keramaian.

GARUGIWA In-Line menjadi MASKOT PELAYANAN dari Dinas, dengan inovasi ini dinas berhasil mempercepat kepemilikan dokumen adminduk dan merubah kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan dari yang buruk menjadi pelayanan yang mudah dan membahagiakan masyarakat. Nama GARUGIWA di ambil dari nama burung langkau yang hanya ada di Danau Tiga Warna Kelimutu yang memiliki beragam suara yang sangat merdu.

6) Pelaksanaan Inovasi

Inovasi GARUGIWA IN-LINE yang penerapannya pada tahun 2020 terus mengalami perkembangan perubahan dengan penambahan-penambahan inovasi, Ada beberapa tahapan yang dilakukan pada inovasi ini diantaranya:

1. **Tahap Pertama** menyediakan layanan terpusat, seluruh jenis layanan mulai dari pengajuan berkas sampai dengan pengambilan dokumen dilakukan dalam satu gerai Layanan.
2. **Tahap ke-dua** menyediakan layanan online pada website <https://disdukcapil.endekab.go.id/dukcapil/layanan-online>. adapun

layanan online yang tersedia (Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Konsolidasi NIK).

3. **Tahap ke-tiga** Membangun kerjasama dengan Desa dengan membentuk Petugas Registrasi, hal ini dilakukan dalam rangka pendekatan pelayanan dan memudahkan masyarakat memperoleh dokumen adminduk. Masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke dinas untuk mengurus dokumen adminduk.
4. **Tahap ke-empat** Berkolaborasi dengan stakeholder membangun Layanan Terintegrasi, dengan layanan terintegrasi dalam sekali urus masyarakat dapat memiliki beberapa dokumen sekaligus. Adapun layanan GARUGIWA Terintegrasi diantaranya :
 - 1) **Inovasi LAPAK 3in1 (LAhir daPat Adminduk)** (Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA));
 - 2) **Inovasi MANDA 3in1 (MAti Nanti Dapat Adminduk)** (Akta Kematian, Kartu Keluarga, KTP Perubahan Status);
 - 3) **Inovasi KANDA 3in1 (KAwin Nanti Dapat Adminduk)** (Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, KTP-EI (perubahan status);
 - 4) **Inovasi PANDA 3in1 (PerMAndian Nanti Dapat Adminduk)** (Kartu Keluarga, KIA);
 - 5) **Inovasi CANDA 3in1 (CerAi Nanti Dapat Adminduk)** (Kartu Keluarga, Akta Perceraian/Buku Cerai, KTP-EI);
 - 6) **Inovasi KAIDA 3in1 (KAwin Isbak Dapat Adminduk)** (Kartu Keluarga, Buku Nikah, KTP-EI).
- 7) Capaian Inovasi dan Dampaknya:

Inovasi GARUGIWA IN-LINE yang pelaksanaannya dilakukan mulai Tahun 2020, dianggap cukup efektif karena langsung menjawab permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat dan memberikan kemudahan pada masyarakat dalam mengakses penerbitan dokumen administrasi kependudukan. Selama pelaksanaan inovasi ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende sudah menerbitkan ribuan dokumen Administrasi Kependudukan melalui Layanan Terintegrasi, Layanan Online dan Gerai Layanan di Desa melalui Petugas Registrasi Desa. Dinas juga berhasil mencapai dan bahkan melampaui target indicator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI, berikut data capaian target indicator Tahun 2020 s/d 2022 sebagai berikut:

1. Capaian KTP-EI untuk tahun 2022 sebesar 99,30%;

2. Capaian akta kelahiran anak umur 0 s/d 17 tahun untuk tahun 2022 sebesar 98,50%;
3. Capaian Kartu Identitas Anak (KIA) untuk tahun 2022 sebesar 68,58%;
4. Capaian akta kematian untuk tahun 2022 sebesar 100%;
5. Capaian akta perkawinan untuk tahun 2022 sebesar 100%;
6. Capaian akta perceraian untuk tahun 2022 sebesar 100%.

Tidak bisa dipungkiri hasil dari inovasi ini membuat masyarakat dapat menerima manfaat secara langsung, hal ini dapat dilihat pada kondisi sebelum dan sesudah inovasi diimplementasikan. Kondisi sebelum dan sesudah ada inovasi:

1. Sebelum ada inovasi tempat pelayanan Terpusat di dinas setelah ada inovasi tersedia di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan layanan online;
 2. Sebelum ada inovasi waktu pelayanan hanya terjadi pada Hari dan Jam Kerja Reguler setelah ada inovasi terlayani di Hari Sabtu–Minggu dan layanan online 24 jam;
 3. Sebelum ada inovasi penyelesaian dokumen Lama, berhari-hari setelah ada inovasi penyelesaian document Mudah, Cepat dan Langsung Jadi;
 4. Sebelum ada inovasi Jarak tempat layanan Jauh dan terpusat di dinas setelah ada inovasi tempat layanan menjadi Dekat tersedia di desa dan jemput bola;
 5. Sebelum ada inovasi Biayanya mahal ada biaya transportasi setelah ada inovasi maka Tidak perlu biaya;
 6. Sebelum ada inovasi Calo banyak berkeliruan setelah ada inovasi sudah tidak ada calo lagi;
 7. Sebelum ada inovasi kegiatan sosialisasi jarang terjadi setelah ada inovasi sosialisasi sering terjadi pada saat jemput bola;
 8. Sebelum ada inovasi tingkat Kepercayaan dan kesadaran Masyarakat Rendah setelah ada inovasi tingkat kepercayaan masyarakat Tinggi;
 9. Sebelum ada inovasi capaian KTP-el, Kartu Kelurga, Akta Kelahiran, KIA,Akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian Rendah setelah ada inovasi capaiannya meningkat bahkan melampaui target national.
2. Judul Inovasi : Moro Si Kepo (Mobil Operasional Slap Keliling Jemput Bola)

1) Dasar Hukum:

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tentang Penetapan Inovasi Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

2) Ketersediaan Sumber Daya:

Keberhasilan suatu inovasi tentu saja harus didukung oleh dukungan financial maupun sumber daya manusia yang bagus. Karena inovasi ini lahir dari komitmen dan semangat yang sama maka Berbagai sumber daya diantaranya:

a) Sumber daya Manusia yang terlibat dalam inovasi ini:

1. Operator dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende yang akan ditugaskan secara bergantian sebanyak: 22 orang;
2. Camat, Lurah, Kepala Desa, Petugas Registrasi dan Kepala Sekolah;

b) Sumber daya Keuangan

Inovasi MORO SI KEPO mendapat dukungan dari DPRD Kabupaten Ende dengan cara mengadakan satu unit mobil bus yang digunakan untuk pelayanan keliling jemput bola, biaya yang digunakan dari alokasi APBD TA 2020 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende sebesar Rp. 700.000.000,- ditambah dengan biaya operasional dari bidang pendaftaran dan bidang pencatatan sipil.

c) Sumber daya material dan peralatan

Operasional yang digunakan dalam inovasi ini adalah: satu unit mobil bus, komputer, alat tulis kantor, formulir persyaratan, leafet, baner, baliho, kalender, buku pencatatan dokumen administrasi kependudukan, dan fasilitas internet.

3) Latar belakang Inovasi :

Mendapatkan pelayanan pengurusan dokumen kependudukan merupakan hak setiap warga negara karena untuk menjamin identitas dan legalitas kependudukannya. Namun kenyataannya masih banyak penduduk yang belum bisa mendapatkan dokumen kependudukan karena terkendala waktu dan kerja. Mereka tidak bisa mengurus dokumen kependudukan karena harus bekerja mencari nafkah bagi keluarganya. Jarak yang jauh ke tempat pelayanan bagi masyarakat miskin juga menjadi hambatan karena harus mengeluarkan biaya untuk transportasi, belum lagi waktu penyelesaian yang lama membuat warga enggan untuk mengurus dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Kartu Identitas Anak. Untuk mengatasi permasalahan ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende berusaha melakukan sebuah terobosan inovasi untuk memberikan pelayanan pembuatan

dokumen kependudukan secara mudah, cepat dan gratis. Sebelum adanya inovasi pelayanan Administrasi Kependudukan warga harus datang ke tempat pelayanan yaitu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Ende, pelayanan di tempat tersebut sering kali terkendala dengan banyaknya antrian sehingga menghabiskan waktu dan juga jarak yang jauh sehingga warga harus mengeluarkan biaya ekstra untuk transportasi ke tempat pelayanan. Masyarakat miskin tidak dapat mengurus dokumen kependudukan karena harus meninggalkan pekerjaan pada hari dan jam kerja reguler. Mereka terpengaruh dalam hal keterbatasan waktu dalam mengurus kepemilikan dokumen kependudukan karena harus bekerja bertani dan berternak 6 hari dalam seminggu dan ketika hari Minggu pelayanan reguler di dinas libur. Bagi masyarakat miskin tempat pelayanan yang jauh juga menimbulkan persoalan karena memerlukan ongkos transportasi naik angkutan umum.

Dari latar belakang permasalahan mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende melakukan suatu terobosan dengan Pelayanan Jemput Bola menggunakan Mobil Keliling Pelayanan Administrasi Kependudukan, dengan nama Inovasi MORO SI KEPO (Mobil OpeRasiOnal Slap Keliling jEmPut bOlA), dimana Dinas melakukan pelayanan tidak hanya pada hari dan jam kerja reguler tetapi juga pada sore hingga malam hari bahkan pada hari libur (Sabtu dan Minggu), hal ini dimaksudkan agar warga yang kesulitan mengurus pada hari kerja tetap terlayani dan mendapatkan haknya dalam memiliki dokumen kependudukan. Pelayanan ini mendekatkan pelayanan kepada warga dengan melakukan pelayanan di Kelurahan, Desa, dan tempat keramaian pada momen acara-acara, sehingga warga tidak perlu jauh – jauh datang ke Dinas. Inovasi ini terbilang unik karena pelayanan menggunakan mobil bus khusus dilengkapi dengan perangkat teknologi informasi.

4) Tujuan Inovasi :

1. Untuk mengatasi masalah utama yaitu keterbatasan akses dan transportasi yang dialami warga karena jaraknya jauh
2. Sebagai sarana untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, agar dapat mempermudah masyarakat dalam kepemilikan dokumen administrasi kependudukan, diantaranya Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Akta pencatatan Sipil, Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA) maupun dokumen kependudukan lainnya.

5) Manfaat Yang diperoleh :

Inovasi ini terbilang unik karena pelayanan menggunakan mobil bus khusus dilengkapi dengan perangkat teknologi informasi dan kabupaten Ende adalah kabupaten pertama di Provinsi NTT yang memiliki mobil bus pelayanan keliling jemput bola. Warga yang tidak dapat mengurus dokumen kependudukan pada hari dan jam kerja reguler tetap dapat terlayani dengan pelayanan mobil keliling pada sore hingga malam hari dan juga pada hari libur (Sabtu dan Minggu). Jarak yang jauh ke tempat pelayanan juga bisa diatasi karena pelayanan MORO SI KEPO akan mendatangi warga di wilayah kelurahan, desa dan tempat keramaian sesuai dengan jadwal yang ditetapkan tanpa dipungut biaya alias gratis.

Manfaat dari inovasi ini adalah:

1. Terjalinnya komunikasi dan kerjasama dengan para pemangku kepentingan/stake holders untuk memecahkan masalah dalam kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.
2. Inovasi yang dilakukan efektif serta dapat membawa hasil yang nyata dan terlihat seperti meningkatnya jumlah kepemilikan dokumen adminduk bagi masyarakat serta memberikan solusi dalam penyelesaian permasalahan bagi masyarakat yang belum sadar akan pentingnya dokumen kependudukan.
3. Inovasi pelayanan jemput bola bermanfaat bagi masyarakat maupun organisasi dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan dan perhatian publik.

Memperoleh design inovasi yang akan dilaksanakan yang dapat menjawab dan menyelesaikan permasalahan utama yang dihadapi dengan didukung penggunaan Teknologi Informasi.

6) Pelaksanaan Inovasi

Inovasi GARUGIWA IN-LINE awalnya diimplementasikan pada tahun 2021. Untuk melaksanakan inovasi ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende telah menyusun tahapan-tahapan dalam rencana aksi yang akan dilaksanakan.

1. Pada tahap pertama adalah Perencanaan Kegiatan, dimana dalam tahap ini terdapat beberapa kegiatan yaitu : Penyusunan Tim Inovasi, Koordinasi dan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah yang lain dan juga dengan stakeholders atau para pemangku kepentingan, Penyiapan Sumber Daya Manusia dengan bimbingan teknis petugas dan

juga operator dalam menggunakan perangkat. Tidak kalah pentingnya dalam tahapan ini adalah Penyiapan sarana dan prasarana. Dinas telah memiliki satu unit Mobil Bus yang dilengkapi dengan perangkat teknologi untuk memproses pengurusan dokumen administrasi kependudukan.

2. Pada Tahap kedua dilakukan uji coba pelayanan di kantor Bupati Ende untuk para pegawai negeri pada acara apel kesadaran. Petugas pendaftaran menerima berkas dari pemohon. Para Kabid bertugas sebagai koordinator dan mengawasi jalannya pelayanan. Alur jalannya berkas dokumen dari petugas pendaftaran ke operator dilanjutkan verifikasi sampai dengan dokumen diserahkan ke pemohon.Capaian Inovasi dan Dampaknya:

Setelah melalui beberapa kali ujicoba dan penyempurnaan Tahap selanjutnya adalah melakukan pelayanan ke kecamatan, kelurahan, desa, kantor, sekolah dan tempat keramaian. Jenis pelayanan dokumen yang dilaksanakan oleh inovasi MORO SI KEPO adalah seluruh dokumen administrasi kependudukan yang dilayani langsung jadi.

7) Capaian Inovasi dan Dampaknya:

Dengan strategi Jemput Bola Inovasi MORO SI KEPO yang pelaksanaannya dilakukan mulai Tahun 2021, dianggap cukup efektif karena langsung menjawab permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat dan memberikan kemudahan pada masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan. Selama pelaksanaan inovasi ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende sudah menerbitkan ribuan dokumen Administrasi Kependudukan melalui pelayanan Jemput Bola.

Dinas juga berhasil mencapai dan bahkan melampaui target indicator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI, berikut data capaian target indicator Tahun 2020 s/d 2022:

1. Capaian KTP-EI untuk tahun 2022 sebesar 99,30%;
2. Capaian akta kelahiran anak umur 0 s/d 17 tahun untuk tahun 2022 sebesar 98,50%;
3. Capaian Kartu Identitas Anak (KIA) untuk tahun 2022 sebesar 68,58%;
4. Capaian akta kematian untuk tahun 2022 sebesar 100%;
5. Capaian akta perkawinan untuk tahun 2022 sebesar 100%;
6. Capaian akta perceraian untuk tahun 2022 sebesar 100%.

Tidak bisa dipungkiri hasil dari inovasi ini membuat masyarakat dapat

menerima manfaat secara langsung, hal ini dapat dilihat pada kondisi sebelum dan sesudah inovasi diimplementasikan.

Kondisi sebelum dan sesudah ada inovasi:

1. Sebelum ada inovasi tempat pelayanan Terpusat di dinas setelah ada inovasi tersedia di Kecamatan, Kelurahan, Desa;
 2. Sebelum ada inovasi waktu pelayanan hanya terjadi pada Hari dan Jam Kerja Reguler setelah ada inovasi terlayani di Hari Sabtu–Minggu dan Hari libur;
 3. Sebelum ada inovasi penyelesaian dokumen Lama, berhari-hari setelah ada inovasi penyelesaian document Mudah, Cepat dan Langsung Jadi;
 4. Sebelum ada inovasi Jarak tempat layanan Jauh dan terpusat di dinas setelah ada inovasi tempat layanan menjadi Dekat tersedia di desa dan ada layanan jemput bola;
 5. Sebelum ada inovasi Biayanya mahal ada biaya transpotasi setelah ada inovasi maka Tidak perlu biaya;
 6. Sebelum ada inovasi Calo banyak berkeliaran setelah ada inovasi sudah tidak ada calo lagi;
 7. Sebelum ada inovasi kegiatan sosialisasi jarang terjadi setelah ada inovasi sosialisasi sering terjadi pada saat jemput bola;
 8. Sebelum ada inovasi tingkat Kepercayaan dan kesadaran Masyarakat Rendah setelah ada inovasi tingkat kepercayaan masyarakat Tinggi;
 9. Sebelum ada inovasi capaian KTP-el, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, KIA,Akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian Rendah setelah ada inovasi capaiannya meningkat bahkan melampaui target nasional.
2. Dinas Pariwisata
 1. Judul Inovasi : Sistem Informasi Pariwisata Daerah
 - 1) Dasar Hukum:
Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pariwisata Daerah (SISPARDA) dan Website Dinas Pariwisata Kabupaten Ende Tahun 2022
 - 2) Ketersediaan Sumber Daya
1-10 Orang Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website Dinas Pariwisata
 - 3) Latar belakang Inovasi
Sistem Informasi Pariwisata Daerah (SISPARDA) adalah sebuah sistem pengumpulan, pengelolaan dan penyampaian informasi pariwisata yang

diperuntukkan bagi wisatawan baik domestik maupun asing serta juga informasi dimaksud dapat dikonsumsi masyarakat pada umumnya. Sistem informasi ini digunakan / dikelola dengan cara online maupun offline. Adapun skema online adalah dengan menggunakan:a. Website,b. Aplikasi Playstore,c. Google Maps,d. Facebook,e Instagram,f. Twitter, Sedangkan skema offline adalah dengan menggunakan :a. Kantor pelayanan informasi (Tourist Information Center / TIC Ende) yang beralamat di Jl.Soekarno Ende, b. Pembuatan brosur, leaflet dan catalogue, c. Newsletter dua bulanan, d. Penjualan souvenir khas Ende dan Flores di Kantor Tourist Information Center / TIC Ende.

Semua pekerjaan diatas dilakukan oleh sebuah team khusus yang bertanggungjawab langsung terhadap Koordinator SISPARDI yaitu Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Ende serta kepada Penasihat SISPARDI yaitu Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ende. Sedangkan Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi Kabupaten Ende berkedudukan sebagai Ketua Team SISPARDI. Sebagai Penanggung jawab SISPARDI, dipercayakan kepada Kepala Seksi Pelayanan Informasi Dinas Pariwisata Kabupaten Ende. Adapun penyunting informasi dipercayakan kepada Kepala Seksi Promosi Dinas Pariwisata Kabupaten Ende. Petugas admin dipercayakan kepada dua (2) orang tenaga lepas yang di ikat dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ende. Begitupun dengan posisi developer dan fotografer, masing-masing dipercayakan kepada dua (2) orang tenaga lepas yang juga diikat dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ende.

4) Tujuan Inovasi

1. Menyediakan informasi pariwisata bagi wisatawan dan masyarakat umum
2. Ikut meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Ende
3. Ikut meningkatkan jumlah lama lama tinggal wisatawan di Kabupaten Ende
4. Menyediakan oleh-oleh / souvenir khas Ende dan Flores

5) Manfaat Yang diperoleh

1. Semua informasi pariwisata dikelola dengan baik dan profesional
2. Menjadi salah satu amenitas penunjang destinasi wisata Kabupaten Ende
3. Tersedianya informasi pariwisata yang dibutuhkan oleh wisatawan dan masyarakat
4. Tersedianya oleh - oleh / souvenir khas Ende dan Flores bagi wisatawan yang berkunjung

6) Pelaksanaan Inovasi

Teknis pelaksanaan pekerjaan :

a. Online :

1. Website : Website akan dioperasikan secara rutin oleh developer, admin dan fotografer
2. Aplikasi Playstore : update informasi pada aplikasi playstore akan ditangani oleh developer, admin dan fotografer
3. Google Maps : update dan informasi pada google maps akan dilakukan oleh admin, developer dan fotografer
4. Facebook , Instagram dan Twitter : updaet dan informasi akan juga dilakukan oleh admin, developer dan fotografer

b. Offline

1. Kantor Tourist Information Center / TIC Ende : beroperasi setiap hari dengan jam operasional mulai jam 09.00 Wita - 15.00 Wita dan dikelola oleh team SISPARD
2. Brosur, Leaflet dan Catalogue : akan dikelola oleh admin, developer dan fotografer
3. Newsletter : akan dikelola oleh admin, developer dan fotografer
4. Souvenir : pengelolaan penjualan souvenir dan oleh-oleh khas Ende dan Flores dilakukan oleh Tema SISPARD dan bekerjasama dengan Bidang Industri Pariwisata serta UMKM dan EKRAF

7. Capaian Inovasi dan Dampaknya

Hasil :

- a. Terlaksananya Website Pariwisata Kabupaten Ende : disparkabende
- b. Terlaksananya Aplikasi Playstore Kabupaten Ende : Jojo Ende
- c. Terlaksananya Google Maps TIC Ende
- d. Terlaksananya Akun Media sosial : Facebook (DisparKabEnde), Instagram (disparende), Twitter (@DisparKabEnde)
- e. Terlaksananya Newsletter TIC Ende
- f. Terlaksananya pelayanan informasi wisata di TIC Ende
- g. Terlaksananya penyediaan souvenir / oleh - oleh khas Ende dan Flores di TIC Ende

3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. Judul Inovasi : Diorama Spensa Ende Bergerak

1. Dasar Hukum:

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

URAI AN	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024	Alokasi Belanja Daerah Tahun 2025	Selisih Selisih miliar)	% Tahun 2026 (dala m iliar)
Terduga						
BELANJA TRANSFE R	254.461.843. 856	273.568.680. 570	282.112.304.5 95	277.327.155.8 22	4.785.148. 773	-1,69 280,11
Belanja Bagi Hasil	3.415.822.45 0	-	1.745.804.18 2,00	4.379.127.422 ,00	2.633.323. 240	150, 83 2,12
Belanja Bantuan Keuangan	251.046.021.4 06	273.568.680. 570	280.366.500. 413	272.948.028. 400	7.418.472. 013	-2,64 277,9 94

Sumber: Laporan Keuangan, LKPJ Tahun 2022, 2023, 2024 dan APBD Tahun 2025 dan RPJMD Kab. Ende 2025-2029,

2) Arah Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2026

Secara umum kebijakan belanja Kabupaten Ende Tahun 2026 diarahkan untuk mendanai program pembangunan daerah yang menjadi unggulan (*dedicated*) Bupati dan Wakil Bupati dan program prioritas ditingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan serta paling berdampak luas terhadap pencapaian kinerja dan pelayanan masyarakat, sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

Belanja daerah terlebih dahulu dialokasikan untuk pemenuhan belanja wajib dan mengikat sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dimana Tahun 2026 diproyeksikan sejumlah Rp. 513,85 miliar yang terdiri atas

komponen Belanja Pegawai sejumlah Rp. 508,854 miliar dan pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 5 miliar.

Tabel 3.5. Proyeksi Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Tahun 2026

No.	URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2026 (Miliar)	KET.
1.	BELANJA OPERASIONAL	508,854	
	Belanja Pegawai (Gaji Dan Tunjangan)	508,854	
2.	PEMBIAYAAN PENGELOUARAN	5	
	Pembentukan Dana Cadangan	-	
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5	
	TOTAL	513,85	

Pengalokasian Belanja Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2026 disesuaikan dengan proyeksi pendapatan, asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, kebutuhan pembangunan, dan mengikuti ketentuan perundungan yang berlaku. Gambaran arah kebijakan belanja Kabupaten Ende Tahun 2026, sebagai berikut:

- Belanja pegawai (Gaji dan Tunjangan) sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025-2029, diasumsikan mengalami penurunan sebesar -15,67 %. Hal ini didasarkan pertimbangan rata-rata pertumbuhan kurun waktu 2022 – 2025 dan kondisi riil realisasi belanja yang tidak mencapai 100% atau terdapat sisa belanja pegawai dari target yang direncanakan.
- Pengeluaran pembiayaan dari tahun 2022-2024 disediakan untuk Penyertaan Modal kepada Bank NTT sebesar Rp. 5 Miliar, sementara pada tahun 2025 disediakan untuk Penyertaan (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar 2,5 miliar.

Selanjutnya selisih Penerimaan Daerah dengan alokasi Belanja Wajib dan Mengikat, yang merupakan Kapasitas Riil Keuangan Daerah sejumlah Rp 755,13 Milliar digunakan untuk mendanai kebutuhan, sebagai berikut:

- Rencana alokasi pengeluaran Prioritas I,

Berkaitan dengan Belanja Pemenuhan Penerapan Pelayanan dasar dianggarkan sebesar Rp. 116,980 miliar

b. Rencana alokasi pengeluaran Prioritas II,

berkaitan dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 354,501 miliar untuk mendukung 12 (dua belas) Program Prioritas pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Ende Cemerlang

Program ini dimaksudkan untuk membangun Kabupaten Ende melalui peningkatan SDM, dan mewujudkan Ende sebagai Kota Pendidikan. Program ini difokuskan pada: 1.) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), 2.) Ende sebagai Kota Pendidikan, dan 3.) Sinergi Pembangunan.

2. Ende Sehat

Program ini dimaksudkan untuk membangun investasi masyarakat yang sehat melalui Optimalisasi Pelayanan dan Sadar Kesehatan. Program ini difokuskan pada: 1.) Investasi Masyarakat Sehat, 2.) Optimalisasi Pelayanan Kesehatan, 3.) Gerakan Sadar Kesehatan dan 4.) Sinergi Pemerintah dan Masyarakat

3. Ende Unggul

Program ini dimaksudkan untuk membangun Kabupaten Ende yang memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif melalui Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi (berfokus pada aspek ekonomi). Makna "Ende Unggul" bukan sekadar slogan, tapi merupakan program strategis untuk menjadikan Kabupaten Ende sebagai daerah yang:

- Unggul secara komparatif: Memaksimalkan potensi alam, budaya, dan geografis yang sudah dimiliki.
- Unggul secara kompetitif: Meningkatkan daya saing melalui inovasi, teknologi, dan pengembangan SDM

4. Ende Produktif

Program ini dimaksudkan untuk membangun Kabupaten Ende melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan , UMKM Pemberdayaan Masyarakat dengan Optimalisasi SDA.

5. Ende Toleran

Program ini dimaksudkan untuk membangun Kabupaten Ende dalam semangat kebersamaan di atas penghargaan terhadap keberagaman sebagai identitas Masyarakat. Strategi Mewujudkan "ENDE TOLERAN" dalam Kehidupan Modern antara lain : 1.) Pendidikan Toleransi sejak Dini, 2.) Forum dan Ruang Dialog Antar-Komunitas, 3.) Peran Tokoh Adat, Agama, dan Pemuda dan 4.) Media Sosial sebagai Alat Edukasi, Bukan Provokasi

6. Ende Bersih

Program ini dimaksudkan untuk membangun Kabupaten Ende dengan berpegang pada semangat good governance (Ende Bebas KKN). Strategi Mewujudkan "ENDE BERSIH" antara lain: 1.) Reformasi Birokrasi, 2.) Pelayanan Publik yang Transparan, 3.) Pengawasan Internal dan Eksternal dan 4.) Pendidikan Anti-Korupsi dan Budaya Integritas.

7. Ende Responsif

Program ini dimaksudkan untuk membangun Kabupaten Ende melalui Perbaikan Tata kelola dan Tata Laksana Pemerintahan. Untuk mewujudkan "ENDE RESPONSIF", beberapa langkah kebijakan dapat dilakukan yakni Pembentukan unit pelayanan cepat tanggap di setiap OPD, Mendorong kepala desa/lurah dan camat menjadi motor penggerak pelayanan publik berbasis warga, Evaluasi kinerja ASN secara berkala dengan indikator keterjangkauan, kepuasan, dan penyelesaian pengaduan dan Pemanfaatan teknologi untuk menyederhanakan prosedur dan mempercepat layanan.

8. Ende Melayani

Program ini dimaksudkan untuk membangun Kabupaten Ende melalui peningkatan kualitas perlindungan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan Kabupaten Ende yang benar-benar melayani, dibutuhkan pendekatan menyeluruh melalui: 1.) Perlindungan Sosial yang Inklusif, 2.) Layanan Kesehatan yang Siap dan Tanggap, 3.) Perlindungan Hukum dan HAM , 4.) Layanan Administrasi yang Mudah dan Cepat dan 5.) Sistem Tanggap Darurat dan Mitigasi Bencana.

9. Ende Membangun

Program ini dimaksudkan untuk membangun Kabupaten Ende melalui ketersediaan dan peningkatan daya dukung infrastruktur dasar (Jalan, jembatan, air bersih). Fokus Utama Program ENDE MEMBANGUN : antara

lain: 1.) Pembangunan dan Perbaikan Jalan, 2.) Pembangunan Jembatan Penghubung dan 3.) Akses Air Bersih dan Sanitasi Layak.

10. Ende Berbudaya

Program ini dimaksudkan untuk membangun Kabupaten Ende berbasis adat istiadat dan budaya. Pilar Utama “ENDE BERBUDAYA” : antara lain: 1.) Pelestarian Adat dan Tradisi Lokal, 2.) Pendidikan Berbasis Budaya, 3.) Budaya sebagai Penggerak Ekonomi Lokal dan 4.) Nilai Budaya dalam Pemerintahan dan Masyarakat.

11. Ende Lestari

Program ini dimaksudkan untuk pembangunan Kabupaten Ende melalui Ende BERIMAN untuk mendukung Pengembangan Potensi Wisata. Makna BERIMAN dalam ENDE LESTARI adalah : 1.) Bersih, 2.) Rindang, 3.) Indah, 4.) Nyaman dan Strategi Implementasi ENDE LESTARI (Sinergi antar dinas pariwisata, lingkungan hidup, PUPR, dan pemerintah desa, Pelibatan aktif masyarakat lokal sebagai pelaku kebersihan dan pengelola wisata., Pengembangan desa wisata berwawasan lingkungan dan Penegakan peraturan daerah tentang kebersihan dan tata ruang)

12. Ende Kreatif

Program ini dimaksudkan untuk membangun Kabupaten Ende yang berdaya saing melalui Peningkatan pertumbuhan di berbagai bidang (fokus pada bidang pertanian: argoindustri, agrowisata). Pilar “ENDE KREATIF” di Bidang Pertanian antara lain: 1.) Agroindustri, 2.) Agrowisata. Strategi Pembangunan ENDE KREATIF antara lain: Integrasi program pertanian dan pariwisata dalam perencanaan pembangunan daerah., Mendirikan rumah kemasan, rumah produksi, dan inkubator UMKM berbasis pertanian, Penguatan kelembagaan petani dan koperasi agar mampu berwirausaha dan Kolaborasi dengan perguruan tinggi, LSM, dan pelaku swasta untuk riset dan promosi.

c. Rencana alokasi pengeluaran Prioritas III,

berkaitan dengan alokasi belanja tidak terduga, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan bantuan parpol dianggarkan sebesar Rp. 283,650 miliar

Secara rinci uraian rencana pembiayaan berdasarkan Kapasitas Riil disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.6. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Ende
Tahun 2026 (dalam Miliar)

No	Uraian	Rencana RKPD 2026	Proporsi thd Kap. Riil (%)	Ket.
A.	Prioritas I	116.980.380.785,00	15,49	
1	Belanja Pemenuhan Penerapan Pelayanan dasar	116.980.380.785,00		
B.	Prioritas II	354.501.770.631,00	46,95	
	Belanja Pemenuhan Visi Misi Kepala Daerah	294.501.770.631,00		
	Pagu Indikatif Kecamatan	60.000.000.000,00		
C	Prioritas III	283.650.577.514,00	37,56	
1	Belanja Tidak Terduga	5.655.633.704,00		
2	Bantuan Keuangan kepada Pem Desa (Dana Desa, ADD, Tunjangan Kades/BPD dll), bantuan parpol	277.994.943.810,00		
	TOTAL (A+B+C)	755.132.728.930,00	100	

Sumber: RPJMD Kab. Ende 2025-2025, Olahan Bappeda kertas kerja RKPD 2026

C. Proyeksi Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan. Selain itu

pembiayaan pembangunan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, kepatutan dan kewajaran, efisien dan efektif.

Gambaran dari proyeksi Pembiayaan Daerah pada tahun 2026, dapat digambarkan pada table 3.7 dibawah ini.

Tabel 3.7. Realisasi Pembiayaan Tahun 2022-2024, Alokasi Pembiayaan 2025 dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2026

JENIS PENERIMAA N DAN PENGELUAR AN PEMBIAYAA N DAERAH	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Alokasi Tahun 2025	Proyeksi/ Target Tahun 2026 (dalam Juta)
PEMBIAYAA N PENERIMAA N PEMBIAYAA N	49.441.512.9 62	25.853.255.3 38	26.200.517.7 57	-	-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	49.441.512.9 62	25.853.255.3 38	26.200.517.7 57	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
PENGELUAR AN PEMBIAYAA N	5.000.000.00 0	5.000.000.00 0	5.000.000.00 0	2.500.000.0 00	5.000.000.00 0

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan N.Bda SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total.. Pencapaian	AKSI
1.	Cadangan Layanan data dan pengaduan (layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DSSS)) layanan pengaduan merupakan sarana untuk menemui dan mendapatkan informasi berupa pengaduan, keluhan, jatuh tempo dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	7	7	0	100.00 %	
			5.000.000.00	5.000.000.00	2.500.000.00	5.000.000.00	
			00	00	00	0	
2.	Penyediaan layanan SEDO (layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar) berdasarkan dengan arah Kebijakan Penerimaan Pembayaran Tahun 2026	Orang	0.	0	0	0.00 %	
3.	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau Pemerintah Kabupaten Ende tidak mengeluarkan kebijakan penerimaan baik pengeluaran maupun pembayaran lainnya.	Orang	0	0	0	0.00 %	
4.	Penyediaan sandang (berdasarkan proyeksi kemampuan keuangan daerah dan kerangka pembelian pokok, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden kebutuhan lahan)	Orang	0	0	0	0.00 %	
5.	Penyediaan alat bantu Pendapatan	Orang	4	4	0	100.00 %	
			1.268.987.442.73				
	1 Daerah	3					
	A Pendapatan	95.022.998.138					
PENERIMAAN DAERAH							
PENGELUARAN DAERAH							
II-177 Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Ende Tahun 2026							

PENERIMAAN DAERAH			PENGELUARAN DAERAH		
	Asli Daerah				
	Pajak Daerah	34.596.087.981		- Belanja pegawai (Gaji Dan Tunjangan)	508.854.713.803
	Retribusi Daerah	6.910.432.012	2	Pembentukan Peneluaran	5.000.000.000
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.528.459.884		- Pembentukan Dana Cadangan	-
	Lain2 PAD yang syah	48.988.018.261		- Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah daerah	5.000.000.000
B	Pendapatan Transfer	1.154.128.402.80 9	I	Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah	755.132.728.930
	Tranfer Pemerintah Pusat	1.117.734.948.255	A -	Prioritas I	116.980.380.785
	Dana Perimbangan	908.560.123.587	1	Belanja wajib dan mengikat serta Pemenuhan Penerapan Pelayanan dasar	116.980.380.785
	• Dana Bagi Hasil (DBH)	10.924.798.884	B -	Prioritas II	354.501.770.631
	• DAU	631.115.287.750	1	Belanja Pemenuhan Visi Misi Kepala Daerah (12 Program Prioritas)	294.501.770.631
	• DAK	266.520.036.953	2	Pagu Indikatif Kecamatan	60.000.000.000
	Dana Insentif Daerah (DID)	-	C.	Prioritas III	283.650.577.514

PENERIMAAN DAERAH			PENGELUARAN DAERAH		
		Dana Desa	1	Belanja Tidak Terduga	5.655.633.704
	Transfer Antar Daerah	36.393.454.554	2	Bantuan Keuangan kepada Pem Desa (Dana Desa, ADD, Tunjangan Kades/BPD dll), bantuan parpol	277.994.943.810
	Pendapatan Bagi Hasil	36.393.454.554			
	Bantuan Keuangan	-			
C	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	19.836.041.786			
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	19.836.041.786			
2	Penerimaan Pembiayaan	-			
	SiLPA	-			
	Pencairan Dana Cadangan	-			
	TOTAL PENERIMAA N DAERAH	1.268.987.442.73		TOTAL PENGELUARAN DAERAH	1.268.987.442.73
		3			3

Sumber: Olahan Bappeda (Kertas Kerja RKPD 2026)

D. Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya

Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten sumber pendanaan selain dari APBD Kabupaten Ende, juga diperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT, Program Kemitraan NGO Internasional dan Corporate Social Responsibility (CSR).

Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi NTT, berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah Kabupaten Ende yang melaksanakan program dan kegiatan dengan sumber pendanaan yang diperoleh dari beberapa Kementerian dan Perangkat Daerah Provinsi NTT, sesuai dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi yang ada di Kabupaten Ende. Mekanisme pengusulan program dan kegiatan untuk didanai APBN dan APBD Provinsi, dilakukan secara online melalui aplikasi SIPD. Untuk itu, khusus Perangkat Daerah yang mengusulkan program dan kegiatan untuk didanai oleh APBN dan APBD Provinsi, agar memastikan seluruh data dukung dan persyaratan teknis usulan terpenuhi serta menjamin pelaksanaan di tingkat Kabupaten Ende tidak mengalami permasalahan.

Sementara itu untuk program dan kegiatan dengan pendanaan dari NGO dan CSR, dapat diperoleh melalui partisipasi aktif Pemerintah Kabupaten Ende untuk menjalin kerjasama kemitraan dengan Organisasi/Lembaga terkait.

Strategi lainnya untuk memperoleh pendanaan pembangunan di Kabupaten Ende, dengan memanfaatkan peluang sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dengan tujuan:

1. Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui penggerahan dana swasta;
2. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu;
3. Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat;
4. Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna; dan/atau
5. Memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada Badan Usaha.

Hal ini dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, sebagai salah satu alternatif dalam pendanaan program dan kegiatan pembangunan kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/ BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.

Dari gambaran kebijakan ekonomi dan keuangan, dirumuskan ringkasan **Proyeksi APBD Kabupaten Ende Tahun 2026** yang secara fungsi merupakan instrumen atau alat utama dari kebijakan fiskal. Kebijakan Fiskal ini menggambarkan langkah-langkah pemerintah untuk mengarahkan dan mengendalikan penerimaan dan pengeluaran daerah, untuk mempengaruhi bekerjanya sistem ekonomi Kabupaten Ende, dengan target utama adalah pencapaian indikator RPJMD. Dalam konteks yang lebih luas akan berimplikasi pada penyediaan dan pemenuhan pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan ±273 ribu jiwa penduduk Kabupaten Ende.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH



Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan elemen kunci dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Keduanya memberikan arah yang jelas dan terukur dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah selama periode lima tahun ke depan. Tujuan dan sasaran pembangunan tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan mendukung pencapaian visi-misi daerah. Sasaran yang terukur juga menjadi dasar untuk merumuskan indikator kinerja daerah (IKD) yang digunakan sebagai alat evaluasi dan pengawasan dalam implementasi RKPD.

Dengan perumusan tujuan dan sasaran yang jelas dan komprehensif, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap program, kegiatan, dan penganggaran berjalan selaras dengan prioritas pembangunan. Hal ini juga memberikan dasar yang kuat untuk membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mencapai pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan pembangunan adalah pernyataan yang mencerminkan hasil-hasil besar yang ingin dicapai dalam jangka waktu menengah. Tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi kepala daerah serta memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan daerah. Tujuan ini bersifat strategis dan menjadi acuan utama untuk semua program dan kegiatan pembangunan.

Sasaran pembangunan adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan. Sasaran dirumuskan secara lebih operasional, terukur, dan berorientasi pada hasil yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Sasaran ini harus relevan dengan isu-isu strategis dan tantangan pembangunan di daerah.

Dalam konteks perencanaan pemerintahan maka pada prinsipnya tujuan dan sasaran pembangunan pada pemerintah daerah harus selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Semangat yang sama ini dalam rangka membangun sinergi perencanaan pusat dan daerah.

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Visi Pembangunan Nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045 adalah “**NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERSATU, BERDAULAT MAJU, DAN BERKELANJUTAN.**”

Selanjutnya, Visi Indonesia Emas 2045 dicerminkan ke dalam lima sasaran visi yang memberikan unsur imperatif pencapaian Pembangunan. Kelima sasaran utama tersebut adalah

1. Pendapatan Perkapita setara Negara Maju
2. Kemiskinan Menurun dan ketimpangan berkurang
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat
4. Daya saing sumber manusia meningkat
5. Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menurun menuju net zero emission

Visi besar ini akan diwujudkan melalui delapan Misi, yang dijabarkan ke dalam delapan agenda pembangunan, sebagai berikut:

1. **Mewujudkan transformasi sosial** untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.
2. **Mewujudkan transformasi ekonomi** untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industry manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
3. **Mewujudkan transformasi tata kelola** untuk membangun regulasi dan tatakelola yang berintegritas dan adaptif.
4. **Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan** Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di Tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar Kawasan
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, Pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam

6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi
8. Kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pendanaan pembangunan

4.1.2. Tema dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2026

RPJMN 2025-2029 mempunyai visi “**Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045**”. Visi tersebut akan diwujudkan melalui delapan Misi yang dikenal sebagai Asta Cita, meliputi :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan 8 (Delapan) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) terlihat pada Tabel berikut ini;

Tabel 4.5 Program Prioritas Nasional dan Program Hasil terbaik Cepat

NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
1	Mencapai Swasembada Pangan, Energi, Dan Air	Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
2	Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara	Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten

NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
3	Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
4	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
5	Pemberantasan Kemiskinan	Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
6	Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba	Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluhan), TNI/POLRI, dan pejabat negara
7	Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
8	Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi	Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%
9	Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional dan Kondusif	
10	Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak serta Penyandang Disabilitas	
11	Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup	
12	Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih dan Pestisida Langsung ke Petani	
13	Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Pedesaan/Perkotaan dan Rakyat yang Membutukan	
14	Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usahan dan Pembangunan Ibu Kota Nusatara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif-Karakteristik-Mandiri Lainnya	
15	Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk membuka Lapangan Kerja yang Seluas-Luasnya dalam memwujudkan Keadilan Ekonomi	
16	Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian dan Perawatan Rumah Ibadah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
17	Pelestarian Seni Budaya , Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga	

Tema Rencana Kerja Pembangunan Nasional Tahun 2026, adalah: “*Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif*”. Untuk mewujudkan tema RKP tersebut ditetapkan sasaran makro pembangunan nasional pada tahun 2026, yaitu;

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi;
2. PDRB per kapita (juta);
3. Kontribusi PDRB Provinsi;
4. Tingkat Kemiskinan;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
6. Indeks Rasio Gini;
7. Indeks Modal Manusia;
8. Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan
9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Pembangunan Wilayah dalam RKP Tahun 2026 diarahkan untuk mengurangi ketimpangan wilayah dengan mendorong peningkatan kontribusi PDRB dari Kawasan Timur Indonesia. Fokus tahun 2026 diarahkan pada penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah dengan Sasaran Pembangunan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan
2. Penurunan Kemiskinan
3. Sumber Daya Manusia Berkualitas

4.1.3 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

Penekanan prioritas pembangunan pada RKP tahun 2026 terdiri dari 5 direktif presiden dan program-program lain yang konkret, terukur dan berdampak yang tersebar dalam seluruh prioritas nasional dan dibagi kedalam 2 hal utama yakni;

- I. Kedaulatan Pangan dan Energi
 1. Pangan
 - ✓ Optimalisasi BULOG
 - ✓ Pelaksanaan lumbung pangan (*food estate*)
 2. Energi
 - ✓ Peningkatan bauran ethanol dan biodiesel

- ✓ Energi terbarukan
- 3. Air
 - ✓ Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir
- 4. Pengelolaan Sampah*

II. Ekonomi yang Produktif dan Inklusif

- 1. Pendidikan dan Kesehatan
 - ✓ Ekosistem Makan Bergizi Gratis
 - ✓ Percepatan renovasi sekolah
 - ✓ Sekolah unggulan
 - ✓ Cek kesehatan
 - ✓ Percepatan rumah sakit daerah
 - ✓ Digitalisasi Pendidikan*
 - ✓ Sekolah Rakyat*
- 2. Deregulasi dan Kepastian Hukum
 - ✓ Reformasi Birokrasi
 - ✓ Kemudahan berbisnis
 - ✓ Ketertarikan investasi
- 3. Pertahanan Sernesta
 - ✓ Komponen cadangan
 - ✓ Pemenuhan alutsista
 - ✓ Penguatan kemampuan teritorial
- 4. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
 - ✓ Percepatan Hilirisasi SDA oleh entitas milik Indonesia
 - ✓ Optimalisasi potensi Danantara
- 5. Adopsi Teknologi dan Inovasi
 - ✓ Transformasi digital
 - ✓ Riset dan Inovasi
- 6. Percepatan Pengentasan Kemiskinan*
 - ✓ Data tunggal kemiskinan
 - ✓ Digitalisasi bantuan
 - ✓ 3 juta rumah
 - ✓ Koperasi desa/kelurahan merah putih*
- 7. Fiskal Adaptif, Stabilitas Makro ekonomi

4.1.4 Isu Strategis Kewilayahana (Wilayah Nusa Tenggara)

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam RPJPN Tahun 2025-2045 merupakan bagian dari wilayah Bali-Nusa Tenggara. Wilayah Bali-Nusa Tenggara berkontribusi

pada perekonomian Indonesia sebesar 2,7 persen pada tahun 2022. Selanjutnya, berdasarkan proyeksi, pada tahun 2045 Bali-Nusa Tenggara berpotensi meningkatkan kontribusinya terhadap PDB nasional menjadi 3,9 persen apabila rata-rata pertumbuhan pulau terjaga pada sekitar persen per tahun. Pembangunan Wilayah Bali-Nusa Tenggara selama 20 tahun ke depan diarahkan sebagai Koridor Ekonomi “*Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara*” yang akan mendorong pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif ke wilayah timur Indonesia. Potensi wilayah lainnya akan tetap dikembangkan. Pembangunan ekosistem kepariwisataan di Wilayah Bali-Nusa Tenggara mencakup 5 (lima) prioritas.

Pertama, pengembangan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) lokal yang akan menjadi modal dasar pembangunan Wilayah Bali-Nusa Tenggara ke depan; khususnya disesuaikan dengan sektor potensial Wilayah Bali-Nusa Tenggara yaitu pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Kedua, pusat-pusat pertumbuhan baru yaitu kawasan pariwisata; sentra-sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan serta sentra pengolahan dan sentra pemasaran di kawasan perkotaan; serta Optimalisasi kawasan eksisting dengan fokus pada peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal dan nilai investasi melalui PMA dan PMDN.

Ketiga, peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas intra dan antar wilayah Bali-Nusa Tenggara yang menjadi backbone pembangunan pusat-pusat pertumbuhan wilayah didukung dengan penguatan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital. Keempat, penguatan tata kelola pembangunan wilayah untuk mewujudkan regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata kelola yang berintegritas, tangkas, dan kolaboratif, penuntasan RDTR kabupaten/kota serta perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan dan perdesaan. Kelima, peningkatan ketahanan sosial budaya dan ekologi untuk mewujudkan pembangunan wilayah yang adaptif dan berkelanjutan

Dalam kick off meeting penyusunan RKP 2026 bahwa Pembangunan Wilayah dalam RKP Tahun 2026 diarahkan untuk mengurangi ketimpangan wilayah dengan mendorong peningkatan kontribusi PDRB dari Kawasan Timur Indonesia. Fokus tahun 2026 diarahkan pada penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah secara khusus untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara pada bagian *Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara Bertaraf Internasional* dengan target laju pertumbuhan ekonomi 5,8- 6,4 % dan kontribusi PDRB sebesar 2,8 %.

4.1.5 Kebijakan Pembangunan Provinsi NTT

Strategi pembangunan Provinsi NTT Tahun 2025-2029 merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Strategi pembangunan dilaksanakan melalui analisis lingkungan strategis internal dan analisis lingkungan strategis eksternal dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*). Strategi akan memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan sekaligus dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada.

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi NTT Tahun 2025-2029. Adapun penetapan strategi dan arah kebijakan ini mengarah pada penerapan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025 – 2029 dengan memperhatikan arahan umum terkait pemenuhan Standar Pelayanan Minimum berdasarkan Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimum (SPM) Provinsi NTT, GEDSI (*Gender Equality, Disability and Social Inclusion*)/Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial, Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan dan Pernyataan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi NTT, Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Tata Kelola Lingkungan Hidup yang berkelanjutan, Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim.

Sementara Visi dan Misi Gubernur NTT terpilih 2025-2029 yakni “**NTT Maju, Sehat, Cerdas, sejahtera dan berkelanjutan**”

Dengan misi

1. Memastikan infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (**MAJU**)
2. Memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau, dan mudah diakses (**SEHAT**)
3. Menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif, dan tepat sasaran (**CERDAS**)
4. Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat (**SEJAHTERA**)
5. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam

dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN)

Didukung dengan 7 Pilar

1. Pilar Ekonomi Berkelanjutan
2. Pilar Pemberdayaan Komunitas
3. Pilar Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan
4. Pilar Kesehatan
5. Pilar Pendidikan
6. Pilar Reformasi Birokrasi dan Hak Asasi Manusia
7. Pilar Kolaborasi

Selanjutnya diterjemahkan ke dalam 10 program prioritas NTT yang dikenal dengan sebutan "**DASA CITA AYO BANGUN NTT**" antara lain sebagai berikut;

1. Dari Ladang dan Laut ke Pasar: Efisien, Modern, dan Aman

Membangun rantai pasok efisien dengan menghadirkan teknologi terbaru dari produksi,hingga distribusi dan hilirisasi untuk hasil pertanian,perkebunan, peternakan, perikanan, dan Kelautan, sekaligus memberikan perlindungan asuransi bagi sektor pertanian dan "kelautan."

2. Milenial dan Perempuan Motor Kreativitas Lokal

Memberdayakan generasi muda dan perempuan melalui bala pelatihan dan youth campaign untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif dan meningkatkan nilai jual produk lokal."

3. Wisata NTT, Penggerak Ekonomi Lokal

'Memperkuat ekowisata dan wisata budaya berbasis komunitas sebagai penggerak ekonomi lokal, menampilkan jati diri dan pesona NTT kepada dunia.

4. Sejahtera Bersama: Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk Masyarakat

"Memastikan seluruh masyarakat NTT sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan dan seluruh pekerja terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan

5. Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas' Stunting

Menjadikan posyandu sebagai pos komando pemberantasan stunting dan Pusat layanan kesehatan dasar

6. Sekolah Vokasi Unggulan Berbasis Potensi Daerah

"Membangun sekolah vokasi unggulan berbasis potensi daerah, mencetak generasi siap kerja

7. Jalan, air, Listrik, rumah layak huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera

Membangun infrastruktur dengan partisipasi bersama, Penerapan infrastruktur

hijau dan biru (*green and blue infrastructure*) serta pertimbangan resiliensi bencana dan perubahan iklim

8. Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin

Meningkatkan sumber pendapatan daerah dan alokasi belanja pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan ASN dan Pelayanan Publik untuk rakyat

9. Membangun NTT Digital: Akses Merafa, Komunikasi lancar

Memperluas Infrastruktur digital untuk akses internet merata, komunikasi lancar dan optimalisasi pembelajaran formal dan non formal

10. Ayo bangun NTT, Kolaborasi Bersama

Mengajak seluruh keluarga besar NTT, untuk bersatu membangun daerah yang lebih sehat, pintar, maju dan sejahtera.

Sementara itu Tema Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2026, yaitu: **“Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”**, dengan tujuh Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi NTT pada tahun 2026, yaitu:

1. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan;
2. Pemberdayaan Komunitas;
3. Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan;
4. Pemerataan Akses dan Layanan Kesehatan;
5. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan;
6. Reformasi Birokrasi dan HAM; dan
7. Kolaborasi Ayo Bangun NTT.

Sedangkan target pembangunan Provinsi NTT pada tahun 2026, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Target Pembangunan Propinsi NTT Tahun 2026

NO	SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL	REALISASI 2025	TARGET RKP 2026 UNTUK PROV. NTT	TARGET NTT 2026 RKPD
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05	4,4-5,0	4,75 – 5,65
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,32 ^{a)}	2,90 – 3,00	2,49 – 2,99
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	9,36 ^{b)}	17,00 – 18,00	15,32 – 15,82
4.	Rasio Gini (nilai)	0,388 ^{b)}	0,303 – 0,310	0,319 – 0,324
5.	Indeks Modal Manusia (nilai)	0,53	0,48	0,47
6.	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	34,09 ^{c)}	58,75 – 63,19	61,82

Sumber ; Olahan Bappeda

4.1.6 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2026

Tujuan adalah suatu kondisi yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Sedangkan sasaran pembangunan disusun untuk mencapai tujuan strategis yang menunjukkan kinerja pembangunan daerah secara

keseluruhan dan selanjutnya menjadi dasar penetapan program dan kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2025-2026. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran. Tujuan juga merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Perumusan tujuan dan sasaran menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Sasaran RKPD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi RPJMD, analisa sasaran pokok RPJMD periode berkenaan, isu strategis aktual serta mengacu pada RPJMN dan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029. Sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMD tahun 2025-2029 ini, merupakan sarana untuk melaksanakan dan mewujudkan sasaran pokok Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran yang akan dijalankan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib, pelayanan dasar dan wajib non-pelayanan dasar maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

Pemetaan Tujuan, Sasaran dan Indikator masing-masing Sasaran, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Pemetaan Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran		Indikator	Kondisi awal (2024)	TARGET		Penanggung Jawab
	No				2026		
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang Unggul dan Berkarakter			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,11	70,23		
	1 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	1	Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun)	13,83	13,86	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun)	8,29	8,6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	46,57	49	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2 Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, dan semangat bela negara di kalangan masyarakat dan generasi muda.	4	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa bagi masyarakat dan generasi muda (%)	66,6	67,1	Kesbangpol	
		5	Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)	66,3	67	Dinas Kesehatan	
		6	Prevalensi stunting (%)	27,5 (2023)	23,6	Dinas Kesehatan	
		7	Indeks Keluarga Sehat	0,5	0,7	Dinas Kesehatan	
		8	% Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan	81,67 % (2023)	100	Dinas Kesehatan	

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi awal (2021)	TARGET	Penanggung Jawab
Meningkatnya kesejahteraan dan daya beli masyarakat	4 Meningkatnya kesejahteraan dan daya beli masyarakat	9 Persentase Faskes yang Terakreditasi (Minimal Utama)	65,1	78,57	Dinas Kesehatan
		10 Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	62,42	63,93	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		11 Pendapatan per kapita ADHB (Rp)	28,03	30,9	Pemda Kab Ende
	5 Meningkatnya dinamika sektor unggulan dan potensial daerah	12 Pengeluaran per Kapita (Rp)	10,009	10,428	Pemda Kab Ende
		13 Persentase Partisipasi Kader Aktif Kepemudaan dalam Ekonomi Mandiri		95,5	Dinas Pemuda dan Olah raga
		Persentase Pertumbuhan Ekonomi	3,88	4,56	
	6 Meningkatnya investasi daerah	14 Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)	2,09	2,262	Dinas Perdagangan dan Industri
		15 Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan terhadap PDRB (%)	22,67	23,934	Dinas Perdagangan dan Industri, Dinas Kooperasi dan UMKM
		16 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	0,34	0,38	Dinas Pariwisata
		17 Kontribusi sektor pertanian, kelautan, dan perikanan terhadap PDRB (%)	31,35	32,56	Dinas Pertanian Dinas Perikanan
Meningkatnya Petumbuhan Ekonomi Masyarakat yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan	7 Terkendalinya inflasi daerah	18 Nilai realisasi investasi (Rp)	101.881.655.707,0 0	200 m	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
	8 Meningkatnya kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan untuk pemberdayaan keluarga	19 Tingkat inflasi tahunan (%)	2,22	2,02	Setda
		Persentase Penduduk Miskin	22,57	21,16	Pemda Kab Ende
		20 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki-Laki dan Perempuan (%)	77,3	79,7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		21 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	2,05	1,96	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		22 Gini Ratio	0,286	0,25	Pemda Kab Ende
		23 Indeks Pembangunan Gender	96,5	96,77	Dinas P3A
	9 Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	24 Indeks Perlindungan Sosial	30,91	31,18	Dinas Sosial
		25 Indeks Perlindungan Anak	38,75	38,8	Dinas P3A
	10 Meningkatnya efektivitas perencanaan dan pengelolaan kebijakan pembangunan daerah	26 Indeks Transparansi	72,78	73,03	Satpol PP
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan ketenteraman dan ketertiban masyarakat		27 Angka Kriminalitas	120,13	119,5	Satpol PP
11 Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	65,24 (B)	B (66,83	Setda	
	28 Persentase ketercapaian target kinerja RPJMD (%)	91,92	92,6	Bappeda	
	29 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	B	B	Setda	
	30 Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2,4688	2,8	Setda	
	31 Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP (2023)	WTP	BPKAD	
	32 Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	4,17	4,21	BPKAD	

Tujuan	Sasaran		Indikator	Kondisi awal (2023)	TARGET	Penanggung Jawab
Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	12 Meningkatnya kualitas dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN)	33 Nilai SPIP 34 Indeks Pengawasan Kearsipan 35 Indeks Kepuasan Layanan kepada Lembaga DPRD 36 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 37 Indeks SPBE / Indeks Pemerintahan Digital 38 Indeks keterbukaan informasi publik 39 Tingkat Keamanan Informasi 40 Capatan Fiskal Daerah 41 Indeks Profesionalitas ASN	33 Nilai SPIP	2,4	2,6	Inspektorat Daerah
			34 Indeks Pengawasan Kearsipan	Tidak diberikan opini	30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			35 Indeks Kepuasan Layanan kepada Lembaga DPRD	N/A	79	Setwan
			36 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	B	Setda
						Kecamatan
						Dukcapil
			37 Indeks SPBE / Indeks Pemerintahan Digital	2,58	3	Diskominfo
			38 Indeks keterbukaan informasi publik	N/A	65	Diskominfo
			39 Tingkat Keamanan Informasi	N/A	100	Diskominfo
			40 Capatan Fiskal Daerah	5,4	6	Bappenda
Meningkatnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	13 Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur dasar 14 Meningkatnya kualitas tata ruang dan penataan wilayah	42 Indeks Pembangunan Infrastruktur 43 Rasio Konektivitas 44 Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang sesuai regulasi yang berlaku (%) 45 Rasio Ruang Terbuka Hijau (%) 46 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	n/a	2,65	Pemda Kab Ende
			42 Indeks Pembangunan Infrastruktur	54,17	56,79	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat, KPP
			43 Rasio Konektivitas	62,85	64,28	Dinas Perhubungan
			44 Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang sesuai regulasi yang berlaku (%)	90	100	Dinas PUPR
			45 Rasio Ruang Terbuka Hijau (%)	1,4	1,4	Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	77,65	83,16	Dinas Lingkungan Hidup
			46 Indeks Desa Membangun	0,61	0,62	DPMRD
			47 Persentase Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pawiata
			48 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	77,65	83,16	Dinas Lingkungan Hidup
			49 Indeks Resiko Bencana	140,12	139,56	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan berbasis potensi wilayah dan tata ruang	19 Meningkatnya produksi, produktivitas dan keamanan pangan serta pemanfaatan lahan pangan sesuai tata ruang	50 Skor Pola Pangan Harapan 51 Produksi pertanian pangan (ton) 52 Produksi perikanan (ton) 53 Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan (Ha) 54 Persentase konversi lahan pertanian terhadap total lahan pertanian (%) 55 Persentase Produk Pangan Segar yang memenuhi Standar dan Mutu Pangan	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	73,42 (2023)	75,68	Dinas Ketahanan Pangan
			50 Skor Pola Pangan Harapan	76,9	77,3	Dinas Ketahanan Pangan
			51 Produksi pertanian pangan (ton)	10.833,17	11.492,9	Dinas Pertanian
			52 Produksi perikanan (ton)	12.316,7	13.066,8	Dinas Perikanan
			53 Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan (Ha)	4.267,19	4.287,19	Dinas Pertanian
			54 Persentase konversi lahan pertanian terhadap total lahan pertanian (%)	100	100	Dinas Pertanian
			55 Persentase Produk Pangan Segar yang memenuhi Standar dan Mutu Pangan	95,7	82	Dinas Ketahanan Pangan

Sumber: RPJMD Ende 2025-2029

4.2 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2026

Sasaran dan Prioritas pembangunan merupakan dua (2) indikator penting dalam mengukur target pembangunan yang akan dicapai oleh Pemerintah Daerah Ende pada tahun 2026. Sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2026 umumnya merujuk pada arah kebijakan pembangunan yang akan dicapai dalam satu tahun rencana yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Ende tahun 2025-2029

4.2.1 Sasaran Pembangunan

Sasaran dan target pembangunan daerah Kabupaten Ende pada tahun 2026, dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel 4.2 Sasaran dan Target Pembangunan Daerah Kabupaten Ende pada tahun 2026

NO	INDIKATOR	Kinerja Awal RPJMD (2024)	TARGET KINERJA	
			2025	2026
1	Indeks Pembangunan Manusia	69,11	69,69	70,23
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,88	4	4,56
3	Tingkat Kemiskinan	22,57	22,18	21,16
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,05	2,03	1,96
5	Rasio Gini	0,286	0,269	0,255
6	Indeks Reformasi Birokrasi	65,24 (B)	B (66, 04)	B (66, 83)
7	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	n/a	2,52	2,65
8	Indeks Desa Membangun	0,6106	0,6106	0,6186
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,65	82,99	83,16
10	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	73,42 (2023)	74,2	75,68

Sumber : RPJMD Ende 2025-2029

4.2.2 Perumusan Prioritas Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2026

Prioritas Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2026, merupakan penjabaran **Program Pembangunan Kabupaten Ende** yang tertuang dalam dokumen RPJMD Ende 2025-2029 dan memperhatikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Ende terpilih tahun 2025-2030 serta sebuah arah kebijakan perencanaan untuk menjawab isu strategis pembangunan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Ende pada tahun 2026. Prioritas Pembangunan memuat **program unggulan daerah** dan **program prioritas seluruh Perangkat Daerah** lingkup Pemkab Ende.

Berdasarkan permasalahan serta beberapa isu global, isu nasional dan isu Propinsi, , maka dirumuskan **Isu Strategis Kabupaten Ende**, antara lain:

1. Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia

Salah satu agenda dalam SDGs adalah pembangunan sumber daya manusia, yaitu mengacu pada tujuan 1 (tanpa kemiskinan atau mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk), tujuan 3 (menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia), dan tujuan 4 (menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua). Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia merupakan modal utama dalam mendorong pembangunan suatu wilayah sehingga selain peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan juga diperlukan upaya peningkatan kesejahteraan serta terpenuhinya perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Ende diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berkarakter, produktif, inovatif, berbudaya, dan berdaya saing. Selanjutnya, untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing, masyarakat Kabupaten Ende perlu disiapkan dan diarahkan untuk dapat memanfaatkan kemajuan teknologi digital, salah satunya agar mendapatkan kemudahan mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan diri.

Selain itu dalam menunjang peningkatan sumber daya manusia Pemerintah Pusat juga mengeluarkan program makan bergizi gratis untuk anak sekolah dari tingkat sekolah dasar sampai menengah atas serta para guru dan ibu hamil

2. Peningkatan perekonomian daerah melalui aktivitas ekonomi pada sektor unggulan

Kabupaten Ende memiliki potensi yang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, seperti pertanian, kehutanan dan perikanan , industri pengolahan, Real estate, Jasa Perusahaan dan Jasa lainnya. Peningkatan perekonomian di kawasan ini dapat dilakukan dengan pengembangan sektor secara berkelanjutan. Pengembangan sektor pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan yang sesuai dengan kondisi daerah, membangun sistem pemasaran yang efektif, serta menerapkan teknologi pertanian yang tepat. Pengembangan sektor kehutanan meliputi pengelolaan hutan rakyat, rehabilitasi lahan kritis, perlindungan fungsi lingkungan hidup, serta fasilitasi usaha kehutanan skala kecil seperti hutan kemasyarakatan dan hutan desa. Pemerintah daerah juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan pengawasan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu secara lokal. Pengembangan sektor perikanan melalui pengembangan budidaya perikanan,

pengembangan teknologi penangkapan ikan (modernisasi teknologi) , serta mengembangkan industri pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah.

Pengembangan real estate mencakup kegiatan perencanaan, pembangunan, pemasaran, dan pengelolaan properti seperti perumahan, kawasan komersial, industri, dan ruang terbuka. Proses ini melibatkan penyediaan lahan, pengurusan perizinan, pembangunan infrastruktur, serta penataan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup Masyarakat.

Pengembangan jasa perusahaan mencakup peningkatan kapasitas, kualitas, dan cakupan layanan yang disediakan oleh perusahaan di berbagai bidang seperti BUMD

Peningkatan ekonomi daerah, khususnya di wilayah pedesaan, dapat dilakukan melalui strategi pembentukan dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pembentukan BUMDes memberikan ruang bagi desa untuk mengelola potensi lokal secara mandiri dan berkelanjutan, seperti sektor pertanian, pariwisata, kerajinan, serta perdagangan hasil bumi. Dengan pengelolaan yang tepat, BUMDes dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa yang berbasis pada keunggulan lokal serta kebutuhan masyarakat setempat.

Sementara itu, revitalisasi BUMDes yang telah ada bertujuan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan, profesionalisme pengelola, serta efektivitas kegiatan usaha yang dijalankan. Revitalisasi ini mencakup perbaikan tata kelola, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta perluasan jejaring kemitraan. Melalui langkah ini, BUMDes diharapkan dapat berperan lebih optimal dalam menggali potensi ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) secara signifikan, sehingga berkontribusi pada pembangunan ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan.

3. Transformasi Manajemen Publik

Transformasi manajemen publik adalah proses perubahan mendasar dalam cara pemerintah mengelola sumber daya, membuat keputusan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat, pelayanan publik serta peningkatan daya saing daerah yang menjadi tujuan utama dari penyelenggaran pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Seiring dengan tuntutan reformasi birokrasi, pemerintah daerah perlu mempercepat transformasi manajemen publik, di antaranya melalui digitalisasi proses dan layanan pemerintah daerah (SPBE), perubahan budaya organisasi, penyederhanaan prosedur layanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penerapan prinsip-prinsip good governance dalam tatakelola pemerintahan yang akan berimplikasi langsung terhadap peningkatan kinerja pelayanan publik, efektivitas kebijakan pemerintah daerah, serta penguatan integritas birokrasi.

4. Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri dan berkelanjutan. Kapasitas fiskal daerah, dengan demikian, mencerminkan seberapa besar daerah dapat mengandalkan pendapatan asli daerah (PAD) dan sumber pendapatan lainnya dibandingkan ketergantungannya pada Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Sejalan dengan semangat otonomi daerah, penguatan kapasitas fiskal daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan kemandirian fiskal guna mempercepat penyediaan pelayanan dasar, terutama dalam membiayai program-program spesifik yang menjadi prioritas lokal, termasuk program inovatif daerah, tanpa terlalu dipengaruhi oleh dinamika dalam prioritas kebijakan keuangan di tingkat pusat. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, diversifikasi sumber-sumber pendanaan serta peningkatan produktifitas belanja daerah, dengan demikian, perlu menjadi prioritas dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah

5. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan

Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa seluruh wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan, serta seluruh masyarakat mendapatkan akses yang sama terhadap seluruh infrastruktur dasar maupun infrastruktur wilayah yang memadai tanpa terkecuali. Pentingnya pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan berdampak pada percepatan pemerataan pembangunan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan daya saing daerah karena dapat mendorong peningkatan investasi, mengurangi kesenjangan, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pengembangan infrastruktur diarahkan pada peningkatan aksesibilitas wilayah, peningkatan penyediaan

infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, jaringan telekomunikasi, penyediaan rumah layak huni, hingga pada pengembangan pelabuhan/dermaga yang mendukung transportasi laut dan pariwisata bahari serta aktivitas perikanan. Peningkatan ruas jalan akan meningkatkan konektivitas wilayah dan/atau meningkatkan keterhubungan wilayah dengan destinasi wisata dan pusat ekonomi lainnya, yang diharapkan akan memberikan dampak yang baik bagi perkembangan pariwisata dan perekonomian.

6. Peningkatan nilai-nilai keimanan, revitalisasi nilai-nilai budaya lokal dan penguatan Lembaga Adat

Peningkatan nilai-nilai keimanan, revitalisasi nilai-nilai budaya lokal, dan penguatan Lembaga Adat merupakan upaya untuk memperkuat identitas dan nilai-nilai luhur masyarakat. Peningkatan keimanan memperkuat rasa spiritual dan moralitas, meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis yang dapat dilakukan melalui kegiatan keagamaan, pendidikan agama, dan pemberian contoh perilaku yang baik oleh tokoh agama, sementara revitalisasi budaya lokal menjaga tradisi kearifan lokal dan memperkuat rasa memiliki terhadap daerah yang dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti festival budaya, lomba seni tradisional, pameran kerajinan tangan, dan pendokumentasian tradisi serta penguatan Lembaga Adat memastikan kelanjutan kearifan lokal dan menjaga keharmonisan social yang dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti memberikan dukungan kepada tokoh adat, melakukan sosialisasi tentang peran lembaga adat, dan melibatkan lembaga adat dalam pengambilan keputusan.

7. Ketahanan dan Swasembada Pangan berbasis potensi wilayah dan ekonomi lokal

Ketahanan pangan berbasis potensi wilayah berarti memanfaatkan sumber daya lokal di suatu daerah untuk memenuhi pangan masyarakatnya. Untuk ketahanan pangan diperlukan strategi diversifikasi pangan, pengembangan pangan lokal dan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam. Dengan memanfaatkan potensi wilayah, ketahanan pangan dapat menjadi berkelanjutan dan mandiri. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional Tahun 2024 nilai Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Ende sebesar 72,93 dengan kategori 5 (tahan). Walaupun masuk dalam kategori tahan namun ada tantangan yang dihadapi yaitu 1) Meningkatnya pertumbuhan penduduk setiap tahun baik kuantitas maupun kualitas yang dapat mempengaruhi tingkat komsumsi pangan; 1) Masih ada petani yang belum menerapkan Panca Usaha

tani; 3) Kurangnya generasi muda yang bekerja pada sektor Pertanian; 4) Terjadinya Elmino, curah hujan lemah yang tidak sesuai musim, sehingga menyebabkan sebagian areal tanaman gagal tamam/gagal panen; 5) serangan OPT (Pegerek batang, Walang sagit, keong mas dll); 6) Penggunaan pupuk Urea dan NPK oleh petani untuk tanaman Pangan masih sangat rendah dan kurang tepat.

8. Potensi Rawan Bencana

Ditinjau dari kondisi Kawasan hutan dan non-hutan, Kabupaten Ende merupakan salah satu kabupaten di Provinsi NTT yang mempunyai potensi untuk terlibat dan berkontribusi dalam pencapaian target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) nasional terutama dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. ditetapkan 8 rencana aksi mitigasi berbasis spatial pada lokasi yang sudah ditentukan. 8 rencana aksi mitigasi tersebut mencakup mencegah degradasi lahan mineral; degradasi konsesi terencana; pembangunan hutan tanaman; penerapan pengkayaan hutan alam; penerapan RIL-C; peningkatan cadangan karbon dengan rotasi; peningkatan cadangan karbon tanpa rotasi, serta perlindungan areal konservasi tinggi.

Kemampuan Kabupaten Ende dalam mengelola dampak dari perubahan iklim (termasuk keragaman dan iklim ekstrem) sangat ditentukan terutama oleh kondisi sosial ekonomi yang merupakan indikator kapasitas adaptif. Dalam analisis ini, Kapasitas Adaptif desa direpresentasikan oleh 13 (tiga belas) indikator, yaitu Fasilitas Listrik, Infrastruktur Jalan, Kelembagaan, Industri Kecil dan Mikro, Fasilitas Pendidikan, Sarana Prasarana Ekonomi, Fasilitas Kesehatan, Lembaga Keuangan, Kegiatan Pelestarian Lingkungan, Fasilitas Kredit yang Diterima Warga, Kegiatan Sosial, Jaminan Kesehatan, dan Komunikasi. Kawasan yang memiliki lebih banyak jumlah kondisi Indikator Kapasitas Adaptif yang bagus, secara relatif memiliki kemampuan adaptif yang lebih tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Wilayah Kabupaten Ende didominasi kerentanan perubahan iklim yang tinggi yakni seluas 112.039,30 Ha atau sebesar 54% dari luas wilayah. Disisi lain terdapat seluas 88.423,23 Ha atau sebesar 43% dari luas wilayah yang tergolong dalam kerentanan perubahan iklim cukup rendah.

Berdasarkan data InaRISK terdapat 7 jenis bencana yang diidentifikasi rawan di Kabupaten Ende meliputi bencana Banjir, Banjir Bandang, Gelombang Ekstrim/abrsasi, Gempa Bumi, Letusan Gunung Api, Tanah Longsor dan Tsunami. Jenis bencana yang ada ini terdiri dari klasifikasi rawan sedang, rendah hingga tinggi. Kondisi rawan bencana alam yang berada pada kategori tinggi meliputi :

Abrasi (593,19,47 ha); Banjir (308,71 ha); Banjir Bandang (4.679,73 ha); Gempa Bumi (9.427,23,23 ha); Gunung api (2.345,53 ha); Likuifaksi (341,18 ha); Tanah Longsor (156.653,74 ha); Tsunami (3365,63 ha).

Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir beragam bencana terjadi di Kabupaten Ende. Bencana tersebut tidak hanya disebabkan oleh faktor alam saja, tetapi juga faktor non alam lainnya. Akibat terjadinya bencana tersebut tentunya timbul kerugian baik nyawa maupun harta benda lainnya. Lebih lanjut terjadinya bencana turut menimbulkan kerusakan bagi infrastruktur sehingga berdampak pada terhambatnya pembangunan nasional. Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2022, Kabupaten Ende memiliki nilai indeks 144,52 berada pada kategori tinggi. Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana.

Prioritas pembangunan menekankan pada program yang secara langsung berhubungan dengan *kinerja pencapaian sasaran RPJMD bersifat mendesak* dan memiliki *daya ungkit yang tinggi* bagi pencapaian kinerja.

Prioritas pembangunan Tahun 2026 menjadi dasar penentuan alokasi pendanaan masing-masing program (berdasarkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana diuraikan pada Bab III) dan dijabarkan oleh masing-masing perangkat daerah dalam rincian program, kegiatan dan sub kegiatan. Pada tataran pencapaian tujuan bersama pembangunan, prioritas pembangunan daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan provinsi NTT.

Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi permasalahan pembangunan Kabupaten Ende, dihubungkan dengan program pembangunan daerah dalam RPJMD. Secara teknis perumusan **Prioritas Pembangunan Tahun 2026** didasarkan pada pelaksanaan tahun kedua RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 dan memerhatikan *prioritas pembangunan nasional dan provinsi*.

Tahapan perumusan Prioritas Pembangunan 2026, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Melakukan Review terhadap Kinerja RKPD Masa Lalu
2. Telahaan **prioritas pembangunan nasional** dalam rancangan RKP 2026
3. Telahaan **prioritas pembangunan Provinsi NTT** dalam rancangan RKPD 2026.
4. Mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana disajikan pada bagian rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan (Bab III RKPD).
5. Perumusan Prioritas Pembangunan Tahun 2026.

1. Review Kinerja RKPD Masa Lalu dan RPD

Berdasarkan hasil review capaian pelaksanaan RKPD dan perkiraan maju

pada RKPD 2025, disimpulkan beberapa hal sebagai dasar dalam perumusan prioritas pembangunan Tahun 2026, antara lain:

1. Adanya kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Peiaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Adanya *program baru* yang diarahkan dalam rangka mempercepat capaian indikator, serta merupakan *arahannya kebijakan nasional dan provinsi*, antara lain perubahan Kebijakan DAK yang bersifat tematik, holistik, integratif dan spasial (THIS) dengan strategi lokasi prioritas 3T (tertinggal, terluar dan terdepan) serta proyek strategis nasional dan program strategis nasional.

2. Telaahan Prioritas Pembangunan Nasional Dalam RKP Tahun 2026

Telaahan RKP yang disajikan, mengacu kepada bahan Rancangan RKP Tahun 2026 sebagai berikut:

Tema RKP 2026: “**Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif**”, yang merupakan fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi sebagaimana yang termuat di dalam RPJPN 2025–2045 dengan rumusan visi Indonesia Emas 2045, yaitu negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik.

Sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2026, antara lain:

- Pertumbuhan ekonomi sebesar : 5,8 – 6,3
- Tingkat kemiskinan sebesar : 6,5 – 7,5 %
- Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar : 4,44 – 4,96
- Rasio Gini (nilai) sebesar : 0,377 – 0,380
- Indeks Modal Manusia sebesar : 0,57
- Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar: 37,14

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (ProSN)

Program Strategis Nasional merupakan program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan program/proyek yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RKP yang mencakup Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, dan Proyek Strategis Nasional yang memiliki sifat strategis dan menjadi tanggung jawab

pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta menjaga keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, ProSN menjadi acuan penting bagi Pemerintah Daerah dalam menyelaraskan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan agar mendukung agenda strategis nasional secara terpadu dan berkelanjutan. Pelaksanaan ProSN diarahkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah. Dalam hal ini, keterpaduan antara program pusat dan daerah menjadi kunci dalam menciptakan pemerataan infrastruktur, peningkatan daya saing wilayah, serta pemerataan akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi di seluruh Indonesia. Selain aspek ekonomi, ProSN juga memuat dimensi strategis dalam menjaga stabilitas nasional, khususnya melalui program-program yang mendukung ketahanan energi, pangan, dan pertahanan negara. Pemerintah Daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung program-program tersebut melalui penguatan kapasitas wilayah dan sinergi lintas sektor, demi menciptakan lingkungan yang aman, tangguh, dan resilien. Pada akhirnya, seluruh inisiatif dalam Program Strategis Nasional bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pelaksanaan ProSN yang terarah dan terkoordinasi dengan baik, diharapkan tercipta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang tidak hanya menciptakan pertumbuhan, tetapi juga memastikan bahwa manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Berikut Program Strategis Nasional (ProSN):

Tabel. 4.15 Program Strategis Nasional (ProSN)

No	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	
1.	Pengentasan Kemiskinan	1	Penanggulangan Kemiskinan
		2	Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
		3	Sekolah Rakyat
		4	Pembangunan 3 Juta Rumah
2.	Ketahanan Pangan	1	Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)
		2	Pendayagunaan Penyuluh Pertanian
		3	Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah
		4	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)
3.	Kesehatan untuk semua	1	Stunting
		2	Pemeriksaan Kesehatan Gratis
		3	Jaminan Kesehatan Nasional
		4	Penuntasan TBC

No	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	
		5	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota
4.	Perluasan Pendidikan	1	Pembangunan dan Revitalisasi PAUD
		2	Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah
		3	Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran
		4	Makan Bergizi Gratis
5.	Pertumbuhan Ekonomi	1	Pengendalian Inflasi
		2	Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
		3	Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
		4	Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan,)
		5	Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah

3. Telahaan Prioritas Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2026

Prioritas Pembangunan Provinsi NTT tahun 2026 antara lain sebagai berikut;

1. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan;
2. Pemberdayaan Komunitas;
3. Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan;
4. Pemerataan Akses dan Layanan Kesehatan;
5. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan;
6. Reformasi Birokrasi dan HAM; dan
7. Kolaborasi Ayo Bangun NTT.

Selain Prioritas yang merupakan pilar dari Gubernur dan Wakil Gubernur juga terdapat dasa cita yang merupakan Program Pembangunan Daerah antara lain:

1. Dasa Cita 1 : Dari ladang dan Laut ke Pasar:Efisien, Modern, dan Aman;
2. Dasa Cita 2 : Milenial dan Perempuan Motot Kreativitas Lokal;
3. Dasa Cita 3 :Wisata NTT Penggerak Ekonomi Lokal;
4. Dasa Cita 4: Kesejahteraan Bersama; Jaminan Kesehatan dan ketenagakerjaan untuk masyarakat;
5. Dasa Cita 5 : Posyandu Tantuh, Masyarakat Sehat dan bebas Stunting
6. Dasa Cita 6 : Sekolah Vokasi Unggulan Berbasis Potensi Unggulan;
7. Dasa Cita 7 : Jalan, Air, Listrik, Rumah Layak Huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera
8. Dasa Cita 8 : Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin
9. Dasa Cita 9 : Membangun NTT Digital : Akses Merata, Komunikasi Lancar
10. Dasa Cita 10 : Ayo Bangun NTT, Kolaborasi Bersama

4. Kemampuan Keuangan Daerah

Besaran kemai

Rencana Penggunaan Kapasitas Ril Keuangan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2026 (dalam Miliar)

No	Uraian	Rencana RKPD 2026	Proporsi thd Kap. Ril (%)	Ket.
A.	Prioritas I	116,9	15,49	
IV-23 Rancangan Akhir RKPD Kab. Ende Tahun 2026 Detail Dalam Implementasi/Enerapan	1 Pelayanan Dasar	116,9		
B.	Prioritas II	354,50	46,95	

Sumber data: BAB III RKPD Tahun 2025

5. Prioritas Kabupaten Ende Tahun 2026

Berdasarkan proses perumusan sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, serta memerhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2026, yang pada prinsipnya mendukung 10 (sepuluh) Program Prioritas Daerah (PPD) Provinsi NTT Tahun 2026 dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas Nasional (PPN) Tahun 2026, sebagai berikut:

Keterkaitan Program Prioritas Daerah Kabupaten Ende (PD) dengan Program Prioritas Provinsi (PP) dan Prioritas Nasional (PN) Tahun 2026

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		Program Prioritas Berdasarkan Kepmendagri No.900.1- 2850 tahun 2025	PROGRAM PRIORITAS PROPINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
1	ENDE CEMERLANG " Membangun Kabupaten Ende melalui peningkatan SDM, dan mewujudkan Ende sebagai Kota Pendidikan"	Program Pengelolaan Pendidikan	DC 6 dan 3	PPN 8
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		
2	ENDE SEHAT "Membangun investasi masyarakat yang sehat melalui Optimalisasi Pelayanan dan Sadar Kesehatan"	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DC 5	PPN 7
		1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		
		2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		
3	ENDE UNGGUL "Membangun Kabupaten Ende yang memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif melalui Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan, kesehatan	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	DC 2	PPN 14
		2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DC 1	

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Program Prioritas Berdasarkan Kepmendagri No.900.1-2850 tahun 2025	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS
	dan ekonomi (berfokus pada aspek ekonomi)"		
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DC 3	
	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	DC 3	
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	DC 2	
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		PPN 14
4 ENDE PRODUKTIF "Membangun Kabupaten Ende melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan , UMKM Pemberdayaan Masyarakat dengan Optimalisasi SDA"	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DC 1	PPN 1
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	DC 1	PPN 1
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DC 1	PPN 1
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DC 1	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DC 1	
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DC 3	
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	DC 3	
	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		
5 ENDE TOLERAN "Membangun Kabupaten Ende dalam semangat kebersamaan di atas penghargaan terhadap keberagaman sebagai identitas Masyarakat"	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	DC 3	PPN 16
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	DC 3	PPN 16
6 ENDE MELAYANI "Membangun Kabupaten Ende melalui peningkatan kualitas perlindungan kepada masyarakat"	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DC 2	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DC 8	

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		Program Prioritas Berdasarkan Kepmendagri No.900.1-2850 tahun 2025	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS
		1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		PPN 10
		1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	DC 2	
		1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	DC 2	
		1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	DC 2	
7	ENDE MEMBANGUN "Membangun Kabupaten Ende melalui ketersediaan dan peningkatan daya dukung infrastruktur dasar (Jalan, jembatan, air bersih,)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		PPN 15
		1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		PPN 15
		1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN	DC 7	PPN 13
		1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		
		1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		
		1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	DC 7	PPN 13
8	ENDE KREATIF "Membangun Kabupaten Ende yang berdaya saing melalui Peningkatan pertumbuhan di berbagai bidang (fokus pada bidang pertanian: argoindustri, agrowisata)	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	DC 1	PPN 1
		2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DC 1	PPN 1
		2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	DC 1	PPN 1
		2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	DC 1	PPN 1

Sumber : Olahan Bappeda

4.3. Data Inovasi

Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mendorong peningkatan daya saing global. Salah satunya melalui inovasi. Untuk menjamin pelaksanaan dan keberlangsungan inovasi, maka inovasi dijalankan dalam suatu sistem, dimana di dalamnya terdapat pelaku, kelembagaan, hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan, kecepatan dan difusi dari suatu inovasi. Pelaksanaannya di daerah dikenal dengan istilah sistem inovasi

daerah, merupakan bagian integral dari sistem inovasi nasional.

Salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan inovasi adalah melalui pengukuran indeks inovasi daerah, dimana penghargaan dan pembinaan diberikan kepada daerah berdasarkan predikat inovasinya. Indeks inovasi daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah, adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah dalam suatu periode tertentu. Lembaga yang bertugas memberikan penilaian , penghargaan dan insentif kepada daerah yang berhasil melaksanakan inovasi adalah kementerian dalam negeri.

Pemberian penghargaan dan insentif ditujukan agar daerah termotivasi untuk melakukan inovasi, yang pada ujungnya berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penilaian indeks inovasi daerah tahun 2022 sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6301.A tahun 2022 tentang Indeks Inovasi daerah Provinsi, kabupaten dan Kota tahun 2022, Kabupaten Ende memperoleh nilai 0,40 dengan predikat kurang Inovatif karena Pelaporan yang disampaikan pada tahun 2022 hanya 1 Inovasi tanpa melaporkan data Indikator. Pada tahun 2023 sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11- 6301.A tahun 2022 tentang Indeks Inovasi daerah Provinsi, kabupaten dan Kota tahun 2023, Kabupaten Ende memperoleh nilai 19,98 dengan predikat kurang Inovatif . Adapun jumlah inovasi yang dilakukan pada tahun 2023 sebanyak 9 Inovasi pada 6 Perangkat Daerah yang dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

1.Judul inovasi : Garugiwa In-Line (Gerai Urusan Pelanggan Insan Adminduk Terintegrasi dan Online)

1) Dasar Hukum:

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tentang Penetapan Inovasi Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2) Ketersediaan Sumber Daya:

Keberhasilan suatu program tentu harus ada dukungan financial maupun sumber daya manusia yang baik. Namun Inovasi GARUGIWA In-Line tidak membutuhkan biaya yang tinggi dan khusus. Karena inovasi ini lahir dari komitmen dan semangat yang sama. Berbagai sumber daya diantaranya:

1. Sumber biaya

Biaya yang digunakan dalam inovasi ini diambil dari alokasi dan pada Disdukcapil Kabupaten Ende yang terdiri dari: APBD Tahun 2020 sebesar Rp.1.138.006.896; Tahun 2021 sebesar Rp.883.676.053; Tahun 2022 sebesar Rp.2.164.445.134; APBN DAK Tahun 2020 sebesar Rp.1.459.153.104; Tahun 2021 sebesar Rp.2.088.566.367; ditambah dengan dukungan biaya dari Topdown dana APBD Desa dan Kelurahan.

2. Sumber daya Manusia

Sumber daya manusia yang terlibat dalam inovasi ini:

- 1) Operator dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende sebanyak 22 orang;
- 2) Petugas Registrasi Desa: 255 orang, Kelurahan :23 orang;
- 3) Petugas Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit dan Puskesmas sebanyak 9 orang (untuk inovasi LAPAK dan MANDA);
- 4) Petugas Pemakaman 7 orang (untuk inovasi MANDA).

3. Sumber daya material dan peralatan

Operasional yang digunakan dalam inovasi ini adalah: komputer, alat tulis kantor, formulir persyaratan, leafet, baner, baliho, kalender, sistem informasi, website dan fasilitas internet.

3) Latar belakang Inovasi :

Memahami bahwa pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) merupakan jenis pelayanan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Ende harus melakukan pelayanan yang memudahkan masyarakat. Masyarakat selalu menuntut kualitas pelayanan yang baik, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan dan keinginan yang dapat membahagiakan masyarakat.

Kabupaten Ende memiliki penduduk 276.740 ribu jiwa (DKB Semester 2 Tahun 2020), dari jumlah penduduk tersebut masih banyak sekali masyarakat yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan. Disdukcapil Kabupaten Ende dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat, namun dalam pelaksanaannya masih banyak sekali kendala dalam pelayanan yang terjadi diantaranya: 1.Pelayanan masih dianggap ber-belit-belit, lambat, ber-resiko dan membuat lelah masyarakat; 2.waktu penyelesaian masih membutuhkan beberapa hari

bahkan sampai beberapa minggu dan bulan; 3.pelayanan belum menerapkan

sistem pelayanan yang cepat, mudah dan langsung jadi; 4.pelayanan masih terpusat hanya ada di kantor dinas, belum ada layanan terintegrasi, layanan di desa dan layanan online, tentu hal ini mempersulit masyarakat untuk memperoleh dokumen administrasi kependudukan.

Capaian Target Indikator Pusat Tahun 2020 terhadap kepemilikan dokumen Adminduk Kabupaten Ende sangat rendah. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia, jumlah anak (usia 0-17 Tahun) di Kabupaten Ende Tahun 2020 yang memiliki akta kelahiran baru mencapai 44 %, sehingga masih ada 56 % anak yang belum memiliki akta kelahiran. Sedangkan jumlah anak yang memiliki Kartu Identitas Anak hanya sebanyak 1.460 anak. Berangkat dari latar belakang permasalahan maka Inovasi GARUGIWA INLINE (GerAi uRUsan pelanGgan Insan Wajib Adminduk Terintegrasi dan Online) digagas, diinisiasi, dan diterapkan untuk memudahkan dan mempercepat kepemilikan dokumen adminduk bagi masyarakat. Inovasi ini di inisiasi, digagas dan penerapannya pada tahun 2020 namun dalam pelaksanaan penerapannya terdapat beberapa inovasi yang terintegrasi dalam inovasi yang pelaksanaan penerapannya ada ditahun 2020, 2021, dan 2022. Inovasi ini memberikan layanan yang efektif dan efisien dalam penerbitan dokumen Adminduk karena dapat dilakukan secara Offline Terintergrasi dan secara Online. Dampak yang di peroleh dari inovasi ini adalah layanan menjadi mudah, murah, cepat dan langsung jadi. Inovasi GARUGIWA In-Line tidak hanya ada di kantor dinas tapi ada juga di kantor desa, layanan online, mobil keliling dan layanan ini tidak hanya tersedia pada hari kerja reguler tetapi juga pada hari libur. Inovasi ini sesuai dengan tujuan SDGs yaitu “Mengatasi kemiskinan, membangun kehidupan sehat dan sejahtera dan membangun kemitraan untuk mencapai tujuan untuk pembangunan berkelanjutan di semua tingkatan.

4) Tujuan Inovasi :

1. Terwujudnya percepatan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan bagi masyarakat;
2. Meningkatnya target capaian indicator kepemilikan dokumen administrasi kependudukan;
3. Mempersingkat prosedur alur pelayanan;
4. Memiliki fleksibilitas waktu terkait pengajuan pendaftaran administrasi kependudukan;

- Memberikan kemudahan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan layanan yang efektif, mudah, tepat, cepat, gratis dan bebas pungli atau calo dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan.

5) Manfaat Yang diperoleh :

- Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan akan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan;
- Mempersingkat prosedur alur pelayanan bagi masyarakat untuk memperoleh beberapa dokumen dalam sekali urus karena memiliki layanan terintegrasi;
- Memudahkan masyarakat dalam mengakses kepengurusan dokumen administrasi kependudukan dari mana saja Dan kapan saja Karena tersedia layanan online;
- Memiliki fleksibilitas waktu terkait pengajuan dokumen administrasi kependudukan dan bebas dari calo dan pungli.

Sedangkan kebaharuan dari Inovasi ini adalah; memiliki 6 (enam) inovasi layanan terintegrasi yang mana dengan layanan terintegrasi dalam sekali urus masyarakat dapat memiliki beberapa dokumen sekaligus. Adapun layanan GARUGIWA Terintegrasi diantaranya :

- * **Inovasi LAPAK 3in1 (LAhir daPat Adminduk)** jika ada ibu yang melahirkan di Faskes bayinya akan memperoleh dokumen administrasi kependudukan (Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA). Inovasi ini telah dilakukan kerjasama/MoU dengan Faskes seperti Rumah Sakit dan Puskesmas;
- * **Inovasi MANDA 3in1 (MAti Nanti Dapat Adminduk)** jika ada keluarga yang meninggal di faskes akan memperoleh dokumen administrasi kependudukan (Akta Kematian, Kartu Keluarga, KTP Perubahan Status). Inovasi ini telah dilakukan kerjasama/MoU dengan Faskes seperti Rumah Sakit dan Puskesmas;;
- * **Inovasi KANDA 3in1 (KAwin Nanti Dapat Adminduk)** jika ada pasangan yang menikah akan memperoleh dokumen administrasi kependudukan (Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, KTP-El (perubahan status). Inovasi ini telah dilakukan kerjasama/MoU dengan Gereja;
- * **Inovasi PANDA 3in1 (PermAndian Nanti Dapat Adminduk)** jika ada anak yang dipermandikan di gereja akan memperoleh dokumen

- administrasi kependudukan (Surat Permandian, Kartu Keluarga, KIA). Inovasi ini telah dilakukan kerjasama/MoU dengan Gereja;
- **Inovasi CANDA 3in1 (CerAi Nanti Dapat Adminduk)** jika ada pasangan yang bercerai akan memperoleh dokumen administrasi kependudukan (Kartu Keluarga, Akta Perceraian/Buku Cerai, KTP-El). Inovasi ini telah dilakukan kerjasama/MoU dengan Kantor Kementerian Agama dan Kantor Pengadilan Agama.
 - **Inovasi KAIDA 3in1 (KAwin Isbak Dapat Adminduk)** jika ada pasangan yang menikah isbak akan memperoleh dokumen administrasi kependudukan (Kartu Keluarga, Buku Nikah, KTP-El). Inovasi ini telah dilakukan kerjasama/MoU dengan Kantor Kementerian Agama dan Kantor Pengadilan Agama.
2. Memiliki 4 (empat) layanan online (1. Akta Kelahiran Online; 2. Kartu Keluarga Online; 3. Kartu Identitas Anak Online;
 3. Konsolidasi NIK Online) yang mudah diakses dari mana saja dan kapan saja 24 jam pada website dinas <https://disdukcapil.endekab.go.id/dukcapil/layanan-online>)
 4. Memiliki gerai layanan di desa dilengkapi dengan petugas registrasi desa,
 5. Adanya gerai layanan keliling jemput bola dengan menggunakan bus ke desa, sekolah, dan tempat keramaian.

GARUGIWA In-Line menjadi MASKOT PELAYANAN dari Dinas, dengan inovasi ini dinas berhasil mempercepat kepemilikan dokumen adminduk dan merubah kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan dari yang buruk menjadi pelayanan yang mudah dan membahagiakan masyarakat. Nama GARUGIWA di ambil dari nama burung langkah yang hanya ada di Danau Tiga Warna Kelimutu yang memiliki beragam suara yang sangat merdu.

6) Pelaksanaan Inovasi

Inovasi GARUGIWA IN-LINE yang penerapannya pada tahun 2020 terus mengalami perkembangan perubahan dengan penambahan-penambahan inovasi, Ada beberapa tahapan yang dilakukan pada inovasi ini diantaranya:

1. **Tahap Pertama** menyediakan layanan terpusat, seluruh jenis layanan mulai dari pengajuan berkas sampai dengan pengambilan dokumen dilakukan dalam satu gerai Layanan.
2. **Tahap ke-dua** menyediakan layanan online pada website <https://disdukcapil.endekab.go.id/dukcapil/layanan-online>. adapun

layanan online yang tersedia (Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Konsolidasi NIK).

3. **Tahap ke-tiga** Membangun kerjasama dengan Desa dengan membentuk Petugas Registrasi, hal ini dilakukan dalam rangka pendekatan pelayanan dan memudahkan masyarakat memperoleh dokumen adminduk. Masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke dinas untuk mengurus dokumen adminduk.
4. **Tahap keempat** Berkolaborasi dengan stakeholder membangun Layanan Terintegrasi, dengan layanan terintegrasi dalam sekali urus masyarakat dapat memiliki beberapa dokumen sekaligus. Adapun layanan GARUGIWA Terintegrasi diantaranya :
 - 1) **Inovasi LAPAK 3in1 (LAhir daPat Adminduk)** (Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA));
 - 2) **Inovasi MANDA 3in1 (MAti Nanti Dapat Adminduk)** (Akta Kematian, Kartu Keluarga, KTP Perubahan Status);
 - 3) **Inovasi KANDA 3in1 (KAwin Nanti Dapat Adminduk)** (Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, KTP-EI (perubahan status);
 - 4) **Inovasi PANDA 3in1 (PermAndian Nanti Dapat Adminduk)** (Kartu Keluarga, KIA);
 - 5) **Inovasi CANDA 3in1 (CerAi Nanti Dapat Adminduk)** (Kartu Keluarga, Akta Perceraian/Buku Cerai, KTP-EI);
 - 6) **Inovasi KAIDA 3in1 (KAwin Isbak Dapat Adminduk)** (Kartu Keluarga, Buku Nikah, KTP-EI).
- 7) Capaian Inovasi dan Dampaknya:

Inovasi GARUGIWA IN-LINE yang pelaksanaannya dilakukan mulai Tahun 2020, dianggap cukup efektif karena langsung menjawab permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat dan memberikan kemudahan pada masyarakat dalam mengakses penerbitan dokumen administrasi kependudukan. Selama pelaksanaan inovasi ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende sudah menerbitkan ribuan dokumen Administrasi Kependudukan melalui Layanan Terintegrasi, Layanan Online dan Gerai Layanan di Desa melalui Petugas Registrasi Desa. Dinas juga berhasil mencapai dan bahkan melampaui target indicator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI, berikut data capaian target indicator Tahun 2020 s/d 2022 sebagai berikut:

1. Capaian KTP-EI untuk tahun 2022 sebesar 99,30%;

2. Capaian akta kelahiran anak umur 0 s/d 17 tahun untuk tahun 2022 sebesar 98,50%;
3. Capaian Kartu Identitas Anak (KIA) untuk tahun 2022 sebesar 68,58%;
4. Capaian akta kematian untuk tahun 2022 sebesar 100%;
5. Capaian akta perkawinan untuk tahun 2022 sebesar 100%;
6. Capaian akta perceraian untuk tahun 2022 sebesar 100%.

Tidak bisa dipungkiri hasil dari inovasi ini membuat masyarakat dapat menerima manfaat secara langsung, hal ini dapat dilihat pada kondisi sebelum dan sesudah inovasi diimplementasikan. Kondisi sebelum dan sesudah ada inovasi:

1. Sebelum ada inovasi tempat pelayanan Terpusat di dinas setelah ada inovasi tersedia di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan layanan online;
2. Sebelum ada inovasi waktu pelayanan hanya terjadi pada Hari dan Jam Kerja Reguler setelah ada inovasi terlayani di Hari Sabtu-Minggu dan layanan online 24 jam;
3. Sebelum ada inovasi penyelesaian dokumen Lama, berhari-hari setelah ada inovasi penyelesaian document Mudah, Cepat dan Langsung Jadi;
4. Sebelum ada inovasi Jarak tempat layanan Jauh dan terpusat di dinas setelah ada inovasi tempat layanan menjadi Dekat tersedia di desa dan jemput bola;
5. Sebelum ada inovasi Biayanya mahal ada biaya transportasi setelah ada inovasi maka Tidak perlu biaya;
6. Sebelum ada inovasi Calo banyak berkeliaran setelah ada inovasi sudah tidak ada calo lagi;
7. Sebelum ada inovasi kegiatan sosialisasi jarang terjadi setelah ada inovasi sosialisasi sering terjadi pada saat jemput bola;
8. Sebelum ada inovasi tingkat Kepercayaan dan kesadaran Masyarakat Rendah setelah ada inovasi tingkat kepercayaan masyarakat Tinggi;
9. Sebelum ada inovasi capaian KTP-el, Kartu Kelurga, Akta Kelahiran, KIA,Akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian Rendah setelah ada inovasi capaian meningkat bahkan melampaui target national.

2. Judul Inovasi : Moro Si Kepo (Mobil Operasional Siap Keliling Jemput Bola)

1) Dasar Hukum:

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tentang Penetapan Inovasi Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

2) Ketersediaan Sumber Daya:

Keberhasilan suatu inovasi tentu saja harus didukung oleh dukungan financial maupun sumber daya manusia yang bagus. Karena inovasi ini lahir dari komitmen dan semangat yang sama maka Berbagai sumber daya diantaranya:

a) Sumber daya Manusia yang terlibat dalam inovasi ini:

1. Operator dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende yang akan ditugaskan secara bergantian sebanyak: 22 orang;
2. Camat, Lurah, Kepala Desa, Petugas Registrasi dan Kepala Sekolah;

b) Sumber daya Keuangan

Inovasi MORO SI KEPO mendapat dukungan dari DPRD Kabupaten Ende dengan cara mengadakan satu unit mobil bus yang digunakan untuk pelayanan keliling jemput bola, biaya yang digunakan dari alokasi APBD TA 2020 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende sebesar Rp. 700.000.000,- ditambah dengan biaya operasional dari bidang pendaftaran dan bidang pencatatan sipil.

c) Sumber daya material dan peralatan

Operasional yang digunakan dalam inovasi ini adalah: satu unit mobil bus, komputer, alat tulis kantor, formulir persyaratan, leafet, baner, baliho, kalender, buku pencatatan dokumen administrasi kependudukan, dan fasilitas internet.

3) Latar belakang Inovasi :

Mendapatkan pelayanan pengurusan dokumen kependudukan merupakan hak setiap warga negara karena untuk menjamin identitas dan legalitas kependudukannya. Namun kenyataannya masih banyak penduduk yang belum bisa mendapatkan dokumen kependudukan karena terkendala waktu dan kerja. Mereka tidak bisa mengurus dokumen kependudukan karena harus bekerja mencari nafkah bagi keluarganya. Jarak yang jauh ke tempat pelayanan bagi masyarakat miskin juga menjadi hambatan karena harus mengeluarkan biaya untuk transportasi, belum lagi waktu penyelesaian yang lama membuat warga enggan untuk mengurus dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Kartu Identitas Anak. Untuk mengatasi permasalahan ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende berusaha melakukan sebuah terobosan inovasi untuk memberikan pelayanan pembuatan

dokumen kependudukan secara mudah, cepat dan gratis. Sebelum adanya inovasi pelayanan Administrasi Kependudukan warga harus datang ke tempat pelayanan yaitu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Ende, pelayanan di tempat tersebut sering kali terkendala dengan banyaknya antrian sehingga menghabiskan waktu dan juga jarak yang jauh sehingga warga harus mengeluarkan biaya ekstra untuk transportasi ke tempat pelayanan. Masyarakat miskin tidak dapat mengurus dokumen kependudukan karena harus meninggalkan pekerjaan pada hari dan jam kerja reguler. Mereka terpengaruh dalam hal keterbatasan waktu dalam mengurus kepemilikan dokumen kependudukan karena harus bekerja bertani dan berternak 6 hari dalam seminggu dan ketika hari Minggu pelayanan reguler di dinas libur. Bagi masyarakat miskin tempat pelayanan yang jauh juga menimbulkan persoalan karena memerlukan ongkos transportasi naik angkutan umum.

Dari latar belakang permasalahan mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende melakukan suatu terobosan dengan Pelayanan Jemput Bola menggunakan Mobil Keliling Pelayanan Administrasi Kependudukan, dengan nama Inovasi MORO SI KEPO (Mobil OpeRasiOnal Slap Keliling jEmPut bOla), dimana Dinas melakukan pelayanan tidak hanya pada hari dan jam kerja reguler tetapi juga pada sore hingga malam hari bahkan pada hari libur (Sabtu dan Minggu), hal ini dimaksudkan agar warga yang kesulitan mengurus pada hari kerja tetap terlayani dan mendapatkan haknya dalam memiliki dokumen kependudukan. Pelayanan ini mendekatkan pelayanan kepada warga dengan melakukan pelayanan di Kelurahan, Desa, dan tempat keramaian pada momen acara-acara, sehingga warga tidak perlu jauh – jauh datang ke Dinas. Inovasi ini terbilang unik karena pelayanan menggunakan mobil bus khusus dilengkapi dengan perangkat teknologi informasi.

4) Tujuan Inovasi :

1. Untuk mengatasi masalah utama yaitu keterbatasan akses dan transportasi yang dialami warga karena jaraknya jauh
2. Sebagai sarana untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, agar dapat mempermudah masyarakat dalam kepemilikan dokumen administrasi kependudukan, diantaranya Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Akta pencatatan Sipil, Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA) maupun dokumen kependudukan lainnya.

5) Manfaat Yang diperoleh :

Inovasi ini terbilang unik karena pelayanan menggunakan mobil bus khusus dilengkapi dengan perangkat teknologi informasi dan kabupaten Ende adalah kabupaten pertama di Provinsi NTT yang memiliki mobil bus pelayanan keliling jemput bola. Warga yang tidak dapat mengurus dokumen kependudukan pada hari dan jam kerja reguler tetap dapat terlayani dengan pelayanan mobil keliling pada sore hingga malam hari dan juga pada hari libur (Sabtu dan Minggu). Jarak yang jauh ke tempat pelayanan juga bisa diatasi karena pelayanan MORO SI KEPO akan mendatangi warga di wilayah kelurahan, desa dan tempat keramaian sesuai dengan jadwal yang ditetapkan tanpa dipungut biaya alias gratis.

Manfaat dari inovasi ini adalah:

1. Terjalinnya komunikasi dan kerjasama dengan para pemangku kepentingan/stake holders untuk memecahkan masalah dalam kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.
2. Inovasi yang dilakukan efektif serta dapat membawa hasil yang nyata dan terlihat seperti meningkatnya jumlah kepemilikan dokumen adminduk bagi masyarakat serta memberikan solusi dalam penyelesaian permasalahan bagi masyarakat yang belum sadar akan pentingnya dokumen kependudukan.
3. Inovasi pelayanan jemput bola bermanfaat bagi masyarakat maupun organisasi dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan dan perhatian publik.

Memperoleh design inovasi yang akan dilaksanakan yang dapat menjawab dan menyelesaikan permasalahan utama yang dihadapi dengan didukung penggunaan Teknologi Informasi.

6) Pelaksanaan Inovasi

Inovasi GARUGIWA IN-LINE awalnya diimplementasikan pada tahun 2021. Untuk melaksanakan inovasi ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende telah menyusun tahapan-tahapan dalam rencana aksi yang akan dilaksanakan.

1. Pada tahap pertama adalah Perencanaan Kegiatan, dimana dalam tahap ini terdapat beberapa kegiatan yaitu : Penyusunan Tim Inovasi, Koordinasi dan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah yang lain dan juga dengan stakeholders atau para pemangku kepentingan, Penyiapan Sumber Daya Manusia dengan bimbingan teknis petugas dan

juga operator dalam menggunakan perangkat. Tidak kalah pentingnya dalam tahapan ini adalah Penyiapan sarana dan prasarana. Dinas telah memiliki satu unit Mobil Bus yang dilengkapi dengan perangkat teknologi untuk memproses pengurusan dokumen administrasi kependudukan.

2. Pada Tahap kedua dilakukan uji coba pelayanan di kantor Bupati Ende untuk para pegawai negeri pada acara apel kesadaran. Petugas pendaftaran menerima berkas dari pemohon. Para Kabid bertugas sebagai koordinator dan mengawasi jalannya pelayanan. Alur jalannya berkas dokumen dari petugas pendaftaran ke operator dilanjutkan verifikasi sampai dengan dokumen diserahkan ke pemohon.Capaian Inovasi dan Dampaknya:

Setelah melalui beberapa kali ujicoba dan penyempurnaan Tahap selanjutnya adalah melakukan pelayanan ke kecamatan, kelurahan, desa, kantor, sekolah dan tempat keramaian. Jenis pelayanan dokumen yang dilaksanakan oleh inovasi MORO SI KEPO adalah seluruh dokumen administrasi kependudukan yang dilayani langsung jadi.

7) Capaian Inovasi dan Dampaknya:

Dengan strategi Jemput Bola Inovasi MORO SI KEPO yang pelaksanaannya dilakukan mulai Tahun 2021, dianggap cukup efektif karena langsung menjawab permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat dan memberikan kemudahan pada masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan. Selama pelaksanaan inovasi ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende sudah menerbitkan ribuan dokumen Administrasi Kependudukan melalui pelayanan Jemput Bola.

Dinas juga berhasil mencapai dan bahkan melampaui target indicator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI, berikut data capaian target indicator Tahun 2020 s/d 2022:

1. Capaian KTP-EI untuk tahun 2022 sebesar 99,30%;
2. Capaian akta kelahiran anak umur 0 s/d 17 tahun untuk tahun 2022 sebesar 98,50%;
3. Capaian Kartu Identitas Anak (KIA) untuk tahun 2022 sebesar 68,58%;
4. Capaian akta kematian untuk tahun 2022 sebesar 100%;
5. Capaian akta perkawinan untuk tahun 2022 sebesar 100%;
6. Capaian akta perceraian untuk tahun 2022 sebesar 100%.

Tidak bisa dipungkiri hasil dari inovasi ini membuat masyarakat dapat

menerima manfaat secara langsung, hal ini dapat dilihat pada kondisi sebelum dan sesudah inovasi diimplementasikan.

Kondisi sebelum dan sesudah ada inovasi:

1. Sebelum ada inovasi tempat pelayanan Terpusat di dinas setelah ada inovasi tersedia di Kecamatan, Kelurahan, Desa;
2. Sebelum ada inovasi waktu pelayanan hanya terjadi pada Hari dan Jam Kerja Reguler setelah ada inovasi terlayani di Hari Sabtu–Minggu dan Hari libur;
3. Sebelum ada inovasi penyelesaian dokumen Lama, berhari-hari setelah ada inovasi penyelesaian document Mudah, Cepat dan Langsung Jadi;
4. Sebelum ada inovasi Jarak tempat layanan Jauh dan terpusat di dinas setelah ada inovasi tempat layanan menjadi Dekat tersedia di desa dan ada layanan jemput bola;
5. Sebelum ada inovasi Biayanya mahal ada biaya transpotasi setelah ada inovasi maka Tidak perlu biaya;
6. Sebelum ada inovasi Calo banyak berkeliaran setelah ada inovasi sudah tidak ada calo lagi;
7. Sebelum ada inovasi kegiatan sosialisasi jarang terjadi setelah ada inovasi sosialisasi sering terjadi pada saat jemput bola;
8. Sebelum ada inovasi tingkat Kepercayaan dan kesadaran Masyarakat Rendah setelah ada inovasi tingkat kepercayaan masyarakat Tinggi;
9. Sebelum ada inovasi capaian KTP-el, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, KIA,Akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian Rendah setelah ada inovasi capaiannya meningkat bahkan melampaui target nasional.

2. Dinas Pariwisata

1. Judul Inovasi : Sistem Informasi Pariwisata Daerah

1) Dasar Hukum:

Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pariwisata Daerah (SISPARDA) dan Website Dinas Pariwisata Kabupaten Ende Tahun 2022

2) Ketersediaan Sumber Daya

1-10 Orang Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website Dinas Pariwisata

3) Latar belakang Inovasi

Sistem Informasi Pariwisata Daerah (SISPARDA) adalah sebuah sistem pengumpulan, pengelolaan dan penyampaian informasi pariwisata yang

diperuntukkan bagi wisatawan baik domestik maupun asing serta juga informasi dimaksud dapat dikonsumsi masyarakat pada umumnya. Sistem informasi ini digunakan / dikelola dengan cara online maupun offline. Adapun skema online adalah dengan menggunakan:a. Website,b. Aplikasi Playstore,c. Google Maps,d. Facebook,e Instagram,f. Twitter, Sedangkan skema offline adalah dengan menggunakan :a. Kantor pelayanan informasi (Tourist Information Center / TIC Ende) yang beralamat di Jl.Soekarno Ende, b. Pembuatan brosur, leaflet dan catalogue, c. Newsletter dua bulanan, d. Penjualan souvenir khas Ende dan Flores di Kantor Tourist Information Center / TIC Ende.

Semua pekerjaan diatas dilakukan oleh sebuah team khusus yang bertanggungjawab langsung terhadap Koordinator SISPARDA yaitu Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Ende serta kepada Penasihat SISPARDA yaitu Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ende. Sedangkan Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi Kabupaten Ende berkedudukan sebagai Ketua Team SISPARDA. Sebagai Penanggung jawab SISPARDA, dipercayakan kepada Kepala Seksi Pelayanan Informasi Dinas Pariwisata Kabupaten Ende. Adapun penyunting informasi dipercayakan kepada Kepala Seksi Promosi Dinas Pariwisata Kabupaten Ende. Petugas admin dipercayakan kepada dua (2) orang tenaga lepas yang di ikat dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ende. Begitupun dengan posisi developer dan fotografer, masing-masing dipercayakan kepada dua (2) orang tenaga lepas yang juga diikat dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ende.

4) Tujuan Inovasi

1. Menyediakan informasi pariwisata bagi wisatawan dan masyarakat umum
2. Ikut meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Ende
3. Ikut meningkatkan jumlah lama lama tinggal wisatawan di Kabupaten Ende
4. Menyediakan oleh-oleh / souvenir khas Ende dan Flores

5) Manfaat Yang diperoleh

1. Semua informasi pariwisata dikelola dengan baik dan profesional
2. Menjadi salah satu amenitas penunjang destinasi wisata Kabupaten Ende
3. Tersedianya informasi pariwisata yang dibutuhkan oleh wisatawan dan masyarakat
4. Tersedianya oleh - oleh / souvenir khas Ende dan Flores bagi wisatawan yang berkunjung

6) Pelaksanaan Inovasi

Teknis pelaksanaan pekerjaan :

a. Online :

1. Website : Website akan dioperasikan secara rutin oleh developer, admin dan fotografer
2. Aplikasi Playstore : update informasi pada aplikasi playstore akan ditangani oleh developer, admin dan fotografer
3. Google Maps : update dan informasi pada google maps akan dilakukan oleh admin, developer dan fotografer
4. Facebook , Instagram dan Twitter : updaet dan informasi akan juga dilakukan oleh admin, developer dan fotografer

b. Offline

1. Kantor Tourist Information Center / TIC Ende : beroperasi setiap hari dengan jam operasional mulai jam 09.00 Wita - 15.00 Wita dan dikelola oleh team SISPARD
2. Brosur, Leaflet dan Catalogue : akan dikelola oleh admin, developer dan fotografer
3. Newsletter : akan dikelola oleh admin, developer dan fotografer
4. Souvenir : pengelolaan penjualan souvenir dan oleh-oleh khas Ende dan Flores dilakukan oleh Tema SISPARD dan bekerjasama dengan Bidang Industri Pariwisata serta UMKM dan EKRAF

7. Capaian Inovasi dan Dampaknya

Hasil :

- a. Terlaksananya Website Pariwisata Kabupaten Ende : disparkabende
- b. Terlaksananya Aplikasi Playstore Kabupaten Ende : Jojo Ende
- c. Terlaksananya Google Maps TIC Ende
- d. Terlaksananya Akun Media sosial : Facebook (DisparKabEnde), Instagram (disparende), Twitter (@DisparKabEnde)
- e. Terlaksananya Newsletter TIC Ende
- f. Terlaksananya pelayanan informasi wisata di TIC Ende
- g. Terlaksananya penyediaan souvenir / oleh - oleh khas Ende dan Flores di TIC Ende

3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. Judul Inovasi : Diorama Spensa Ende Bergerak

1. Dasar Hukum:

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2. Ketersediaan Sumber Daya

11-30 Orang Tim Fasilitasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SMP Negeri 1 Tahun Ajaran 2022/2023

3. Latar belakang Inovasi

Dasar hukum inovasi yang diperlukan untuk Kurikulum merdeka P5, Project penguatan profile pelajar Pancasila :

a. Memenuhi 6 dimensi dasar pembentukan karakter pelajar Pancasila yaitu :

1. Beriman & bertaqwa kepada Tuhan YME
2. Berkebinekaan global
3. Bergotong royong
4. Berpikir kritis
5. Kreatif
6. Mandiri

Selain 6 dimensi dasar pembentukan pelajar Pancasila juga program kurikulum merdeka P5 harus terintegrasi dengan industry dan ekosistem UMKM daerah sekitar sehingga terjadi link and match antara kurikulum dengan kebutuhan dan strategis perusahaan ke depan.

b. Permasalahan Makro di dunia pendidikan Indonesia adalah Bahwa Pendidikan Indonesia belum bisa link & match dengan dunia kerja dan masih rendahnya kompetensi siswa maupun guru di Indonesia. Sedangkan permasalahan mikro nya adalah, satuan penyelenggaraan pendidikan belum mampu menyediakan guru yang memiliki kompetensi untuk mencetak generasi unggul serta kualitas lulusan siswa yg tidak siap kerja atau berkarya.

c. Isu – isu strategis yang sudah jelas menjadi target Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045, merupakan kewajiban satuan penyelenggara pendidikan Indonesia untuk segera menjalankan sistem pendidikan yang revolusioner dalam mencetak SDM unggul dan mampu tampil di panggung dunia serta mampu menciptakan siswa siswa yang mampu menciptakan karya karya nyata yang bermanfaat bagi masyarakat dan dunia.

d. Diperlukan Creativology Kurikulum merdeka untuk menciptakan SDM yang memiliki

- 10 kompetensi global. Yaitu kemampuan sebagai "Visioner, analisator, konseptor, komunikator, innovator, executor, integrator, motivator, inspirator dan

investor.

e. Keunggulan dan kebaruan dari Creativology Kurikulum merdeka yang menggunakan “simulasi rancang bangun” sebagai media proses pembelajaran adalah menghasilkan siswa yang memiliki profile unggul berkelas dunia yaitu seperti ini :

1. Multi kompetensi
 2. Multitasking
 3. Berpikir holistic, komprehensif
 4. Memiliki kecerdasan IQ, EQ dan SQ
 5. Memiliki keterampilan teknis
4. Tujuan Inovasi

Tujuan dari inovasi produk miniature diorama yang dihasilkan oleh siswa-siswi SMPN 1 Ende adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan siswa-siswi yang memiliki kompetensi inovasi dan berkarya nyata dengan standar industri.
2. Membentuk karakter pengusaha kreatif pada siswa
3. Menjadi sekolah yang mampu menjadi motor penggerak ekosistem UMKM industry kreatif dan entertainment di Kabupaten Ende dan daerah wisata di sekitarnya.
4. Mampu menciptakan karya miniature diorama untuk industry film animasi.
5. SMPN 1 Ende mampu menjadi Laboratorium kompetensi dan inovasi.
6. SMPN 1 Ende mampu membangun kemitraan strategis dengan para kreator yang telah berkarya tingkat nasional.

5. Manfaat Yang diperoleh

1. Siswa-siswi SMPN 1 Ende akan menjadi motor penggerak desa kreatif di Kabupaten Ende, NTT dan seluruh Indonesia.
2. Siswa SMPN 1 Ende akan menjadi role model pemuda kreatif yang akan menjalankan program hilirisasi di desa-desa di seluruh Indonesia.
3. Menciptakan lapangan kerja dan membantu mempercepat mengentaskan kemiskinan dan ketertinggalan di NTT.

6. Pelaksanaan Inovasi

Tahapan Inovasi :

1. Vision

Proses inovasi produk miniature diorama harus dimulai dari visi dari ide bisnis besar berkelas dunia spt : "miniature wonderland yg ada di jerman, Italy dan Toronto), studio set miniature film Hollywood/dreamworks, madurodam di Belanda

2. Analysis

Proses analisa & riset pengembangan diperlukan untuk ambil peran dunia pendidikan sebagai pencetak tenaga kerja ahli yang akan diintegrasikan dengan materi pelatihan kepada siswa sehingga kompetensi siswa memenuhi standar industry kreatif kelas dunia.

3. Konsep

Tahap berikutnya adalah membuat konsep program kegiatan yang bertahap dimulai dari program kecil sampai besar seperti tahap awal, pelatihan membuat miniature, selanjutnya pelatihan membuat miniature diorama untuk film animasi, pelatihan membuat robotic dll

4. Komunikasi

Setelah program kegiatan pelatihan dilaksanakan oleh siswa dan menghasilkan karya nyata, buatlah pameran, promosikan lewat youtube, tiktok dll serta ikut berkolaborasi pameran dengan program bupati, gubernur dll

4. Dinas Kesehatan (Puskesmas Rukun Lima)

1. Judul Inovasi : PETANI RULI

1) Dasar Hukum:

Surat Keputusan Kepala Puskesmas Rukun Lima tentang Penggunaan Tools Screening Anemia Ringan-sedang pada Pasien ANC K1

2) Ketersediaan Sumber Daya

1-10 Orang Tim Inovasi Tools Screening Anemia Ringan-Sedang (7,0%-9,9%)
Pada Pasien Anc k1 (murni dan Akses) sebagai Pencegahan Perdarahan paska Persalinan di Puskesmas rukun lima Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende

3) Latar belakang Inovasi

Pemicu utama kematian ibu dikarenakan perdarahan pada postpartum. Perdarahan postpartum dapat dipengaruhi oleh adanya faktor risiko pada periode antenatal salah satunya adalah anemia. Ibu hamil yang mengidap anemia mempunyai potensi untuk mengalami perdarahan postpartum. Dengan menerapkan pengisian Tools Screening Anemia Ringan-Sedang

melalui digital informasi pada Kunjungan Ibu Hamil K1 dapat mencegah Perdarahan paska persalinan. Oleh karena itu, penulis akan membahas bagaimana penerapan digital informasi melalui Tools Screening anemia ringan – sedang pada kunjungan ibu hamil K1 sebagai pencegahan Perdarahan paska persalinan di Puskesmas Rukun Lima (PETANI RULI) Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende pada Tahun 2023.

Peningkatan kunjungan ibu hamil di poli KIA di wilayah kerja Puskesmas Rukun Lima dan peningkatan kasus perdarahan postpartum maka dibuatlah suatu inovasi Tools screening anemia ringan – sedang pada kunjungan ibu hamil K1 sebagai pencegahan Perdarahan postpartum. Sebelum tools screening anemia ringan – sedang terbentuk, pemantauan ibu hamil dengan anemia hanya melalui status rekam medis pasien dan register harian. Penggunaan tools screening anemia ringan – sedang sebagai cara pemantauan untuk mencegah terjadinya perdarahan postpartum. Tools Screening memuat informasi tentang data pasien dan hasil pemeriksaan HB awal serta ulangan. Tools screening wajib diisi oleh petugas agar hasil dapat terus dipantau dan ketepatan dalam pemberian intervensi tablet tambah darah. Tools screening juga dibuat dalam bentuk google form serta dalam bentuk kartu Petani Ruli yang memuat Biodata ibu hamil, Informasi seputar Anemia dan Jadwal kontrol minum tablet tambah darah. Setiap bulan tim akan mengevaluasi jumlah ibu hamil yang menderita anemia ringan – sedang untuk dilakukan intervensi tablet tambah darah.

Kesimpulan Pengisian Tools Screening Anemia Ringan-sedang membantu petugas dalam hal pengawasan minum tablet tambah darah sehingga meningkatkan HB dalam darah guna mencegah perdarahan paska persalinan yang disebabkan oleh anemia. Dan penulis menyarankan agar pengisian digital informasi Tools Screening Anemia Ringan- Sedang konsisten dilakukan.

4) Tujuan Inovasi

1. Tujuan Umum :

Menerapkan pengisian Tools Screening Anemia Ringan-Sedang melalui digital informasi pada Kunjungan Ibu Hamil K1 sebagai pencegahan Perdarahan paska persalinan di Puskesmas Rukun Lima (PETANI RULI) pada Tahun 2023

2. Tujuan Khusus :

- 1) mengetahui capaian pengisian toolsa screening anemia ringan-sedang

- 3) Keterbatasan sumber daya aparatur; dan
- 4) Kurangnya sarana/ prasarana pendukung.

Kendala di atas menyebabkan terputusnya informasi tentang ATHG yang timbul di dalam kehidupan sosial masyarakat sehingga mengakibatkan gangguan kondisi kamtibmas serta kehilangan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktifitas. Untuk itu, PIDA merupakan solusi yang tepat sebagai upaya menjaring akses informasi guna menekan potensi ATHG yang ada. PIDA dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk di tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa/ kelurahan yang melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat. Adapun indikator PIDA yang hendak dicapai yakni terjaringnya seluruh informasi ATHG yang ada di masyarakat; analisis terhadap informasi terkait potensi ATHG; rekomendasi dan pelaporan secara berjenjang kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan. Melalui PIDA, masyarakat dapat terlibat aktif dan dengan mudah melaporkan setiap potensi ATHG yang terjadi di sekitarnya; memudahkan pengelolaan informasi ATHG yang ada dan pemberian rekomendasi yang tepat kepada pimpinan; serta pimpinan dapat dengan cepat dan tepat mengambil kebijakan/ keputusan dalam rangka penyelesaian konflik

5. Tujuan Inovasi

- 1) Mempercepat proses penjaringan informasi terkait potensi ATHG yang terjadi di masyarakat;
- 2) Mempermudah pendataan, analisa dan predksi situasi dan kondisi terkait setiap potensi ATHG;
- 3) Memaksimalkan pengajuan rekomendasi kepada pimpinan terkait penanganan (potensi) konflik sosial yang terjadi di masyarakat secara cepat, tepat dan akurat.

6. Manfaat Yang diperoleh

- 1) BUPATI/ WAKIL BUPATI ENDE (PIMPINAN/ PENGGUNA)
 1. Memperoleh seluruh data terkait ATHG yang terjadi di masyarakat secara cepat dan akurat;
 2. Mendapatkan masukan/ rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
 3. Pengambilan kebijakan/ keputusan secara cepat dan tepat dalam rangka penanganan konflik yang terjadi di masyarakat.
- 2) BADAN KESBANGPOLDA KABUPATEN ENDE

1. Memperoleh seluruh informasi terkait ATHG yang terjadi di masyarakat secara cepat dan akurat;
2. Analisa terhadap informasi potensi ATHG yang terjadi di masyarakat semakin mudah, cepat dan akurat;
3. Pemberian data dan rekomendasi terkait ATHG kepada pimpinan dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan akurat.

3) MASYARAKAT

1. Mudah dalam melaporkan setiap situasi dan kondisi (potensi ATHG) yang terjadi di wilayah (melalui aplikasi PIDA yang ada di Playstore);
2. Penanganan konflik sosial yang terjadi di masyarakat dapat dilakukan dengan cepat dan menyeluruh.

7. Pelaksanaan Inovasi

PIDA dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk di tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa/ kelurahan yang melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat. Adapun indikator PIDA yang hendak dicapai yakni terjaringnya seluruh informasi ATHG yang ada di masyarakat; analisis terhadap informasi terkait potensi ATHG; rekomendasi dan pelaporan secara berjenjang kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan. Melalui PIDA, masyarakat dapat terlibat aktif dan dengan mudah melaporkan setiap potensi ATHG yang terjadi di sekitarnya; memudahkan pengelolaan informasi ATHG yang ada dan pemberian rekomendasi yang tepat kepada pimpinan; serta pimpinan dapat dengan cepat dan tepat mengambil kebijakan/ keputusan dalam rangka penyelesaian konflik

8. Capaian Inovasi dan Dampaknya

- 1) Data/ Informasi terkini terkait potensi ATHG;
- 2) Kajian dan rekomendasi terkait penanganan konflik terhadap ATHG;
- 3) Peringatan dini terhadap potensi ATHG.

6. Kelurahan Rewarangga (Kec. Ende Timur) ada 3 Inovasi yaitu sebagai berikut :

1. Judul Inovasi: Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok tenun Ikat

2. Dasar Hukum: -

3. Ketersediaan Sumber Daya

11-30 Orang Kelompok Tenun Ikat

4. Latar belakang Inovasi

Kelurahan Rewarangga memiliki potensi sumber daya manusia, khususnya kaum hawa yang mempunyai ketrampilan menenun tradisional yang sudah

diwariskan secara turun temurun oleh para leluhurnya. Pada tahun 2016 terdapat 6 kelompok tenun ikat yang menjalankan aktifitasnya sebagai salah satu usaha menambah penghasilan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari. selain kelompok terdapat juga usaha tenun secara pribadi /perorangan. Ruka/Ragi (sarung laki-laki) dan Rawo/Lawo (sarung Perempuan) merupakan pakaian tradisional yang secara umum dikenakan oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur dalam berbagai bentuk kegiatan, baik acara keagamaan, acara adat, sosial kemasyarakatan maupun dikenakan dalam kehidupan sehari- hari. Dengan melihat potensi sumber daya yang ada, salah satu Yayasan Insan Bumi Mandiri Bandung melalui program Pemberdayaan Tenun ikat pada tahun 2021 memilih Kelurahan Rewarangga sebagai salah satu kelurahan pilihan dalam program ini, penenun-penenun NTT mendapatkan beragam pembinaan, mulai dari pengembangan produk hingga pemasaran. Merangkum banyak cerita, Tenun ikat hadir dengan misi meluaskan keindahan lokal tenun NTT dengan memberdayakan setiap penenun lokal di sana. Tidak sendiri, projek kebaikan ini terlaksana karena bekerjasama dengan partner kebaikan lainnya. Bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), Insan Burni Mandiri mendirikan sentra Tenun ikat pertama di Alor, NTT. 14 orang anggota kelompok tenun di Alor menyambut gembira setiap kegiatan di sentra pertama ini. Sumba menjadi destinasi program pemberdayaan Tenun ikat selanjutnya. Pada tahun 2020 pun sentra kedua yang berlokasi di Sumba diresmikan. Bersama PT SMI, 10 orang penenun di Sentra Tenun.in Sumba mendapatkan pembinaan pengembangan produk mereka. 30 anggota kelompok tenun di Ende menjadi penerima manfaat program pemberdayaan Tenun ikat selanjutnya. Dalam program ini terdapat 2 unit rumah tenun yang dibangun sebagai rumah produksi dan juga sebagai sentra penjualan tenun yakni untuk Kelompok Tenun Aenarhi dan Kelompok Tenun Beringin Indah di RT 10 Mokekeso Kelurahan Rewarangga.

Berpijak dari potensi kelompok Tenun dan juga bentuk perhatian pihak Yayasan Insan Bumi Mandiri Bandung terhadap keberlangsungan usaha kelompok tenun kelurahan Rewarangga melalui program pemberdayaan masyarakat selama 1 tahun (2021 s/d 2022), menjadi kewajiban pemerintah setempat untuk turut andil dalam pendampingan dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dimaksud agar terus berkembang dan berkesinambungan sebagai upaya pelestarian budaya dan

peningkatan ekonomi keluarga.

5. Tujuan Inovasi

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi dalam penguatan kelembagaan kelompok tenun ikat di Kelurahan Rewarangga

Manfaat Yang diperoleh

1. Mempermudah pendampingan bagi para pengrajin tenun ikat tradisional
2. Menjadi pusat sarana peningkatan kualitas SDM masyarakat.
3. Menciptakan pusat ekonomi baru
4. Mempermudah proses pemasaran dengan adanya kelompok ataupun sentra tenun.
5. Menjadi salah satu destinasi wisata edukasi.

6. Capaian Inovasi dan Dampaknya

Hasil dari inovasi ini selain adanya sentra penjualan tenun yang menjual Ruka, Rawo, Selendang (tenunan utuh) dengan adanya pendampingan pemberdayaan oleh yayasan Insan Bumi Mandiri Bandung. Hasil tenunan tersebut dibeli dan diolah kembali dengan berbagai kombinasi bahan sintetis lainnya (produk turunan) sehingga menghasilkan produk asesoris yang lebih menarik dan Variatif. sehingga semakin banyak produk olahan yang terjual jadi semakin banyak pula permintaan tenunan utuh yang akan dibeli.

Judul Inovasi :Membangun Literasi Melalui Taman Bacaan Masyarakat "Teras Baca Anmok"

1. Dasar Hukum:

Surat Keputusan Lurah Rewarangga tentang Pembentukan Taman Bacaan Masyarakat Teras Baca Anmok Kelurahan Rewarangga

2. Ketersediaan Sumber Daya

1-10 Orang

3. Latar belakang Inovasi

Keprihatian akan masih rendahnya minat baca, tulis dan hitung anak - anak RT 10 Mokekeso Kelurahan Rewarangga menjadi cikal bakal dibentuknya wadah bernama Teras Baca. Ibu Dominika Dhapa salah seorang dosen dari kampus swasta di kota Ende yang berdomisili di Mokekeso tergerak hati untuk mencoba menghimpun anak-anak di lingkungan tempat tinggalnya mengadakan kegiatan membaca menulis dan berhitung di teras rumahnya diwaktu sore hari selepas melaksanakan pekerjaan pokoknya. Dengan

pengetahuan yang dimiliki dan ketersediaan buku bacaan yang ada dimulailah kegiatan dimaksud, lambat laun jumlah anak-anak yang mengikuti kegiatan semakin bertambah baik inisiatif dari anak-anak sendiri maupun dorongan dari orang tua. Dengan makin bertambahnya anak-anak yang mau dan ingin belajar bersama di waktu sore hari, berpengaruh terhadap ketersediaan buku bacaan yang ada. Berbagai langkah diupayakan untuk memperoleh bantuan buku bacaan selain membuka donasi buku, pengajuan proposal ke para pihak juga berupaya melakukan pendekatan kepada pihak pemerintah setempat dalam hal ini Lurah Rewarangga. Tanggapan atas ide yang baik tentunya Lurah Rewarangga sangat mendukung dan mencoba membantu mensupport buku bacaan yang ada di Taman Bacaan Kelurahan Rewarangga dengan meminjamkannya ke Teras Baca Anmok dengan durasi waktu 2 minggu sekali melakukan penarikan dan tukar kembali buku bacaannya. Melihat semakin giatnya anak-anak Mokekeso dalam mengikuti kegiatan non formal ini, ibu Dominika bersama Lurah Rewarangga dan beberapa pegiat Literasi di kampung berisiatif membentuk struktur organisasi dan juga rencana kegiatan harian anak-anak agar lebih terarah maka terbentuklah wadah bernama TERAS BACA ANMOK yang secara resmi diperkuat dengan Surat Keputusan Lurah Rewarangga pada tahun 2022. Beberapa kegiatan rutin harian sudah dijalankan baik baca, tulis dan hitung sesuai dengan kelompok usia sekolah, teras baca juga menggali potensi anak-anak dengan melatih membuat dan membacakan puisi, melatih drama/teater, seni tari dan musik serta membuat kerajinan tangan dari limbah plastik. Adapun beberapa kegiatan diluar yang cukup membanggakan TERAS BACA ANMOK dan Kelurahan Rewarangga antara lain :

1. Pembacaan Puisi pada penerimaan Duta Baca Indonesia Bpk. Gol A. Gong yang melakukan SAFARI LITERASI 2022
2. Pengisi acara berupa teater cerita rakyat pada acara Sepekan Danau Kelimutu 2022
3. Lomba Bercerita Anak LPP RRI 2022 usia sekolah dasar se Kabupaten Ende dan meraih juara 1 dan 5
4. Pengisi acara Teater cerita rakyat pada Festival Paralayang 2023
5. Menyambut para tamu yang berkunjung di teras baca ANmok dengan atraksi tarian, puisi, teater cerita rakyat.
4. Tujuan Inovasi

1. agar anak memiliki budaya membaca dan menulis sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas.
 2. untuk menumbuhkan minat baca peserta didik serta meningkatkan keterampilan membaca.
5. Manfaat Yang diperoleh
1. Dapat memperkaya kosa-kata yang dimiliki
 2. Dapat memaksimalkan kerja otak
 3. Dapat memperluas wawasan dan informasi baru
 4. Dapat meningkatkan kemampuan interpersonal
 5. Dapat meningkatkan kemampuan dalam menangkap makna dari suatu informasi yang sedang dibaca
 6. Dapat meningkatkan kemampuan verbal
 7. Dapat melatih kemampuan berfikir kritis dan menganalisa
 8. Dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi anak - anak
 9. Dapat melatih dalam hal menulis dan merangkai kata-kata yang bermakna
6. Capaian Inovasi dan Dampaknya
1. Memberantas angka buta aksara di Nusa Tenggara timur secara khusus di Kelurahan Rewarangga
 2. Menjadi wadah dalam menggali minat dan bakat anak - anak
 3. Menyiapkan generasi yang unggul dan berdaya saing.
 4. Menciptakan anak - anak yang berprestasi dan berdaya saing tinggi

4. Judul Inovasi : **Menjaga Asa Kelestarian Musik Tradisional “Geko” dalam Wadah**

Sanggar

Seni Mokekeso

1. Dasar Hukum: -

2. Ketersediaan Sumber Daya: -

3. Latar belakang Inovasi

Hal yang melatarbelakangi terbentuknya sanggar seni Mokekeso adanya kebutuhan akan musik dan tarian sebagai pengiring / penerima tamu yang berkunjung ke wilayah kelurahan Rewarangga pada tahun 2021. Pemerintah Kelurahan Rewarangga berinovasi mendirikan Sanggar Seni Mokekeso sebagai wadah untuk mengarahkan remaja pada kegiatan-kegiatan yang positif. Inovasi Pemerintah Kelurahan Rewarangga ini mendapat sambutan antusias dari para pegiat maupun anak-anak yang memiliki bakat minat bidang seni sehingga dengan melihat potensi sumber daya manusia yang ada mampu untuk menciptakan wadah kesenian tradisional di Kelurahan

Rewarangga. Di Kabupaten Ende ada beberapa Seni musik tradisional seperti musik suling, musik Nggo wani , musik Nggeninggo dan musik Geko. Musik Nggeninggo dan musik Geko, sudah lama hilang dari keberadaannya di tengah kehidupan masyarakat.Musik geko di jaman dahulu orang memainkannya dikebun atau diladang sebagai alat Pengusir hama / hewan pemakan tanaman dikebun dengan suara yang dihasilkan dan pukulan musik geko tersebut. Alat musik geko tersebut terbuat dari potongan – potongan kayu khusus bernama kayu Wae yang dirangkai memakai tali dari serat kulit pohon secara vertikal berjumlah 6 atau 7 batang. Notasi yang dihasilkan tidak beraturan atau sekedar memukul untuk menghasilkan bunyi bunyian. Setelah diamati bahwa musik tradisional geko sangat unik tetapi perlahaan mulai ditinggalkan karena kemajuan teknologi sehingga tidak dapat dipungkiri ini bisa punah karena tidak ada yang memainkan, maka dengan melihat potensi yang ada menjadi kewajiban pemerintah untuk mencoba menggali dan menghidupkan kembali musik tradisional ini sebagai suatu asset berharga di Kabupaten Ende dalam hal kebudayaan Dalam rangka melestarikan musik tradisional geko maka dibentuklah sebuah wadah Sanggar Seni Mokokeso pada tanggal 1 Juli 2021 yang akan dijadikan sebagai tempat untuk belajar seni musik, seni suara dan tarian tradisional. Secara legalitas bahwa Sanggar Seni Mokekeso sudah memiliki Surat Keputusan Lurah Rewarangga dan menjadi kelompok dampingan yang sudah sering tampil di Kabupaten Ende dalam berbagai event kebudayaan dan pariwisata. dengan adanya sanggar seni Mokekeso.

4. Tujuan Inovasi

Untuk melestarikan musik tradisional yang sudah mulai hilang

Manfaat Yang diperoleh

1. Adanya upaya pelestarian asset berupa musik tradisional Ende Lio
2. Menjadi salah satu destinasi wisata budaya dan edukasi

5. Capaian Inovasi dan Dampaknya

Hasil dari inovasi ini selain bentuk pelestarian aset berupa alat musik tradisional, inovasi ini juga bermanfaat sebagai alat musik/ tarian

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025-2029. RKPD Kabupaten Ende Tahun 2025 memuat program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Ende sebagai jawaban atas semua permasalahan pembangunan daerah yang berkembang saat ini. Program dan kegiatan dalam RKPD ini ditetapkan dengan memperhatikan pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2026 memuat program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana urusan daerah yang meliputi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintah pilihan, serta urusan pendukung urusan pemerintah sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1. Rencana Kerja

Rencana kerja Pemerintah Kabupaten Ende yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Ende Tahun 2025 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dengan tetap memperhatikan urgensi dan kapasitas keuangan daerah, sehingga penjabarannya dibagi menjadi dua prioritas, yaitu:

5.1.1 Rencana Kerja Prioritas RPJMD untuk Tahun 2026

Pelaksanaan pembangunan tahun 2026 merupakan terjemahan tujuan dan sasaran dari RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 sesuai pentahapan dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya Kabupaten Ende Yang Maju, Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Berbasiskan Iman Dan Budaya Menuju Ende Lio Nage Sare Pawe”. Penentuan prioritas Pembangunan tidak terlepas dari

penyelesaian permasalahan Pembangunan dan isu strategis yang dirumuskan berdasarkan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Pada RKPD tahun 2026, permasalahan dan isu strategis berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2024. Hasil penyelarasan prioritas Pembangunan Kabupaten Ende tahun 2026 dengan nomenklatur program sesuai ketentuan tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 5.1 Penjabaran Program Prioritas Kabupaten Ende Tahun Pertama RPJMD

Kabupaten Ende Tahun 2025-2029

NO.	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
1.	ENDE CEMERLANG	1. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	23.375.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		2. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	950.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		3. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	ENDE SEHAT	1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	72.850.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN	4.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.400.000.000,00	DPPKB
3.	ENDE UNGGUL	1. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	75.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		2. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.500.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		3. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
		4. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA

		MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		
		5. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	500.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		6. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	150.000.000,00	DINAS SOSIAL
		7. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.500.000.000,00	DISNAKETRANS
4.	ENDE PRODUKTIF	1. PROGRAM PENATAAN DESA	150.000.000,00	DPMD
		2. PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	150.000.000,00	DPMD
		3. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	400.000.000,00	DPMD
		4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	75.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	ENDE TOLERAN	1. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	75.000.000,00	BADAN KESBANGPOLDA
		2. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	900.000.000,00	BADAN KESBANGPOLDA
6.	ENDE BERSIH	1. PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.250.000.000,00	BAPPEDA
		2. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.400.000.000,00	BAPPEDA
		3. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN	5.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

		RAKYAT		
		4. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		5. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		6. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		7. PROGRAM PENGELOLAAN KEUJANGAN DAERAH	277.000.000.000,00	BPKAD
		8. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.750.000.000,00	BPKAD
		9. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	10.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		10. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.000.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		11. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
7.	ENDE RESPONSIF	1. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	100.000.000,00	DISKOMINFO
		2. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	800.000.000,00	DISKOMINFO
		3. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.500.000.000,00	BAPENDA
		4. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.500.000.000,00	BKPSDM
		5. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.000.000.000,00	BKPSDM
		6. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.275.000.000,00	21 KECAMATAN
		7. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.650.000.000,00	21 KECAMATAN
		8. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.050.000.000,00	21 KECAMATAN
		9. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1.050.000.000,00	21 KECAMATAN

		UMUM		
		10. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.550.000.000,00	19 KECAMATAN
		11. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	750.000.000,00	DISDUKCAPIL
		12. PROGRAM PENCATATAN SIPIL	500.000.000,00	DISDUKCAPIL
		13. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	150.000.000,00	DISDUKCAPIL
		14. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	75.000.000,00	DISDUKCAPIL
8.	ENDE MELAYANI	1. PROGRAM PEMERDAYAAN SOSIAL	50.000.000,00	DINAS SOSIAL
		2. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	50.000.000,00	DINAS SOSIAL
		3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	750.000.000,00	DINAS SOSIAL
		4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	150.000.000,00	DINAS SOSIAL
		5. PROGRAM PENANGANAN BENCANA	300.000.000,00	DINAS SOSIAL
		6. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	750.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		7. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.250.000.000,00	BPBD
		8. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
9.	ENDE MEMBANGUN	1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	5.100.000.000,00	DINAS PUPR
		2. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	10.000.000.000,00	DINAS PUPR
		3. PROGRAM	1.000.000.000,00	DINAS PUPR

		PENGEMBANGAN PEMUKIMAN		
		4. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.500.000.000,00	DINAS PUPR
		5. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	47.000.000.000,00	DINAS PUPR
		6. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	250.000.000,00	DINAS PUPR
		7. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.000.000.000,00	DPRKPP
		8. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.000.000.000,00	DPRKPP
		9. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	100.000.000,00	DPRKPP
		10. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		11. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	650.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		12. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		13. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		14. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
10.	ENDE BERBUDAYA	1. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	950.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		2. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		3. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		4. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
11.	ENDE LESTARI	1. PROGRAM PENINGKATAN	750.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

		KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
		2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.250.000.000,00	BPBD
		3. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		4. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.375.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		5. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
12. ENDE KREATIF		1. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.650.000.000,00	DINAS PERTANIAN
		2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	15.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN
		3. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	350.000.000,00	DINAS PERTANIAN
		4. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	500.000.000,00	DINAS PERTANIAN
		5. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	150.000.000,00	DINAS PERTANIAN
		6. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	1.100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		7. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		8. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	600.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		9. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

5.1.2. Rencana Kerja mendukung Prioritas Nasional (Astacita) Tahun 2026

Dalam rangka menjamin sinergitas antara program pembangunan pemerintah pusat dan daerah, perlu dilaksanakan penyelarasan program dan kegiatan yang dilaksanakan di daerah dengan program prioritas nasional (Astacita) dan penyelarasan tersebut disepakati dalam Rakortekrenbang. Berikut penyelarasan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2026 mendukung Prioritas Nasional (Astacita):

Tabel 5.2 Rencana Kerja Prioritas Kabupaten Ende Tahun 2026 mendukung Asta Cita

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.0 1.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		DINAS PK
							1.01.02.2.0 2.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		DINAS PK
							1.01.02.2.0 2.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		DINAS PK
							1.01.02.2.0 3.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		DINAS PK
							1.01.02.2.0 4.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		DINAS PK
2	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.0 1.0022	Pengembangan Rumah Sakit		DINKES
							1.02.02.2.0 1.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		DINKES
	kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan						1.02.02.2.0 2.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		DINKES
							1.02.02.2.0 2.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		DINKES

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	generasi Z), dan penyandang disabilitas.						1.02.02.2.0 2.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		DINKES
					1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.0 2.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		DINKES
3	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1,03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.0 2.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan		DINAS PUPR
							1.03.02.2.0 2.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		DINAS PUPR
					1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.0 1.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		DINAS PUPR
							1.03.03.2.0 1.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		DINAS PUPR
	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru			Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01 .0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota		DINAS PUPR
							1.03.12.2.01 .0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota		DINAS PUPR

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
4	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1,04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.0 1.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		DPRKPP
							1.04.04.2.0 1.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru		DPRKPP
					1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.0 1.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		DPRKPP
							1.04.05.2.0 1.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		DPRKPP
5	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1,05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.0 2.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		BPBD
							1.05.03.2.0 4.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		BPBD

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	Memperkuat penyelesaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.0 1.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan		SAT. POL PP
								Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		SAT. POL PP
							1.05.02.2.0 2.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah		SAT. POL PP
					1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.0 1.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)		SAT. POL PP
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi	1,06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.0 3.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		DINSOS

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.				1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.02.2.0 3.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota		DINSOS
							1.06.05.2.0 2.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		DINSOS
							1.06.05.2.0 2.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		DINSOS
7	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.0 1.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		DISTRANSNAKER
	2.07.05				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.0 1.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		DISTRANSNAKER	
						2.07.05.2.0 2.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan		DISTRANSNAKER	

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						Pekerja			
8	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	2,08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAN GENDER DAN	2.08.02.2. 01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota		DP3A
	sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Perlindungan Anak		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2. 02.0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		DP3A
					2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2. 01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota		DP3A
							2.08.07.2. 02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota		DP3A
9	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	2,09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN	2.09.03.2. 01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		DKP
							2.09.03.2. 01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen		DKP

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
9	melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				MASYARAKAT	di Kabupaten/Kota				
10	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2,10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	2.10.06.2.0 1.0004	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		DKP
								Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota		
11	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong	2,11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU	2.11.03.2.01 .0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah,		DLH

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		HIDUP				KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Air, Udara, dan Laut		
							2.11.03.2.01 .0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan		DLH
					2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01. 0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan		DLH
							2.11.11.2.01. 0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah		DLH
dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.							2.11.11.2.01. 0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangannya		DLH
							2.11.11.2.01. 0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		DLH

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
12	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2,12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.0 2.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota		DISDUKCAPIL
							2.12.03.2.0 2.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil		
13	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2,13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Salng untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.2.0 1.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa		DPMD
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.0 1.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
14	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2,14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.0 3.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Tersusun Jaringan dan Jejalngnya		DPPKB
							2.14.03.2.0 4.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas		DPPKB
							2.14.04.2.0 1.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)		DPPKB
						KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.0 1.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)		DPPKB
15	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis	2,15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN	2.15.02.2.0 2.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		DISHUB

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.		PERHUBUNGAN	Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.0 3.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)		DISHUB
	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.				2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.1 3.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau		DISHUB
							2.15.03.2.1 3.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan		DISHUB
16	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2,16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.0 1.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik		DISKOMINFO
							2.16.02.2.0 1.0017	Pelayanan Informasi Publik		DISKOMINFO
							2.16.02.2.0 1.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik		DISKOMINFO
							2.16.02.2.0 1.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		DISKOMINFO

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.				2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.0 2.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi		DISKOMINFO
							2.16.03.2.0 2.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan		DISKOMINFO
							2.16.03.2.0 2.0036	Penyediaan Akses Internet		DISKOMINFO
							2.16.03.2.0 2.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas		DISKOMINFO
17	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.0 1.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi		DINKOP
	yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi		USAHA KECIL, DAN MENENGAH					Dalam Pengembangan Ekonomi		DINKOP
							2.17.06.2.0 1.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota		DINKOP
					2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN	2.17.07.2.0 1.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		DINKOP

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	melalui peran aktif koperasi,				USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.0 1.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan			DINKOP
18	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2,18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.0 1.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		DPMPTSP
							2.18.05.2.0 1.0005	Pengawasan Penanaman Modal		DPMPTSP
19	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	2,19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.0 1.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota		DISPORA

5.2. Pendanaan Daerah

5.2.1 Pendanaan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2026

Proyeksi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Ende pada Tahun 2026 sebesar Rp1.263.987.442.733,00 dengan Proyeksi Pendapatan Daerah sebesar Rp1.268.987.442.733,00. Sedangkan penerimaan pembiayaan Kabupaten Ende tahun 2026 belum dapat dihitung karena didominasi oleh SILPA, dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000 yaitu berupa penyertaan modal ke Bank NTT dan Perusahaan Daerah serta pihak lainnya. Alokasi Belanja Daerah digunakan untuk membiayai program, kegiatan, dan sub kegiatan masing-masing Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan Urusan Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan. Adapun rekapitulasi proyeksi pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut ini.

Tabel 5.3 Rekapitulasi Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2026

NO.	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	400.475.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	183.050.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	79.350.000.000,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	10.550.000.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	7.750.000.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Alam dan Daerah	3.750.000.000,00
7	Dinas Sosial	4.100.000.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.495.000.000,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	4.850.000.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	9.040.000.000,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.975.000.000,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.400.000.000,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.700.000.000,00
14	Dinas Perhubungan	7.900.000.000,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.850.000.000,00
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	6.950.000.000,00
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	5.050.000.000,00
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3.475.000.000,00

NO.	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.125.000.000,00
20	Dinas Perikanan	12.400.000.000,00
21	Dinas Pariwisata	9.400.000.000,00
22	Dinas Pertanian	28.650.000.000,00
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	8.500.000.000,00
24	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	6.150.000.000,00
25	Sekretariat Daerah	26.850.000.000,00
26	Sekretariat DPRD	31.000.000.000,00
27	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	6.150.000.000,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	296.000.000.000,00
29	Badan Pendapatan Daerah	7.850.000.000,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.000.000.000,00
31	Inspektorat	7.650.000.000,00
32	Kecamatan Ende	2.600.000.000,00
33	Kecamatan Ende Tengah	5.825.000.000,00
34	Kecamatan Ende Selatan	4.925.000.000,00
35	Kecamatan Ende Timur	3.800.000.000,00
36	Kecamatan Ende Utara	4.600.000.000,00
37	Kecamatan Pulau Ende	1.575.000.000,00
38	Kecamatan Nangapanda	2.975.000.000,00
39	Kecamatan Ndona	3.175.000.000,00
40	Kecamatan Detusoko	2.825.000.000,00
41	Kecamatan Kelimutu	1.575.000.000,00
42	Kecamatan Detukeli	2.025.000.000,00
43	Kecamatan Wolowaru	2.725.000.000,00
44	Kecamatan Lepembusu Kelisoke	1.475.000.000,00
45	Kecamatan Maurole	2.125.000.000,00
46	Kecamatan Lio Timur	2.375.000.000,00
47	Kecamatan Kotabaru	1.800.000.000,00
48	Kecamatan Maukaro	2.175.000.000,00
49	Kecamatan Wolojita	2.275.000.000,00
50	Kecamatan Wewaria	2.175.000.000,00

NO.	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026
51	Kecamatan Ndona Timur	1.327.442.733,00
52	Kecamatan Ndori	1.175.000.000,00
53	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	4.550.000.000,00
	TOTAL	1.263.987.442.733,00

Pendanaan untuk menjawab prioritas pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2026 disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahun 2024, perkiraan tahun 2025 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Ende tahun 2025-2029. Rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2026 ini diharapkan telah mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat Kabupaten Ende yang telah disepakati dalam Musrenbang baik ditingkat kecamatan maupun kabupaten.

Perencanaan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2026 juga memuat beberapa kegiatan unggulan yang menjadi prioritas utama antara lain:

1. Pembangunan Gedung Serba Guna;
2. Pembangunan Hotel Bintang 3;
3. Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST);
4. Pembebasan tanah dan pembangunan Sport Center;
5. Pengembangan Tempat Budidaya Ikan dan ternak;
6. Pembangunan Pabrik Pengolahan Daging dan Ikan;
7. Pembangunan Sekolah Rakyat;
8. Pembangunan Kawasan Perumahan;
9. Penataan dan pengembangan kawasan wisata pantai;
10. Pembangunan Pabrik Pengolahan Komoditi.

Tabel 5.4 Rancangan Program, Target Kinerja dan Pagu Program RKPD Kabupaten Ende Tahun 2026

KODE		PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				400.475.000.000,00
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				398.625.000.000,00
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				398.625.000.000,00
1	1	2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun (PAUD)	%	82,76	12.000.000.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun (SD)	%	98,99	45.000.000.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun (SMP)	%	95,96	35.000.000.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun (Kesetaraan)	%	35,00	1.500.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	%	100,00	350.000.000,00
1	1	4 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Pemerataan Guru	Skala	0,76	500.000.000,00
1	1	5 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran bahasa dan sastra sesuai kurikulum	%	100	500.000.000,00
1	1	6 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/Diperbaharui	%	100	250.000.000,00

KODE			PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	%	100	303.525.000.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.850.000.000,00
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				1.850.000.000,00
2	22	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pelaksanaan kegiatan kebudayaan sesuai rencana tahunan	%	100	950.000.000,00
2	22	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase pelaksanaan kegiatan pengembangan kesenian tradisional sesuai rencana	%	100	200.000.000,00
2	22	3	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pelaksanaan kegiatan pembinaan sejarah sesuai dengan rencana	%	100	150.000.000,00
2	22	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang terinventarisasi dan terlindungi	%	100	250.000.000,00
2	22	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase koleksi museum yang terinventarisasi dan terkonservasi dengan baik	%	100	300.000.000,00
			Dinas Kesehatan				183.050.000.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				183.050.000.000,00
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				183.050.000.000,00
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Angka Kematian Ibu (AKI)	%	6	40.000.000.000,00

KODE		PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF	
		MASYARAKAT					
			Pravalensi Stunting (Pendek dan sangat Pendek pada balita)	%	7,6	32.850.000.000,00	
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	% Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	%	100	4.500.000.000,00
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	% Cakupan Sediaan farmasi, Alat kesehatan dan makanan minuman	%	100	500.000.000,00
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	% Masyarakat bidang kesehatan yang diperdayakan	%	100	2.700.000.000,00
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	%	n	102.500.000.000,00
		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				79.350.000.000,00	
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			79.350.000.000,00	
1	3	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	50,57	3.600.000.000,00
				Persentase luas lahan wilayah sungai rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur penahan banjir	%	10,86	750.000.000,00
				Persentase panjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai	%	25,59	750.000.000,00
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga dengan akses air minum layak	%	65,74	10.000.000.000,00

KODE			PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Kota yang diperbaiki/dipelihara	%	40,43	5.000.000.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Cakupan Infrastruktur permukiman dalam kondisi baik	%	95	1.000.000.000,00
1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Cakupan layanan penilaian kelayakan fungsi bangunan gedung negara daerah	%	64,49	1.500.000.000,00
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	Prosentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya	%	90	2.000.000.000,00
1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan yang diperbaiki/dipelihara	%	4,39	47.000.000.000,00
1	3	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Prosentase kepatuhan KKPR dan PMP UMK	%	98,89	250.000.000,00
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	%	100,00	7.500.000.000,00
			Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan				10.550.000.000,00
1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tinggal Bersanitas	%	74,91	4.000.000.000,00
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				6.400.000.000,00
1	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	3,51	1.000.000.000,00

KODE		PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				Percentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni		1.000.000.000,00	
1	4	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Percentase Luasan Permukiman Kumuh Tertangani	%	0,22	300.000.000,00
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Percentase Meningkatnya Rumah Layak Huni	%	72,33	700.000.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM		Percentase Permukiman yang sudah dilengkapi dengan PSU	%	73,91	1.000.000.000,00
1	04	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Percentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	%	100,00	2.400.000.000,00
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					150.000.000,00
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				150.000.000,00
2	10	8	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Percentase Tanah Kosong yang Dikelola	%	14,99	50.000.000,00
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			%	100	100.000.000,00
		Satuan Polisi Pamong Praja					7.750.000.000,00
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					7.750.000.000,00

KODE		PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				7.750.000.000,00
1	5	2 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Peningkatan Kasus Trantibum yang Terselesaikan	%	100	750.000.000,00
1	05	04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanganan Aduan Kebakaran dan Penyelamatan Korban kebakaran	%	100	500.000.000,00
1	05	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	%	100	6.500.000.000,00
		Badan Penanggulangan Bencana Alam dan Daerah				3.750.000.000,00
1	5	3 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Penyebaran informasi dan Edukasi rawan bencana	%	1,57	750.000.000,00
			Persentase Penanganan Tanggap darurat bencana	%	100,00	250.000.000,00
			Persentase Penanganan pasca Bencana	%	100,00	250.000.000,00
1	05	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	%	100,00	2.500.000.000,00
		Dinas Sosial				4.100.000.000,00
1	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				4.100.000.000,00

KODE		PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	6	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS (PKH,TKSK,TAGANA,PEKSOS dan KARANG TARUNA) yang melaksanakan Pelayanan Sosial diluar panti	%	100	50.000.000,00
1	06	03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan yang tertangani	%	26,35	50.000.000,00
1	6	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak terlantar, lansia terlantar gelandang Pengemis dan PMKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	17,21	750.000.000,00
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penerima manfaat terpenuhi Kebutuhan dasar	%	57,42	150.000.000,00
1	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan /Atau Non Alam yang terpenuhi Kebutuhan Dasar pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana	%	100	300.000.000,00
1	6	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	%	100	50.000.000,00
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	%	100	2.750.000.000,00
			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			2.495.000.000,00	

KODE		PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.495.000.000,00	
2	08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			2.495.000.000,00	
2	08	02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pemberdayaan Gender	%	96,40	100.000.000,00
2	8	3 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Ratio Kekerasan Dalam Rumah Tangga	%	2	145.000.000,00
2	8	4 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK)	%	73	625.000.000,00
2	8	5 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Yang Tersedia	%	3	50.000.000,00
2	8	6 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Lembaga Pemenuhan Hak Anak	Lembaga	37,00	175.000.000,00
2	8	7 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Perlindungan Khusus Anak	%	18	100.000.000,00
2	08	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	%	100	1.300.000.000,00
		Dinas Ketahanan Pangan				4.850.000.000,00
2	9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				4.850.000.000,00
2	09	02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase jumlah Cadangan Pangan	%	50	1.100.000.000,00

KODE		PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF	
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	skor	77,10	200.000.000,00
2	9	4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah Rentan Rawan Pangan	%	12	600.000.000,00
2	9	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	80	250.000.000,00
2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	%	100	2.700.000.000,00
		Dinas Lingkungan Hidup				9.040.000.000,00	
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			9.040.000.000,00	
2	11	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	%	100	150.000.000,00
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	83,16	650.000.000,00
		PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	%	0	25.000.000,00	
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	%	35	150.000.000,00
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Ijin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULH	%	100	100.000.000,00

KODE			PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat di Kabupaten	%	100	100.000.000,00
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Presentase Lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diberikan penghargaan	%	100	50.000.000,00
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindakan Pidana Lingkungan Hidup	%	100	40.000.000,00
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah	%	88	4.375.000.000,00
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	%	100,00	3.400.000.000,00
			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				4.975.000.000,00
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				4.975.000.000,00
2	12	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	7	100.000.000,00
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	60	150.000.000,00

KODE		PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Persentase Kepemilikan KTP	%	98,50	500.000.000,00	
2	12	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk berusia 0-18 tahun berakta kelahiran	%	100,00	500.000.000,00
2	12	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi kependudukan yang dimanfaatkan	%	18,50	150.000.000,00
2	12	5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Ketersediaan Profil Kependudukan	Dokumen	2	75.000.000,00
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	%	100	3.500.000.000,00
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				3.400.000.000,00	
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			3.400.000.000,00	
2	13	2	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	100	150.000.000,00
2	13	3	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	100	150.000.000,00
2	13	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	27,45	50.000.000,00
				Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	%	17,65	50.000.000,00
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	12,94	300.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF
		Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	3,53	100.000.000,00
2 13 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	%	100	2.600.000.000,00
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				9.700.000.000,00
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				9.700.000.000,00
2 14 2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific FertilityRate/ ASFR 15 -19)	perseribu kelahiran	25,00	500.000.000,00
2 14 3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR)	%	4670,00%	3.000.000.000,00
		Persentase Kenutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi	%	21,14	1.000.000.000,00
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	%	25	2.400.000.000,00
2 14 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	%	100	2.800.000.000,00
	Dinas Perhubungan				7.900.000.000,00

KODE		PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF
2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				7.900.000.000,00
2	15	02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks Pelayanan Transportasi Darat	%	88,54	1.400.000.000,00
			Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	59,54	1.900.000.000,00
2	15	3 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Indeks Pelayanan Transportasi Laut	%	98,59	100.000.000,00
2	15	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	%	100	4.500.000.000,00
		Dinas Komunikasi dan Informatika				2.850.000.000,00
2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				2.800.000.000,00
2	16	2 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Capaian Kinerja E - Government (Domain Kebijakan + Domain Tata Kelola SPBE + Domain Manajemen SPBE + Domain Layanan SPBE)	%	47,25	50.000.000,00
			Persentase Perangkat daerah yang memiliki akses internet dan terhubung jaringan intra Pemerintah Daerah	%	41,51	50.000.000,00
2	16	3 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase diseminasi informasi publik	%	100	800.000.000,00

KODE			PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	%	100	1.900.000.000,00
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				25.000.000,00
2	20	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Penyediaan Data Statistik Sektoral	%	100	25.000.000,00
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				25.000.000,00
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase pengamanan data dan informasi daerah	%	100	25.000.000,00
			Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah				6.950.000.000,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				6.950.000.000,00
2	17	2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	15	100.000.000,00
2	17	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	63	500.000.000,00
2	17	4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	%	92,67	50.000.000,00
2	17	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	14,56	750.000.000,00
2	17	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	1,49	75.000.000,00
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang bertransformasi dari informal ke Formal	%	40	1.500.000.000,00

KODE			PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan administrasi perkantoran Dinas Koperasi secara efektif dan efisien selama 1 tahun	%	100	3.300.000.000,00
			Dinas Kepemudaan dan Olahraga				3.475.000.000,00
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				3.475.000.000,00
2	19	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rasio Wirausaha Pemuda	%	94,40	500.000.000,00
2	19	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlit yang memperoleh medali dalam olahraga prestasi, olahraga pendidikan pada Kejuaraan tingkat propinsi dan Nasional	%	75	750.000.000,00
2	19	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepramukaan	%	80,00	325.000.000,00
2	19	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan administrasi perkantoran Dinas Koperasi secara efektif dan efisien selama 1 tahun	%	100	1.900.000.000,00
			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				4.125.000.000,00
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				4.000.000.000,00
2	23	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase judul bahan pustaka yang dikembangkan	%	7,97	400.000.000,00
				Persentase Pembentukan Perpustakaan	%	29,86	300.000.000,00
				Persentase Pengunjung Perpustakaan per Tahun	%	41,77	300.000.000,00

KODE			PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF
2	23	3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	%	100	100.000.000,00
2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan administrasi perkantoran Dinas Koperasi secara efektif dan efisien selama 1 tahun	%	100	2.900.000.000,00
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				125.000.000,00
2	24	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip	%	28	25.000.000,00
				Persentase SDM Bidang Karsipan yang ditingkatkan kompetensinya	%	31,12	25.000.000,00
2	24	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang dimusnahkan	%	0	50.000.000,00
2	24	4	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Layanan Penggunaan Arsip	%	0,04	25.000.000,00
			Dinas Perikanan				12.400.000.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				12.400.000.000,00
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				12.400.000.000,00
3	25	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi perikanan Tangkap	ton	13.054,13	5.000.000.000,00
3	25	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi perikanan Budidaya	ton	12,66	1.000.000.000,00
3	25	5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan terhadap Peraturan di Bidang Perikanan	%	52,00	200.000.000,00
3	25	6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahu	45,92	3.100.000.000,00

KODE			PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF
3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat daerah secara Efektif dan Efisien selama 1 tahun	%	100,00	3.100.000.000,00
			Dinas Pariwisata				9.400.000.000,00
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				9.400.000.000,00
3	26	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	%	5	3.000.000.000,00
3	26	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan media Pemasaran Pariwisata	%	10	1.000.000.000,00
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	%	7,32	1.000.000.000,00
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang aktif dan tervalidasi	%	5,60	1.500.000.000,00
3	26	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 Tahun	%	100	2.900.000.000,00
			Dinas Pertanian				28.650.000.000,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				28.650.000.000,00
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi tanaman Pangan	Ton	73.612,23	1.500.000.000,00
				Peningkatan Produksi Holtikultura	Ton		

KODE		PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF
5	01	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			500.000.000,00
			Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya			450.000.000,00
			Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA			450.000.000,00
5	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 Tahun			3.200.000.000,00
5	5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				300.000.000,00
5	5	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan			50.000.000,00
			Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah			50.000.000,00
			Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah			50.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF
	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Fasilitasi,Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah			50.000.000,00
		Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan			25.000.000,00
		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi UnggulanDaerah			25.000.000,00
		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah			25.000.000,00
		Persentase Fasilitasi,Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkaitRiset dan Inovasi di Daerah			25.000.000,00
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-			296.000.000.000,00
5 2	KEUANGAN				296.000.000.000,00
5 2 2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase laporan keuangan tepat waktu	%	100	277.000.000.000,00
5 2 3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	2,78	1.750.000.000,00
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 Tahun	%	100	17.250.000.000,00
	Badan Pendapatan Daerah				7.850.000.000,00

KODE			PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF
5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pendapatan dari Retribusi dan Pajak Daerah terhadap PAD	%	57,00	2.500.000.000,00
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 Tahun	%	100	5.350.000.000,00
			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				9.000.000.000,00
5	3		KEPEGAWAIAN				7.000.000.000,00
5	3	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	%	44,44	1.500.000.000,00
				Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	86,46	1.000.000.000,00
				Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	%	73,54	1.000.000.000,00
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 Tahun	%	100	3.500.000.000,00
5	4		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				2.000.000.000,00
5	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	%	22,56	500.000.000,00
				Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	%	17,40	500.000.000,00

KODE		PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF
		KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	kebutuhan pokok dan barang penting			150.000.000,00
3	30	6 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat Ukur Takar Timbang dan perelengkapannya (UTTP) yang bertanda Tera Sah	%	75,56	150.000.000,00
3	30	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 Tahun	%	100,00	4.800.000.000,00
3	31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				1.350.000.000,00
3	31	2 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	Rp	4,71 m	1.250.000.000,00
3	31	3 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase rekomendasi ijin usaha industri	%	100	50.000.000,00
3	31	4 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	Dokumen	46,00	50.000.000,00
		Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja				6.150.000.000,00
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.000.000.000,00
2	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				6.000.000.000,00
2	7	2 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kabupaten Kota yang Menyusun rencana Tenaga Kerja	%	75%	100.000.000,00
2	7	3 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktifitasnya	%	43,90	1.500.000.000,00

KODE		PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF
2	7	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Di Dalam Negeri dan Luar Negeri	%	8,79 500.000.000,00
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	%	15,02 100.000.000,00
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 Tahun	%	100 3.800.000.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			150.000.000,00
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			150.000.000,00
3	32	2	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Program Transmigrasi yang dilaksanakan	%	100 50.000.000,00
3	32	3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang berkembang	%	54 50.000.000,00
3	32	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigrasi yang dibina dan diberdayakan	%	20 50.000.000,00
4	1		SEKRETARIAT DAERAH			26.850.000.000,00
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 Tahun	%	100 4.400.000.000,00
				Persentase dokumen perencanaan dan kinerja Sekretariat Daerah yang disusun	%	100 1.000.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF
		Persentase dokumen pengelolaan keuangan dan BMD Sekretariat Daerah yang disusun	%	100	2.000.000.000,00
		Persentase pelayanan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta sekretariat daerah	%	100	10.000.000.000,00
		Persentase Perangkat Daerah yang tepat tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan	%	72,73	900.000.000,00
		Persentase Perangkat Daerah/Unit Kerja penanggung jawab Reformasi Birokrasi yang menyampaikan Rencana Aksi sesuai ketentuan	%	100	900.000.000,00
		Persentase dokumen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang berkualitas baik	%	100	900.000.000,00
		Persentase Perangkat Daerah/Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan mutu pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat minimal Baik (B)	%	100	900.000.000,00
4 1 4	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pemenuhan Isian Indeks Capaian LPPD Kabupaten	%	100	400.000.000,00
		Persentase kelengkapan data dan informasi dalam dokumen LKPJ	%	100	400.000.000,00
		Persentase capaian layanan dasar SPM minimal Kategori Tuntas Madya	%	83,33	400.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF
		Persentase kerja sama daerah yang ditetapkan	%	100	400.000.000,00
		Persentase Masalah Hukum Yang ditangani	%	100	400.000.000,00
		Persentase Produk Hukum Daerah yang Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	%	100	400.000.000,00
		Persentase Produk Hukum Daerah yang Dipublikasikan	%	80,00	400.000.000,00
		Persentase Naskah Perjanjian yang Dihasilkan	%	90,00	200.000.000,00
		Nilai Aksi HAM	Nilai	75,00	300.000.000,00
		Persentase hasil kajian/evaluasi terkait kesejahteraan rakyat yang disusun	%	100	1.700.000.000,00
4	1	6	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
		Capaian Pemanfaatan Sistem Informasi	%	42,15	150.000.000,00
		Nilai tingkat kematangan UKPBJ	%	55,56	100.000.000,00
		Persentase Pemenuhan kualifikasi dan kompetensi Sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa	%	62,01	100.000.000,00
		Persentase realisasi pembangunan fisik dan non fisik yang tepat waktu	%	100	100.000.000,00
		Persentase rumusan kebijakan dari OPD dan pihak lainnya bidang perekonomian, pembinaan BUMD dan BLUD serta Sumber Daya Alam	%	100	100.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF
		Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang ditindaklanjuti	%	100	300.000.000,00
4 2	SEKRETARIAT DPRD				31.000.000.000,00
4 2 2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas dan disetujui Bersama antara Bupati dan DPRD	%	100	4.000.000.000,00
		Persentase Raperda yang Dibahas dan Disetujui Bersama	%	100	3.000.000.000,00
		Persentase Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan oleh DPRD	%	100	3.000.000.000,00
4 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 Tahun	%	100,00	21.000.000.000,00
	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah				6.150.000.000,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				6.150.000.000,00
5 1	PERENCANAAN				5.850.000.000,00
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD			800.000.000,00
		Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD			450.000.000,00

KODE		PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF
			Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	%	5,08	500.000.000,00
			Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	%	11,66	500.000.000,00
6	1	INSPEKTORAT DAERAH				7.650.000.000,00
6	1	2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Jumlah Laporan Hasil Penyeleenggaraan Pengawasan	%	76,00	3.000.000.000,00
6	1	3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Nilai	2,5	125.000.000,00
			Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	%	62	125.000.000,00
6	01	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 Tahun			4.400.000.000,00
7		UNSUR KEWILAYAHAN				-
7	1	KECAMATAN ENDE				2.600.000.000,00
7	1	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran PD secara efektif dan efisien selama 1 tahun	%	100	2.300.000.000,00
7	1	2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik	%	100	50.000.000,00
7	1	3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan dengan baik	%	100	50.000.000,00

KODE			PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menurunnya Konflik Sosial yang terjadi di Masyarakat	%	100	50.000.000,00
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	%	100	50.000.000,00
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran serta menyampaikan laporan tepat waktu	%	100	100.000.000,00
7	1		KECAMATAN ENDE TENGAH				5.825.000.000,00
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran PD secara efektif dan efisien selama 1 tahun	%	100	4.800.000.000,00
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik	%	100	75.000.000,00
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan dengan baik	%	100	850.000.000,00
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menurunnya Konflik Sosial yang terjadi di Masyarakat	%	100	50.000.000,00
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	%	100	50.000.000,00
7	1		KECAMATAN ENDE SELATAN				4.925.000.000,00

KODE			PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran PD secara efektif dan efisien selama 1 tahun	%	100	3.700.000.000,00
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik	%	100	75.000.000,00
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan dengan baik	%	100	1.050.000.000,00
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menurunnya Konflik Sosial yang terjadi di Masyarakat	%	100	50.000.000,00
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	%	100	50.000.000,00
7	1		KECAMATAN ENDE TIMUR				3.800.000.000,00
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran PD secara efektif dan efisien selama 1 tahun	%	100	2.900.000.000,00
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik	%	100	75.000.000,00
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan dengan baik	%	100	650.000.000,00
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menurunnya Konflik Sosial yang terjadi di Masyarakat	%	100	50.000.000,00

KODE		PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF	
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	%	100	50.000.000,00
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran serta menyampaikan laporan tepat waktu	%	100	75.000.000,00
7	1	KECAMATAN ENDE UTARA				4.600.000.000,00	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran PD secara efektif dan efisien selama 1 tahun	%	100	3.500.000.000,00
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik	%	100	75.000.000,00
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan dengan baik	%	100	850.000.000,00
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menurunnya Konflik Sosial yang terjadi di Masyarakat	%	100	50.000.000,00
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	%	100	50.000.000,00
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran serta menyampaikan laporan tepat waktu	%	100	75.000.000,00

KODE		PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF	
7	1	KECAMATAN PULAU ENDE				1.575.000.000,00	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran PD secara efektif dan efisien selama 1 tahun	%	100	1.300.000.000,00
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik	%	100	50.000.000,00
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan dengan baik	%	100	50.000.000,00
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menurunnya Konflik Sosial yang terjadi di Masyarakat	%	100	50.000.000,00
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	%	100	50.000.000,00
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran serta menyampaikan laporan tepat waktu	%	100	75.000.000,00
7	1	KECAMATAN NANGAPANDA				2.975.000.000,00	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran PD secara efektif dan efisien selama 1 tahun	%	100	2.450.000.000,00
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik	%	100	75.000.000,00

KODE			PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan dengan baik	%	100	250.000.000,00
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menurunnya Konflik Sosial yang terjadi di Masyarakat	%	100	50.000.000,00
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	%	100	50.000.000,00
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran serta menyampaikan laporan tepat waktu	%	100	100.000.000,00
7	1		KECAMATAN NDONA				3.175.000.000,00
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran PD secara efektif dan efisien selama 1 tahun	%	100	2.450.000.000,00
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik	%	100	75.000.000,00
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan dengan baik	%	100	450.000.000,00
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menurunnya Konflik Sosial yang terjadi di Masyarakat	%	100	50.000.000,00
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan	%	100	50.000.000,00

KODE		PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF
				baik		
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran serta menyampaikan laporan tepat waktu	%	100 100.000.000,00
7	1	KECAMATAN DETUSOKO				2.825.000.000,00
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran PD secara efektif dan efisien selama 1 tahun	%	100 2.300.000.000,00
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik	%	100 75.000.000,00
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan dengan baik	%	100 250.000.000,00
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menurunnya Konflik Sosial yang terjadi di Masyarakat	%	100 50.000.000,00
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	%	100 50.000.000,00
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran serta menyampaikan laporan tepat waktu	%	100 100.000.000,00
7	1	KECAMATAN KELIMUTU				

KODE		PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF
						1.575.000.000,00
7	1	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran PD secara efektif dan efisien selama 1 tahun	%	100	1.300.000.000,00
7	1	2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik	%	100	50.000.000,00
7	1	3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan dengan baik	%	100	50.000.000,00
7	1	4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menurunnya Konflik Sosial yang terjadi di Masyarakat	%	100	50.000.000,00
7	1	5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	%	100	50.000.000,00
7	1	6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran serta menyampaikan laporan tepat waktu	%	100	75.000.000,00
7	1	KECAMATAN DETUKELI				2.025.000.000,00
7	1	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran PD secara efektif dan efisien selama 1 tahun	%	100	1.750.000.000,00
7	1	2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik	%	100	50.000.000,00

KODE			PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan dengan baik	%	100	50.000.000,00
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menurunnya Konflik Sosial yang terjadi di Masyarakat	%	100	50.000.000,00
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	%	100	50.000.000,00
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran serta menyampaikan laporan tepat waktu	%	100	75.000.000,00
7	1		KECAMATAN WOLOWARU				2.725.000.000,00
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran PD secara efektif dan efisien selama 1 tahun	%	100	2.225.000.000,00
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik	%	100	75.000.000,00
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan dengan baik	%	100	250.000.000,00
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menurunnya Konflik Sosial yang terjadi di Masyarakat	%	100	50.000.000,00
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan	%	100	50.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF
		baik			
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran serta menyampaikan laporan tepat waktu	%	100	75.000.000,00
7 1	KECAMATAN LEPEMBUSU KELISOKE				1.475.000.000,00
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran PD secara efektif dan efisien selama 1 tahun	%	100	1.200.000.000,00
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik	%	100	50.000.000,00
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan dengan baik	%	100	50.000.000,00
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menurunnya Konflik Sosial yang terjadi di Masyarakat	%	100	50.000.000,00
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	%	100	50.000.000,00
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran serta menyampaikan laporan tepat waktu	%	100	75.000.000,00
7 1	KECAMATAN MAUROLE				

KODE		PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF
						2.125.000.000,00
7	1	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran PD secara efektif dan efisien selama 1 tahun	%	100	1.850.000.000,00
7	1	2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik	%	100	50.000.000,00
7	1	3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan dengan baik	%	100	50.000.000,00
7	1	4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menurunnya Konflik Sosial yang terjadi di Masyarakat	%	100	50.000.000,00
7	1	5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	%	100	50.000.000,00
7	1	6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran serta menyampaikan laporan tepat waktu	%	100	75.000.000,00
7	1	KECAMATAN LIO TIMUR				2.375.000.000,00
7	1	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran PD secara efektif dan efisien selama 1 tahun	%	100	1.900.000.000,00
7	1	2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik	%	100	50.000.000,00

KODE		PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF	
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan dengan baik	%	100	250.000.000,00
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menurunnya Konflik Sosial yang terjadi di Masyarakat	%	100	50.000.000,00
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	%	100	50.000.000,00
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran serta menyampaikan laporan tepat waktu	%	100	75.000.000,00
7	1	KECAMATAN KOTABARU				2.275.000.000,00	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran PD secara efektif dan efisien selama 1 tahun	%	100	2.000.000.000,00
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik	%	100	50.000.000,00
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan dengan baik	%	100	50.000.000,00
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menurunnya Konflik Sosial yang terjadi di Masyarakat	%	100	50.000.000,00
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan	%	100	50.000.000,00

KODE		PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF
				baik		
7	1	6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran serta menyampaikan laporan tepat waktu	%	100	75.000.000,00
7	1	KECAMATAN MAUKARO				2.175.000.000,00
7	1	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran PD secara efektif dan efisien selama 1 tahun	%	100	1.900.000.000,00
7	1	2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik	%	100	50.000.000,00
7	1	3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan dengan baik	%	100	50.000.000,00
7	1	4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERIBATAN UMUM	Menurunnya Konflik Sosial yang terjadi di Masyarakat	%	100	50.000.000,00
7	1	5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	%	100	50.000.000,00
7	1	6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran serta menyampaikan laporan tepat waktu	%	100	75.000.000,00
7	1	KECAMATAN WOLOJITA				

KODE		PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF	
						2.275.000.000,00	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran PD secara efektif dan efisien selama 1 tahun	%	100	1.800.000.000,00
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik	%	100	50.000.000,00
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan dengan baik	%	100	250.000.000,00
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menurunnya Konflik Sosial yang terjadi di Masyarakat	%	100	50.000.000,00
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	%	100	50.000.000,00
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran serta menyampaikan laporan tepat waktu	%	100	75.000.000,00
7	1		KECAMATAN WEWARIA			2.175.000.000,00	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran PD secara efektif dan efisien selama 1 tahun	%	100	1.850.000.000,00
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik	%	100	75.000.000,00

KODE		PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF
7	1	3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan dengan baik	%	100	50.000.000,00
7	1	4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menurunnya Konflik Sosial yang terjadi di Masyarakat	%	100	50.000.000,00
7	1	5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	%	100	50.000.000,00
7	1	6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran serta menyampaikan laporan tepat waktu	%	100	100.000.000,00
7	1	KECAMATAN NDONA TIMUR				1.327.442.733,00
7	1	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran PD secara efektif dan efisien selama 1 tahun	%	100	1.052.442.733,00
7	1	2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik	%	100	50.000.000,00
7	1	3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan dengan baik	%	100	50.000.000,00
7	1	4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menurunnya Konflik Sosial yang terjadi di Masyarakat	%	100	50.000.000,00
7	1	5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	%	100	50.000.000,00

KODE		PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF
			baik			
7	1	6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran serta menyampaikan laporan tepat waktu	%	100	75.000.000,00
7	1	KECAMATAN NDORI				1.175.000.000,00
7	1	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran PD secara efektif dan efisien selama 1 tahun	%	100	900.000.000,00
7	1	2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik	%	100	50.000.000,00
7	1	3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan dengan baik	%	100	50.000.000,00
7	1	4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menurunnya Konflik Sosial yang terjadi di Masyarakat	%	100	50.000.000,00
7	1	5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	%	100	50.000.000,00
7	1	6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran serta menyampaikan laporan tepat waktu	%	100	75.000.000,00
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF
					4.550.000.000,00
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah				4.550.000.000,00
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100	750.000.000,00
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	%	100,00	750.000.000,00
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	55	75.000.000,00
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	%	75	75.000.000,00
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	%	100	900.000.000,00
8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 Tahun	%	100,00	2.000.000.000,00
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun 2026 – 2030					1.263.987.442.733,00

5.3 Telaahan Terhadap Usulan Masyarakat Hasil Renses untuk RKPD Tahun 2026

Usulan Masyarakat Hasil Renses tahun 2026 secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pendidikan

- 1) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SMP;
- 2) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD;
- 3) Pengadaan Mebel SD;
- 4) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD;
- 5) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP;
- 6) Penambahan Ruang Kelas Baru SMP;
- 7) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD;
- 8) Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga SD;
- 9) Pembangunan Perpustakaan SMP;
- 10) Pembangunan Perpustakaan SD;
- 11) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Kelurahan;
- 12) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD Negeri;
- 13) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU;
- 14) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Negeri;
- 15) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMP;
- 16) Pembangunan Laboratorium SD;
- 17) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas SMP;
- 18) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru SMP;
- 19) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD;
- 20) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP;
- 21) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung SMP.

2. Bidang Kesehatan

- 1) Pembangunan Puskesmas;
- 2) Pengadaan Obat, Vaksin;
- 3) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
- 4) Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
- 5) Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
- 6) Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- 7) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- 8) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan LainnyaPengadaan Alat

Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

3. Bidang Pemerintahan

- 1) Pengadaan Sarana Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna);
- 2) Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa;

4. Bidang Infrastruktur

- 1) Pembangunan Bronjong Sungai;
- 2) Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di perdesaan;
- 3) Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten;
- 4) Normalisasi/Restorasi Sungai;
- 5) Pengadaan Lampu Penerangan Jalan;
- 6) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan;
- 7) Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan;
- 8) Rehabilitasi Bendungan;
- 9) Penyediaan Jalan Lingkungan di Kelurahan;
- 10) Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah;
- 11) Perbaikan Tembok Penahan Tanah (TPT);
- 12) Pemeliharaan Ruas Jalan Kabupaten;
- 13) Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Perkotaan;
- 14) Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah;
- 15) Penyediaan Tembok Penahan Tanah (TPT);
- 16) Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman;
- 17) Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota;
- 18) Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman;
- 19) Perbaikan Jalan Lingkungan di Kelurahan;
- 20) Pembangunan Jembatan;
- 21) Rehabilitasi Ruas Jalan Kabupaten;
- 22) Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan;
- 23) Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya;
- 24) Pembangunan Unit Air Baku;
- 25) Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan;
- 26) Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan;
- 27) Rehab Lampu Penerangan Jalan;

- 28) Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota;
- 29) Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya;
- 30) Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah;
- 31) Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan;
- 32) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
- 33) Pengadaan Guardrill;
- 34) Rehabilitasi Jembatan;
- 35) Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air;
- 36) Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan;
- 37) Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan.

5. Bidang Kesejahteraan Rakyat

- 1) Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual;
- 2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi;
- 3) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.

6. Bidang Ekonomi dan Sosial

- 1) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
- 2) Bantuan Peralatan untuk Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing UMKM;
- 3) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi;
- 4) Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap;
- 5) Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain;
- 6) Bantuan Barang untuk Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing UMKM;
- 7) Bantuan Benang Tenun Ikat;
- 8) Pengadaan Sarana Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna);
- 9) Penyediaan Jalan Lingkungan di Kelurahan;
- 10) Bantuan Peralatan Tenun Ikat;
- 11) Bantuan Pupuk;
- 12) Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
- 13) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;
- 14) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- 15) Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah;
- 16) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi;

- 17) Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- 18) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa.

5.4 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Dengan mendasar pada tema, prioritas dan sasaran pembangunan yang harus dicapai pada tahun 2026, maka rencana kerja untuk masing-masing perangkat daerah berikut pendanaannya tersaji seperti pada halaman lampiran.

LAMPIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2026



(SCAN BARCODE)

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH



Bab ini memuat gambaran tentang indikator keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah, meliputi Indikator Kinerja Utama, Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Kunci, serta Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dengan kondisi capaian kinerja sampai dengan Tahun 2024.

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan cerminan dari efektifitas dan efisiensi kebijakan dalam memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pembangunan daerah, yang terdiri atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). IKU adalah parameter yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian dan pelaksanaan visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode jabatan, sedangkan IKD adalah parameter yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum.

6.1. Target Pencapaian Keberhasilan Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU, pada dasarnya, diturunkan dari sejumlah indikator tujuan dan/atau sasaran RPJMD 2025-2029 yang terseleksi, terutama indikator-indikator yang relevan secara strategis dengan pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Indikator-indikator dimaksud sebagai berikut.

Tabel 6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Ende Tahun 2026

NO	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Awal RPD (2024)	TARGET KINERJA			
			2025	2026	2027	Kinerja Akhir
INDIKATOR MAKRO						
1.	Indeks Pembangunan Manusia	69,11	69,69	70,23	70,78	72,43
2.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,88	4	4,56	5,13	6,83
3.	Tingkat Kemiskinan	22,57	22,18	21,16	21,28	19,37
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,05	2,03	1,96	1,78	1,24
5.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,286	0,269	0,255	0,246	0,21
6	Indeks Reformasi Birokrasi	65,24 (B)	B (66,04)	B (66,83)	B (67,63)	BB (70,01)

NO	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Awal RPD (2024)	TARGET KINERJA			
			2025	2026	2027	Kinerja Akhir
7	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	n/a	2,52	2,65	2,72	3,10
8	Indeks Desa Membangun	0,6106	0,6106	0,6186	0,6266	0,65
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,65	82,99	83,16	83,33	83,84
10	Indeks Ketahanan Pangan Daerah (2023)	73,42	74,2	75,68	77,16	81,61

6.2. Target Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD)

IKD terdiri atas indikator makro pembangunan dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Makro adalah gambaran umum mengenai keberhasilan pemerintahan daerah yang ditinjau dari aspek geografi dan demografi, kesejahteraan rakyat, daya saing daerah serta aspek pelayanan umum, sementara IKK adalah cerminan dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. IKD Kabupaten Ende 2025-2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Ende Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	TARGET KINERJA 2026-2030			Kinerja Akhir	Penanggungjawab
			2025	2026	2027		
			K	K	K		
1	2	3	4	5	6		10
	Indikator Makro						
I ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI							
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	74,2	75,68	77,16	81,61	Dinas Ketahanan Pangan
2	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%		65,74	67,63	75,94	
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	82,99	83,16	83,33	83,84	DLH
4	Indeks Resiko Bencana	Angka	140	139,56	139,2	137,89	BPBD
5	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,507	0,51	0,513	0,517	Kesbangpol Pol-PP BPBD
6	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,11	1,23	1,49	2,02	DPPKB
7	Rasio Penduduk	%	96,2	96,02	96,09	96,29	DPPKB
8	Kepadatan Penduduk	Org/km	135	136	138	142	Disdukcapil
II ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4	4,56	5,13	6,83	Dinas Pertanian Dinas Peternakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Sosial

2	Tingkat Kemiskinan	%	22,18	21,16	21,28	19,37	
3	PDRB Per Kapita	Rp. Juta	29,44	30,9	32,35	36,71	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,13	1,96	1,78	1,24	
5	Indeks Gini	Angka	0,27	0,25	0,25	0,21	
6	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	69,69	70,23	70,78	72,43	Dinas P & K
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	66,63	67	67,23	68,19	Dinas Kesehatan
8	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,6	0,7	0,8	0,8	Dinas Kesehatan
9	Prevalensi Stunting	%	24,5	23,6	22,8	20,2	Dinas Kesehatan
10	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,47	8,6	8,74	9,13	Dinas P & K
11	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,85	13,86	13,88	13,92	Dinas P & K
12	Angka Literasi/Numerasi	Angka	50,18	52,18	54,17	- 60,14	Dinas P & K
13	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	48	49	50	53	Dinas P & K
14	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	100	100	100	100	Kesbangpol
15	Indeks Perlindungan Anak	Angka	38,75	38,8	38,85	39	DP3A
16	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	63	63,93	65,43	69,93	DPPKB
17	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,25	0,25	0,23	0,16	DP3A
18	Indeks Pembangunan Gender	Angka	96,64	96,77	96,9	97,28	DP3A
III ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Angka Ketergantungan	Angka	47,63	47,45	47,27	46,72	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	2.137	2.262	2.387	2.761	
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	0,36	0,38	0,4	0,46	
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Angka	79,4	79,7	79,98	82,85	
5	Indeks Inovasi Daerah	Angka	35	35,05	35,08	39,52	
6	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	4.412,901	4.612,00	4.924,106	5.635,40	
7	Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	2,52	2,65	2,72	3,10	Dinas Pekerjaan Umum
8	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	60,54	64,04	67,54	78,04	Dinas Perumahan Rakyat
9	Persentase Desa Mandiri/Nilai Indeks Desa Membangun (IDM)	%	0,6106	0,6306	0,6406	0,6707	DPMD dan Kecamatan
10	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,41	0,44	0,46	0,53	Bappenda
11	Tingkat Inflasi	%	3,30%	3,27%	3,24%	3,15%	
IV ASPEK PELAYANAN UMUM							
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka		87,2	87,5	88,2	Bagian Hukum Setda Ende
2	Indeks SPBE	Angka		47,25	47,5	48,5	
3	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,50 (B)-	3,58 (B)	3,67 (B)	3,92 (B)	DPMPTSP
5	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	Sat-Pol PP
	Persentase Capaian Aksi HAM	%	74	75	75	75,2	Kesbangpol
8	Indeks Rasa Aman	Angka	0,56	0,56	0,56	0,56	Sat-Pol PP
9	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	81	82	83	86	Sat-Pol PP
INDIKATOR KNERJA KUNCI (IKK)							
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							

	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun (PAUD)	%		82,76	87,13	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun (SD)	%		98,99	99,49	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun (SMP)	%		95,96	97,37	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun (Kesetaraan)	%		35	45	75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	%		100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Indeks Pemerataan Guru	Skala		0,76	0,81	0,96	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran bahasa dan sastra sesuai kurikulum	%		100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/Diperbaharui	%		100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
1	Persentase pelaksanaan kegiatan kebudayaan sesuai rencana tahunan	%		100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Persentase pelaksanaan kegiatan pengembangan kesenian tradisional sesuai rencana	%		100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Persentase pelaksanaan kegiatan pembinaan sejarah sesuai dengan rencana	%		100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Persentase cagar budaya yang terinventarisasi dan terlindungi	%		100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Persentase koleksi museum yang terinventarisasi dan terkonservasi dengan baik	%		100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Dinas Kesehatan						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	%		6	4,93	3,92	Dinas Kesehatan
2	Pravalsensi Stunting (Pendek dan sangat Pendek pada balita)	%		7,6	6,5	3,5	Dinas Kesehatan
3	% Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	%		100	100	100	Dinas Kesehatan
4	% Cakupan Sediaan farmasi, Alat kesehatan dan makanan minuman	%		100	100	100	Dinas Kesehatan
5	% Masyarakat bidang kesehatan yang diperdayakan	%		100	100	100	Dinas Kesehatan
6	% Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	%		100	100	100	Dinas Kesehatan
	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						

1	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	%		50,57	50,66	50,93	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2	Persentase luas lahan wilayah sungai rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur penahan banjir	%		10,86	11,7	14,22	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase panjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai	%		25,59	26,3	28,41	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4	Persentase Rumah Tangga dengan akses air minum layak	%		65,74	67,63	75,94	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
5	Persentase Drainase Kota yang diperbaiki/dipelihara	%		40,43	45,12	59,49	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
6	Persentase Cakupan Infrastruktur permukiman dalam kondisi baik	%		95	95,7	100	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
7	Cakupan layanan penilaian kelayakan fungsi bangunan gedung negara daerah	%		64,49	64,75	65,13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
9	Prosentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya	%		90	94	100	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
9	Persentase jalan yang diperbaiki/dipelihara	%		4,39	4,59	5,32	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
10	Prosentase kepatuhan KKPR dan PMP UMK	%		98,89	98,95	99,09	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan							
1	Persentase Rumah Tinggal Bersanitas	%		74,91	75,39	76,84	DPRKPP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
1	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%		3,51	3,64	4,08	DPRKPP
2	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	%		0,22	0,22	0,23	DPRKPP
3	Persentase Luasan Permukiman Kumuh Tertangani	%		12,57	13,05	14,79	DPRKPP
4	Persentase Meningkatnya Rumah Layak Huni	%		72,33	72,7	73,78	DPRKPP
5	Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi dengan PSU	%		73,91	78,26	91,3	DPRKPP
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							
1	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola	%		14,99	16,47	20,9	DPRKPP
2	Persentase ganti Rugi Lahan	%		100	100	100	DPRKPP
Satuan Polisi Pamong Praja							
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
1	Peningkatan Kasus Trantibum yang Tersesuaikan	%		100	100	100	Sat-Pol PP
2	Persentase Penanganan Aduan Kebakaran dan Penyelamatan Korban kebakaran	%		100	100	100	Sat-Pol PP
Badan Penanggulangan Bencana Alam dan Daerah							
1	Persentase Cakupan Penyebaran informasi dan Edukasi rawan bencana	%		1,57	2,41	0,87	BPBD
2	Persentase Penanganan Tanggap darurat bencana	%		100	101	100	BPBD
3	Persentase Penanganan pasca Bencana	%		100	100	100	BPBD
Dinas Sosial							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							
1	Persentase PSKS (PKH,TKSK,TAGANA,PE KSOS dan KARANG TARUNA) yang melaksanakan Pelayanan Sosial diluar panti	%		100	100	100	Dinas Sosial
2	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan yang tertangani	%		26,35	32,4	50,3	Dinas Sosial
3	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak terlantar, lansia terlantar gelandang Pengemis dan PMKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%		17,21	26,34	53,72	Dinas Sosial
4	Persentase penerima manfaat terpenuhi Kebutuhan dasar	%		57,42	58,37	61,22	Dinas Sosial
5	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan /Atau Non Alam yang terpenuhi Kebutuhan Dasar pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana	%		100	100	100	Dinas Sosial
6	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	%		100	100	100	Dinas Sosial
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
1	Indeks Pemberdayaan Gender	%		96,4	96,5	96,7	DP3A
2	Ratio Kekerasan Dalam Rumah Tangga	%		2	2,1	2,4	DP3A
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK)	%		73	73,6	75	DP3A
4	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Yang Tersedia	%		3	3	3	DP3A
5	Cakupan Lembaga Pemenuhan Hak Anak	Lembaga		37	38	41	DP3A
6	Cakupan Perlindungan Khusus Anak	%		18	25	40	DP3A
Dinas Ketahanan Pangan							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							
1	Persentase jumlah Cadangan Pangan	%		50	50	50	Dinas Ketahanan Pangan
2	Skor Pola Pangan Harapan	skor		77,1	77,3	77,9	Dinas Ketahanan Pangan

3	Persentase daerah Rentan Rawan Pangan	%		12	11	8	Dinas Ketahanan Pangan
4	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%		80	82	88	Dinas Ketahanan Pangan
Dinas Lingkungan Hidup							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							
1	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	%		100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks		83,16	83,33	83,75	Dinas Lingkungan Hidup
3	Persentase Ruang Terbuka Hijau	%		0	0,06	0,06	Dinas Lingkungan Hidup
4	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	%		35	37	41,5	Dinas Lingkungan Hidup
5	Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Ijin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULH	%		100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
6	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat di Kabupaten	%		100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
7	Persentase Lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diberikan penghargaan	%		100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
8	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindakan Pidana Lingkungan Hidup	%		100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
9	Persentase Pengelolaan Sampah	%		88	90	92,5	Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
1	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%		7	9	20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%		60	70	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Persentase Kepemilikan KTP	%		98,5	99	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Persentase penduduk berusia 0-18 tahun berakta kelahiran	%		100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Persentase Informasi kependudukan yang dimanfaatkan	%		18,5	28,3	62,3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	Cakupan Ketersediaan Profil Kependudukan	Dokumen		2	2	2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
1.	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%		100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%		100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3.	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%		27,45	35,29	50,98	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4.	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	%		17,65	21,57	33,33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5.	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%		12,94	13,73	16,08	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6.	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%		3,53	4,71	7,06	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
1.	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific FertilityRate/ ASFR 15 - 19)	perseribukelahiran		25	23	19	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR)	%		46,7	49,8	59,1	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.	Persentase Kenutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi	%		21,14	18,64	11,14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4.	Persentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	%		25	30	50	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Dinas Perhubungan						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
1.	Indeks Pelayanan Transportasi Darat	%		88,54	91,4	100	Dinas Perhubungan
2.	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%		59,54	69,64	100	Dinas Perhubungan
3.	Indeks Pelayanan Transportasi Laut	%		98,59	99,06	100	Dinas Perhubungan
	Dinas Komunikasi dan Informatika						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
1.	Indeks Capaian Kinerja E-Government {Domain Kebijakan + Domain Tata Kelola SPBE + Domain	%		47,25	47,5	48,5	Dinas Komunikasi dan Informatika

	Manajemen SPBE + Domain Layanan SPBE]						
2	Persentase Perangkat daerah yang memiliki akses internet dan terhubung jaringan intra Pemerintah Daerah	%		41,51	56,6	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Persentase diseminasi informasi publik	%		100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							
1	Persentase Penyediaan Data Statistik Sektorial	%		100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							
1	Persentase pengamanan data dan informasi daerah	%		100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%		15	18	27	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%		63	67	71,94	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3	Persentase Koperasi Aktif	%		92,67	93,33	96	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
4	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%		14,56	14,56	29,13	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
5	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	%		1,49	2,99	7,46	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
6	Persentase UMKM yang bertransformasi dari informal ke Formal	%		40	40	40	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
7	Pertumbuhan Wirausaha	%		15,43	0,13	9,54	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
8	Persentase UMKM yang berkualitas dan berdaya saing	%		0,04	0,03	1,56	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
9	Persentase Koperasi yang memiliki ijin usaha Simpan Pinjam	%		0,18	24,12	40,12	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							
1	Realisasi total terhadap Target investasi	%		100	100	100	DPMPPPTSP
2	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	%		100	100	100	DPMPPPTSP
3	Persentase Pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai ketentuan	%		100	100	100	DPMPPPTSP
4	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	%		100	100	100	DPMPPPTSP
5	Persentase Pemanfaatan data dan Informasi Penanaman	%		100	100	100	DPMPPPTSP

	Modal						
6	Persentase Kerja Sama Penanaman Yang ditindaklanjuti	%		100	100	100	DPMPPPTSP
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
1	Rasio Wirausaha Pemuda	%		94,4	95,5	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	Persentase Atlit yang memperoleh medali dalam olahraga prestasi, olahraga pendidikan pada Kejuaraan tingkat propinsi dan Nasional	%		75	80	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepramukaan	%		80	85	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						
1	Persentase judul bahan pustaka yang dikembangkan	%		7,97	8	8,35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Persentase Pembentukan Perpustakaan	%		29,86		37,05	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Persentase Pengunjung Perpustakaan per Tahun	%		41,77	43,48	48,6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	%		100	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	URIUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						
1	Tingkat Ketersediaan Arsip	%		28	28	28,8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Persentase SDM Bidang Kearsipan yang ditingkatkan kompetensinya	%		31,12	34	43,2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Persentase Arsip yang dimusnahkan	%		0	13,33	21,33	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Persentase Layanan Penggunaan Arsip	%		0,04	0,06	0,12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Dinas Perikanan						
	URIUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
	URIUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
3	Jumlah Produksi perikanan Tangkap	ton		13.054	13.445,00		Dinas Perikanan
4	Jumlah Produksi perikanan Budidaya	ton		12,66	13,04	14,25	Dinas Perikanan
5	Persentase Kepatuhan terhadap Peraturan di Bidang Perikanan	%		52	64	100	Dinas Perikanan
6	Angka Konsumsi ikan	kg/kapi ta/tahu		45,92	47,24	51,42	Dinas Perikanan
	Dinas Pariwisata						
	URIUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
1	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	%		5	10	25	Dinas Pariwisata

2	Percentase Peningkatan media Pemasaran Pariwisata	%		10	12	18	Dinas Pariwisata
3	Percentase Pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	%		7,32	8,94	13,01	Dinas Pariwisata
4	Percentase pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang aktif dan tervalidasi	%		5,6	7,15	13,2	Dinas Pariwisata
Dinas Pertanian							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							
1	Peningkatan Produksi tanaman Pangan	Ton		73.612	75.099,00	79.782,00	Dinas Pertanian
				0,23	19	30	
2	Peningkatan Produksi Holtikultura	Ton		0,74	0,74	0,74	Dinas Pertanian
3	Peningkatan Produksi Pertenakan	Ton		0,21	0,21	0,21	Dinas Pertanian
4	Peningkatan Produksi Perkebunan	Ton		0,47	0,48	0,51	Dinas Pertanian
5	Terbangunnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	unit		45	40	45	Dinas Pertanian
6	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%		100	100	100	Dinas Pertanian
7	Percentase Penanganan Bencana Pertanian	%		100	100	100	Dinas Pertanian
8	Percentasi Penanganan dampak Perubahan Iklim terhadap pertanian	%		100	100	100	Dinas Pertanian
9	Percentase SDM Pertanian yang Ditingkatkan	Kelompok		31	31	31	Dinas Pertanian
Dinas Perdagangan dan Perindustrian							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							
1	Percentase rekomendasi ijin usaha Perdagangan	%		100	100	100	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2	Percentase sarana Perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	%		4,56	8,21	11,91	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	Percentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%		≤5	≤5	≤4	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
4	Percentase Alat Ukur Takar Timbang dan pereengkapannya (UTTP) yang bertanda Tera Sah	%		75,56	80%	100	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							
1	Jumlah realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	Rp		4,71 m	4,84 m	5,09 m	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2	Percentase rekomendasi ijin usaha Industri	%		100	100	100	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	Dokumen		46	51	66	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja							
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							
1	Percentase Kabupaten Kota yang Menyusun rencana Tenaga Kerja	%		75%	77,27	90,91	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja

2	Persentase Tenaga Kerja Di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktifitasnya			43,9	47,62	52,17	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
3	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Di Dalam Negeri dan Luar Negeri	%		8,79	9,89	13,19	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
4	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	%		15,02	17,17	23,61	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							
1	Persentase Program Transmigrasi yang dilaksanakan	%		100	100	100	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
2	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang berkembang	%		54	54	54	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
3	Persentase Transmigrasi yang dibina dan diberdayakan	%		20	30	60	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
SEKRETARIAT DAERAH							
1	Persentase dokumen perencanaan dan kinerja Sekretariat Daerah yang disusun	%		100	100	100	SEKRETARIAT DAERAH
2	Persentase dokumen pengelolaan keuangan dan BMD Sekretariat Daerah yang disusun	%		100	100	100	SEKRETARIAT DAERAH
3	Persentase pelayanan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta sekretariat daerah	%		100	100	100	SEKRETARIAT DAERAH
4	Persentase Perangkat Daerah yang tepat tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan	%		72,73	78,79	100	SEKRETARIAT DAERAH
5	Persentase Perangkat Daerah/Unit Kerja penanggung jawab Reformasi Birokrasi yang menyampaikan Rencana Aksi sesuai ketentuan	%		100	100	100	SEKRETARIAT DAERAH
6	Persentase dokumen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang berkualitas baik	%		100	100	100	SEKRETARIAT DAERAH
7	Persentase Perangkat Daerah/Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan mutu pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat minimal Baik (B)	%		100	100	100	SEKRETARIAT DAERAH
8	Persentase Pemenuhan Isian Indeks Capaian LPPD Kabupaten	%		100	100	100	SEKRETARIAT DAERAH
9	Persentase kelengkapan data dan informasi dalam dokumen LKPJ	%		100	100	100	SEKRETARIAT DAERAH
10	Persentase capaian layanan dasar SPM minimal Kategori Tuntas Madya	%		83,33	83,33	100	SEKRETARIAT DAERAH
11	Persentase kerja sama daerah yang ditetapkan	%		100	100	100	SEKRETARIAT DAERAH
12	Persentase Masalah Hukum Yang ditanganai	%		100	100	100	SEKRETARIAT DAERAH

13	Percentase Produk Hukum Daerah yang Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	%		100	100	100	SEKRETARIAT DAERAH
14	Percentase Produk Hukum Daerah yang Dipublikasikan	%		80	90	100	SEKRETARIAT DAERAH
15	Percentase Naskah perjanjian yang Dihasilkan	%		90	100	100	SEKRETARIAT DAERAH
16	Nilai Aksi HAM	Nilai		75	75	75,2	SEKRETARIAT DAERAH
17	Percentase hasil kajian/evaluasi terkait kesejahteraan rakyat yang disusun	%		100	100	100	SEKRETARIAT DAERAH
18	Capaian Pemanfaatan Sistem Informasi	%		42,15	42,75	44,83	SEKRETARIAT DAERAH
19	Nilai tingkat kematangan UKPBJ	%		55,56	66,67	100	SEKRETARIAT DAERAH
20	Percentase Pemenuhan kualifikasi dan kompetensi Sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa	%		62,01	66,18	78,68	SEKRETARIAT DAERAH
21	Percentase realisasi pembangunan fisik dan non fisik yang tepat waktu	%		100	100	100	SEKRETARIAT DAERAH
22	Percentase rumusan kebijakan dari OPD dan pihak lainnya bidang perekonomian, pembinaan BUMD dan BLUD serta Sumber Daya Alam	%		100	100	100	SEKRETARIAT DAERAH
23	Percentase Koordinasi dan Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang ditindaklanjuti	%		100	100	100	SEKRETARIAT DAERAH
SEKRETARIAT DPRD							
1	Percentase Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas dan disetujui Bersama antara Bupati dan DPRD	%		100	100	100	SEKRETARIAT DPRD
2	Percentase Raperda yang Dibahas dan Disetujui Bersama	%		100	100	100	SEKRETARIAT DPRD
3	Percentase Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan oleh DPRD	%		100	100	100	SEKRETARIAT DPRD
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah							
PERENCANAAN							
2	Percentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD		100	100	100	100	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
2	Percentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		100	100	100	100	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
3	Percentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		100	100	100	100	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
4	Percentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		100	100	100	100	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

5	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA		100	100	100	100	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan		100	100	100	100	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
2	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah		100	100	100	100	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
3	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah		100	100	100	100	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
4	Persentase Fasilitasi,Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah					100	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
5	Persentase Fasilitasi,Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah		100	100	100	100	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
5	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan		100	100	100	100	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
6	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi UnggulanDaerah		100	100	100	100	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
7	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah		100	100	100	100	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
8	Persentase Fasilitasi,Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkaitRiset dan Inovasi di Daerah		100	100	100	100	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah							
KEUANGAN							
1	Persentase laporan keuangan tepat waktu	%		100	100	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%		2,78	2,78	2,78	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Badan Pendapatan Daerah							
1	Persentase Pendapatan dari Retribusi dan Pajak Daerah terhadap PAD	%		57	58	61	Badan Pendapatan Daerah

	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
KEPEGAWAIAN							
1	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	%		44,44	44,45	50	BKPSDM
2	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	%		86,46	89,86	95,3	BKPSDM
3	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	%		73,54	76,39	78,41	BKPSDM
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
1	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	%		22,56	27,34	41,46	BKPSDM
2	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	%		17,4	19,4	25,4	BKPSDM
3	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	%		5,08	6,69	11,55	BKPSDM
4	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	%		11,66	13,25	18,03	BKPSDM
INSPEKTORAT DAERAH							
1	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan	%		76	77	80	INSPEKTORAT
2	Maturitas Penyelenggaraan SPiP	Nilai		2,5	2,6	30	INSPEKTORAT
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	%		62	64	70	INSPEKTORAT
UNSUR KEWILAYAHAN							
1	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik	%		100	100	100	KECAMATAN
2	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan dengan baik	%		100	100	100	KECAMATAN
3	Menurunnya Konflik Sosial yang terjadi di Masyarakat	%		100	100	100	KECAMATAN
4	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	%		100	100	100	KECAMATAN
5	Persentase Desa yang menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran serta menyampaikan laporan tepat waktu	%		100	100	100	KECAMATAN
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah							
1	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%		100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
2	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	%		100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%		55	56	59	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

4	Percentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	%		75	75	75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
5	Percentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	%		100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
1	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 Tahun	%		100	100	100	Semua OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende

6.1.4 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah merupakan indikator penyelenggaraan pemerintahan urusan wajib, urusan pilihan dan fungsi urusan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ende yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsi masing-masing, sebagaimana terlampir dalam

tabel berikut.

Tabel 6.3. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan (Wajib, Pilihan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan) Tahun 2026

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi awal (2024)	Target Kinerja				Penanggung Jawab
						2025	2026	2027	Kondisi Akhir	
1.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang Unggul dan Berkarakter	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,11	69,69	70,23	70,78	72,43	
				Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun)	13,83	13,85	13,86	13,88	13,92	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun)	8,29	8,47	8,60	8,74	9,13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	46,57	48	49	50	53	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, dan semangat bela negara di kalangan masyarakat dan generasi muda.	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa bagi masyarakat dan generasi muda (%)	66,6	66,9	67,1	67,3	65,6	Kesbangpol
			Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)	66,30	66,63	67,00	67,23	68,19	Dinas Kesehatan
				Prevalensi stunting (%)	27,5 (2023)	24,50	23,60	22,80	20,2	Dinas Kesehatan
				Indeks Keluarga Sehat	0,50	0,60	0,70	0,80	0,8	Dinas Kesehatan
				% Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan	81,67 % (2023)	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
				Persentase Faskes yang Terakreditasi (Minimal Utama)	65,10	71,43	78,57	85,71	100,00	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya kesejahteraan dan daya beli masyarakat	Indeks Pembangunan Keluarga (Bangga)	62,42	63,00	63,93	65,43	69,93	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Pendapatan per kapita ADHB (Rp)	28,03	29,44	30,90	32,35	36,71	Pemda Kab Ende
				Pengeluaran per Kapita (Rp)	10,009	10,191	10,428	10,664	11,38	Pemda Kab Ende

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi awal (2024)	Target Kinerja				Penanggung Jawab
						2025	2026	2027	Kondisi Akhir	
2	Mewujudkan peningkatan produktivitas masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi yang adil, pro rakyat, serta ramah investasi dan berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Meningkatnya Petumbuhan Ekonomi Masyarakat yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan	Meningkatnya kinerja sektor unggulan dan potensial daerah	Percentase Partisipasi Kader Aktif Kepemudaan dalam Ekonomi Mandiri	94,4	95,5	95,55	0	Dinas Pemuda dan Olah raga	
				Percentase Pertumbuhan Ekonomi	3,88	4,00	4,56	5,13	6,83	
				Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)	2,09	2.137	2.262	2.387	2,761	
				Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Kecil, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan terhadap PDRB (%)	22,67	23.309	23.934	24.560	26,437	
				Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	0,34	0,36	0,38	0,40	0,46	
			Meningkatnya investasi daerah	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB (%)	31,35	32,13	32,56	32,99	34,28	
				Nilai realisasi investasi (Rp)	101.881.655.707,00	150 m	200 m	250 m	400 m	
			Terkendalinya inflasi daerah	Tingkat inflasi tahunan (%)	2,22	2,12	2,02	1,92	1,62	
				Percentase Penduduk Miskin	22,57	22,18	21,16	21,28	19,37	
			Meningkatnya kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan untuk pemberdayaan keluarga	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki-Laki dan Perempuan (%)	77,3	79,40	79,70	79,98	82,85	
				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	2,05	2,13	1,96	1,78	1,24	
				Gini Ratio	0,286	0,27	0,25	0,25	Pemda Kab Ende	
				Indeks Pembangunan Gender	96,5	96,64	96,77	96,90	97,28	
				Indeks Perlindungan Sosial	30,91	31,05	31,18	31,31	31,71	
				Dinas Sosial						

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi awal (2024)	Target Kinerja				Penanggung Jawab	
						2025	2026	2027	Kondisi Akhir		
3	Mewujudkan supremasi hukum dan good governance dengan mengoptimalkan peran stakeholders serta pemanfaatan sumber daya pelayanan secara efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Perlindungan Anak	38,75	38,75	38,80	38,85	39,00	Dinas P3A	
				Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Trantibum	72,78	72,87	73,03	73,19	73,66	Satpol PP
				Angka Kriminalitas	120,13	120,00	119,50	119,00	117,50	Satpol PP	
					Indeks Reformasi Birokrasi	65,24 (B)	B (66,04)	B (66,83)	B (67,63)	BB (70,01)	Setda
				Meningkatnya efektivitas perencanaan dan pengelolaan kebijakan pembangunan daerah	Persentase ketercapaian target kinerja RPJMD (%)	91,92	91,55	92,60	93,60	96,29	Bappeda
					Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	B	B	B	B	BB	Setda
					Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2,4688	2,75	2,8	2,85	3	Setda
					Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP (2023)	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
					Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	4,17	4,20	4,21	4,22	4,26	BPKAD
					Nilai SPID	2,400	2,500	2,600	2,700	3,000	Inspektorat Daerah
					Indeks Pengawasan Kearsipan	Tidak diberikan opini	25	30	35	50	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Indeks Kepuasan Layanan kepada Lembaga DPRD	N/A	77	79	81	85	Setwan
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	B	B	A	Setda, Kecamatan	
					Indeks SPBE / Indeks Pemerintahan Digital	2,58	3	3	3,5	4	Diskominfo
					Indeks keterbukaan informasi publik	N/A	60	65	70	80	Diskominfo
					Tingkat Keamanan Informasi	N/A	100	100	100	100	Diskominfo
					Capaian Fiskal Daerah	5,4	5,7	6	6,15	7,15	Bappenda

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi awal (2024)	Target Kinerja				Penanggung Jawab
						2025	2026	2027	Kondisi Akhir	
			Meningkatnya kualitas dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN)	Indeks Profesionalitas ASN	72,25	74,4	76,75	77,6	83,32	BKPSDM
4	Mewujudkan koneksi antar wilayah yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas, merata, berkeadilan dan ramah lingkungan	Meningkatnya akses dan pembangunan infrastruktur wilayah		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLU)	n/a	2,52	2,65	2,72	3,10	Pemda Kab Ende
			Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur dasar	Indeks Pembangunan Infrastruktur	54,17	55,02	56,79	58,61	64,69	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat, KPP
				Rasio Konektivitas	62,85	63,56	64,28	65,71	69,78	Dinas Perhubungan
			Meningkatnya kualitas tata ruang dan penataan wilayah	Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang sesuai regulasi yang berlaku (%)	90	100	100	100	100	Dinas PUPR
				Rasio Ruang Terbuka Hijau (%)	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	Dinas Lingkungan Hidup
5	Mewujudkan pembangunan inklusif dan berkelanjutan berbasis lingkungan hidup dan karakteristik sosial budaya dengan mengoptimalkan keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif daerah	Meningkatnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	77,65	82,99	83,16	83,33	83,84	Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan/ekologi masyarakat	Indeks Desa Membangun	0,61	0,61	0,62	0,63	0,65	DPMPD
			Meningkatnya pemberdayaan sosial budaya berbasis kearifan lokal	Persentase Kebudayaan Lokal yang Diestimasi	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	77,65	82,99	83,16	83,33	83,84	Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana	Indeks Resiko Bencana	140,12	140	139,56	139,02	137,89	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Mewujudkan kedaulatan pangan melalui peningkatan produktivitas sektor	Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan berbasis potensi wilayah		Indeks Ketahanan Pangan Daerah	73,42 (2023)	74,20	75,68	77,16	81,61	Dinas Ketahanan Pangan
				Skor Pola Pangan Harapan	76,9	77,1	77,3	77,5	78,1	Dinas Ketahanan Pangan

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi awal (2024)	Target Kinerja				Penanggung Jawab
						2025	2026	2027	Kondisi Akhir	
ekonomi berbasis potensi wilayah spesifik dan tata ruang	dan tata ruang	Meningkatnya produksi, produktivitas dan keamanan pangan serta pemanfaatan lahan pangan sesuai tata ruang		Produksi pertanian pangan (ton)	10.833,17	11158,2	11492,9	11838	12935,37	Dinas Pertanian
				Produksi perikanan (ton)	12316,7	12686,2	13066,8	13459	14706,8	Dinas Perikanan
				Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan (Ha)	4.267,19	4.277,19	4.287,19	4.297,19	4.327,19	Dinas Pertanian
		Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pangan		Persentase konversi lahan pertanian terhadap total lahan pertanian (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pertanian
				Persentase Produk Pangan Segar yang memenuhi Standar dan Mutu Pangan	95,7	80,00	82,00	84,00	90	Dinas Ketahanan Pangan

Tabel 6.3. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan (Wajib, Pilihan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan) Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2024)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Perangkat daerah Penanggungjawab
				Nilai	Satuan	Tahun 2026	Tahun 2027	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daysa Manusia Yang Unggul dan Berkarakter									
1.1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan									
	1	Rata-Rata Lama Sekolah		8,29	Tahun	8,6	8,74	9,13	Dinas PK
	2	Harapan Lama Sekolah		13,83	Tahun	13,86	13,88	13,92	Dinas PK
	3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		46,57	Angka	49	50	53	Perpustakaan dan Kearsipan
Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah									
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun (PAUD)	(Jumlah anak usia 5–6 tahun yang sedang bersekolah / Jumlah total anak usia 5–6 tahun) x 100	78,39	%	82,76	87,13	100	Dinas PK
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun (SD)	(Jumlah anak usia 7–12 tahun yang sedang bersekolah / Jumlah total anak usia 7–12 tahun) x 100	98,91	%	98,99	99,49	100	Dinas PK
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun (SMP)	(Jumlah anak usia 7–12 tahun yang sedang bersekolah / Jumlah total anak usia 7–12 tahun) x 100	93,75	%	95,96	97,37	100	Dinas PK
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun (Kesetaraan)	Penjumlahan seluruh Ruang Perpustakaan yang telah selesai dibangun dalam periode waktu tertentu (misalnya 1 tahun anggaran)	6,01	%	35,00	45,00	75	Dinas PK
		Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	(Satuan Pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal / Total Satuan Pendidikan) x 100		%	100,00	100,00		Dinas PK

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2024)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Perangkat daerah Penanggungjawab
				Nilai	Satuan	Tahun 2026	Tahun 2027	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Indeks Pemerataan Guru	$1 - \sum_{i=1}^n \left \frac{G_i}{G_t} - \frac{S_i}{S_t} \right $	0,4	Skala	0,76	0,81		Dinas PK
		Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran bahasa dan sastra sesuai kurikulum	(Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran bahasa dan sastra / Jumlah total satuan pendidikan) x 100	0	%	100	100		Dinas PK
		Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/Diperbaharui	(Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/Diperbaharui / Total usulan Izin Satuan Pendidikan) x 100	0	%	100	100	100	Dinas PK
		Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan tahun N / dengan jumlah Total Kegiatan yang dilaksanakan tahun N) X 100	100	%	100	100		Dinas PK
		Persentase koleksi museum yang terinventarisasi dan terkonservasi dengan baik	(Jumlah koleksi terinventarisasi dan terkonservasi / Total koleksi museum) x 100	0	%	100	100		Dinas PK
		Persentase judul bahan pustaka yang dikembangkan	(Jumlah Koleksi Bahan Pustaka yang tersedia dibagi Jumlah Penduduk di wilayah) X 100	7,85	%	7,97	8,00	8,35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Persentase Pembentukan Perpustakaan	(Jumlah Perpustakaan Desa dan Kelurahan yang dibentuk dibagi Jumlah Perpustakaan Desa dan Kelurahan) X 100	28,06	%	29,86		37,05	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Persentase Pengunjung Perpustakaan per Tahun	(Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun dibagi Jumlah Penduduk (5-60thn)) X 100	40,28	%	41,77	43,48	48,6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	(Jumlah Koleksi Daerah dan Naskah Kuno yang terpelihara dibagi Jumlah Koleksi Daerah dan Naskah Kuno Seluruhnya) x 100		%	100	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Penyelenggaraan administrasi perkantoran Dinas Koperasi secara efektif dan efisien selama 1 tahun	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing kegiatan dibagi jumlah total sub kegiatan) x 100	100	%	100	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2024)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Perangkat daerah Penanggungjawab
				Nilai	Satuan	Tahun 2025	Tahun 2027	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2. Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan Masyarakat									
	1.	Angka Usia Harapan Hidup		66,3	Tahun	67	67,23	68,19	Dinkes
	2.	Prevalensi Stunting		27,5 (2023)	%	23,6	22,8	20,2	Dinkes
	3.	Indeks Keluarga Sehat		0,5	Angka	0,7	0,8	0,8	Dinkes
	4.	Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan		81,67 % (2023)	%	100	100	100	Dinkes
	5.	Persentase Faskes Yang Terakreditasi (Minimal Utama)		65,1	%	78,57	85,71	100	Dinkes
	6.	Indeks Pembangunan Keluarga (Bangga)		62,42	Angka	63,93	65,43	69,93	DPPKB
Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah									
		Angka Kematian Ibu (AKI)	(Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi Jumlah Kelahiran)	6,21	%	6	4,93	3,92	Dinas Kesehatan
		Pravaleensi Stunting (Pendek dan sangat Pendek pada balita)	(Jumlah Balita Stunting di bagi dengan Jumlah Balita yang di ukur) X100	7,6	%	7,6	6,50	3,5	Dinas Kesehatan
		% Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	% Penyelenggaraan Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan selama 1 tahun	100	%	100	100	100	Dinas Kesehatan
		% Cakupan Sediaan farmasi, Alat kesehatan dan makanan minuman	% Penyelenggaraan Penyediaan farmasi, Alat Kesehatan ,Makanan dan Minuman Selama 1 Tahun	100	%	100	100	100	Dinas Kesehatan
		% Masyarakat bidang kesehatan yang diperdayakan	% Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	100	%	100	100	100	Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2024)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Perangkat daerah Penanggungjawab
				Nilai	Satuan	Tahun 2026	Tahun 2027	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		% Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	% Penyelenggaraan Akreditasi Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan selama 1 Tahun	100	%	100	100	100	Dinas Kesehatan
		Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan tahun N / dengan Jumlah Total Kegiatan yang dilaksanakan tahun N) X 100	100	%	100	100	100	Dinas Kesehatan
		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific FertilityRate/ ASFR 15 -19)	(ASFR = (Jumlah kelahiran per 1000 orang remaja umur 15-19) / (Jumlah penduduk wanita usia subur per 1000 orang)) X 1000	27	perseribu kelahiran	25,00	23,00	29	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR)	(Jumlah Peserta KB Aktif Modern dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur) X 100	40,51	%	4670,00%	4980,00%	59,10%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Kenutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi	(Jumlah PUS yang ingin ber KB tetapi tidak terlayani dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur) X 100	26,14	%	21,14	18,64	11,14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	(Jumlah Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga dibagi Jumlah Keluarga) X 100	18,79	%	25	30	50	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan tahun N / dengan Jumlah Total Kegiatan yang dilaksanakan tahun N) X 100	100	%	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.3. Meningkatnya Kesejahteraan dan Daya beli Masyarakat									
	1	Pendapatan per kapita ADHB		28,03	Rp.	30,9	32,35	36,71	Pemda Kab Ende
	2	Pengeluaran per Kapita		10,009	Rp.	10,428	10,664	11,38	Pemda Kab Ende
	3	Persentase Partisipasi Kader Aktif Kepemudaan dalam Ekonomi Mandiri			%	95,5	95,55	0	Dispora

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2024)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Perangkat daerah Penanggungjawab
				Nilai	Satuan	Tahun 2026	Tahun 2027	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah									
		Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	(Jumlah koperasi yang berkualitas dibagi jumlah koperasi yang ada) X 100	N/A	%	1,49	2,99		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase UMKM yang bertransformasi dari informal ke formal	Jumlah UMKM yang bertransformasi dibagi jumlah total UMKM	28,13	%	40	40		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pertumbuhan Wirausaha	((Jumlah Wirausaha tahun n-jumlah wirausaha n-1) dibagi jumlah wirausaha n-1) X 100	45,45	%	15,43	0,13		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	((Jumlah Kunjungan Wisatawan tahun N - Jumlah Kunjungan wisatawan N-1) dibagi Jumlah Kunjungan wisatawan N-1) X 100	0,07	%	0,18	0,22	0,34	Dinas Pariwisata
		Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	((Jumlah Pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual/Jumlah Pelaku ekonomi kreatif) X 100	4,88	%	7,32	8,54	13,01	Dinas Pariwisata
		Persentase penerima manfaat terpenuhi Kebutuhan dasar	(Jumlah Keluarga Penerima manfaat Miskin yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya dibagi Jumlah Masyarakat Miskin seluruhnya) x100	56,46	%	57,42	58,37	61,22	Dinas Sosial
		Persentase Tenaga Kerja Di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktifitasnya	((Jumlah Pencari Kerja yang mengikuti Pelatihan dibagi Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar) X 100	43,66	%	43,90	47,62	52,17	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
		Rasio Wirausaha Pemuda	((Jumlah Pemuda yang Aktif berwirausaha dibagi Jumlah Pemuda Usia 16-30) X 100	75	%	94,40	95,50	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase Atlit yang memperoleh medali dalam olahraga prestasi, olahraga pendidikan pada Kejuaraan tingkat propinsi dan Nasional	(Jumlah Cabang Olahraga yang Memperoleh Medali dibagi Jumlah Cabang Olahraga yang Di Ikuti) X 100	60	%	75	80	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepramukaan	((Jumlah Masyarakat usia 16-30 yang berpartisipasi aktif dalam Kepramukaan dibagi Jumlah Masyarakat secara keseluruhan usia 16-30) X 100		%	80,00	85,00	100	Dinas Keperhudaan dan Olahraga

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2024)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Perangkat daerah Penanggungjawab
				Nilai	Satuan	Tahun 2026	Tahun 2027	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyelenggaraan administrasi perkantoran Dinas Koperasi secara efektif dan efisien selama 1 tahun	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing kegiatan dibagi jumlah total sub kegiatan) x 100	100	%	100	100	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.4. Meningkatnya Pemahaman Wawasan Kebangsaan, Nilai-Nilai Pancasila, Semangat Bela Negara di Kalangan Masyarakat dan Generasi Muda									
	1.	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa bagi masyarakat dan generasi muda		66,6	%	67,1	67,3	65,6	Kesbangpol
Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah									
		Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	(Jumlah Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dilakukan di tahun n dibagi Jumlah Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dilakukan di rencanakan di tahun n) x 100	100	%	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
		Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	(Jumlah Parpol penerima hibah yang melakukan pendidikan politik pada kader politik di tahun n/ jumlah Parpol penerima hibah di tahun n) X 100		%	100,00	100,00	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	(Jumlah Ormas yang aktif di tahun n dibagi jumlah Ormas yang terdaftar) X 100	52	%	55	56	59	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
		Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi KUB dan Penghayat Kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	(Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi KUB dan Penghayat Kepercayaan di daerah yang dilaksanakan di tahun n dibagi Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi KUB, dan Penghayat Kepercayaan di daerah yang direncanakan) x 100	0	%	75	75	75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2024)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Perangkat daerah Penanggungjawab
				Nilai	Satuan	Tahun 2026	Tahun 2027	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	(Jumlah Konflik Sosial yang terselesaikan dibagi Jumlah Konflik sosial yang terjadi) x 100		%	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 Tahun	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi Jumlah Total Kegiatan X 100	100	%	100,00	100,00	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
2. Meningkatnya Petumbuhan Ekonomi Masyarakat Yang Berdampak Pada Penurunan Angka Kemiskinan									
	2.1. Meningkatnya Kinerja Sektor Unggulan dan Potensial Daerah								
	1	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%)		2,09	%	2.262	2.387	2.761	Dinas Perdagangan dan Industri
	2	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan Terhadap PDRB (%)		22,67	%	23.934	24.560	26	Dinas Perdagangan dan Industri
	3	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%)		0,34	%	0,38	0,4	0,46	Dinas Pariwisata
	4	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB (%)		31,35	%	32,56	32,99	34,28	Dinas Pertanian
	Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintaan Daerah								
		Persentase rekomendasi ijin usaha Perdagangan	(Jumlah ijin usaha perdagangan yg difasilitasi/jumlah permohonan ijin usaha perdagangan) X 100	100	%	100	100	100	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Persentase sarana Perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	(Jumlah sarana perdagangan yang memenuhi syarat/jumlah sarana perdagangan) X 100	0	%	4,56	8,21	4,56	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2024)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Perangkat daerah Penanggungjawab
				Nilai	Satuan	Tahun 2026	Tahun 2027	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	(fluktuasi harga barang kebutuhan pokok pada tahun n dibagi rata-rata fluktuasi harga barang kebutuhan per tahun) x 100	3	%	≤5	≤5	≤4	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Persentase Alat Ukar Takar Timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda Tera Sah	(Jumlah alat UTTP yang bertanda Tera sah pada tahun n dibagi Jumlah Keseluruhan UTTP Tahun N) X 100	4,71	%	75,56	80%	100	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 Tahun	(Jumlah Capaian indikator masing-masing Kegiatan dibagi Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100,00	100,00	100	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Jumlah realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	Nilai absolut Rupiah	4,3 m	Rp	4,71 m	4,84 m		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Persentase rekomendasi ijin usaha industri	(Jumlah realisasi rekomendasi ijin usaha industri yg diterbitkan tahun n dibagi jumlah Permohonan tahun N) X 100	100	%	100	100	100	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	(Jumlah IKM yang memiliki informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini per jumlah IKM seluruh) X 100	41	Dokumen	46,00	51,00	66	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Persentase Peningkatan media Pemasaran Pariwisata	(Nilai Akhir-Nilai Awal dibagi nilai awal) X 100	0	%	0,10	0,12	0,18	Dinas Pariwisata
		Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	(Jumlah Pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual/Jumlah Pelaku ekoni kreatif) X 100	4,88	%	7,32	8,94	13,01	Dinas Pariwisata
		Persentase pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang aktif dan tervalidasi	(Jumlah Pelaku Pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi/Jumlah Pelaku ekoni kreatif) X 100	4,2	%	5,60	7,15	13,2	Dinas Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2024)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Perangkat daerah Penanggungjawab
				Nilai	Satuan	Tahun 2026	Tahun 2027	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 Tahun	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Dinas Pariwisata
		Skor Pola Pangan Harapan	Capaian Skor	76,9	skor	77,10	77,30	78,1	Dinas Ketahanan Pangan
		Persentase daerah Rentan Rawan Pangan	Jumlah desa/Kel yang	0	%	12,00	11,00	10	Dinas Ketahanan Pangan
		Jumlah Produksi perikanan Tangkap	Produksi Ikan Tangkap	12.304,77	ton	13.054,13	13.445,75		Dinas Perikanan
		Peningkatan Produksi tanaman Pangan	((Jumlah Produksi Tahun n - jumlah Produksi Tahun n-1) / jumlah Produksi Tahun n-1) X 100	72.363,97	Ton	73.612,23	75.099,19		Dinas Pertanian
		Peningkatan Produksi Holtikultura	((Jumlah Produksi Tahun n - jumlah Produksi Tahun n-1) / jumlah Produksi Tahun n-1) X 100	7.559,18	Ton	0,74	0,74		Dinas Pertanian
		Peningkatan Produksi Perternakan	((Jumlah Produksi Tahun n - jumlah Produksi Tahun n-1) / jumlah Produksi Tahun n-1) X 100	1.451,40	Ton	0,21	0,21		Dinas Pertanian
		Peningkatan Produksi Perkebunan	((Jumlah Produksi Tahun n - jumlah Produksi Tahun n-1) / jumlah Produksi Tahun n-1) X 100	27.504,05	Ton	0,47	0,48		Dinas Pertanian
		Terbangunnya Pemasaran dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Terbangunnya Pemasaran dan Pengembangan Prasarana Pertanian Tahun n	30	unit	45,00	40		Dinas Pertanian
		Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	((Jumlah Kunjungan Wisatawan tahun N - Jumlah Kunjungan wisatawan N-1) dibagi Jumlah Kunjungan wisatawan N-1) X 100	0,07	%	0,18	0,22	0,34	Dinas Pariwisata
		Persentase Peningkatan media Pemasaran Pariwisata	(Nilai Akhir-Nilai Awal dibagi nilai awal) X 100	0	%	0,10	0,12	0,15	Dinas Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2024)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Perangkat daerah Penanggungjawab
				Nilai	Satuan	Tahun 2026	Tahun 2027	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2. Meningkatnya Investasi Daerah									
	1	Nilai Realisasi Investasi		101.881.655,7 07,00	Rp.	200 m	250 m	400 m	DPMPTSP
	2	Persentase Investasi Sektor Ekonomi Hijau dan Biru			%				
Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah									
		Realisasi total terhadap Target Investasi	(Realisasi tahun N dibagi Target Investasi tahun N) X 100	10.188,17	%	100	100		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
		Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	((Jumlah investor Yang berinvestasi tahun N-Jumlah investor yang berinvestasi Tahun N-1) dibagi Jumlah investor yang berinvestasi Tahun N-1) X 100	100	%	100	100	100	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
		Persentase Pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai ketentuan	((jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh ijin sesuai ketentuan dibagi jumlah Pelaku Usaha yang) X 100	100	%	100	100	100	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
		Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	Jumlah Permasalahan dan hambatan yang diselesaikan dibagi Jumlah Pelaku usaha yang Bermasalah X100	100	%	100	100	100	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
		Persentase Pemanfaatan data dan Informasi Penanaman Modal	((jumlah data dan informasi yang dimanfaatkan dibagi jumlah data yang tersedia) X 100	100	%	100	100	100	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
		Persentase Kerja Sama Penanaman Yang dilindkangkan	((jumlah Kerja Sama Penanaman Yang ditindaklanjuti dibagi jumlah Kerjasama Penanaman Yang Direncanakan) X 100	N/A	%	100	100	100	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
		Penyelenggaraan administrasi perkantoran Dinas Koperasi secara efektif dan efisien selama 1 tahun	((jumlah Capaian Indikator masing-masing kegiatan dibagi jumlah total sub kegiatan) x 100	100	%	100	100	100	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2024)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Perangkat daerah Penanggungjawab
				Nilai	Satuan	Tahun 2026	Tahun 2027	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3. Terkendalinya Inflasi Daerah									
	1	Tingkat inflasi tahunan		2,22	%	2,02	1,92	1,62	Setda
	2	Indeks Perkembangan Harga			Angka				Disperdagin
Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintaan Daerah									
		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 Tahun	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Sekretariat Daerah
		Persentase dokumen perencanaan dan kinerja Sekretariat Daerah yang disusun	(Jumlah dokumen Perencanaan dan Kinerja Sekretariat Daerah Yang tersusun dibagi Jumlah keseluruhan dokumen Perencanaan dan Kinerja Sekretariat Daerah yang harus disusun) X 100	100	%	100	100	100	Sekretariat Daerah
		Persentase dokumen pengelolaan keuangan dan BMD Sekretariat Daerah yang disusun	(Jumlah dokumen pengelolaan keuangan dan BMD Sekretariat Daerah yang disusun dibagi Jumlah keseluruhan dokumen pengelolaan keuangan dan BMD Sekretariat Daerah) X 100	100	%	100	100	100	Sekretariat Daerah
		Persentase pelayanan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta sekretariat daerah	(Jumlah pelayanan yang diberikan dibagi Jumlah keseluruhan layanan) X 100	100	%	100	100	100	Sekretariat Daerah
		Persentase Perangkat Daerah yang tepat tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan	(Jumlah Perangkat Daerah yang tepat tugas dan fungsinya dibagi Jumlah Perangkat Daerah) X 100	51,52	%	72,73	78,79	100	Sekretariat Daerah
		Persentase Perangkat Daerah/Unit Kerja penanggung jawab Reformasi Birokrasi yang menyampaikan Rencana Aksi sesuai ketentuan	(Jumlah Perangkat Daerah Perangkat Daerah penanggung jawab Reformasi Birokrasi yang menyampaikan Rencana Aksi dibagi Jumlah Perangkat Daerah penanggung jawab Reformasi Birokrasi) X 100	100	%	100	100	100	Sekretariat Daerah
		Persentase kerja sama daerah yang ditetapkan	(Jumlah kerja sama daerah yang ditetapkan dibagi Jumlah kerja sama daerah yang dibahas) X 100	84,21	%	100	100	100	Sekretariat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2024)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Perangkat daerah Penanggungjawab
				Nilai	Satuan	Tahun 2026	Tahun 2027	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Masalah Hukum Yang ditangani	(Jumlah Masalah Hukum yang Ditangani dibagi Jumlah Masalah Hukum yang Diterima) X 100	100	%	100	100	100	Sekretariat Daerah
		Persentase Produk Hukum Daerah yang Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	(Jumlah Produk Hukum Daerah yang Ditetapkan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibagi Jumlah Produk Hukum Daerah yang Difasilitasi) X 100	142,98	%	100	100	100	Sekretariat Daerah
		Persentase Produk Hukum Daerah yang Dipublikasikan	(Jumlah produk hukum daerah yang dipublikasikan dibagi Jumlah produk hukum daerah yang diundangkan) X 100	66,67	%	80,00	90,00	100	Sekretariat Daerah
		Persentase Naskah Perjanjian yang Dihasilkan	(Jumlah Naskah Perjanjian yang Dihasilkan dibagi Jumlah Naskah Perjanjian yang Difasilitasi) X 100	85,71	%	90,00	100,00	100	Sekretariat Daerah
		Nilai Aksi HAM	Hasil Penilaian dari Kementerian HAM	73,9	Nilai	75,00	75,00	75,2	Sekretariat Daerah
		Persentase hasil kajian/evaluasi terkait kesejahteraan rakyat yang disusun	(Jumlah hasil kajian/evaluasi terkait kesejahteraan rakyat yang tersusun dibagi Jumlah hasil kajian/evaluasi terkait kesejahteraan rakyat yang ditargetkan) X 100 Penjelasan: Hasil kajian/evaluasi merupakan dokumen kegiatan yang terkait dengan 1. Laporan kegiatan keagamaan 2. Laporan organisasi masyarakat dan kegiatan lembaga keagamaan terkait penyaluran dan penerimaan dana hibah/bantuan 3. Dokumen kajian dan evaluasi terkait kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan sosial	100	%	100	100	100	Sekretariat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2024)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Perangkat daerah Penanggungjawab
				Nilai	Satuan	Tahun 2026	Tahun 2027	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Capaian Pemanfaatan Sistem Informasi	(Jumlah pemenuhan tingkat kematangan UKPBI yang dicapai dibagi Jumlah pemenuhan tingkat kematangan UKPBI yang direncanakan) X 100 Penjelasan: Kegiatan yang terkait dengan pemenuhan nilai tingkat kematangan UKPBI yaitu pengelolaan tingkat kematangan kelembagaan UKPBI dalam mewujudkan tingkat kematangan UKPBI yang proaktif	46,61	%	42,15	42,75	44,83	Sekretariat Daerah
		Nilai tingkat kematangan UKPBI	(Jumlah SDM yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia pengadaan barang/jasa dibagi Jumlah SDM kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia pengadaan barang/jasa sesuai standar yang berlaku) x 100	33,33	%	55,56	66,67	100	Sekretariat Daerah
		Persentase Pemenuhan kualifikasi dan kompetensi Sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa	(Jumlah SDM yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia pengadaan barang/jasa dibagi Jumlah SDM kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia pengadaan barang/jasa sesuai standar yang berlaku) X 100	35,29	%	62,01	66,18	78,68	Sekretariat Daerah
		Persentase realisasi pembangunan fisik dan non fisik yang tepat waktu	(Jumlah pekerjaan fisik dan non fisik dengan realisasi tepat waktu dibagi Jumlah pekerjaan fisik dan non fisik keseluruhan) X 100	82,68	%	100	100	100	Sekretariat Daerah
		Persentase rumusan kebijakan dari OPD dan pihak lainnya bidang perekonomian, pembinaan BUMD dan BLUD serta Sumber Daya Alam	(Jumlah rumusan kebijakan dari OPD dan pihak lainnya bidang perekonomian, pembinaan BUMD dan BLUD serta Sumber Daya Alam yang disusun dibagi Jumlah rumusan kebijakan dari OPD dan pihak lainnya bidang perekonomian, pembinaan BUMD dan BLUD serta Sumber Daya Alam yang direncanakan) X 100	100	%	100	100	100	Sekretariat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2024)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Perangkat daerah Penanggungjawab
				Nilai	Satuan	Tahun 2026	Tahun 2027	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang ditindaklanjuti	(Jumlah koordinasi dan Fasilitasi TPID yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Keseluruhan Koordinasi dan Fasilitasi TPID yang direncanakan) X 100	100	%	100	100	100	Sekretariat Daerah
2.4.. Meningkatnya Kesempatan Kerja Dan Pemerataan Pendapatan Untuk Pemberdayaan Keluarga									
	1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki-Laki dan Perempuan		77,3	%	79,7	79,98	82,85	Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata, Dinas Nakertrans
	2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		2,05	%	1,96	1,78	1,24	Dinas Nakertrans
	3	Gini Ratio		0,286	Angka	0,25	0,25	0,21	Dinas Nakertrans
	4	Indeks Pembangunan Gender		96,5	Angka	96,77	96,9	97,28	Dinas P3A
	5	Indeks Perlindungan Sosial		32,89	Angka	31,02	31,11	31,39	Dinas Sosial
	6	Indeks Perlindungan Anak		38,75	Angka	38,8	38,85	39	Dinas P3A
Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah									
		Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	(Jumlah koperasi yang berkualitas dibagi jumlah koperasi yang ada) X 100	N/A	%	1,49	2,99		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase UMKM yang bertransformasi dari informal ke Formal	Jumlah UMKM yang bertransformasi dibagi jumlah total UMKM	28,13	%	40	40		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pertumbuhan Wirausaha	((Jumlah Wirausaha tahun n-jumlah wirausaha n-1) dibagi jumlah wirausaha n-1) X 100	45,45	%	15,43	0,13		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	((Jumlah Kunjungan Wisatawan tahun N - Jumlah Kunjungan wisatawan N-1) dibagi Jumlah Kunjungan wisatawan N-1) X 100	0,07	%	0,18	0,22	0,34	Dinas Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2024)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Perangkat daerah Penanggungjawab
				Nilai	Satuan	Tahun 2026	Tahun 2027	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	(Jumlah Pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual/Jumlah Pelaku ekonomi kreatif) X 100	4,88	%	7,32	8,94	13,01	Dinas Pariwisata
		Persentase Tenaga Kerja Di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktifitasnya	(Jumlah Pencari Kerja yang mengikuti Pelatihan dibagi jumlah Pencari Kerja yang terdaftar) X 100	43,66	%	43,90	47,62	52,17	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
		Indeks Pemberdayaan Gender	(Jumlah Partisipasi angkatan kerja Perempuan dibagi Jumlah Partisipasi angkatan kerja laki-laki) X 100	96,35	%	96,40	96,50	96,7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Ratio Kekerasan Dalam Rumah Tangga	(Jumlah kasus KDRT/Jumlah Rumah Tangga) X 100	1,9	%	2	2,1	2,4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK)	(Jumlah angkatan kerja perempuan / jumlah penduduk usia kerja perempuan) x100	72,56	%	73	73,6	75	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Yang Tersedia	Jumlah Dokumen data gender dan anak yang ada	2	%	3	3	3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Cakupan Lembaga Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Lembaga yang memiliki peran dalam memberikan layanan, perlindungan dan advokasi untuk anak	38	Lembaga	37,00	38,00	41	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Cakupan Perlindungan Khusus Anak	(Jumlah yang mendapatkan perlindungan khusus/Jumlah anak mengalami kerasan) x 100	50	%	18	25	40	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan tahun N / dengan jumlah Total Kegiatan yang dilaksanakan tahun N) X 100	100	%	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase PSKS (PKH,TKSK,TAGANA,PEKSOS dan KARANG TARUNA) yang melaksanakan Pelayanan Sosial diluar partai	(Jumlah PSKS yang melakukan Pelayanan Sosial dibagi jumlah PSKS seluruhnya) x 100	100	%	100	100	100	Dinas Sosial
		Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan dalam dan Luar Negeri yang tertangani	(Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dalam dan Luar Negeri yang tertangani dibagi Jumlah Negara Migran dalam dan Luar Negeri) X 100	20,36	%	26,35	32,40	50,3	Dinas Sosial

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2024)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Perangkat daerah Penanggungjawab
				Nilai	Satuan	Tahun 2026	Tahun 2027	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Percentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar gelandang Pengemis dan PMKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	(Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar gelandang Pengemis dan PMKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dibagi Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar gelandang Pengemis dan PMKS Lainnya seluruhnya) x 100	8,06	%	17,21	26,34	53,72	Dinas Sosial
		Percentase penerima manfaat terpenuhi Kebutuhan dasar	(Jumlah Keluarga Penerima manfaat Miskin yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya dibagi Jumlah Masyarakat Miskin seluruhnya) x100	56,46	%	57,42	58,37	61,22	Dinas Sosial
		Percentase Korban Bencana Alam, Sosial dan /Atau Non Alam yang terpenuhi Kebutuhan Dasar pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana	(Jumlah korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial dibagi total korban bencana) X 100	100	%	100	100	100	Dinas Sosial
		Percentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	(Jumlah TMP Nasional yang terkelola dengan baik dibagi Jumlah TMP seluruhnya) x 100	100	%	100	100	100	Dinas Sosial
		Percentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan tahun N / dengan jumlah Total Kegiatan yang dilaksanakan tahun N) X 100	100	%	100	100	100	Dinas Sosial
2.5: Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat									
	1	Indeks Trantibum		72,78	Angka	73,03	73,19	73,66	Satpol PP
	2	Angka Kriminalitas		120,13	Angka	119,5	119	117,5	Satpol PP
Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah									
		Peningkatan Kasus Trantibum yang Terselesaikan		100	%	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
		Percentase Cakupan Penyebaran informasi dan Edukasi rawan bencana	(Jumlah Warga Masyarakat yang mendapat informasi bencana/Jumlah masyarakat yang berada di daerah rawan bencana) X 100	0,72	%	1,57	2,41	0,87	Badan Penanggulangan Bencana Alam dan Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2024)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Perangkat daerah Penanggungjawab
				Nilai	Satuan	Tahun 2026	Tahun 2027	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Penanganan Tanggap darurat bencana	(Jumlah warga masyarakat yang mendapat layanan penyelamatan dan evakuasi/jumlah masyarakat yang terdampak bencana) X100	100	%	100,00	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Alam dan Daerah
		Persentase Penanganan pasca Bencana	(Jumlah Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi/jumlah fasilitas terdampak bencana) X 100	100	%	100,00	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Alam dan Daerah
		Persentase Penanganan Aduan Kebakaran dan Penyelamatan Korban kebakaran		100	%	100	100	100	Satuan Polisi Pemong Prije
3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat									
	3.1. Meningkatnya Efektivitas Perencanaan dan Pengelolaan Kebijakan Pembangunan Daerah								
	1	Persentase Ketercapaian Target Kinerja RPJMD		91,92	%	92,6	93,6	96,29	Bappeda
	Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah								
		Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD		100	%	100	100	100	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
		Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		100	%	100	100	100	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		100	%	100	100	100	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		100	%	100	100	100	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA		100	%	100	100	100	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 Tahun	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2024)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Perangkat daerah Penanggungjawab
				Nilai	Satuan	Tahun 2026	Tahun 2027	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan		100	%	100	100	100	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah		100	%	100	100	100	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah		100	%	100	100	100	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
		Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah		100	%	100	100	100	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
		Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan		100	%	100	100	100	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah		100	%	100	100	100	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah		100	%	100	100	100	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
		Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah		100	%	100	100	100	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
		3.2. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah							
	1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		B		B	B	BB	Setda
	2	Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		2,4688		2,8	2,85	3	Setda

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2024)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Perangkat daerah Penanggungjawab
				Nilai	Satuan	Tahun 2026	Tahun 2027	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		WTP (2023)		WTP	WTP	WTP	BPKAD
	4	Nilai SPIP		61,24		30	35	0	Inspektorat Daerah
	5	Indeks Pengawasan Kearsipan		Tidak diberikan opini		79	81	50	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	6	Indeks Kepuasan Layanan kepada Lembaga DPRD		N/A		8	8	85	Setwan
	7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		B		3	3,5	A	Setda, Kecamatan
		Indeks SPBE / Indeks Pemerintahan Digital		2,58		65	70	4	Diskominfo
	8	Indeks keterbukaan informasi publik				100	100	80	Diskominfo
	9	Tingkat Keamanan Informasi				6	6,15	100	Diskominfo
	10	Capaian Fiskal Daerah		5,4				7,15	Bappenda
	Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah								
		Persentase dokumen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang berkualitas baik	(Jumlah dokumen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang berkualitas baik dibagi Jumlah dokumen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang tersusun) X 100	94,34	%	100	100	100	Sekretariat Daerah
		Persentase Perangkat Daerah/Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan mutu pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat minimal Baik (B)	(Jumlah Perangkat Daerah/Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan mutu pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat minimal Baik (B) dibagi Jumlah Perangkat Daerah/Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang melaksanakan SKM) X 100	80,00	%	100	100	100	Sekretariat Daerah
		Persentase Pemenuhan Isian Indeks Capaian LPPD Kabupaten	(Jumlah isian Indeks LPPD Kabupaten yang terpenuhi dibagi Jumlah seluruh Isian Indeks LPPD Kabupaten) X 100	98,39	%	100	100	100	Sekretariat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2024)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Perangkat daerah Penanggungjawab
				Nilai	Satuan	Tahun 2026	Tahun 2027	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase kelengkapan data dan informasi dalam dokumen LKPJ	(Jumlah data dan informasi yang lengkap sesuai format dibagi Jumlah data dan informasi yang dibutuhkan) X 100	79,25	%	100	100	100	Sekretariat Daerah
		Persentase capaian layanan dasar SPM minimal Kategori Tuntas Madya	(Jumlah layanan dasar SPM kategori minimal tuntas madya dibagi Jumlah keseluruhan layanan dasar SPM) X 100	66,67	%	83,33	83,33	100	Sekretariat Daerah
		Persentase laporan keuangan tepat waktu		100	%	100	100	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	(Nilai aset tetap Tahun n-Nilai Aset Tetap Tahun N-1)/Tahun-N1	2,78	%	2,78	2,78	13,91	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 Tahun		100	%	100	100	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan	(Jumlah Rekomendasi BPK Yang Ditindaklanjuti / Rekomendaasi) X 100	75,52	%	76,00	77,00	80	Inspektorat Daerah
		Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Nilai Evaluasi SPIP	2,4	Nilai	2,5	2,60	30	Inspektorat Daerah
		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Kapabilitas APIP	60,53	%	62	64	70	Inspektorat Daerah
		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 Tahun	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi Jumlah Total Kegiatan) X 100						Inspektorat Daerah
		Tingkat Ketersediaan Arsip	$T = (a + i + s + j)/4$	28	%	28	28	28,8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Persentase SDM Bidang Kearsipan yang ditingkatkan kompetensinya	(Jumlah SDM Kearsipan yang telah mengikuti Bimtek dibagi Jumlah SDM Kearsipan di PD, Desa dan Kelurahan) x 100	28,10	%	31,12	34	43,2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Persentase Arsip yang dimusnahkan	(Jumlah Arsip yang dimusnahkan dibagi Jumlah Arsip yg slsp dimusnahkan) x100	0	%	0	13,33	21,33	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Persentase Layanan Penggunaan Arsip	(Jumlah Instansi Pengguna Layanan Arsip dibagi Jumlah Instansi yang ada di kab. Ende) X 100	0,02	%	0,04	0,06	0,12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2024)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Perangkat daerah Penanggungjawab
				Nilai	Satuan	Tahun 2026	Tahun 2027	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas dan disetujui Bersama antara Bupati dan DPRD	(Jumlah Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas dan disetujui Bersama pada Tahun n dibagi dengan Jumlah Dokumen Kebijakan Anggaran yang diajukan dan dibahas oleh Pemerintah pada Tahun n) X 100	100	%	100	100	100	Sekretariat DPRD
		Persentase Raperda yang Dibahas dan Disetujui Bersama	(Jumlah Raperda yang dibahas dan Disetujui Bersama antara Bupati dan DPRD pada Tahun n dibagi dengan Jumlah Raperda yang diajukan dan dibahas pada Tahun n dikalikan) 100X	100	%	100	100	100	Sekretariat DPRD
		Persentase Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan oleh DPRD	(Jumlah Urusan Pemerintahan Daerah yang di awasi pada Tahun n dibagi jumlah Urusan Pemerintahan Daerah yang seharusnya dilawasi) X 100	100	%	100	100	100	Sekretariat DPRD
		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 Tahun	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100,00	100	100	Sekretariat DPRD
		Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	(Jumlah penduduk yang mendapat pelayanan identitas kependudukan digital dibagi jumlah layanan) X 100	6	%	7	9	20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	(Jumlah Penduduk dibawah 17 Tahun yang berbasis NIK dibagi jumlah pelayanan) X 100	50	%	60	70	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Kepemilikan KTP	(Jumlah penduduk berumur 17 tahun ketas yang memiliki KTP dibagi Jumlah penduduk 17 tahun ketatas) X 100	98	%	98,50	99	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase penduduk berusia 0-18 tahun berakta kelahiran	(Jumlah anak 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir dibagi jumlah anak usia 0-18 tahun) X 100	98	%	100,00	100,00	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	(Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data/informasi kependudukan berdasarkan PKS dibagi jumlah OPD) X 100	9,43	%	18,50	28,30	62,3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2024)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Perangkat daerah Penanggungjawab
				Nilai	Satuan	Tahun 2026	Tahun 2027	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Cakupan Ketersediaan Profil Kependudukan	Jumlah pengeloaan Agregat dan profil yang diterbitkan	2	Dokumen	2	2	2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan tahun N / dengan Jumlah Total Kegiatan yang dilaksanakan tahun N) X 100	96,36	%	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Administrasi Perkantoran PD secara efektif dan efisien selama 1 tahun	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100,00	100	Kecamatan Ende
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100,00	100	Kecamatan Ende
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100,00	100	Kecamatan Ende
		Menurunnya Konflik Sosial yang terjadi di Masyarakat	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100,00	100	Kecamatan Ende
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan dikali) X 100	100	%	100	100,00	100	Kecamatan Ende
		Persentase Desa yang menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran serta menyampaikan laporan tepat waktu	(Jumlah Desa yang menetapkan Dokrenggar dan laporan Tepat Waktu bagi Jumlah Desa yang ada) X100	100	%	100	100,00	100	Kecamatan Ende
		Persentase Administrasi Perkantoran PD secara efektif dan efisien selama 1 tahun	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Ende Tengah
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Ende Tengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2024)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Perangkat daerah Penanggungjawab
				Nilai	Satuan	Tahun 2026	Tahun 2027	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Ende Tengah
		Menurunnya Konflik Sosial yang terjadi di Masyarakat	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Ende Tengah
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan dikali) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Ende Tengah
		Persentase Administrasi Perkantoran PD secara efektif dan efisien selama 1 tahun	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Ende Selatan
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Ende Selatan
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Ende Selatan
		Menurunnya Konflik Sosial yang terjadi di Masyarakat	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Ende Selatan
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan dikali) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Ende Selatan
		Persentase Administrasi Perkantoran PD secara efektif dan efisien selama 1 tahun	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Ende Timur
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Ende Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2024)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Perangkat daerah Penanggungjawab
				Nilai	Satuan	Tahun 2026	Tahun 2027	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Ende Timur
		Menurunnya Konflik Sosial yang terjadi di Masyarakat	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Ende Timur
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan dikali) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Ende Timur
		Persentase Desa yang menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran serta menyampaikan laporan tepat waktu	(Jumlah Desa yang menetapkan Dokrenggar dan laporan Tepat Waktu bagi Jumlah Desa yang ada) X100	101	%	100	100	100	Kecamatan Ende Timur
		Persentase Administrasi Perkantoran PD secara efektif dan efisien selama 1 tahun	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Ende Utara
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Ende Utara
		Menurunnya Konflik Sosial yang terjadi di Masyarakat	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Ende Utara
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan dikali) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Ende Utara
		Persentase Desa yang menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran serta menyampaikan laporan tepat waktu	(Jumlah Desa yang menetapkan Dokrenggar dan laporan Tepat Waktu bagi Jumlah Desa yang ada) X100	101	%	100	100	100	Kecamatan Ende Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2024)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Perangkat daerah Penanggungjawab
				Nilai	Satuan	Tahun 2026	Tahun 2027	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Administrasi Perkantoran PD secara efektif dan efisien selama 1 tahun	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Pulau Ende
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Pulau Ende
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Pulau Ende
		Menurunnya Konflik Sosial yang terjadi di Masyarakat	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Pulau Ende
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan dikali) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Pulau Ende
		Persentase Desa yang menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran serta menyampaikan laporan tepat waktu	(Jumlah Desa yang menetapkan Dokrenggar dan laporan Tepat Waktu bagi Jumlah Desa yang ada) X100	101	%	100	100	100	Kecamatan Pulau Ende
		Persentase Administrasi Perkantoran PD secara efektif dan efisien selama 1 tahun	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Nangapanda
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Nangapanda
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Nangapanda
		Menurunnya Konflik Sosial yang terjadi di Masyarakat	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Nangapanda

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2024)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Perangkat daerah Penanggungjawab
				Nilai	Satuan	Tahun 2026	Tahun 2027	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan dikali) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Nangapanda
		Persentase Desa yang menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran serta menyampaikan laporan tepat waktu	(Jumlah Desa yang menetapkan Dokrenggar dan laporan Tepat Waktu bagi Jumlah Desa yang ada) X100	101	%	100	100	100	Kecamatan Nangapanda
		Persentase Administrasi Perkantoran PD secara efektif dan efisien selama 1 tahun	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Ndona
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Ndona
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Ndona
		Menurunnya Konflik Sosial yang terjadi di Masyarakat	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Ndona
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Ndona
		Persentase Desa yang menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran serta menyampaikan laporan tepat waktu	(Jumlah Desa yang menetapkan Dokrenggar dan laporan Tepat Waktu bagi Jumlah Desa yang ada) X100	101	%	100	100	100	Kecamatan Ndona
		Persentase Administrasi Perkantoran PD secara efektif dan efisien selama 1 tahun	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Detusoko
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 101	100	%	100	100	100	Kecamatan Detusoko

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2024)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Perangkat daerah Penanggungjawab
				Nilai	Satuan	Tahun 2026	Tahun 2027	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Detusoko
		Menurunnya Konflik Sosial yang terjadi di Masyarakat	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 103	100	%	100	100	100	Kecamatan Detusoko
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 104	100	%	100	100	100	Kecamatan Detusoko
		Persentase Desa yang menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran serta menyampaikan laporan tepat waktu	(Jumlah Desa yang menetapkan Dokrenggar dan laporan Tepat Waktu bagi Jumlah Desa yang ada) X100	100	%	100	100	100	Kecamatan Detusoko
		Persentase Administrasi Perkantoran PD secara efektif dan efisien selama 1 tahun	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Kelimutu
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Kelimutu
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Kelimutu
		Menurunnya Konflik Sosial yang terjadi di Masyarakat	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Kelimutu
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Kelimutu
		Persentase Desa yang menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran serta menyampaikan laporan tepat waktu	(Jumlah Desa yang menetapkan Dokrenggar dan laporan Tepat Waktu bagi Jumlah Desa yang ada) X100	101	%	100	100	100	Kecamatan Kelimutu

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2024)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Perangkat daerah Penanggungjawab
				Nilai	Satuan	Tahun 2026	Tahun 2027	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Administrasi Perkantoran PD secara efektif dan efisien selama 1 tahun	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Detukeli
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Detukeli
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Detukeli
		Menurunnya Konflik Sosial yang terjadi di Masyarakat	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Detukeli
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan dikali) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Detukeli
		Persentase Desa yang menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran serta menyampaikan laporan tepat waktu	(Jumlah Desa yang menetapkan Dokrenggar dan laporan Tepat Waktu bagi Jumlah Desa yang ada) X100	101	%	100	100	100	Kecamatan Detukeli
		Persentase Administrasi Perkantoran PD secara efektif dan efisien selama 1 tahun	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Wolowaru
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Wolowaru
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Wolowaru
		Menurunnya Konflik Sosial yang terjadi di Masyarakat	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Wolowaru

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2024)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Perangkat daerah Penanggungjawab
				Nilai	Satuan	Tahun 2026	Tahun 2027	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan dikali) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Wolowaru
		Persentase Desa yang menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran serta menyampaikan laporan tepat waktu	(Jumlah Desa yang menetapkan Dokrenggar dan laporan Tepat Waktu bagi Jumlah Desa yang ada) X100	101	%	100	100	100	Kecamatan Wolowaru
		Persentase Administrasi Perkantoran PD secara efektif dan efisien selama 1 tahun	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Lepembusu Kelisoke
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Lepembusu Kelisoke
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Lepembusu Kelisoke
		Menurunnya Konflik Sosial yang terjadi di Masyarakat	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Lepembusu Kelisoke
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan dikali) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Lepembusu Kelisoke
		Persentase Desa yang menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran serta menyampaikan laporan tepat waktu	(Jumlah Desa yang menetapkan Dokrenggar dan laporan Tepat Waktu bagi Jumlah Desa yang ada) X100	101	%	100	100	100	Kecamatan Lepembusu Kelisoke
		Persentase Administrasi Perkantoran PD secara efektif dan efisien selama 1 tahun	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Maurole
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Maurole

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2024)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Perangkat daerah Penanggungjawab
				Nilai	Satuan	Tahun 2026	Tahun 2027	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Maurole
		Menurunnya Konflik Sosial yang terjadi di Masyarakat	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Maurole
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan dikali) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Maurole
		Persentase Desa yang menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran serta menyampaikan laporan tepat waktu	(Jumlah Desa yang menetapkan Dokrenggar dan laporan Tepat Waktu bagi Jumlah Desa yang ada) X100	101	%	100	100	100	Kecamatan Maurole
		Persentase Administrasi Perkantoran PD secara efektif dan efisien selama 1 tahun	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	93	%	100	100	100	Kecamatan Lio Timur
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 101	99	%	100	100	100	Kecamatan Lio Timur
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 102	95,5	%	100	100	100	Kecamatan Lio Timur
		Menurunnya Konflik Sosial yang terjadi di Masyarakat	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan jumlah Total Kegiatan) X 103	29	%	100	100	100	Kecamatan Lio Timur
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan jumlah Total Kegiatan) X 104	25	%	100	100	100	Kecamatan Lio Timur
		Persentase Desa yang menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran serta menyampaikan laporan tepat waktu	(Jumlah Desa yang menetapkan Dokrenggar dan laporan Tepat Waktu bagi Jumlah Desa yang ada) X100	67	%	100	100	100	Kecamatan Lio Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2024)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Perangkat daerah Penanggungjawab
				Nilai	Satuan	Tahun 2026	Tahun 2027	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Administrasi Perkantoran PD secara efektif dan efisien selama 1 tahun	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Kotabaru
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Kotabaru
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Kotabaru
		Menurunnya Konflik Sosial yang terjadi di Masyarakat	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Kotabaru
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan dikali) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Kotabaru
		Persentase Desa yang menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran serta menyampaikan laporan tepat waktu	(Jumlah Desa yang menetapkan Dokrienggar dan laporan Tepat Waktu bagi Jumlah Desa yang ada) X100	100	%	100	100	100	Kecamatan Kotabaru
		Persentase Administrasi Perkantoran PD secara efektif dan efisien selama 1 tahun	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Maukaro
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Maukaro
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Maukaro
		Menurunnya Konflik Sosial yang terjadi di Masyarakat	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Maukaro

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2024)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Perangkat daerah Penanggungjawab
				Nilai	Satuan	Tahun 2026	Tahun 2027	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan dikali) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Maukaro
		Persentase Desa yang menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran serta menyampaikan laporan tepat waktu	(Jumlah Desa yang menetapkan Dokrenggar dan laporan Tepat Waktu bagi Jumlah Desa yang ada) X100	101	%	100	100	100	Kecamatan Maukaro
		Persentase Administrasi Perkantoran PD secara efektif dan efisien selama 1 tahun	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Wolojita
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Wolojita
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Wolojita
		Menurunnya Konflik Sosial yang terjadi di Masyarakat	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Wolojita
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Wolojita
		Persentase Desa yang menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran serta menyampaikan laporan tepat waktu	(Jumlah Desa yang menetapkan Dokrenggar dan laporan Tepat Waktu bagi Jumlah Desa yang ada) X100	101	%	100	100	100	Kecamatan Wolojita
		Persentase Administrasi Perkantoran PD secara efektif dan efisien selama 1 tahun	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Wewaria
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Wewaria

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2024)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Perangkat daerah Penanggungjawab
				Nilai	Satuan	Tahun 2026	Tahun 2027	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Wewaria
		Menurunnya Konflik Sosial yang terjadi di Masyarakat	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Wewaria
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan dikali) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Wewaria
		Persentase Desa yang menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran serta menyampaikan laporan tepat waktu	(Jumlah Desa yang menetapkan Dokrenggar dan laporan Tepat Waktu bagi Jumlah Desa yang ada) X100	101	%	100	100	100	Kecamatan Wewaria
		Persentase Administrasi Perkantoran PD secara efektif dan efisien selama 1 tahun	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Ndona Timur
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Ndona Timur
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Ndona Timur
		Menurunnya Konflik Sosial yang terjadi di Masyarakat	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Ndona Timur
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	(Jumlah Capaian indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Kecamatan Ndona Timur
		Persentase Desa yang menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran serta menyampaikan laporan tepat waktu	(Jumlah Desa yang menetapkan Dokrenggar dan laporan Tepat Waktu bagi Jumlah Desa yang ada) X100	100	%	100	100	100	Kecamatan Ndona Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2024)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Perangkat daerah Penanggungjawab
				Nilai	Satuan	Tahun 2026	Tahun 2027	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Administrasi Perkantoran PD secara efektif dan efisien selama 1 tahun	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100,00	100	Kecamatan Ndori
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100,00	100	Kecamatan Ndori
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100,00	100	Kecamatan Ndori
		Menurunnya Konflik Sosial yang terjadi di Masyarakat	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100,00	100	Kecamatan Ndori
		Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan dikali) X 100	100	%	100	100,00	100	Kecamatan Ndori
		Persentase Desa yang menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran serta menyampaikan laporan tepat waktu	(Jumlah Desa yang menetapkan Dokrenggar dan laporan Tepat Waktu bagi Jumlah Desa yang ada) X100	100	%	100	100,00	100	Kecamatan Ndori
		Indeks Capaian Kinerja F - Government (Domain Kebijakan + Domain Tata Kelola SPBE + Domain Manajemen SPBE + Domain Layanan SPBE)		23,25	%	47,25	47,50	48,5	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase Perangkat daerah yang memiliki akses internet dan terhubung jaringan intra Pemerintah Daerah		35,85	%	41,51	56,60	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase disseminasi informasi publik		100	%	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan tahun N / dengan Jumlah Total Kegiatan yang dilaksanakan tahun N) X100	100	%	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase Penyediaan Data Statistik Sektoral		100	%	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase pengamanan data dan informasi daerah		100	%	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2024)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Perangkat daerah Penanggungjawab
				Nilai	Satuan	Tahun 2026	Tahun 2027	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Pendapatan dari Retribusi dan Pajak Daerah terhadap PAD	(Presentase Realisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dibagi Realisasi Pendapatan Asli Daerah) X 100	56,22	%	57,00	58,00	61	Badan Pendapatan Daerah
		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 Tahun	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Badan Pendapatan Daerah
3.3. Meningkatnya Kualitas dan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)									
	1	Indeks Profesionalitas ASN		72,25	Angka	76,75	77,6	83,32	BKPSDM
		Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah							
		Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	(Jumlah Kebutuhan yang sesuai dengan formasi dibagi Total Kebutuhan) X 100	88,64	%	44,44	44,45	50	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	(Jumlah ASN yang mengisi jabatan sesuai kompetensi dibagi Jumlah ASN) X 100	81,74	%	86,46	89,86	95,3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	(Jumlah Pegawai dengan SKP bernilai baik dibagi Jumlah ASN) X 100	63,69	%	73,54	76,39	78,41	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 Tahun	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	(Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional dibagi Jumlah ASN) X 100	13	%	22,56	27,34	41,46	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	(Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan dibagi Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang dibutuhkan) X 100	13,4	%	17,40	19,40	25,4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	(Jumlah ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi dibagi Jumlah ASN) X 100	1,84	%	5,08	6,69	11,55	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	(Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis/ jumlah ASN) X 100	8,47	%	11,66	13,25	18,03	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2024)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Perangkat daerah Penanggungjawab
				Nilai	Satuan	Tahun 2026	Tahun 2027	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Wilayah									
4.1. Meningkatnya Akses dan Kualitas Infrastruktur Dasar									
		Indeks Pembangunan Infrastruktur							
		Rasio Konektivitas		62,85	%	64,28	65,71	69,78	
Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah									
		Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	(Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik (primer dan sekunder) dibagi Total panjang jaringan irigasi (primer dan sekunder)) X 100	50,39	%	50,57	50,66		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase luas lahan wilayah sungai rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur penahan banjir	(Luas lahan wilayah sungai rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur penahan banjir dibagi Total luas lahan wilayah sungai rawan banjir di wilayah Kab. Ende) X 100	9,18	%	10,86	11,70		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase panjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai	(Panjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai dibagi Total panjang pantai rawan abrasi di wilayah Kab. Ende) X 100	24,19	%	25,59	26,30		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Rumah Tangga dengan akses air minum layak	(Jumlah Rumah Tangga terakses Air Minum Layak dibagi Jumlah Rumah Tangga) X 100	59,82	%	65,74	67,63	75,94	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Drainase Kota yang diperbaiki/dipelihara	(Panjang drainase kota yang diperbaiki dibagi Total panjang Drainase Kota yang tidak berfungsi dengan baik) X 100	35,78	%	40,43	45,12		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Cakupan layanan penilaian kelayakan fungsi bangunan gedung negara daerah	(Jumlah penilaian kelayakan fungsi bangunan gedung Negara Daerah dibagi Jumlah permintaan penilaian kelayakan fungsi bangunan gedung Negara Daerah dalam 1 tahun) X 100	63,64	%	64,49	64,75	65,13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2024)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Perangkat daerah Penanggungjawab
				Nilai	Satuan	Tahun 2026	Tahun 2027	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase jalan yang diperbaiki/dipelihara	(Panjang jalan yang diperbaiki dibagi Total panjang jalan dalam kondisi rusak) X 100	3,92	%	4,39	4,59	5,32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Prosentase kepatuhan KKPR dan PMP UMK	(Jumlah kepatuhan dan kesesuaian dibagi Jumlah Total KKPR dan PMP UMK yang dilakukan penilaian) X 100	98,78	%	98,89	98,95	99,09	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan tahun N / dengan Jumlah Total Kegiatan yang dilaksanakan tahun N) X 100	100	%	100,00	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Rumah Tinggal Bersanitas	(Jumlah Rumah Tinggal Bersanitasi dibagi Jumlah Rumah Seluruhnya) X 100	73,95	%	74,91	75,39	76,84	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan
		Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	(Jumlah KK Korban Bencana Alam yang Memperoleh RLH dibagi Jumlah Total KK Korban Bencana tahun n-1) X 100	4,25	%	3,51	3,64	4,08	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan
		Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	(Jumlah KK Relokasi yang Memperoleh RLH dibagi Jumlah Total KK di lokasi rawan bencana) X 100	0	%	0,22	0,22	1,12	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan
		Persentase Luasan Permukiman Kumuh Tertangani	(Luas permukiman kumuh tertangani dibagi total wilayah kumuh) X 100	11,92	%	12,57	13,05	14,79	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan
		Persentase Meningkatnya Rumah Layak Huni	(RLH Tahun n dibagi Total Jumlah Rumah Tahun n) X 100	71,91	%	72,33	72,70	73,78	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan
		Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi dengan PSU	Persentase PSU Baik (%) = [(Lokasi PSU yang Dalam Kondisi Baik dibagi Total Rencana Lokasi PSU Seluruhnya) X 100]	65,22	%	73,91	78,26	91,30	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2024)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Perangkat daerah Penanggungjawab
				Nilai	Satuan	Tahun 2026	Tahun 2027	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan tahun N / dengan Jumlah Total Kegiatan yang dilaksanakan tahun N) X 100	100	%	100,00	100	100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan
		Persentase Tanah Kosong yang Dikelola							Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan
4.2. Meningkatnya Kualitas Tata Ruang dan Penataan Wilayah									
	1.	Rasio Kesesuaian Ruang							
	2	Rasio Ruang Terbuka Hijau		1,4	%	1,4	1,4	1,4	DLH
Indikator Penyeleenggaraan Urusan Pemerintaan Daerah									
		Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	(I Rekomendasi yang Ditindaklanjuti dibagi Total Rekomendasi) X 100	50	%	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	(0,376 x IKA)+(0,405 x IKU)+(0,219 x IKL)	73,37	Indeks	83,16	83,33	83,75	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Ruang Terbuka Hijau	(Luas RTH/Luas Wilayah) X 100	0,059	%	0	0,06	0,06	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Limbah B3 yang Terkelola	(Jumlah Unit Usaha yang Berpotensi Menghasilkan B3 dan Limbah B3 yang Memenuhi Persyaratan Penyimpanan Sementara dibagi jumlah seluruh unit usaha yang berpotensi menghasilkan B3 dan Limbah B3) X 100	33,33	%	35	37	41,5	Dinas Lingkungan Hidup
		Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan PUULH	(Jumlah Usaha/Kegiatan yang Taat : Jumlah Usaha/Kegiatan yang Dievaluasi) X 100	100	%	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2024)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Perangkat daerah Penanggungjawab
				Nilai	Satuan	Tahun 2026	Tahun 2027	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Percentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat di Kabupaten	(Jumlah Penyelenggaran Pendidikan, Pelatihan dan Penyuhan LH untuk Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten dibagi Jumlah Kelompok Masyarakat Sasaran) X 100	100	%	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
		Presentase Lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/Bilantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diberikan penghargaan	(XKegiatan atau Aksi Lingkungan yang Melibatkan Masyarakat dibagi 2 Kegiatan PPLH yang Dilaksanakan) x 100	100	%	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
		Percentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindakan Pidana Lingkungan Hidup	(Jumlah Kasus yang Diselesaikan dibagi Jumlah Total Kasus yang Ditangani) X 100	100	%	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
		Percentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan tahun N / dengan Jumlah Total Kegiatan yang dilaksanakan tahun N) X 100	100	%	100,00	100,00	100	Dinas Lingkungan Hidup
5. Meningkatnya Pembangunan Yang Inklusif dan Berkelanjutan									
	5.1. Meningkatnya Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan/Ekologi Masyarakat								
	1	Indeks Desa Membangun							
		Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah							
		Percentase Fasilitasi Penataan Desa	(Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Desa / Jumlah Desa yang diusulkan untuk dilakukan Penataan Desa) X 100	100	%	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Percentase Fasilitasi Kerjasama Desa	(Jumlah Desa yang terfasilitasi kerja sama antar desa dibagi seluruh Desa yang melakukan kerja sama) X100	100	%	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2024)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Perangkat daerah Penanggungjawab
				Nilai	Satuan	Tahun 2026	Tahun 2027	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	(Jumlah Desa yang mengikuti kegiatan peningkatan Kapasitas / jumlah Desa) X 100	11,76	%	27,45	35,29	50,98	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	(Jumlah Desa yang terfasilitasi tata kelola desa dibagi Jumlah Desa) x 100	9,8	%	17,65	21,57	33,33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	(Jumlah Desa yang difasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desanya / Jumlah Desa) X 100	11,37	%	12,94	13,73	16,08	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	(Jumlah Desa yang difasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat / Jumlah Desa) X 100	2,35	%	3,53	4,71	7,06	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan tahun N / dengan Jumlah Total Kegiatan yang dilaksanakan tahun N) X 100	100	%	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5.2. Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Budaya Berbasis Kearifan Lokal									
	1	Indeks Pembangunan Kebudayaan							
		Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah							
		Persentase pelaksanaan kegiatan kebudayaan sesuai rencana tahunan	(Jumlah kegiatan kebudayaan yang terlaksana / jumlah kegiatan kebudayaan yang direncanakan) x 100	23,5	%	100	100		Dinas PK
		Persentase pelaksanaan kegiatan pengembangan kesenian tradisional sesuai rencana	(Jumlah kegiatan pengembangan kesenian tradisional terlaksana / jumlah kegiatan yang direncanakan) x 100	78,26	%	100	100		Dinas PK
		Persentase pelaksanaan kegiatan pembinaan sejarah sesuai dengan rencana	(Jumlah kegiatan pembinaan sejarah terlaksana / jumlah kegiatan yang Direncanakan) x 100	0	%	100	100		Dinas PK
		Persentase cagar budaya yang terinventarisasi dan terlindungi	(Jumlah cagar budaya yang terinventarisasi dan dilindungi / Total cagar budaya di daerah) x 100%	0	%	100	100		Dinas PK
5.3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup									

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2024)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Perangkat daerah Penanggungjawab
				Nilai	Satuan	Tahun 2026	Tahun 2027	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)							
5.4. Meningkatnya Mitigasi dan Penanggulangan Bencana									
	1	Indeks Resiko Bencana							
Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah									
		Peningkatan Kasus Trantibum yang Tersesuaikan		100	%	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase Cakupan Penyebaran informasi dan Edukasi rawan bencana	(Jumlah Warga Masyarakat yang mendapat informasi bencana/Jumlah masyarakat yang berada di daerah rawan bencana) X 100	0,72	%	1,57	2,41	0,87	Badan Penanggulangan Bencana Alam dan Daerah
		Persentase Penanganan Tanggap darurat bencana	(Jumlah warga masyarakat yang mendapat layanan penyelamatan dan evakuasi/ jumlah masyarakat yang terdampak bencana) X100	100	%	100,00	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Alam dan Daerah
		Persentase Penanganan pasca Bencana	(Jumlah Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi/Jumlah fasilitas terdampak bencana) X 100	100	%	100,00	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Alam dan Daerah
		Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan tahun N / dengan Jumlah Total Kegiatan yang dilaksanakan tahun N) X 100	100	%	100,00		100	Badan Penanggulangan Bencana Alam dan Daerah
		Persentase Penanganan Aduan Kebakaran dan Penyelamatan Korban kebakaran		100	%	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan tahun N / dengan Jumlah Total Kegiatan yang dilaksanakan tahun N) X 100	100	%	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2024)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Perangkat daerah Penanggungjawab
				Nilai	Satuan	Tahun 2026	Tahun 2027	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Pengelolaan Sampah	(Volume sampah yang dapat dikelola dibagi Volume timbulan sampah) X 100	86,3	%	88	90	92,5	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	((Jumlah Kunjungan Wisatawan tahun N - Jumlah Kunjungan wisatawan N-1) dibagi Jumlah Kunjungan wisatawan N-1) X 100	0,07	%	0,18	0,22	0,34	Dinas Pariwisata
6. Meningkatkan Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Berbasis Potensi Wilayah dan Tata Ruang									
		1. Skor Pola Pangan Harapan			Skor				
		2. Produksi Pertanian Pangan			Ton				
		3. Produksi Perikanan			Ton				
		4. Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan			Ha				
		5. Persentase Konversi Lahan Pertanian Terhadap Total Lahan Pertanian			%				
		Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintaan Daerah							
		6.2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pangan							
		1. Persentase Produk Pangan Segar Yang Memenuhi Standar dan Mutu Pangan							
		Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintaan Daerah							
		Peningkatan Produksi tanaman Pangan	((Jumlah Produksi Tahun n - jumlah Produksi Tahun n-1) / jumlah Produksi Tahun n-1) X 100	72.163,97	Ton	73.612,23	75.099,19		Dinas Pertanian
		Peningkatan Produksi Holtikultura	((Jumlah Produksi Tahun n - jumlah Produksi Tahun n-1) / jumlah Produksi Tahun n-1) X 100	7.559,18	Ton	0,74	0,74		Dinas Pertanian

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2024)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Perangkat daerah Penanggungjawab
				Nilai	Satuan	Tahun 2026	Tahun 2027	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Peningkatan Produksi Pertenakan	(Jumlah Produksi Tahun n - jumlah Produksi Tahun n-1) / jumlah Produksi Tahun n-1 X 100	1.451,40	Ton	0,21	0,21		Dinas Pertanian
		Peningkatan Produksi Perkebunan	(Jumlah Produksi Tahun n - jumlah Produksi Tahun n-1) / jumlah Produksi Tahun n-1 X 100	27.504,05	Ton	0,47	0,48		Dinas Pertanian
		Terbangunnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Terbangunnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Tahun n	30	unit	45,00	40		Dinas Pertanian
		Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Prosentase Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Tahun n	100	%	100,00	100,00		Dinas Pertanian
		Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian Tahun n	100	%	100	100	100	Dinas Pertanian
		Persentasi Penanganan dampak Perubahan iklim terhadap pertanian	Persentasi Penanganan dampak Perubahan iklim terhadap pertanian Tahun n	100	%	100	100		Dinas Pertanian
		Persentase SDM Pertanian yang Ditingkatkan	Jumlah kelompok mendapatkan pelatihan tahun n	31	Kelompok	31	31	355	Dinas Pertanian
		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 Tahun	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Dinas Pertanian
		Persentase jumlah Cadangan Pangan		0	%	50	50	50	Dinas Ketahanan Pangan
		Skor Pola Pangan Harapan	Capaian Skor	76,9	skor	77,10	77,30	78,1	Dinas Ketahanan Pangan
		Persentase daerah Rentan Rawan Pangan	Jumlah desa/Kel yang	0	%	12	11,00	10	Dinas Ketahanan Pangan
		Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Jumlah Pangan Segar yang Aman per jumlah Pangan Yang diuji Kali 100%	93,75	%	80	82,00	88	Dinas Ketahanan Pangan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2024)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Perangkat daerah Penanggungjawab
				Nilai	Satuan	Tahun 2026	Tahun 2027	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan tahun N / dengan Jumlah Total Kegiatan yang dilaksanakan tahun N) X 100	100	%	100	100	100	Dinas Ketahanan Pangan
		Jumlah Produksi perikanan Budidaya	Produksi Ikan Budidaya	13,93	ton	12,66	13,04		Dinas Perikanan
		Persentase Kepatuhan terhadap Peraturan di Bidang Perikanan	(Jumlah Kegiatan dan Usaha yang mematuhi regulasi peraturan di bidang perikanan pada tahun N per Jumlah Total Kegiatan dan usaha yang mematuhi regulasi dibidang perikanan) X 100	28	%	52,00	64,00		Dinas Perikanan
		Angka Konsumsi ikan	Jumlah konsumsi ikan pertahun N	43,4	kg/kapita/tahun	45,92	47,24		Dinas Perikanan
		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat daerah secara Efektif dan Efisien selama 1 tahun	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi Jumlah Total Kegiatan) x 100	100	%	100,00	100,00		Dinas Perikanan
		Indeks Pelayanan Transportasi Darat	(Jumlah cakupan Pelayanan Transportasi Darat / Jumlah Pelayanan transportasi darat) X 100	65,51	%	88,54	91,40	100	Dinas Perhubungan
		Persentase Kelengkapan jalan yang telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	(Jumlah Kelengkapan Jalan yang terpasang pada tahun N / Jumlah Kelengkapan Jalan yang direncanakan) X 100	48,99	%	59,54	69,64	100	Dinas Perhubungan
		Indeks Pelayanan Transportasi laut	(Jumlah cakupan Pelayanan Transportasi laut / Jumlah Pelayanan transportasi laut) X 100	98,12	%	98,59	99,06	100	Dinas Perhubungan
		Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan tahun N / dengan Jumlah Total Kegiatan yang dilaksanakan tahun N) X 100	100	%	100	100	100	Dinas Perhubungan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2024)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Perangkat daerah Penanggungjawab
				Nilai	Satuan	Tahun 2026	Tahun 2027	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	(Jumlah Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi Tahun N-Jumlah Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi Tahun Lalu) dibagi jumlah pertumbuhan volume usaha Tahun Lalu) X100	11,98	%	15	18		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	(Jumlah pengawasan dan pemeriksaan koperasi tahun N dibagi Jumlah Koperasi Aktif) X 100	50	%	63	67		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase Koperasi Aktif	Jumlah koperasi aktif dibagi Jumlah koperasi X 100	88,81	%	92,67	93,33		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Jumlah Koperasi yang telah diberikan pelatihan dibagi Jumlah Koperasi Yang Ada X 100	22,39	%	14,56	14,56		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase UMKM yang berkualitas dan berdaya saing	(Jumlah UKM yang berkualitas dan berdaya saing/ Jumlah UKM yang bertransformasi) X 100	31,25	%	0,04	0,03		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase Koperasi yang memiliki ijin usaha Simpan Pinjam	(Jumlah Koperasi yang memiliki ijin usaha simpan pinjam dibagi jumlah koperasi yang bisa difasilitasi ijin usaha simpan pinjam) X 100	12,12%	%	0,18	24,12		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Penyelenggaraan administrasi perkantoran Dinas Koperasi secara efektif dan efisien selama 1 tahun	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing kegiatan dibagi jumlah total sub kegiatan) x 100	100%	%	1,00	1,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase Kabupaten Kota yang Menyusun rencana Tenaga Kerja	(Jumlah kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada RKT dibagi Jumlah keseluruhan Kegiatan yang dilaksanakan di kabupaten/kota) x 100	86,38	%	75%	77,27	90,91	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Di Dalam Negeri dan Luar Negeri	(Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan dibagi Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar) X 100	7,69	%	8,79	9,89	13,19	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2024)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Perangkat daerah Penanggungjawab
				Nilai	Satuan	Tahun 2025	Tahun 2027	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	(Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial dibagi Jumlah Perusahaan yang Terdaftar) X 100	32,88	%	15,02	17,17	23,61	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 Tahun	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	%	100	100	100	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
		Persentase Program Transmigrasi yang dilaksanakan	(Jumlah Program Transmigrasi yang Dilaksanakan dibagi Jumlah Program Transmigrasi yang Direncanakan) X 100	100	%	100	100	100	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
		Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang berkembang	Luas Lahan di Kawasan transmigrasi yang berkembang pada total Luas Lahan di kawasan transmigrasi		%	54	54	54	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
		Persentase Transmigrasi yang dibina dan diberdayakan	(Jumlah Transmigran yang dibina dan diberdayakan dibagi Jumlah Transmigran) X 100	20	%	20	30	50	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja

BAB VII

PENUTUP

RKPD Kabupaten Ende Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun pertama dari RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025-2029, dengan tema “**Peningkatan Kualitas SDM dan Pemberdayaan Masyarakat, Penguanan Infrastruktur dan Ketahanan Pangan Serta Meningkatkan Supremasi Hukum dan Good Governance Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan**”. Tema ini dimaksudkan bahwa fokus pembangunan yang dilaksanakan ditekankan pada upaya-upaya untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat, Penguanan Infrastruktur dan Ketahanan Pangan, serta Meningkatkan Supremasi Hukum dan Good Governance untuk mendukung Pembanguna Berkelanjutan

Sejalan dengan ketentuan, penyusunan RKPD 2026 telah memastikan keselarasan dan sinergisitas perencanaan dan penganggaran. Perumusan prioritas program dan kegiatan, dilaksanakan secara lebih terukur dan didasarkan pada kemampuan riil keuangan daerah. Selain itu dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat, terus dilakukan perbaikan- perbaikan untuk menjamin kualitas pelaksanaan musrenbang, yang tidak lain merupakan proses bersama merumuskan alokasi Pagu Indikatif bagi desa dan kelurahan dalam prioritas pembangunan.

RKPD Kabupaten Ende Tahun 2026 juga disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2025 serta kebijakan pusat dan provinsiNTT, sehingga seluruh kebijakan, strategi dan program atau kegiatan pembangunan Kabupaten Ende tahun 2026 akan fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Ende tahun 2026. RKPD Tahun 2026 juga diselaraskan dengan RPJMN 2025-2029, dan mendukung pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta mewujudkan perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam bentuk rumusan program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator yang terukur beserta sumber pembiayaannya.

RKPD Kabupaten Ende Tahun 2026 diharapkan dapat dilaksanakan secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan melibatkan seluruh pihak (partisipatif). Oleh karena itu diperlukan suatu langkah strategis yang dituangkan dalam Kaidah Pelaksanaan sebagai berikut;

1. Sebagai pedoman penyusunan APBD, RKPD Kabupaten Ende Tahun 2026 ini selanjutnya dijabarkan dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Ende Tahun 2026.
2. Untuk mengoptimalkan hasil pembangunan, kepada seluruh perangkat daerah dan para pelaku pembangunan lainnya diwajibkan untuk mempedomani RKPD ini dalam merencanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Seluruh program dan kegiatan yang disusun diharapkan tidak keluar dari kerangka RKPD ini, kecuali sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam regulasi yang mengaturnya.
3. Dalam upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN dan PHLN serta sumber-sumber lainnya, setiap Perangkat Daerah harus membuat Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang dapat menggambarkan sinergitas program dan kegiatan sesuai dengan sumber anggaran.
4. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan melalui upaya koreksi, dan melaporkannya secara berkala setiap triwulan kepada Bupati Ende melalui Kepala Bappeda Kabupaten Ende.
5. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
6. Kepala Bappeda Kabupaten Ende menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari para Kepala Perangkat Daerah dan hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode perencanaan berikutnya.
7. RPKD Kabupaten Ende Tahun 2026 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026, yang diawali dengan langkah persiapan hingga pelaksanaannya.

Keberhasilan pelaksanaan RKPD Tahun 2026 tidak terlepas dari peran pemerintah Kabupaten Ende untuk terus mendorong peran serta aktif dari seluruh pihak, dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah. Selain itu optimalisasi reformasi birokrasi, melalui upaya-upaya kreatif dan inovatif oleh masing-masing perangkat daerah teknis terkait, harus terus didorong sehingga terjadi perubahan signifikan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

RKPD Kabupaten Ende Tahun 2026 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dan para pelaku pembangunan di Kabupaten Ende dalam menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Akhirnya dengan memohon rahmat dan penyertaan Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini disampaikan selamat menggunakan Dokumen RKPD Kabupaten Ende Tahun 2026 ini, dengan harapan agar pembangunan di Kabupaten Ende hari ini dan akan datang menjadi lebih baik.



Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Bappeda	
Kepala Bagian Hukum	

Paraf Hirerki	
Plt. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Bappeda	